



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

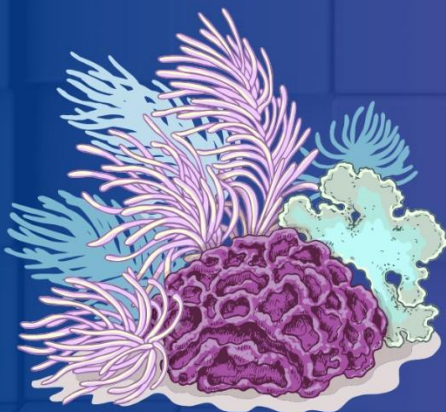
LAPORAN **KEUANGAN**

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TA 2024 AUDITED



kata pengantar X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
audited

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

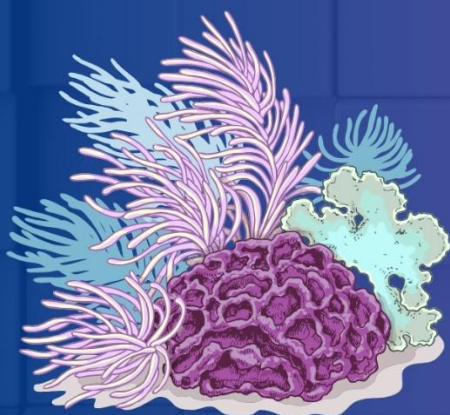
 Ditandatangani
Secara Elektronik
Sakti Wahyu Trenggono



daftar

isi

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
audited

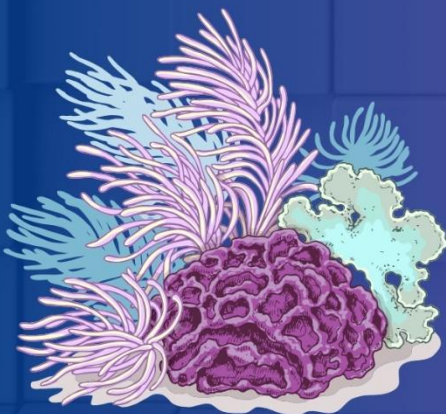
DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Daftar Tabel	vi-xxxii
Penjelasan Umum	vi-vii
LRA	viii-xiv
Neraca	xv-xxiv
LO	xxv-xxix
LPE	xxx-xxxi
Pengungkapan Penting Lainnya	xxxii- xxxiii
Daftar Gambar	xxxiv-xxxv
Penjelasan Umum	xxxiv
Laporan Operasional	xxxv
Daftar Lampiran	xxxvi
Ringkasan	xxxvii-xxxviii
I. Laporan Realisasi Anggaran	xxxix
II. Neraca	xl-xlii
III. Laporan Operasional	xliii
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	xliv
Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	A.1-79
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	B.1-91
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	C.1-205
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	D.1-44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	E.1-17
F. Pengungkapan Penting Lainnya	F.1-53
V. Lampiran-Lampiran	



pernyataan tanggung jawab

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024

audited

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan



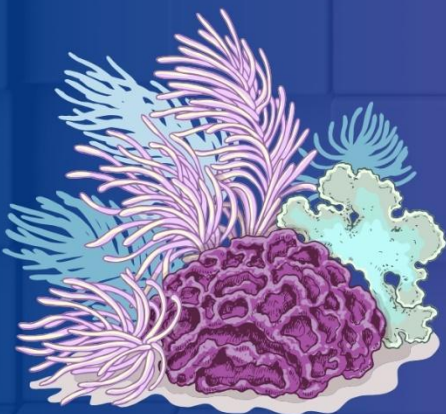
**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sakti Wahyu Trenggono



pernyataan telah direviu

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
audited



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

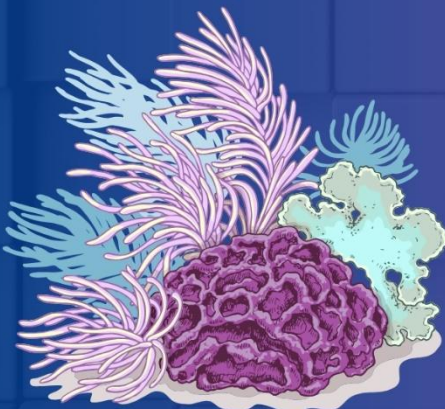
Jakarta, 19 Februari 2025
Inspektur Jenderal,


Tomanda Syafullah
NIP 19720202 199603 1 003



daftar tabel

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024

audited

DAFTAR TABEL PENJELASAN UMUM

Tabel	Judul	Hal.
A.1	Perhitungan Penyisihan Piutang	A.22
A.2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	A.25
A.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	A.32
A.4	Perbandingan Jumlah Satker yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024	A.39
A.5	Jumlah Rekening Pemerintah pada Satker di lingkungan KKP	A.40
A.6	Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan	A.40
A.7	Data Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024	A.41
A.8	Data Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2024	A.41
A.9	Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024	A.41
A.10	Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024	A.41
A.11	Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	A.41
A.12	Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	A.42
A.13	Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024	A.42

Tabel	Judul	Hal.
A.14	Data Pegawai Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	A.42
A.15	Data Pegawai Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	A.42
A.16	Daftar Aplikasi yang Digunakan dan Dikembangkan oleh KKP	A.46
A.17	Tahapan Penyelenggaraan PIPK sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	A.53

DAFTAR TABEL LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel	Judul	Hal.
B.1	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I TA 2024	B.1
B.2	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2024	B.1
B.3	Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2024	B.2
B.4	Perbandingan Pagu dan Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Per Unit Eselon I TA 2024	B.3
B.5	Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2024	B.3
B.6	Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Kegiatan TA 2024	B.4
B.7	Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.7
B.8	Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.7
B.9	Rincian Realisasi PNBP Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.8
B.10	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 September 2024 dan 2023	B.9

Tabel	Judul	Hal.
B.11	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.13
B.12	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.17
B.13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.18
B.14	Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.21
B.15	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.22
B.16	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.23
B.17	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.35
B.18	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.36
B.19	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan	

Tabel	Judul	Hal.
	Keagamaan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.40
B.20	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.41
B.21	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.42
B.22	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.44
B.23	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.45
B.24	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.48
B.25	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.48
B.26	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.50
B.27	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Pada Masing-Masing Unit Eselon I	

Tabel	Judul	Hal.
	Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.50
B.28	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.54
B.29	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.55
B.30	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.60
B.31	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-Masing Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.60
B.32	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.61
B.33	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.62
B.34	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.62
B.35	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.62
B.36	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.63

Tabel	Judul	Hal.
B.37	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.64
B.38	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.66
B.39	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.66
B.40	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.66
B.41	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.67
B.42	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.69
B.43	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.71
B.44	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.73
B.45	Rincian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I	B.74

Tabel	Judul	Hal.
B.46	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.74
B.47	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.76
B.48	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.79
B.49	Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.80
B.50	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024	B.80
B.51	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.82
B.52	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.83
B.53	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.85
B.54	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.87

Tabel	Judul	Hal.
B.55	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.89
B.56	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	B.90

DAFTAR TABEL NERACA

Tabel	Judul	Hal.
C.1	Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.1
C.2	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.2
C.3	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.2
C.4	Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.3
C.5	Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.4
C.6	Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.5
C.7	Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.6
C.8	Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Per 31 Desember 2023 (rekening koran)	C.7
C.9	Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek SKPT JICA Per 31 Desember 2024	C.8

Tabel	Judul	Hal.
C.10	Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Per 31 Desember 2024 (rekening koran)	C.9
C.11	Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek GEF-6 Per 31 Desember 2024	C.12
C.12	Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada KMOUC Per 31 Desember 2024	C.14
C.13	Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.15
C.14	Rincian Saldo Kas dan Bank BLU Per Satker Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.16
C.15	Rincian Saldo Rekening Operasional BLU Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.17
C.16	Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2024	C.19
C.17	Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.20
C.18	Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.21
C.19	Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.22

Tabel	Judul	Hal.
C.20	Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.24
C.21	Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pada Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman Per 31 Desember 2024	C.25
C.22	Perhitungan Penyisihan Piutang	C.27
C.23	Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.28
C.24	Rincian saldo Piutang PNBPN pada PPS Nizam Zachman Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.33
C.25	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.55
C.26	Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.57
C.27	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.59
C.28	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kualitas Per 31 Desember 2024	C.60
C.29	Rincian Saldo Persediaan Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.62

Tabel	Judul	Hal.
C.30	Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	C.63
C.31	Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.64
C.32	Daftar Barang Persediaan untuk Operasional Per 31 Desember 2024	C.65
C.33	Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.66
C.34	Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau Diserahkan kepada Masyarakat Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.73
C.35	Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.75
C.36	Rincian Harga Satuan Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat yang Belum Diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021	C.80
C.37	Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.81
C.38	Rincian Transfer Masuk dan/atau Transfer Keluar Aset Tetap ke K/L Lain Per 31 Desember 2024	C.81
C.39	Rincian Saldo Tanah Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.83
C.40	Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.84

Tabel	Judul	Hal.
C.41	Rincian Tanah Dikuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	C.87
C.42	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.91
C.43	Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.92
C.44	Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.92
C.45	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.100
C.46	Daftar Rinci Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.101
C.47	Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.102
C.48	Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.109
C.49	Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.110
C.50	Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.110
C.51	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.115

Tabel	Judul	Hal.
C.52	Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.116
C.53	Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.118
C.54	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.122
C.55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Status Keberlanjutannya Per 31 Desember 2024	C.124
C.56	Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.126
C.57	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.130
C.58	Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.130
C.59	Rincian Saldo Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.132
C.60	Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.134
C.61	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.134
C.62	Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.135

Tabel	Judul	Hal.
C.63	Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.136
C.64	Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing- Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2023	C.138
C.65	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.138
C.66	Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.139
C.67	Perhitungan Kontribusi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa	C.140
C.68	Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	C.141
C.69	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.141
C.70	Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.142
C.71	Ringkasan Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.144
C.72	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.145

Tabel	Judul	Hal.
C.73	Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun Per 31 Desember 2024	C.146
C.74	Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.147
C.75	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.150
C.76	Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.151
C.77	Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.153
C.78	Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan-K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.153
C.79	Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan – K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	C.154
C.80	Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan – K/L Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 9 Mei 2025	C.160
C.81	Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.162
C.82	Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan Barang Per 31 Desember 2024	C.166
C.83	Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024	C.166

Tabel	Judul	Hal.
C.84	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.169
C.85	Ringkasan Nilai Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024	C.170
C.86	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.172
C.87	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.173
C.88	Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.174
C.89	Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.179
C.90	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.191
C.91	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.192
C.92	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Terkait BAST RPATA Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024	C.193
C.93	Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.193

Tabel	Judul	Hal.
C.94	Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.194
C.95	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.195
C.96	Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.196
C.97	Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.200
C.98	Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.201
C.99	Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-Masing Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.203
C.100	Rincian Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.203
C.101	Rincian Saldo Utang Panjang Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor Pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	C.204

DAFTAR TABEL LAPORAN OPERASIONAL

Tabel	Judul	Hal.
D.1	Rincian Pendapatan-LO Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.2
D.2	Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.2
D.3	Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.4
D.4	Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.4
D.5	Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.5
D.6	Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.7
D.7	Perbedaan Saldo PNBP Lainnya Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.8
D.8	Rincian Perbedaan Saldo PNBP Lainnya per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.8
D.9	Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.9
D.10	Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.10

Tabel	Judul	Hal.
D.11	Perbedaan Saldo PNBPN Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.11
D.12	Rincian Perbedaan Saldo PNBPN Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.11
D.13	Rincian Beban Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.12
D.14	Rincian Saldo Beban Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.13
D.15	Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.14
D.16	Perbedaan Saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.16
D.17	Rincian Perbedaan Saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.16
D.18	Rincian Saldo Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.17
D.19	Rincian Saldo Beban Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.17
D.20	Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.18
D.21	Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.20
D.22	Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.22

Tabel	Judul	Hal.
D.23	Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.23
D.24	Rincian Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.23
D.25	Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.24
D.26	Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.25
D.27	Rincian Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.25
D.28	Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.26
D.29	Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.27
D.30	Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.27
D.31	Rincian Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.28
D.32	Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.28
D.33	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.29
D.34	Transaksi Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.30

Tabel	Judul	Hal.
D.35	Perbedaan Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.31
D.36	Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO	D.31
D.37	Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.33
D.38	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.34
D.39	Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.34
D.40	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.35
D.41	Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.37
D.42	Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.37
D.43	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.38
D.44	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.38
D.45	Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024	

Tabel	Judul	Hal.
	dan 31 Desember 2023	D.39
D.46	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.40
D.47	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.41
D.48	Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.42
D.49	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	D.42
D.50	Rincian BAST Persediaan untuk Tinta/ <i>Toner</i>	D.43
D.51	Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tinta/ <i>Toner</i>	D.44

DAFTAR TABEL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel	Judul	Hal.
E.1	Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-Masing Eselon I per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023	E.1
E.2	Perbandingan Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023	E.1
E.3	Perbandingan Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.2
E.4	Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.3
E.5	Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.4
E.6	Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.5
E.7	Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.7
E.8	Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain per Satuan Kerja pada Satkon dan Ditjen PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.7
E.9	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.8
E.10	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.9

Tabel	Judul	Hal.
E.11	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.9
E.12	Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.10
E.13	Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk Pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024	E.11
E.14	Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk dari Kementerian Lainnya pada Masing-Masing Eselon I per 31 Desember 2024	E.12
E.15	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Masing Unit Eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.14
E.16	Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.17
E.17	Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	E.17

**DAFTAR TABEL
PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

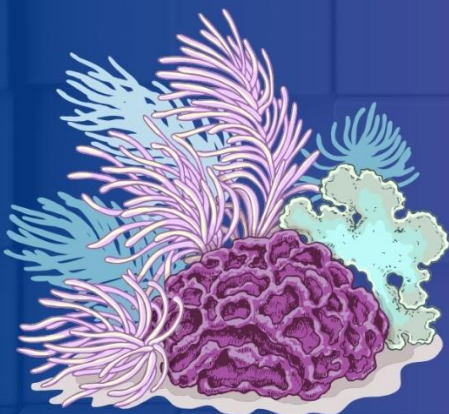
Tabel	Judul	Hal.
F.1	Ringkasan Pagu dan Realisasi Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024	F.5
F.2	Ikhtisar Laporan Keuangan BLU KKP Per 31 Desember 2024	F.11
F.3	Rincian Penyelesaian atas Rekomendasi Hasil Monev PPK BLU pada BLU LPMUKP Per 31 Desember 2024	F.14
F.4	Rincian Penyelesaian Rekomendasi atas Hasil Monev PPK BLU Per 31 Desember 2024	F.16
F.5	Data Optimalisasi Penagihan yang Dilakukan LPMUKP Tahun 2024	F.21
F.6	Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih 2024 Berdasarkan Kolektibilitas	F.24
F.7	Sisa BBM pada Kapal Pengawas Tahun 2024	F.27
F.8	KJA OS Sabang Tahun 2024	F.39
F.9	KJA OS Pangandaran Tahun 2024	F.39
F.10	KJA OS Karimunjawa Tahun 2024	F.40
F.11	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional II	F.44
F.12	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional III	F.45
F.13	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional IV	F.46
F.14	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VI	F.46

Tabel	Judul	Hal.
F.15	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional VII	F.49
F.16	Utang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	F.51
F.17	Pengungkapan Aset Tetap yang Diperoleh dari Modalitas Pembiayaan Syariah IsDB Tahun 2024	F.52
F.18	Rincian Aset Belanja Modal dari Pembiayaan Syariah IsDB Tahun 2024	F.52



daftar gambar

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
audited

DAFTAR GAMBAR PENJELASAN UMUM

Gambar	Judul	Hal.
A.1	Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan	A.7
A.2	Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	A.11

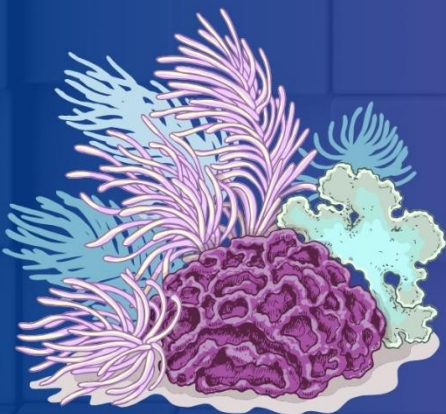
DAFTAR GAMBAR
LAPORAN OPERASIONAL

Gambar	Judul	Hal.
D.1	Tangkapan Layar MonSAKTI atas Transaksi Persediaan	D.44



daftar lampiran

X



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
audited

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
Lampiran 1	Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 2	Daftar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 3	Daftar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 4	Data Permasalahan Hukum di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 5	Daftar Piutang Negara di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 6	Daftar Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan KKP TA 2024
Lampiran 7	Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri TA 2024
Lampiran 8	Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri TA 2024
Lampiran 9	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Lampiran 10	Penyelesaian Kerugian Negara pada Satuan Kerja Lingkup KKP
Lampiran 11	Rincian Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah per Fase Per 31 Desember 2024 (rekening koran)
Lampiran 12	Rincian Penyetoran Pajak pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP Per 13 Januari 2025
Lampiran 13	Rekapitulasi Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi di Lingkungan KKP Tahun 2024
Lampiran 14	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional I
Lampiran 15	Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Tahun 2024



RINGKASAN

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara bersih sampai dengan 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.208.325.020.038,00 atau mencapai 49,30% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.479.533.695.000,00 Sedangkan Realisasi Belanja Negara Bersih sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.299.997.586.481,00 atau mencapai 86,92% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp7.248.311.610.000

2. NERACA

Neraca menyajikan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp25.325.030.197.249,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp696.230.937.761,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp23.377.116.399.469,00; Properti Investasi sebesar Rp817.060.407.609,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp100.864.137.988,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp333.758.314.422,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp104.869.850.410,00 dan Rp25.220.160.346.839,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.207.976.788.689,00 sedangkan jumlah

Beban Operasional adalah sebesar Rp6.629.592.600.166,00; sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.421.615.811.477,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar surplus Rp71.402.185.380,00; Dengan demikian, entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.350.213.626.097,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp25.529.221.392.262,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp4.350.213.626.097,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp25.028.983.106,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp4.066.181.563.780,00 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.220.160.346.839,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024, disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN	B.1						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	4.479.533.695.000	2.208.325.020.038	49,30	4.088.397.446.000	1.699.152.504.614	41,56
Jumlah Pendapatan		4.479.533.695.000	2.208.325.020.038	49,30	4.088.397.446.000	1.699.152.504.614	41,56
BELANJA	B.2						
1. Belanja Pegawai	B.2.1	1.899.944.432.000	1.891.758.893.702	99,57	1.801.000.979.000	1.777.377.905.274	98,69
2. Belanja Barang	B.2.2	4.469.224.914.000	3.885.910.376.345	86,95	3.970.968.474.000	3.879.529.145.356	97,70
3. Belanja Modal	B.2.3	879.142.264.000	522.328.316.434	59,41	683.310.692.000	678.688.874.687	99,32
Jumlah Belanja Netto		7.248.311.610.000	6.299.997.586.481	86,92	6.455.280.145.000	6.335.595.925.317	98,15

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan


**Ditandatangani
Secara Elektronik**
SAKTI WAHYU TRENGGONO



NERACA

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

II. NERACA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN		31 Des 2024	31 Des 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	215.583.279	206.500
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	81.395.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	247.271.846.142	481.649.921.126
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	210.657.196.390	30.779.421.970
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.1.5	23.450.000.000	110.950.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	C.1.6	853.731.100	1.856.560.265
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.7	21.667.904.525	23.106.014.631
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	58.098.228.477	47.500.916.438
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.9	(37.330.326.609)	(36.242.472.804)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		20.767.901.868	11.258.443.634
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	105.339.479	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(526.698)	0
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		104.812.781	0
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	40.334.387.105	28.745.692.709
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.13	(28.682.135.319)	(20.423.296.818)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		11.652.251.786	8.322.395.891
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	19.780.175	35.235.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	(98.901)	(35.235.000)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)		19.681.274	0
Persediaan	C.1.16	159.570.028.616	91.244.601.839
JUMLAH ASET LANCAR		696.230.937.761	759.248.960.856
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	15.853.798.190.884	16.011.305.715.663
Peralatan dan Mesin	C.2.2	6.284.712.692.903	6.522.510.838.685
Gedung dan Bangunan	C.2.3	5.261.675.168.922	5.302.979.449.379
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	4.053.129.578.585	3.924.815.114.324
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	211.154.575.775	226.854.882.066

URAIAN		31 Des 2024	31 Des 2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	183.735.627.793	91.116.357.351
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(8.471.089.435.393)	(8.176.775.149.955)
JUMLAH ASET TETAP		23.377.116.399.469	23.902.807.207.513
Properti Investasi	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	898.573.434.043	477.778.353.020
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.2	(81.513.026.434)	(67,013,812,119)
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		817.060.407.609	410,764,540,901
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.4		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.1	516.201.823	201.014.544
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4.2	(158.621.431)	(157.051.745)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (NETTO)		357.580.392	43.962.799
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.4.3	101.011.615.666	103.580.242.333
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.4.4	(505.058.070)	(517.901.203)
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA (NETTO)		100.506.557.596	103.062.341.130
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		100.864.137.988	103.106.303.929
ASET LAINNYA	C.5		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.5.1	103.876.004.000	214.231.398.172
Aset Tak Berwujud	C.5.2	256.859.024.246	234.921.980.781
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.5.3	235.822.950	2.745.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.5.4	78.880.988.327	32.493.421.582
Aset Lain-lain	C.5.5	390.301.200.894	443.267.346.082
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.5.6	(496.394.725.995)	(505.938.982.710)
JUMLAH ASET LAINNYA		333.758.314.422	418.977.908.907
JUMLAH ASET		25.325.030.197.249	25.594.904.922.106
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.6		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.6.1	94.174.913.102	47.165.904.471
Hibah Yang Belum Disahkan	C.6.2	0	8.820.342.608
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.6.3	44.885.401	144.463.282
Pendapatan Diterima Dimuka	C.6.4	10.255.464.006	9.518.380.902
Uang Muka dari KPPN	C.6.5	215.583.279	206.500
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.6.6	179.004.622	34.232.081
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		104.869.850.410	65.683.529.844
JUMLAH KEWAJIBAN		104.869.850.410	65.683.529.844
EKUITAS	C.7		
Ekuitas	C.7.1	25.220.160.346.839	25.529.221.392.262
JUMLAH EKUITAS		25.220.160.346.839	25.529.221.392.262
JUMLAH EKUITAS		25.220.160.346.839	25.529.221.392.262
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		25.325.030.197.249	25.594.904.922.106

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2024	31 Des 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.1	954.494.968.076	637.161.520.387
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2	1.060.883.227.384	1.043.563.997.110
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.1.3	192.598.593.229	
JUMLAH PENDAPATAN		2.207.976.788.689	1.680.725.517.497
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	1.912.227.733.739	1.800.393.474.514
Beban Persediaan	D.2.2	147.530.974.235	179.045.299.672
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.009.908.942.375	1.931.232.862.440
Beban Pemeliharaan	D.2.4	341.035.450.066	359.522.125.975
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	835.505.791.460	875.495.745.766
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	619.256.772.699	615.716.271.822
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	758.048.674.328	791.677.052.361
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	6.078.261.264	9.786.927.758
JUMLAH BEBAN		6.629.592.600.166	6.562.869.760.308
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(4.421.615.811.477)	(4.882.144.242.811)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	(114.278.615.674)	(116.634.758.937)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	185.680.801.054	112.664.256.329
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		71.402.185.380	(3.970.502.608)
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(4.350.213.626.097)	(4.886.114.745.419)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	CATATAN	31 Des 2024	31 Des 2023
EKUITAS AWAL	E.1	25.529.221.392.262	25.420.240.996.441
SURPLUS/(DEFISIT) LO	E.2	(4.350.213.626.097)	(4.886.114.745.419)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(25.028.983.106)	(52.349.387.566)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	44.567.008.171	5.160.560.702
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	360.018.554	11.717.276.630
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(64.588.272.232)	(28.047.097.088)
Koreksi Lain-Lain	E.3.4	(5.367.737.599)	7.424.453.146
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.066.181.563.780	4.942.745.753.674
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(309.061.045.423)	108.980.395.821
EKUITAS AKHIR	E.5	25.220.160.346.839	25.529.221.392.262

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, 19 Mei 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

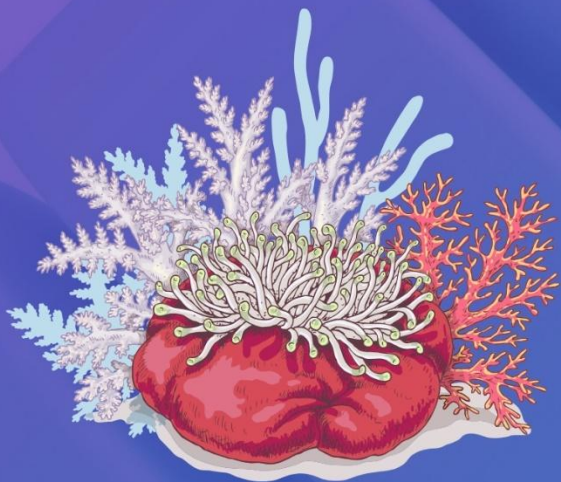
SAKTI WAHYU TRENGGONO



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan

Profil

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan. Pada masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari

Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. KKP diharapkan mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang dapat mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya:

- Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- Kedua, selama beberapa dasawarsa, pembangunan di negara ini lebih berorientasi pada sektor yang ada di darat, mengakibatkan sumber daya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.
- Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat

meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumber daya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi KKP sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024, tanggal 23 Februari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; Biro Hukum; Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Pusat Data, Statistik dan Informasi, serta kelompok jabatan fungsional.
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Susunan organisasi Ditjen PKRL terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; Direktorat Penataan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan

- Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan; dan kelompok jabatan fungsional.
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan organisasi DJPT terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Kepelabuhan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan kelompok jabatan fungsional.
 4. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; Direktorat Ikan Air Tawar; Direktorat Ikan Air Payau; Direktorat Ikan Air Laut; Direktorat Rumput Laut; dan kelompok jabatan fungsional.
 5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Direktorat Logistik; Direktorat Pemberdayaan Usaha; Direktorat Pengolahan; Direktorat Pemasaran; dan kelompok jabatan fungsional.
 6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Direktorat Pengendalian Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan kelompok jabatan fungsional.

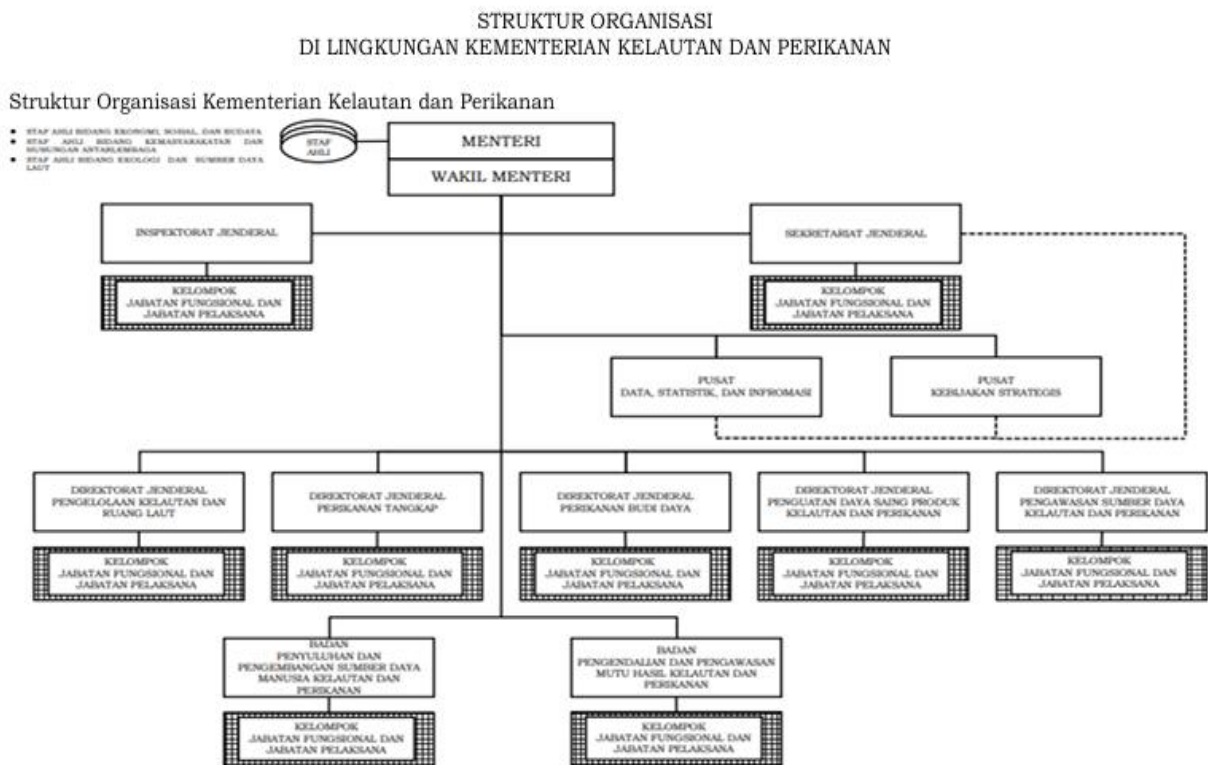
7. Inspektorat Jenderal, dipimpin oleh Inspektur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Susunan organisasi Itjen terdiri dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan kelompok jabatan fungsional.
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan kelompok jabatan fungsional.
9. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Susunan organisasi terdiri atas: Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; Pusat Manajemen Mutu; Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer; Pusat

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; dan kelompok jabatan fungsional.

10. Staf Ahli, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli terdiri atas:
 - a) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - b) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
 - c) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
11. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dipimpin oleh Kepala Pusat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistic, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
12. Pusat Kebijakan Strategis, dipimpin oleh Kepala Pusat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
13. Kelompok Jabatan Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atas pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional, memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.

14. Unit Pelaksana Teknis, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar A.1 Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/07/M.LB.01/2017 tanggal 11 Januari 2017, selain struktur organisasi di atas, KKP juga mempunyai satuan kerja (Satker) non struktural yaitu Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Menurut PermenKP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMUKP, pada Pasal 1, disebutkan bahwa lembaga ini di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Menteri Keuangan menetapkan dua Satker BPPSDMKP, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan ditetapkannya satuan kerja pada BRSDMKP menjadi BLU merupakan salah satu bentuk dukungan dalam mengakselerasi tiga program prioritas KKP, khususnya melalui pengembangan SDM, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. KKP telah menetapkan tiga program prioritas yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan kampung budidaya berbasis komoditas ekspor, dan pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta Kampung Nelayan Maju.

Pada Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) Satker di Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yaitu Balai Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebagai bagian Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara diarahkan untuk dapat menjadi salah satu Pusat Pelayanan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang cepat, efisien, ramah, inovatif dan akuntabel, sedangkan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo diarahkan untuk dapat menjadi salah satu pusat pelayanan produksi perikanan budidaya air payau yang berkelanjutan, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang diarahkan menjadi salah satu pusat pelayanan usaha produksi perikanan budidaya yang

berkelanjutan baik komoditas air tawar, pesisir (payau) maupun laut.

*Kebijakan
Penetapan
Strategis*

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Visi Presiden periode 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia,

pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara. Pada tahun 2023, KKP telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dimana indikator kinerja utama tersebut terbagi dalam 8 (Delapan) Sasaran Strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan.

Untuk itu hasil pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan sehingga pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud. Adapun 8

Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
2. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
3. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan meningkat;
5. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
7. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif;
8. Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas.

A.2 Rencana Strategis KKP 2020-2024

*Rencana
Strategis KKP
2020-2024*

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.



Gambar A.2 Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompeten SDM kelautan dan perikanan
 - b. Menkuatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamana hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut
3. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

A.3 Penyusunan Laporan Keuangan (LK)

Penyusunan Laporan Keuangan

LK Tahun 2024 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) melalui Aplikasi SAKTI.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 dan surat edaran Nomor B.385/SJ/KU.510/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor B.325/SJ/KU.510/IV/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2024 *Audited*, K/L dapat melakukan koreksi data/transaksi yang merupakan usulan koreksi mandiri dan/atau hasil pemeriksaan BPK RI.
- b. Kriteria koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* terdiri dari:
 - Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI;
 - Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI;
 - Koreksi data/transaksi RPATA TA 2024.
- c. Pengaturan koreksi data/transaksi tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan SAKTI dapat dilakukan sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
 - Koreksi data LKKL Tahun 2024 *Unaudited* yang hanya mengakibatkan perubahan data SAKTI dapat dilakukan sampai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh masing-masing unit konsolidator K/L dengan memperhatikan batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*;
 - Seluruh koreksi data/transaksi LKKL Tahun 2024 *Unaudited* harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI pada masing-masing K/L.

- d. Laporan Keuangan beserta lampiran dan dokumen pendukung disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lambat sebagai berikut:

No	Unit Akuntansi Pengirim	Dokumen Pendukung	Unit Akuntansi Penerima	Batas Penyampaian Laporan
1.	UAKPA/B	a. Rekapitulasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud; b. Ikhtisar PHLN (jika ada); c. Catatan Hasil Reviu; d. Telaah LK; e. Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (Jika ada); f. Laporan Barang Milik Negara.	UAPPA/B-W	3 Mei 2025
			UAPPA/BE-1	
2.	UAKPA/B yang menerapkan pola keuangan BLU	a. Rekapitulasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud; b. Catatan Hasil Reviu; c. Telaah LK; d. Laporan Barang Milik Negara.	UAPPA/B-W	3 Mei 2025
			UAPPA/BE-1	
3.	UAPPA/B-W	a. Rekapitulasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud; b. Ikhtisar PHLN (jika ada); c. Telaah LK; d. Laporan Keuangan BLU; e. Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (Jika ada); f. Laporan Barang Milik Negara.	UAPPA/B-E1	4 Mei 2025
4.	UAPPA/B-E1	a. Rekapitulasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud; b. Ikhtisar PHLN (jika ada); c. Catatan Hasil Reviu; d. Telaah LK; e. Laporan Keuangan BLU; f. Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (Jika ada); g. Laporan Barang Milik Negara.	UAPA/B	5 Mei 2025

- e. LK KKP Tahun 2024 *Audited* disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal **9 Mei 2025**.
- f. Penyusunan dan penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited* agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
- Seluruh satker wajib melakukan tutup periode 14 pada Aplikasi SAKTI agar LKKL Tahun 2024 *Audited* yang dihasilkan Aplikasi MonSAKTI dapat bersifat final;

- Kementerian/Lembaga memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* LKKL Tahun 2024 *Audited* dengan data pada Aplikasi MonSAKTI;
 - Lembar muka/*face* masing-masing komponen LKKL serta Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility* (SOR) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- g. Tembusan Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi di lingkungan KKP kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN disampaikan melalui *e-mail* bagianakuntansi@kkp.go.id, kerjatim5.rokeukkp@gmail.com dan pengelolaanbmn.kkp@gmail.com.
- h. Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 *Audited* disampaikan dalam bentuk *softcopy* (dalam format .pdf) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui alamat *e-mail* bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc bai.dit.apk@gmail.com. Penyampaian LK KKP Tahun 2024 *Audited* disertai dengan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.

A.4 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Dalam penyelenggaraan akuntansi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP berlaku untuk

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dengan menggunakan basis kas dan untuk menyusun neraca dengan menggunakan basis akrual. Selanjutnya, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Periode inilah implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka pemerintah pusat perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

Sejalan dengan berkembangnya kelembagaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat Badan Layanan Umum yang merupakan satuan kerja vertikal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan pembukuan, Badan Layanan Umum selaku UAKPA berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 (PSAP 13) tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan

diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti aturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (Rekening KUN/D), sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening KUN/D dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening KUN/D mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Pendanaan yang berasal bukan dari rupiah murni dan transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian LK KKP Tahun 2024 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.6.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi dalam pendapatan-LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan PNPB.

Terkait dengan pengakuan pendapatan BLU diidentifikasi sebagai berikut:

1) Timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih

Sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan dan/atau hak BLU untuk menagihkan beban tagihan kepada alokasi APBN - DIPA Rupiah Murni berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan BLU yang secara hak telah diterima oleh BLU tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

A.6.2. Belanja

Belanja

Merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi belanja-LRA mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Belanja-LRA disajikan

menurut klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

A.6.3. Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti Investasi, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
- 2) Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
- 3) Sedangkan untuk kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui sebagai berikut:
 - a) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;
 - b) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;
 - c) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
- 4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian Investasi BLU, sebagai berikut:
 - a) Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

- b) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.
- 5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
 - c) Piutang yang timbul dari bukan pajak diakui apabila penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;
 - d) Piutang BLU diakui sebagai berikut:
 - (1) Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;
 - (2) Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan;
 - (3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti

rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan;

- (4) Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel A.1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- 7) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan pengukuran dan penyajian persediaan mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37/PERMEN-KP/2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan KKP, dimana barang yang pertama kali masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama kali keluar first in first out (FIFO). Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasar harga perolehan masing-masing. Tujuan penggantian metode penilaian persediaan dari harga pembelian terakhir menjadi FIFO pada tahun 2021 adalah untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar. Khusus untuk persediaan berupa biota, persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan dilakukan setiap terjadi mutasi/transaksi yang mempengaruhi Persediaan. Selanjutnya pencatatan persediaan disesuaikan dengan hasil opname fisik akhir periode.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset

tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- (1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk:
 - (a). peralatan dan mesin; atau
 - (b). aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- (2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - (a). gedung dan bangunan; atau
 - (b). aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan/Depresiasi (carrying amount). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel A.2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca. Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

d. Properti Investasi

Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- (a). Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- (b). Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- (a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- (b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil *netto* dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti

investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Entitas mengungkapkan:

- (a). dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b). metode penyusutan yang digunakan;
- (c). masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (d). jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- (e). rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. pelepasan;
 - iv. penyusutan;
 - v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - vi. perubahan lain.
- (f). apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;

- v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
- vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- (g). apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- (h). apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- (i). metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- (j). apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- (k). jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

- (l). kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan; membangun atau untuk perbaikan,
- (m). properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

e. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan;
- 3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:
 - a) Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
 - (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan;
 - (2) Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - b) Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

f. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

- a) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani.

Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU;

- b) Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU;
- c) Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum

dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- 3) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.4. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- c. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:
 - 1) Utang Usaha BLU, Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka

pendek, dan/atau diakui berdasarkan hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang BLU dari aktivitas pembiayaan pada periode pelaporan.

- 2) Utang Pihak Ketiga BLU Utang Pihak Ketiga diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/atau
 - b) Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLU.
- 3) Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor diakui pada saat Bendahara BLU memungut pajak namun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.
- 4) Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DIPA rupiah murni, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLU dan/atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.
- 5) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLU terkait kas yang telah diterima BLU dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLU pada akhir periode pelaporan keuangan. Pendapatan Diterima di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar-benar

merupakan hak pada periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, Utang kepada Pihak Ketiga BLU, Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor, Belanja yang Masih Harus Dibayar, dan Pendapatan Diterima di Muka.

7) Utang Jangka Panjang BLU

Utang Jangka Panjang BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka panjang dan dilakukan pengesahan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3B/ SP2B-BLU, dan/atau pada saat BLU menerima dana sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Bagian Anggaran BUN.

A.6.5. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Pendapatan-LO

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan nonoperasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
- 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO pada BLU disajikan:

- 1) Nilai pendapatan dari alokasi APBN - DIPA RM sesuai dengan SP2D Belanja yang berasal dari pagu DIPA rupiah murni disajikan di LO sebagai Pendapatan dari Alokasi APBN dalam pos Pendapatan Operasional;
- 2) Nilai pendapatan umum PNBPN sesuai dengan dokumen sumber setoran ke kas negara (SSBP dan/atau SSPB) atau dokumen LO sebagai PNBPN Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
- 3) Nilai pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari masyarakat - DIPA PNBPN; Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat - DIPA PNBPN; Pendapatan hasil kerja sama - DIPA PNBPN; dan Pendapatan BLU lainnya - DIPA PNBPN yang telah disahkan sesuai dengan

SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;

- 4) Nilai pendapatan hibah bentuk uang dari masyarakat yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional;
- 5) Pendapatan hibah bentuk barang dan/atau jasa dari masyarakat sesuai dengan berita acara serah terima hibah barang/jasa atau dokumen yang dipersamakan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional, sedangkan beban jasanya disajikan di LO sebagai beban sesuai definisi bebannya dalam pos Beban Operasional;
- 6) Pendapatan BLU secara transaksional kas yang belum dilakukan pengesahan transaksinya pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;
- 7) Pendapatan BLU secara transaksional nonkas pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU yang dicatat di buku pembantu pendapatan BLU non kas LO sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya; dan
- 8) Pendapatan sehubungan dengan perhitungan akuntansi misalnya pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan pendapatan pelepasan aset disajikan di Laporan Operasional dalam pos Kegiatan Non Operasional.

b. Beban LO

Adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban yang terdapat pada BLU adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai beban sehubungan dengan adanya realisasi belanja sesuai dengan SPM/SP2D Belanjanya, nilai beban sehubungan dengan pengesahan belanja barang sesuai dengan SP3B/SP2B-BLU, nilai beban sehubungan dengan beban transaksional secara kas belum dilakukan pengesahan belanjanya, dan nilai beban sehubungan dengan penyesuaian beban operasional BLU disajikan di Laporan Operasional dalam pos Beban Operasional;
- 2) Beban operasional BLU di Laporan Operasional disajikan menurut klasifikasi ekonomi, antara lain:
 - a) Beban pegawai;
 - b) Beban barang dan jasa;
 - c) Beban persediaan;
 - d) Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - e) Beban pemeliharaan;
 - f) Beban perjalanan dinas;
 - g) Penyisihan piutang tidak tertagih; dan
 - h) Beban penyusutan dan amortisasi.
- 3) Nilai beban sehubungan dengan penyetoran pendapatan PNPB untuk keuntungan rekening kas umum negara disajikan di Laporan Operasional sebagai Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara dalam pos Kegiatan Non-Operasional. Selain itu beban-beban yang disajikan dalam pos Kegiatan Nonoperasional misalnya beban sehubungan dengan kerugian persediaan rusak atau usang, kerugian pelepasan aset, kerugian selisih kurs belum terealisasi atas saldo kas dan bank BLU, piutang BLU, dan utang BLU.

A.7 Penjelasan Umum Lainnya

A.7.1 Entitas Penyusunan Laporan Keuangan

Penjelasan Umum Lainnya

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, KKP menggunakan pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker, wilayah, eselon I dan Kementerian. Jumlah satker yang melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan di lingkungan KKP dengan perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam Rincian jumlah satker aktif pada masing-masing eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel A.4
Perbandingan Jumlah Satker
Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024

Kode Es I	Eselon 1	2023					2024					±
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
01	Setjen	2	1	34	-	37	2	1	-	34	37	0
02	Itjen	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0
03	DJPT	1	23	34	25	83	1	23	-	34	58	-25
04	DJPB	1	15	34	-	50	1	15	-	34	50	0
05	Ditjen PSDKP	1	14	34	-	49	1	14	15	34	64	+15
06	Ditjen PDSPKP	1	1	34	-	36	1	1	-	38	40	+4
07	Ditjen PRL	1	8	33	12	54	1	8	-	34	43	-11
12	BPPSDMKP	2	41	-	-	43	2	39	-	-	41	-2
13	BPPKMHP	1	47	-	-	48	1	47	-	-	48	0
	Konsolidasi	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	0
Jumlah	Jumlah	12	150	203	37	402	12	148	15	208	383	-19

Pada tahun 2024, KKP memiliki Satker sejumlah 383 yang terbagi ke dalam empat kewenangan yaitu Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Tugas Pembantuan (TP), dan satker konsolidasi.

Rincian lebih lanjut atas jumlah satker tersebut, dijelaskan pada Bab Laporan Realisasi Anggaran (Catatan atas Laporan Keuangan) laporan keuangan ini.

Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah

Pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menampung pencairan

anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun belanja, menggunakan 626 rekening Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel A.5
Jumlah Rekening Pemerintah pada Satker di Lingkungan KKP

Eselon I	Nama Bank									Jumlah
	BNI	MANDIRI	BRI	BSI	BTN	BPD JABAR BANTEN	BPD JAWA TIMUR	BPD NAGARI	BPD PAPUA	
Setjen	28	12	15	1	-	-	-	-	-	56
Itjen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7
DJPT	29	14	24	2	1	1	1	-	-	72
DJPB	16	21	18	2	2	4	1	-	4	68
Ditjen PSDKP	46	57	25	9	-	-	-	-	-	137
Ditjen PDSPKP	25	12	10	1	-	-	-	-	-	48
Ditjen PKRL	27	17	20	20	-	-	1	1	-	86
BPPSDMKP	36	17	32	1	13	-	-	-	-	99
BPPMHKP	19	16	17	1	-	-	-	-	-	53
Total	233	166	161	37	16	5	3	1	4	626

Sumber Data: <https://sprint.kemenkeu.go.id/> per Desember 2024

Adapun Rekapitulasi Data Rekening Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagaimana matriks pada Lampiran I.

A.7.2 Informasi Kepegawaian

Informasi
Kepegawaian

Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel A.6
Data Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Unit Eselon I	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Setjen	580	621	622	647	682
2	Ditjen PKRL	659	725	713	715	728
3	Ditjen PT	1.284	1.300	1.367	1.641	1.646
4	Ditjen PB	1.356	1.309	1.205	1.172	1.241
5	Ditjen PDSPKP	367	384	378	408	418
6	Ditjen PSDKP	1.290	1.294	1.329	1.489	1.520
7	Itjen	214	219	206	215	208
8	BPPSDMKP	5.345	5.126	5.061	4.999	5.061
9	BPPMHKP	1.868	1.869	1.872	1.866	918
TOTAL		12.963	12.847	12.753	13.152	12.422

Sumber data: pegawai.kkp.go.id per 31 Desember 2024

Berikut perincian lebih lanjut data pegawai di lingkungan KKP pada masing-masing unit eselon I:

I. Sekretariat Jenderal

Tabel A.7
Data Pegawai Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		305	36		1	3	108	453
2	Perempuan		192	26				11	229
	Total		497	62		1	3	119	682

II. Inspektorat Jenderal

Tabel A.8
Data Pegawai Lingkup Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		127	3					130
2	Perempuan		76	2					78
	Total		203	5					208

III. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Tabel A.9
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		821	327					1148
2	Perempuan		374	124					498
	Total		1195	451					1646

IV. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Tabel A.10
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		727	94		1			822
2	Perempuan		358	61					419
	Total		1085	155		1			1241

V. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tabel A.11
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		1082	193			2		1277

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
2	Perempuan		206	37					243
	Total		1288	230			2		1520

VI. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

Tabel A.12
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		185	31			2		218
2	Perempuan		173	27					200
	Total		358	58			2		418

VII. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Tabel A.13
Data Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		429	32		1	2		464
2	Perempuan		246	18					264
	Total		675	50		1	2		728

VIII. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tabel A.14
Data Pegawai Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		2639	384			3		3026
2	Perempuan		1683	351			1		2035
	Total		4322	735			4		5061

IX. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel A.15
Data Pegawai Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status							Jumlah
		CPNS	PNS	PPPK	DPK Dari Inst. Lain	DPB Dari Inst. Lain	DPK Ke Inst. Lain	DPB Ke Inst. Lain	
1	Laki-Laki		486	30					516
2	Perempuan		383	19					402
	Total		869	49					918

Keterangan:

DPK: DiPeKerjakan; DPB: DiPerBantukan; Inst.: Instansi

Kebijakan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi:

- Kebijakan Jabatan dan Kelas Jabatan ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Manajemen Talenta ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

- Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bawah Pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Kebijakan Mekanisme Kerja Penyederhanaan Birokrasi

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

A.7.3 Sistem Informasi yang Digunakan

*Sistem
Informasi yang
Digunakan*

Sistem Informasi yang digunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*web-based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
- c. Aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Aplikasi Simponi (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*), aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan non anggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- e. Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara), aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan

BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan

- f. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan mulai periode penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

- i. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- ii. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- iii. Proses pelaporan Modul dalam aplikasi SAKTI.

A.7.4 Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh KKP

*Aplikasi yang
digunakan dan
dikembangkan
oleh KKP*

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel A.16
Daftar Aplikasi yang Digunakan dan Dikembangkan Oleh KKP

No	Nama Aplikasi	Lokus/Alamat data/Informasi	Jenis Data/Informasi	Eselon I
1	<i>Integrated Maritime Intelligent Platform</i>	cc.kkp.go.id	Data <i>tracking</i> kapal Indonesia dan kapal asing, logbook kapal, kepelabuhanan, pemetaan ruang laut bersumber dari VMS dan AIS	SETJEN
2	Aplikasi Sistem Persediaan	e-persediaan.kkp.go.id	Data Persediaan Barang	SETJEN
3	E-Pegawai (Sistem Informasi Kepegawaian KKP)	epegawai.kkp.go.id	Data pribadi, data riwayat keluarga, data riwayat pendidikan, data riwayat jabatan	SETJEN
4	JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum)	jdih.kkp.go.id	Data Peraturan Kelautan dan Perikanan	SETJEN
5	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	lpse.kkp.go.id	Data Pengeadaan Barang dan Jasa	SETJEN
6	MD (Master Data)	md.kkp.go.id	Data induk KKP untuk master datanya sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	SETJEN
7	Aplikasi Gateway OSS (<i>Online Single Submission</i>)	oss.kkp.go.id	Data pelaku usaha, data perizinan	SETJEN
8	Perpustakaan (<i>Archipelago Indonesia Marine Library</i>)	perpustakaan.kkp.go.id	Data Informasi Layanan Perpustakaan KKP	SETJEN
9	Portal KKP	portal.kkp.go.id	Data persuratan, organisasi, pegawai, pejabat, disposisi, email, repositori, TTDE, cuti, agenda, regulasi, dan pengembangan kompetensi	SETJEN
10	Presensi KKP	presensi.kkp.go.id	Data Pegawai, Data Rekam Presensi, Data Jadwal Kerja, Data Cuti/Dinas	SETJEN
11	PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	ptsp.kkp.go.id	Data pelaku usaha, data dan informasi layanan perizinan	SETJEN
12	Web KKP	kkp.go.id	Data kegiatan resmi lingkup KKP untuk publikasi resmi	SETJEN
13	Warroom	warroom.kkp.go.id	Data tracking kapal Indonesia dan kapal asing	SETJEN
14	Portal data	portaldata.kkp.go.id	Data kelautan dan perikanan yang diperoleh dari setiap eselon teknis lingkup KKP	SETJEN
15	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	ppid.kkp.go.id	Data yang dipublikasikan berdasarkan peraturan PPID	SETJEN
16	Pengawasan	pengawasan.kkp.go.id	Data tender, penyedia barang jasa, nilai kontrak, data spasial sebaran perizinan, data pelaku usaha, data PNBP, data pelanggaran izin kapal	SETJEN
17	Sidak (Sistem informasi data tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan)	sidak.kkp.go.id	Data Satker, Data Eselon, Data LHP, Data temuan dan rekomendasi, Data status tindak lanjut dan bukti tindak lanjut	ITJEN
18	Whistleblower system (Sistem pengaduan <i>Whistleblower</i> lingkup KKP)	wbs.kkp.go.id	Data Pengadu, Bukti Pengaduan, Data Pelaku, Status penanganan pengaduan	ITJEN

No	Nama Aplikasi	Lokus/Alamat data/Informasi	Jenis Data/Informasi	Eselon I
19	Audit Management System (Sistem manajemen pengawasan intern lingkup ITJEN KKP)	ams.kkp.go.id	Data perencanaan pengawasan, Data program kerja pengawasan, Data pelaksanaan dan pelaporan	ITJEN
20	Unit Pengendalian Gratifikasi	upg.kkp.go.id	Data sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi	ITJEN
21	Internal Audit Enterprise Governance and Information Technology	integrity.kkp.go.id	Bigdata pengawasan lingkup KKP dan tools analysis di bidang pengawasan intern	ITJEN
22	Support and Services Application	ssa.kkp.go.id	Data assesment dan Data Konsultasi	ITJEN
23	Website Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan	pipp.kkp.go.id	Data operasional kapal di pelabuhan, data ikan di pelabuhan, data harga ikan konsumen, data jasa pelabuhan, dan data fasilitas dalam pelabuhan	DJPT
24	CDS (Catch Documentation Scheme)	cds.kkp.go.id	Data Kapal yang menangkap, data panjang dan berat ikan yang ditangkap, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Bulan Tangkap, Tujuan (penjualan domestik/ekspor), khusus tuna sirip biru selatan	DJPT
25	Sistem Informasi Record of Vessels Authorized to Fish for Tuna, Skipjack Tuna and Neritic Tuna Within Indonesia Archipelagic, Territorial Waters and IEEZ Waters (R-VIA) / DIVA TUNA	integrasi.djpt.kkp.go.id/tunavessel/	Data kapal perikanan penangkap tuna cakalang dan tongkol (TCT) , Nama kapal, nama dan alamat pemilik, periode autorisasi, nomor buku kapal, GT dan ukuran kapal, alat tangkap, daerah penangkapan ikan	DJPT
26	TEMAN SPB (Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar)	integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb2017	Data Kedatangan Kapal, Data Keberangkatan Kapal, History Kapal	DJPT
27	SI-SCPIB (Sistem Informasi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik)	integrasi.djpt.kkp.go.id/inspeksiikan/	Data ikan, Alat tangkap, Wilayah administratif, Data Kapal, Data Pelaku Usaha	DJPT
28	SILOPI (Sistem Informasi Log Book Penangkapan Ikan) dan E-LOG BOOK (SDI)	integrasi.djpt.kkp.go.id/admin_elogbook , playstore: elogbook penangkapan ikan kkp	Identitas Kapal Penangkap Ikan, Nama Pemilik, Jenis Alat Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan, Jenis dan Jumlah Ikan Hasil Tangkapan, Pelabuhan Pangkalan, Lama Hari Melaut, Jumlah <i>Setting</i> , Periode Trip	DJPT
29	E-LOBSTER berubah nama menjadi SILOKER (Sistem Informasi Pengelolaan Lobster, Kepiting, Rajungan) (SDI)	integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr/	Nama KUB penangkap BBL, Identitas Nelayan Penangkap, Alokasi Kuota Provinsi, Alokasi Kuota Nelayan/Kelompok Nelayan, Realisasi Kouta Provinsi, Realisasi Kuota Nelayan/Kelompok Nelayan, Dinas KP Prov/Kab/Kota penerbit SKA, Jumlah SKA realisasi di tiap Dinas KP, Jumlah surat penetapan kelompok nelayan dan kuota penangkapan BBL di Dinas KP Prov, Tujuan Pemasaran, Lokasi Penangkapan, Pelaku Usaha (Nama Pembawa dan Nama Penerimaanya) -> Data Ini dapat dilihat oleh admin DJPT, dan sebagian data dapat dilihat oleh Dinas KP	DJPT
30	SIPALKA (Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan)	kapal.kkp.go.id/sipalkaonline/	Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Nomor Register Kapal Perikanan, Foto Kapal	DJPT
31	SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah)	perizinan.kkp.go.id/simkada	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Alat tangkap	DJPT

No	Nama Aplikasi	Lokus/Alamat data/Informasi	Jenis Data/Informasi	Eselon I
32	Portal SILAT (Sistem Aplikasi Pendelegasian Kewenangan Perpanjangan SIPI/SIKPI Kapal Perikanan Ukuran)	perizinan.kkp.go.id/silat	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Alat tangkap	DJPT
33	SIJAKA (Sistem Integrasi Jasa Kepelabuhanan) (KEPELABUHAN)	integrasi.djpt.kkp.go.id/sijakadev	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Alat tangkap, Data Tambat Labuh	DJPT
34	SIKAPI (sistem informasi persetujuan pengadaan kapal perikanan)	kapal.kkp.go.id/sikapi	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Nomor Register Kapal Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan	DJPT
35	SICEFI (Sistem informasi cek fisik kapal perikanan)	kapal.kkp.go.id/sicefi	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Nomor Register Kapal Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan	DJPT
36	OMKAPI (online monitoring kapal bantuan)	kapal.kkp.go.id/omkapi	Data Kapal, Wilayah administratif, Pelaku Usaha, Data Pemilik, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan, Nomor Register Kapal Perikanan, Foto Kapal, data pelabuhan, data logbook, dan data pendaratan dan data produksi	DJPT
37	(SIMPELBUKAN) Sistem informasi pelayanan buku pelaut perikanan	integrasi.djpt.kkp.go.id/bukupelaut	biodata awak kapal, sertifikasi dan kompetensi awak kapal, data pelabuhan	DJPT
38	E-PIT (Sistem Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur)	integrasi.djpt.kkp.go.id/portaltipit	Data Kapal, data SPB, data STBLK, data LPM	DJPT
39	DSS (Data Sharing System)	integrasi.djpt.kkp.go.id/login_baru/	Data Ikan, Data Kapal, Alat Tangkap, Daerah Administratif, jenis ikan	DJPT
40	SIVOLKA (Sistem volume kapal)	kapal.kkp.go.id/pengukuranpalka	Data kapal, data pelabuhan, data pengukuran palka, lokasi pemeriksaan kapal	DJPT
41	SIBATIK (Sistem Informasi Obat Ikan)	sibatik.kkp.go.id/aplikasi/	Obat Ikan, Pelaku Usaha	DJPB
42	SIPINA (Sistem Informasi Pakan Ikan Nasional)	sipina.kkp.go.id	Pelaku Usaha, Pakan, Bahan Baku Pakan, Negara, Daerah Administratif, Pelabuhan, UPT Barantin dan Ditjen Pajak	DJPB
43	CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	cbib.kkp.go.id/	Pelaku Usaha Budidaya Ikan	DJPB
44	Tebar Budidaya (Data elektronik bantuan sebaran budidaya)	tebarbudidaya.kkp.go.id/	Aplikasi Penampung Bantuan Pemerintah di lingkup DJPB	DJPB
45	Aplikasi Kartu Data SKAT (Sesdit PSDKP)	spkp.kkp.go.id/aktivasi	Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel Monitoring System)	PSDKP
46	Aplikasi Salmon Track (Sesdit PSDKP)	spkp.kkp.go.id/salmontrack	Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel Monitoring System)	PSDKP
47	Aplikasi SP (Aplikasi Pemantauan keaktifan transmitter)	spkp.kkp.go.id/sp	Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel Monitoring System)	PSDKP
48	Aplikasi Dashboard (Sistem Informasi Pengawasan)	sipmdjpsdkp.kkp.go.id	Data SILAT (Perizinan DJPT), Data VMS (vessel Monitoring System)	PSDKP
49	SLO Elektronik (e-SLO) (Sit. SDP)	eslo.kkp.go.id	Data epegawai, Master data perizinan DJPT (Silat dan DSS), Master data Kepelabuhanan, Master Data Jenis Ikan, Master Data Kuota DJPT, Master data Teman SPB, Master data SPKP POA	PSDKP
50	Aplikasi TPKP Nasional (Dit. PP)	tpkpnasional.kkp.go.id	Data penanganan pelanggaran pidana dan administratif sektor kelautan dan perikanan	PSDKP

No	Nama Aplikasi	Lokus/Alamat data/Informasi	Jenis Data/Informasi	Eselon I
51	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	ntphp.kkp.go.id	Data Harga Konsumen dan Harga Produsen	PDSPKP
52	Stelina (Sistem informasi ketelusuran dan logistik ikan nasional)	stelina.kkp.go.id	Data Ketelusuran Ikan dan Produk Perikanan	PDSPKP
53	Neraca Komoditas (Dit. Logistik)	nk.kkp.go.id/	Data Pelaku Usaha, Data usulan rencana kebutuhan impor, data penetapan rencana kebutuhan impor dan data realisasi impor	PDSPKP
54	BURSAIKAN (Sistem Informasi Bursa Ikan)	bursaikan.kkp.go.id	Data user selaku pelaku usaha, data NIB, data Kusuka, data produk yang dipromosikan	PDSPKP
55	Sistem Elektronik Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	e-sea.kkp.go.id	Data Permohonan KKPRL, Data kewajiban laporan tahunan KKPRL	PKRL
56	e-Saji (Aplikasi Online Surat Angkut Jenis Ikan)	saji.kkp.go.id/	Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan	PRL
57	Seapark (Aplikasi Pemanfaatan Konservasi lingkup KKP)	seapark.kkp.go.id/	Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi	PRL
58	Sistem Informasi Data Kawasan Konservasi (SIDAKO)	sidakokkhl.kkp.go.id/	Sistem Database Konservasi	PRL
59	Surga Garam (Dit. Jaskel)	surga-garam.kkp.go.id	Survey Harga NTPG (Nilai Tukar Petambak Garam)	PRL
60	AKAPI	akapi.kkp.go.id	Data AKP, Wilayah, Sertifikat Pelatihan, Kompetensi	BPPSDMKP
61	emilea KKP	emilea KKP	Data ASN, Data Modul Pelatihan	BPPSDMKP
62	Ejournal	ejournal-balitbang.kkp.go.id	Meta data artikel, data jurnal sesuai fokus dan scope kelautan dan perikanan	BPPSDMKP
63	Aplikasi Pelatihan serta sertifikasi KP	elaut-bppsdm.kkp.go.id	Data Pelatihan, Balai Pelatihan, Program Pelatihan, Jenis Pelatihan, Waktu Pelatihan	BPPSDMKP
64	BIMA	bima-bppsdm.kkp.go.id	Data Dosen, Data dokumen penelitian	BPPSDMKP
65	Dashboard BPPSDM (HILIR)	bppsdm.kkp.go.id	Data pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	BPPSDMKP
66	E-Latar	elatar-bppsdm.kkp.go.id	Data pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	BPPSDMKP
67	Pentaru KKP	pentaru.kkp.go.id	Data pendaftaran pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	BPPSDMKP
68	HACCP (Sistem Informasi sertifikasi Hazard analysis Critical Control Points)	haccp.kkp.go.id	Data produk perikanan, UPT BKIPM, NIB, SKP, Data Pegawai	BPPMHKP
69	Aplikasi SKP Online (Dit. Pengolahan Hasil)	skp-pdspkp.kkp.go.id/	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	BPPMHKP

A.7.5 Produk Hukum yang telah diterbitkan dan data permasalahan hukum di lingkungan KKP Tahun 2024

Produk Hukum

Produk hukum yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024, terdiri atas:

1. 32 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMENKP); dan
2. 95 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMENKP).

(Rekapitulasi Peraturan MKP dan Keputusan MKP sebagaimana matriks terlampir pada Lampiran Nomor II dan Lampiran Nomor III)

Daftar permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kasus *Inkracht*, sebanyak 7 kasus dimana Biro Hukum telah berkontribusi mencegah potensi pengeluaran negara sebesar Rp1.619.461.617.600,00 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah); dan
- b. Terdapat 9 perkara yang masih dalam proses upaya hukum dan masih dalam proses persidangan.

(Rekapitulasi daftar permasalahan hukum terlampir pada matriks Lampiran Nomor IV)

A.7.6 Kebijakan Manajemen Bidang Keuangan

Kebijakan Manajemen Bidang Keuangan

Pada Tahun 2024 ini, KKP mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembinaan tata kelola, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, koordinasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pembinaan badan layanan umum, tata laksana dan transformasi keuangan, kepatuhan pejabat perbendaharaan, penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, dan penyelesaian kerugian negara dan koordinasi pengelolaan barang milik negara.

Kebijakan Pemblokiran Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Kebijakan blokir anggaran pada tahun 2024 yang mendapat KKP yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024;
2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Penjelasan lebih rinci dituangkan pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan LRA (Laporan Realisasi Anggaran).

A.7.7 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Dasar Hukum terkait penyelenggaraan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan PIPK yang diimplementasikan pada Entitas Akuntansi (UAKPA) serta Entitas Pelaporan (UAPPA-E1 dan UAPA) terdiri atas:

- a. Penerapan

Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.

- b. Penilaian

Penilaian PIPK bertujuan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas.

- c. Reviu PIPK

Reviu PIPK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Adapun waktu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan PIPK Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Akun Signifikan. Terdiri atas:

- a. Akun signifikan kementerian

Merupakan akun yang ditetapkan oleh manajemen UAPA yang telah dibahas bersama Unit Eselon I dan Inspektorat Jenderal yang bersifat tematik sesuai dengan kondisi dan karakteristik Unit Eselon I dan wajib diterapkan di seluruh entitas akuntansi lingkup Unit Eselon I masing-masing.

- b. Akun signifikan UAKPA

Merupakan akun yang diusulkan oleh manajemen UAKPA yang telah dibahas bersama manajemen UAPPA-E1 dan Inspektorat Mitra, dengan kriteria: (1) memiliki kemungkinan terjadinya salah saji yang material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu; (2) menjadi temuan pemeriksa eksternal dan atau APIP dalam 2 (dua) tahun terakhir; (3) akun turunan dari kegiatan yang mempunyai risiko tinggi berdasarkan hasil Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko.

2. Penyusunan Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) yang telah dinilai oleh Tim Penilai.

Merupakan proses penilaian risiko terhadap suatu akun signifikan dengan melakukan identifikasi dan analisis risiko serta

merencanakan pengelolaan risiko dalam rangka mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*control selfassessment*).

3. Permohonan Reviu Tabel A dan atau Tabel A.1. Reviu PIPK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan melakukan penelaahan atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Pelaksanaan PIPK di lingkungan KKP sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel A.17
Tahapan Penyelenggaraan PIPK sampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2024
Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Keterangan
Waktu Pelaksanaan		
1	Penetapan Akun Signifikan Kementerian	Disampaikan oleh Biro Keuangan ke seluruh Unit Eselon I dan Inspektorat Jenderal pada minggu pertama Bulan April 2024
2	Usulan Akun Signifikan UAKPA	Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling lambat tanggal 26 April 2024
3	Usulan Akun Signifikan dan Entitas Akuntansi yang melakukan penilaian lingkup UAPPA-E1 setelah Pembahasan bersama Biro Keuangan dan Inspektorat Mitra	Disampaikan oleh Unit Eselon I ke Biro Keuangan paling lambat tanggal 13 Mei 2024
4	Penyusunan Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A.1) yang telah dinilai oleh Tim Penilai	Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling lambat tanggal 14 Juni 2024
5	Permohonan Reviu Tabel A dan atau Tabel A.1	Disampaikan oleh Unit Eselon I ke Inspektorat Mitra paling lambat tanggal 21 Juni 2024
6	Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya	Dilaksanakan tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024
7	Pengujian Pengendalian Tingkat Entitas (Tabel B.1)	Disampaikan oleh Satker ke Unit Eselon I paling lambat tanggal 30 September 2024
8	Pengendalian Umum	
9	Pengujian Atribut Pengendalian (Tabel C.1)	
10	Pengujian Pengendalian Aplikasi (Tabel C.2)	Cut Off Realisasi per 31 Oktober 2024
11	Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan Pengendalian (Tabel D)	Disampaikan ke Unit Eselon I paling lambat tanggal 15 November 2024
12	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK Satker	
13	Penilaian Kelemahan Gabungan (Tabel E) oleh Unit Eselon I	Disampaikan ke Biro Keuangan dan Inspektorat Mitra paling lambat tanggal 29 November 2024

No	Uraian	Keterangan
Waktu Pelaksanaan		
14	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK Unit Eselon I	
15	Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Unit Eselon I	Minggu ke-1 s.d. Minggu ke-3 Bulan Desember 2024
16	Penyampaian perbaikan Laporan Hasil Penilaian PIPK Unit Eselon I setelah reviu	Disampaikan ke Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 Januari 2025
17	Penilaian Kelemahan Gabungan Kementerian (Tabel E)	Minggu ke-3 s.d. Minggu ke-4 Bulan Januari 2025
18	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK Kementerian	
19	Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Kementerian	Bulan Februari 2025
20	Penerbitan SOR Laporan Keuangan TA 2024	Paling lambat 28 Februari 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2025, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif**, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

A.7.8 Prioritas Nasional

Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN) merupakan penjabaran lanjut daripada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan khusus untuk bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

PN KKP dalam rangka mendukung 5 kebijakan ekonomi biru KKP didukung anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) PN1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran senilai Rp1.965.049.174.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan;
- Peralatan dan Mesin Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih;
- Rekomendasi Kebijakan Pendampingan *Major Project* Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional;
- Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Pasar Ikan bertaraf internasional yang dikembangkan-IFPIFM I;
- Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor;
- Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah;
- Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional;
- Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri;
- Peralatan Pemasaran;
- Kendaraan Pemasaran Alih Teknologi Informasi;
- Profil Pasar Ekspor Hasil Kelautan Perikanan;
- Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan;
- Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan;
- Bursa Pasar Ikan;

- Produk yang mendapatkan pembinaan penerapan kelayakan pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/*Good Manufacturing Practices* (GMP)/HACCP;
- Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina;
- UPI skala menengah besar yang dibina;
- Industri pengolahan yang dibina oleh daerah;
- Sarana sistem rantai dingin Hasil KP;
- Sarana pengolahan Hasil KP;
- Sarana Pengolahan Hasil KP (MP korporasi);
- Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun;
- Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI;
- Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi;
- Sertifikat mutu lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer;
- Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi;
- Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya;
- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability*;
- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Sarana Pengujian Mutu;
- Prasarana Pengujian Mutu;
- UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis;
- UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP;
- Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan;

- Rekomendasi Kebijakan Metode/Parameter uji yang dihasilkan laboratorium acuan;
- Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu;
- Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
- Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Unit/Usaha perikanan yang menerapkan *quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi;
- Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan;
- Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan;
- Awak kapal perikanan yang disertifikasi;
- Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan;
- Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha;
- Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan;
- Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan;
- Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan;
- Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya;
- Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya;
- Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
- Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan;

- Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
- Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I;
- Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - *Eco Fishing Port*;
- Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan prasarananya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
- Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM II;
- Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur;
- Rekomendasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang Dilaksanakan;
- Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan;
- Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya;
- Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya;
- Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya;
- Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya;
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi);
- Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju);
- Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi);
- Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - *Ocean for Prosperity Project* (Lautra);
- Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya;

- Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya;
- Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan;
- Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi;
- Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data *Log Book* Penangkapan Ikan;
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan;
- Rekomendasi kebijakan dari hasil pengolahan dan analisis data pemantauan Observer diatas kapal perikanan;
- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional;
- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang terkelola kelembagaannya - *Ocean for Prosperity Project* (Lautra);
- Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi;
- Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun;
- Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Perbenihan;
- Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat;
- Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat;
- Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - *Oceans for Prosperity Project* – Lautra;
- Klaster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat;

- Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat;
- Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat;
- Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat;
- Calon Induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat;
- Calon Induk Unggul ikan laut yang disalurkan ke masyarakat;
- Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat;
- Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat;
- Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat;
- Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat;
- Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat;
- Calon Induk Unggul yang diproduksi;
- Prasarana produksi perikanan budidaya;
- Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan;
- Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat;
- Sampel Monitoring Residu yang diuji;
- Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji;
- Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) yang diuji;
- Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan;
- Sarana Perikanan Budidaya di UPT;
- Klaster kawasan di Lokasi *Major Project* Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng;
- Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP);
- Infrastruktur budidaya udang yang di tingkatkan – IISAP;
- Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT;
- Budidaya Udang Terintegrasi – ISF;

- Klaster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng di Lokasi Prioritas Lainnya;
- Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha;
- Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi;
- Usaha Pembudidaya Ikan yang dibina dan dikembangkan (MP Korporasi);
- Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat;
- Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan;
- Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya;
- Pengelola Gudang yang Difasilitasi Penerapan Sistem Resi Gudang;
- Lembaga Pengelola Logistik Ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok;
- Sarana Penyimpanan Produk KP;
- Sarana distribusi logistik produk KP;
- Mobil refrigerasi (MP korporasi);
- Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku;
- Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) yang diimplementasikan;
- Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton;
- Promosi Usaha dan Investasi KP;
- Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya;
- Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina;
- UMKM KP yang difasilitasi pembiayaan usaha;
- UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha;
- Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi;
- Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut;
- Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam;

- Rekomendasi kebijakan pengelolaan wisata bahari dan BMKT;
- Dokumen NSPK Jasa Kelautan;
- Sarana Wisata Bahari;
- Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun;
- Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun;
- Lahan Garam yang difasilitasi;
- Pengelola Wisata Bahari yang Ditingkatkan Kompetensinya;
- Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut);
- Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- Rekomendasi kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut;
- Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan;
- Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN;
- Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang KSN;
- Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN;
- Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan;
- Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut;
- Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU);

- Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RT/RW Provinsi;
- Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Pakan dan Obat Ikan;
- Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat;
- Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- Kluster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan;
- Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional;
- Sarana Data Citra Satelit Radar; dan
- OM Sarana Data Citra Satelit Radar.

2) PN2: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan alokasi anggaran senilai Rp26.510.000.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar;
- Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar;
- Rekomendasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar;
- NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar; dan
- Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar.

3) PN3: meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan alokasi anggaran senilai Rp232.953.698.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi;
- Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya;
- Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya;
- Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten; dan
- Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

4) PN4: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan alokasi anggaran senilai Rp3.000.000.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- NSPK Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya; dan
- Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut.

5) PN6: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dengan alokasi anggaran senilai Rp156.444.597.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Rekomendasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut;
- Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut;
- Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut;
- Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi;
- Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional;
- *Oceans for Prosperity Project* – Lautra;
- Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan;
- Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan;
- Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya;
- Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya;
- Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran;
- Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya terhadap resiko Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- Sarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove;
- Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh;

- Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Kawasan mangrove yang direhabilitasi;
- Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana;
- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP;
- Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya; dan
- Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

6) PN7: memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan alokasi anggaran senilai Rp699.120.292.000,00. Bentuk kegiatannya antara lain:

- Operasi Kapal Pengawas;
- Operasi Pesawat Patroli;
- Operasi *Speedboat* Pengawas;
- Kapal Pengawas;
- *Speedboat* Pengawas;
- Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun;
- Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
- Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional; dan
- Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan.

A.7.9 Kerja Sama Tahun 2024

*Kerja Sama
Dalam/Luar
Negeri*

Pada Tahun 2024, beberapa kegiatan kerja sama baik dalam maupun luar negeri cukup penting untuk mendapatkan perhatian diantaranya adalah:

- 1) Kerja Sama Dalam Negeri
 - a. Kementerian/Lembaga
 - Nota Kesepahaman antara KKP dan KEMENDAGRI, tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang

Kelautan dan Perikanan dan Pemerintahan Dalam Negeri;

- Nota Kesepahaman antara KKP dan KEMENTERIAN ATR/BPN, tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
- Nota Kesepahaman antara KKP dan BPKP, tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan KEMENTAN, tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pertanian;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan KEMENTERIAN PU/PR, tentang Dukungan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Nota Kesepahaman antara KKP dan BRIN, tentang Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Nota Kesepahaman antara KKP dan Barantin, tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan BAKAMLA RI, tentang Sinergisitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan BKKBN, tentang Sinergisitas Program Kelautan dan Perikanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Nota Kesepahaman antara KKP dan POLRI, tentang Sinergisitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Nota Kesepahaman antara KKP dan Kejaksaan Agung, tentang Sinergisitas dalam mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- Kesepahaman Bersama antara KKP dan Kemendes PDT, tentang Penguatan Kelembagaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Desa dan Daerah Tertinggal.

b. Non Pemerintah/BUMN/PT

- Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Hasanuddin, tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru Melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Brawijaya, tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Syiah Kuala, tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Padjadjaran, tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Kesepakatan Bersama antara KKP dan Universitas Diponegoro, tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Bank Mandiri, tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan;

- Yayasan WWF Indonesia, tentang Transformasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru;
- Perjanjian Kerja Sama, tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan.

2) Kerja Sama Luar Negeri

- a. Bilateral, yaitu Tindak lanjut dokumen kerja sama bilateral bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 antara Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, Persatuan Emirat Arab, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Spanyol, Tanzania, Uni Eropa, dan Vietnam;
- b. Multilateral, di antaranya:
 - Diterimanya posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan pada pertemuan internasional, diantaranya Pertemuan ASWGF ke-32;
 - Pertemuan ASEAN *Fisheries Consultative Forum* ke-16;
 - Pertemuan ASEAN *Joint Committee on Cooperation in Agriculture and Forest Product Promotion Scheme* ke-31 (30th ASEAN JCM);
 - SEAFDEC SCM ke-56;
 - SEAFDEC PCM ke-47;
 - FCG/ASSP ke-27;
 - BIMP-EAGA (WG on Fisheries) ke-11;
 - The 28th Regular Session of Indian Ocean Tuna Commission;
 - The 31st Annual Meeting of CCSBT;
 - Working Group on Agriculture and Agro-based Industry Meeting IMT-GT ke-17;
 - The 21st Regular Session of the WCPFC;

- Penyusunan *ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers*;
 - *RPOA IUU CCM*;
 - *OOC-9*;
 - *APEC OFWG ke-22*;
 - *SGOM ATSEA-2*;
 - Usulan Proyek KKP oleh APEC;
 - Forum G-20 *CESWG Brazilia 2024*;
 - *RSC ATSEA-2*;
 - *Pre-SOM/SOM ke-19*;
 - *MM9 CTI-CFF*;
 - Forum *1st Session of the Sub-Committee on Fisheries Management*;
 - Forum *Joint FAO-IMO-ILO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Related Matters*;
 - Forum *Eleventh Asia- Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD-11)*;
 - *Sidkom 80 UNESCAP*;
 - *Regional Dialogue on OBCA*;
 - Forum *36th FAO COFI*;
 - *COP-29 UNFCCC*; dan
 - Proposal *Project GEF 8* disampaikan kepada *GEF Implementasi 4 Proyek APEC* yang berhasil didapatkan oleh Indonesia c.q KKP melalui forum Kerja Sama *APEC Ocean and Fisheries Working Group (OFWG)*.
- c. Daftar Kebijakan Kerja Sama Luar Negeri yang telah ditandatangani dalam kurun waktu tahun 2024, yaitu:
- Memorandum of *Understanding between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Livestock and Fisheries of the United Republic of Tanzania on Development of Blue Economy*

through Marine Affairs and Fisheries Cooperation ditandatangani di Bogor pada 24 Januari 2024;

- *Technical Cooperation Guidelines (TCG) to Promote Sustainable Capture Fisheries between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China* ditandatangani di Beijing pada 9 November 2024;
- *Letter of Intent between Korea Maritime and Ocean University Consortium and Directorate General of Marine Spatial and Ocean Management of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and PT PERTAMINA (Persero) and PT PERTAMINA Hulu Energi on Cooperation for Feasibility Studies on Decommissioning and Re-Utilization of Oil and Gas Offshore Platforms Project* ditandatangani di Busan, Korea Selatan pada tanggal 13 Juni 2024;
- *Implementing Arrangement between The Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment of The Republic of Indonesia and The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries of The Republic Indonesia and The Ministry of Oceans And Fisheries of The Republic of Korea and The Korea Institute of Ocean Science and Technology and Indonesia - Korea Marine Technology Cooperation Research Center Concerning Official Development Assistance Project on The Establishment of The Integrated Ocean Fisheries Technology Training Center and The Enhancement of Capacity Building in Indonesia* ditandatangani di Busan, Korea Selatan pada tanggal 12 Juni 2024.

A.7.10 Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan KKP

BLU di Lingkungan KKP

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan Praktik Bisnis yang Sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.

Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau disebut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja Lingkup KKP yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai keputusan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Rumpun dan Layanan
660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (LPMUKP)	No. Penetapan : 710/KMK.05/2016 Tarif : PMK 100/PMK.05/2016	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Pengelolaan Dana
622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN (Poltek KP) SIDOARJO	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 198/PMK.05/2022	Pendidikan
239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) TEGAL	No. Penetapan : 526/KMK.05/2021 Tarif : PMK 166/PMK.05/2022	Pendidikan
239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BBPBAP) JEPARA	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Kode Satker	Nama Satker	Keputusan Menteri Keuangan	Rumpun dan Layanan
567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BPBAP) SITUBONDO	No. Penetapan : KMK 163 Tahun 2023 Tarif : PMK 139 Tahun 2023	Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Pada Tahun 2023, Kontrak kinerja antara satker PPK BLU KKP dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI dengan rincian sebagai berikut:

a. **LPMUKP**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-142/PB/2023 antara lain:

1) Aspek Pembinaan Teknis

- (a). Realisasi PNBPN Layanan Utama BLU Rp30 Miliar;
- (b). Realisasi Penyaluran Dana Bergulir Rp660 Miliar;
- (c). Rasio Dana Bergulir Diragukan Tertagih Maksimal 3%;
- (d). Indeks Kepuasan Masyarakat 3,4; dan
- (e). Persentase Peningkatan Usaha Debitur Penerima Pelatihan/Pendampingan Usaha 80%.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

- (a). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 100%;
- (b). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100%;
- (c). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 100%.

b. **Poltek Sidoarjo**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-142/PB/2023 antara lain:

1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel:

- (a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 12,88%;
- (b). Realisasi Pendapatan BLU Rp4.340.501.000,00;
- (c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset:
 - i. Pendapatan BLU dari Aset Lancar Rp4.081.000,00;

- ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama Rp942.735.000,00;
- (d). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 100%
- 2) Layanan Prima:
 - (a). Kuantitas dan Kualitas Dosen 31,35%;
 - (b). Serapan Lulusan 100%;
 - (c). Keluaran Riset Dosen 17,31%;
 - (d). Kepuasan Pengguna Layanan 3,48%;
 - (e). Pengabdian Masyarakat 2 Kegiatan;
 - (f). Jumlah Mahasiswa yang Di sponsori Beasiswa dan Lembaga/Industri 40,65%;
 - (g). Kemitraan Kerja Sama Baru 4 Kerja Sama;
 - (h). Jumlah Mata Kuliah Kompetensi yang Diampu oleh Dosen yang Berasal dari Praktisasi/Industri 18,72%.
- c. **BPPP Tegal**, sesuai Kontrak Kinerja Nomor PRJ-71/PB/2023 antara lain:
 - 1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel:
 - (a). Persentase Pendapatan BLU Terhadap Biaya Operasional 10,12%;
 - (b). Realisasi Pendapatan BLU Rp9.973.709.947,00;
 - (c). Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset:
 - i. Pendapatan BLU dari Aset Lancar Rp51.737.000,00;
 - ii. Pendapatan BLU dari Aset Tetap dan Kerjasama Rp2.335.873.550,00;
 - (d). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 124%
 - 2) Layanan Prima:
 - (a). Jumlah Peserta Pelatihan Sektor Industri 16,914 Orang;
 - (b). Jumlah Peserta yang mengikuti sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sektor KP 1.400 orang;

- (c). Kuantitas dan Kualitas Widyaiswara dan Instruktur 28 Orang;
- (d). Jumlah Lulusan Diklat yang terserap di DUDI dan Wirausaha 47%;
- (e). Kepuasan Pengguna Layanan 4%;
- (f). Kuantitas dan Kualitas Kaji Terap:
 - i. Jumlah Kaji Terap yang dihasilkan pada Tahun 2023 2 Judul
 - ii. Jumlah Kualitas Kaji Terap yang dipublikasikan pada tahun 2023 1 Nilai;
- (g). Jumlah Penerima Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Satker BLU 9.044 Orang;
- (h). Kemitraan Kerjasama 10 Perjanjian.
- d. **BBPBAP Jepara**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-274.1/PB/2023 antara lain:
 - 1) Aspek Pembinaan Teknis:
 - (a). Realisasi PNBPN Layanan Utama BLU Rp8.160.000.000,00;
 - (b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;
 - (c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;
 - (d). Prosesntase Bantuan Pada Masyarakat 55%;
 - (e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan
 - (f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks $\geq 3,5$.
 - 2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:
 - (a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;
 - (b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;
 - (c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%;

e. **BLUPPB Kerawang**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-274.3/PB/2023 antara lain:

1) Aspek Pembinaan Teknis:

- (a). Realisasi PNBPN Layanan Utama BLU Rp67.909.000.000,00;
- (b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;
- (c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;
- (d). Persentase Bantuan Pada Masyarakat 55%;
- (e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan
- (f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks $\geq 3,5$.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

- (a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;
- (b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;
- (c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%;

f. **BPBAP Situbondo**, sesuai Kontrak kinerja Nomor PRJ-274.2/PB/2023 antara lain:

(a) Aspek Pembinaan Teknis:

- (a). Realisasi PNBPN Layanan Utama BLU Rp6.700.000.000,00;
- (b). Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional 25%;
- (c). Prosentase Optimalisasi Aset Tetap berupa Tanah dan/bangunan 75%;
- (d). Prosesntase Bantuan Pada Masyarakat 55%;
- (e). Jumlah Bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan 10 Kegiatan; dan
- (f). Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks $\geq 3,5$.

2) Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola:

- (a). Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 80%;
- (b). Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pembinaan/ Pengawasan/Pemeriksaan Internal dan Eksternal 85%;
- (c). Persentase Penerapan Inovasi Layanan 80%.

A.7.11 Kebijakan KKP terkait dengan dibentuknya Badan Karantina Indonesia

*Kebijakan KKP
terkait dengan
Dibentuknya
Badan
Karantina
Indonesia*

Penyelenggaraan Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, memengaruhi penyelenggaraan Karantina.

Pada tahun 2019, diterbitkan Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mencabut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Karantina berdasarkan asas:

- (a) Kedaulatan;
- (b) Keadilan;
- (c) Perlindungan;
- (d) Keamanan nasional;
- (e) Keilmuan;
- (f) Keperluan;
- (g) Dampak minimal;
- (h) Transparansi;
- (i) Keterpaduan;
- (j) Pengakuan;
- (k) Nondiskriminasi; dan
- (l) Kelestarian.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan pengintegrasian dan pengkoordinasian Penyelenggaraan Karantina terbentuk menjadi satu badan. Ketentuan mengenai integrasi dan koordinasi dalam bentuk satu badan, termasuk tugas dan fungsinya, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pada tanggal 20 Juli 2023, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Badan Karantina Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Fungsi dari Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- d. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 23 Februari 2024.

Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, salah satu fungsi KKP terkait dengan pelaksanaan perkarantinaan

ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan telah dicabut. Dengan demikian, unit Eselon I yang menyelenggarakan tugas dari fungsi KKP tersebut sudah tidak menjadi bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

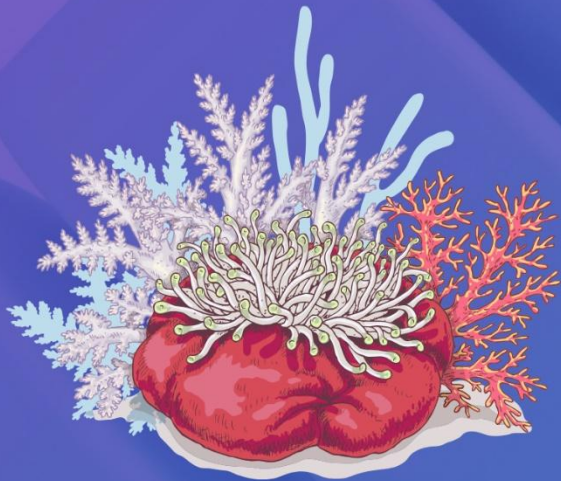
Pada saat Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada tahun 2024 KKP menerima alokasi Pagu Anggaran APBN sebesar Rp7.248.311.610.000,00 yang terbagi ke dalam sembilan DIPA Induk untuk masing-masing Unit Eselon I lingkup KKP yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, lima Direktorat Jenderal, dan dua Badan. Berikut postur anggaran tahun 2024 menurut Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel B.1
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I TA 2024

No.	Unit Eselon I	Pagu Anggaran
1.	Setjen	902.569.227.000
2.	Itjen	86.789.911.000
3.	Ditjen PT	984.561.316.000
4.	Ditjen PB	1.227.143.203.000
5.	Ditjen PSDKP	1.142.452.116.000
6.	Ditjen PDSPKP	386.899.151.000
7.	Ditjen PKRL	684.053.244.000
8.	BPPSDMKP	1.489.964.596.000
9.	BPPMHKP	343.878.846.000
TOTAL		7.248.311.610.000

Pagu anggaran belanja KKP dibagi ke dalam tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rincian pagu anggaran menurut Unit Eselon I per jenis belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.2
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2024

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	Setjen	88.615.123.000	577.216.135.000	236.737.969.000	902.569.227.000
2.	Itjen	36.583.468.000	47.498.733.000	2.707.710.000	86.789.911.000
3.	Ditjen PT	230.159.600.000	686.991.796.000	67.409.920.000	984.561.316.000
4.	Ditjen PB	186.783.785.000	732.542.591.000	307.816.827.000	1.227.143.203.000

No.	Unit Eselon I	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
5.	Ditjen PSDKP	201.373.771.000	850.488.264.000	90.590.081.000	1.142.452.116.000
6.	Ditjen PDSPKP	65.466.051.000	312.725.337.000	8.707.763.000	386.899.151.000
7.	Ditjen PKRL	112.500.887.000	470.570.648.000	100.981.709.000	684.053.244.000
8.	BPPSDM KP	819.729.572.000	612.820.358.000	57.414.666.000	1.489.964.596.000
9.	BPPMHKP	158.732.175.000	178.371.052.000	6.775.619.000	343.878.846.000
TOTAL		1.899.944.432.000	4.469.224.914.000	879.142.264.000	7.248.311.610.000

Pagu anggaran belanja menurut kewenangan Satker per Jenis Belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.3
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Kewenangan Satker Per Jenis Belanja TA 2024

No.	Kw	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Total Pagu
1.	DK		1.600.000.000		1.600.000.000
2.	KD	1.451.634.572.000	1.712.756.826.000	243.137.883.000	3.407.529.281.000
3.	KP	448.309.860.000	2.655.481.289.000	636.004.381.000	3.739.795.530.000
4.	TP		99.386.799.000		99.386.799.000
TOTAL		1.899.944.432.000	4.469.224.914.000	879.142.264.000	7.248.311.610.000

DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan usulan blokir *Automatic Adjustment* melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-SJ/RC.420/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal Usulan *Automatic Adjustment* Belanja KKP TA 2024.

Pada bulan November 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali terdampak kebijakan penghematan belanja sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Berdasarkan surat ini,

masing-masing Unit melakukan revisi pengajuan penambahan blokir di masing-masing Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Selain dari dua kebijakan di atas, terdapat blokir lain Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya blokir kode 2, 3 dan 5. Perbandingan pagu dan blokir anggaran KKP TA 2024 terdapat pada tabel berikut.

Tabel B.4
Perbandingan Pagu dan Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Per Unit Eselon I TA 2024

No.	Unit Eselon I	Total Pagu	Total Blokir
1.	Setjen	902.569.227.000	57.931.082.000
2.	Itjen	86.789.911.000	2.293.710.000
3.	Ditjen PT	984.561.316.000	90.116.063.000
4.	Ditjen PB	1.227.143.203.000	223.024.494.000
5.	Ditjen PSDKP	1.142.452.116.000	76.436.694.000
6.	Ditjen PDSPKP	386.899.151.000	59.296.601.000
7.	Ditjen PKRL	684.053.244.000	200.005.822.000
8.	BPPSDM KP	1.489.964.596.000	50.105.893.000
9.	BPPMHKP	343.878.846.000	11.099.956.000
TOTAL		7.248.311.610.000	770.310.315.000

Rincian blokir per jenis belanja per Unit Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.5
Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Unit Eselon I Per Jenis Belanja TA 2024

No.	Unit Eselon I	Blokir Belanja Pegawai	Blokir Belanja Barang	Blokir Belanja Modal	Total Blokir
1.	Setjen	0	51.391.263.000	6.539.819.000	57.931.082.000
2.	Itjen	0	2.293.710.000	0	2.293.710.000
3.	Ditjen PT	0	81.430.765.000	8.685.298.000	90.116.063.000
4.	Ditjen PB	0	12.024.494.000	211.000.000.000	223.024.494.000
5.	Ditjen PSDKP	0	45.540.434.000	30.896.260.000	76.436.694.000
6.	Ditjen PDSPKP	0	57.600.366.000	1.696.235.000	59.296.601.000
7.	Ditjen PKRL	0	118.004.700.000	82.001.122.000	200.005.822.000
8.	BPPSDM KP	0	42.953.218.000	7.152.675.000	50.105.893.000
9.	BPPMHKP	0	11.099.956.000	0	11.099.956.000
TOTAL		0	422.338.906.000	347.971.409.000	770.310.315.000

Rincian blokir per kegiatan per Unit Eselon I disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.6
Blokir Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menurut Unit Eselon I Per Kegiatan TA 2024

Unit	Kegiatan	Blokir Belanja Barang	Blokir Belanja Modal	Total Blokir
Setjen		51.391.263.000	6.539.819.000	57.931.082.000
	2322 Legislasi, Litigasi dan Kerjasama	6.299.503.000		6.299.503.000
	2323 Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.850.623.000		2.850.623.000
	2325 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	17.835.110.000		17.835.110.000
	2328 Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	14.085.182.000	6.039.819.000	20.125.001.000
	2329 Pengelolaan Data dan Informasi	10.320.845.000	500.000.000	10.820.845.000
Itjen		2.293.710.000		2.293.710.000
	2335 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP	2.293.710.000		2.293.710.000
Ditjen PT		81.430.765.000	8.685.298.000	90.116.063.000
	2337 Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	9.502.175.000		9.502.175.000
	2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	19.477.774.000	6.902.373.000	26.380.147.000
	2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	28.379.621.000		28.379.621.000
	2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6.702.856.000		6.702.856.000
	2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.368.339.000	1.782.925.000	19.151.264.000
Ditjen PB		12.024.494.000	211.000.000.000	223.024.494.000
	2344 Pengelolaan Perbenihan Ikan	351.627.000		351.627.000
	2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	4.227.081.000	211.000.000.000	215.227.081.000
	2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	271.894.000		271.894.000
	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	7.114.848.000		7.114.848.000
	5747 Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	59.044.000		59.044.000

Unit	Kegiatan	Blokir Belanja Barang	Blokir Belanja Modal	Total Blokir
Ditjen PSDKP		45.540.434.000	30.896.260.000	76.436.694.000
	2350 Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	28.085.336.000	30.880.260.000	58.965.596.000
	2351 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.953.567.000		1.953.567.000
	2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	5.513.989.000	16.000.000	5.529.989.000
	2353 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3.074.912.000		3.074.912.000
	2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6.912.630.000		6.912.630.000
Ditjen PDSPKP		57.600.366.000	1.696.235.000	59.296.601.000
	2356 Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	11.806.837.000		11.806.837.000
	2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	13.475.455.000	621.500.000	14.096.955.000
	2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	10.228.030.000		10.228.030.000
	2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	5.294.362.000		5.294.362.000
	2361 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	14.123.592.000	1.046.546.000	15.170.138.000
	5279 Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	2.672.090.000	28.189.000	2.700.279.000
Ditjen PKRL		118.004.700.000	82.001.122.000	200.005.822.000
	2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.214.574.000		3.214.574.000
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	1.553.525.000		1.553.525.000
	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	725.076.000		725.076.000

Unit	Kegiatan	Blokir Belanja Barang	Blokir Belanja Modal	Total Blokir
	2366 Perencanaan Ruang Laut	106.895.617.000	82.000.000.000	188.895.617.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	4.023.509.000	1.122.000	4.024.631.000
	4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.592.399.000		1.592.399.000
BPPSDMKP		42.953.218.000	7.152.675.000	50.105.893.000
	2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	28.129.671.000		28.129.671.000
	2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan	383.967.000	5.152.675.000	5.536.642.000
	2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.421.401.000	2.000.000.000	15.421.401.000
	4345 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP	18.179.000		18.179.000
	6706 Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000		1.000.000.000
BPPMHKP		11.099.956.000		11.099.956.000
	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	307.034.000		307.034.000
	3989 Pengendalian Mutu	2.172.312.000		2.172.312.000
	7010 Manajemen Mutu	8.620.610.000		8.620.610.000
Jumlah		422.338.906.000	347.971.409.000	770.310.315.000

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki nilai Estimasi PNBP sebesar Rp4.479.533.695.000,00. Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.208.325.020.038,00 dari atau 49,30% dari estimasi PNBP yang telah ditetapkan. Rincian realisasi PNBP menurut

jenis pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel B.7
Rincian Realisasi PNBP Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Nama Akun	Estimasi	Realisasi	%
PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	3.500.000.000.000	951.819.466.723	27,19
Pendapatan Kelautan dan Perikanan	3.500.000.000.000	951.819.466.723	27,19
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	100.206.621.000	182.656.387.734	182,28
Pendapatan Jasa Layanan Umum	49.894.761.000	55.032.771.602	110,30
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	71.009.136.247	100,00
Pendapatan BLU Lainnya	50.311.860.000	56.614.479.885	112,53
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	879.327.074.000	1.073.849.165.581	122,12
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	48.945.213.000	64.754.057.946	132,30
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	744.091.535.000	868.465.662.961	116,71
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	2.167.412.000	38.700.000	1,79
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.992.080.000	4.964.310.500	99,44
Pendapatan Jasa Lainnya	72.131.570.000	99.644.150.219	138,14
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	175.159.746	100,00
Pendapatan Denda	6.999.264.000	25.095.541.265	358,55
Pendapatan Lain-Lain	0	10.711.582.944	100,00
Total	4.479.533.695.000	2.208.325.020.038	49,30

Rincian estimasi dan realisasi PNBP pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.8
Rincian Realisasi PNBP Per Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
Setjen	43.011.358.000	63.033.811.786	146,55
Itjen	0	23.878.250	100,00
Ditjen PT	3.569.732.159.000	1.053.010.386.957	29,50
Ditjen PB	52.426.593.000	117.016.527.359	223,20

Unit Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
Ditjen PSDKP	6.999.264.000	23.459.756.799	335,17
Ditjen PDSPKP	7.625.123.000	9.354.525.348	122,68
Ditjen PKRL	708.313.391.000	843.308.374.261	119,06
BPPSDMKP	35.544.860.000	51.789.809.578	145,70
BPPMHKP	55.880.947.000	47.327.949.700	84,69
Total	4.479.533.695.000	2.208.325.020.038	49,30

Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Berjalan terhadap Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Tahun Lalu (Year on Year)

Rincian perbandingan realisasi PNBPN per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.9
Rincian Realisasi PNBPN Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun	%
PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	951.819.466.723	636.893.353.269	314.926.113.454,00	49,45
Pendapatan Perikanan	951.819.466.723	636.893.353.269	314.926.113.454,00	49,45
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	182.656.387.734	88.722.308.538	93.934.079.196,00	105,87
Pendapatan Jasa Layanan Umum	55.032.771.602	35.459.613.443	19.573.158.159,00	55,20
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	71.009.136.247	1.512.940.434	69.496.195.813,00	100,00
Pendapatan BLU Lainnya	56.614.479.885	51.749.754.661	4.864.725.224,00	9,40
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	1.073.849.165.581	973.536.842.807	100.312.322.774,00	10,30
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	64.754.057.946	78.837.869.789	(14.083.811.843,00)	(17,87)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	868.465.662.961	755.318.422.355	113.147.240.606,00	14,98
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	38.700.000	1.632.470.000	(1.593.770.000,00)	(97,63)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi	4.964.310.500	5.206.243.030	(241.932.530,00)	(4,65)
Pendapatan Jasa Lainnya	99.644.150.219	90.660.796.504	8.983.353.715,00	9,91

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik/Turun	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Dan Pengelolaan Keuangan	175.159.746	299.192.691	(124.032.945,00)	(41,46)
Pendapatan Denda	25.095.541.265	29.848.322.009	(4.752.780.744,00)	(15,92)
Pendapatan Lain-Lain	10.711.582.944	11.733.526.429	(1.021.943.485,00)	(8,71)
Total	2.208.325.020.038	1.699.152.504.614	509.172.515.424,00	29,97

B.1.1.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh dari Pendapatan Perikanan.

Pendapatan Perikanan

Pendapatan Perikanan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp951.819.466.723,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 atau 27,19%. Realisasi Pendapatan Perikanan tanggal 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp636.893.353.269,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Perikanan per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.10
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Perikanan Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	58.359	41.585	71,26	56.027	45.971	82,05	(4.386)	(9,54)
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	64,53	153,87	100,00	0	93	100,00	61	65,49
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	3.441.576	910.081	26,44	3.443.973	590.829	17,16	319.252	54,03
Total	3.500.000	951.819	27,19	3.500.000	636.893	18,20	314.927	49,45

Pendapatan SDA Perikanan merupakan pendapatan pada Unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap. Terdapat kenaikan sebesar Rp314.926.113.454,00 atau 49,45% jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan pada tahun 2023 merupakan tahun transisi pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi, sehingga kapal penangkap ikan baru mulai beralih dari sistem praproduksi ke pascaproduksi yang menyebabkan adanya jeda penerimaan karena sebelumnya pungutan dilakukan di awal perizinan beralih ke pungutan yang dilakukan saat pendaratan produksi ikan, sementara itu pada tahun 2024 kapal penangkap ikan sudah seluruhnya memiliki izin dengan sistem pascaproduksi.

Pendapatan Perikanan hanya dihasilkan dari Ditjen Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Pendapatan pungutan pengusaha perikanan bidang perikanan tangkap sebesar Rp41.585.077.902,00 antara lain:
 - a. Pungutan pengusaha perikanan reguler sebesar Rp19.445.210.000,00;
 - b. Pungutan pengusaha perikanan kapal angkut sebesar Rp22.075.224.500,00;
 - c. Surat izin pemasangan rumpon sebesar Rp14.000.000,00;
 - d. Pungutan hasil perikanan sebesar Rp59.890.893,00;

Terdapat penurunan Pendapatan Pungutan Pengusaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap yang disebabkan penurunan permohonan PPP tangkap oleh pelaku usaha yaitu pada tahun 2023 sejumlah 5.471 sedangkan tahun 2024 sejumlah 3.643.

2. Pendapatan pungutan pengusaha perikanan bidang pembudidayaan ikan sebesar Rp153.870.000,00, antara lain:
 - a. Pungutan pengusaha perikanan reguler sebesar Rp38.850.000,00;

- b. Pungutan perusahaan perikanan kapal angkut Rp115.020.000,00.

Terdapat kenaikan pendapatan pungutan perusahaan perikanan bidang pembudidaya ikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang disebabkan kenaikan jumlah kepemilikan kapal dari kapal sebelumnya berizin daerah bermigrasi ke izin pusat total migrasi perizinan sampai tahun 2024 sebanyak 64 kapal.

- 3. Pendapatan pungutan hasil perikanan sebesar Rp910.080.518.821,00 antara lain:
 - a. Pungutan hasil perikanan sebesar Rp19.583.689,00;
 - b. Pungutan hasil perikanan pasca sebesar Rp910.051.687.640,00.

Pendapatan pungutan hasil perikanan mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang ditunjukkan dengan peningkatan pencatatan kedatangan kapal sebesar 205% (yoy) dari rata rata 3.593 pelaporan kedatangan per bulan di tahun 2023 menjadi 7.377 pelaporan kedatangan per bulan di tahun 2024. Selanjutnya dari sisi pencatatan produksi juga dilaporkan terjadi peningkatan sebesar 210% dari 555 ribu ton di tahun 2023 menjadi 1,167 juta ton di tahun 2024.

Terdapat temuan atas pemeriksaan BPK RI yaitu penetapan target PNPB Sumber Daya Alam tahun 2024 sebesar Rp3.500.000.000.000,00 tidak realistis. Penetapan target PNPB SDA terkait PHP pascaproduksi dihitung dengan asumsi bahwa pemungutannya akan dilakukan dengan sistem pascaproduksi dan sistem kontrak yang tidak didukung kertas kerja yang memadai karena terdapat beberapa kelemahan.

Dalam rangka perbaikan penyusunan target tahun 2025, KKP telah berupaya mengusulkan target yang lebih realistis kepada Kementerian Keuangan dengan menyampaikan usulan target PNPB SDA perikanan sebesar Rp1,2 triliun melalui Surat Sekretaris

Jenderal KKP kepada Direktur Jenderal Anggaran B.44/SJ/KU.340/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Usulan Target dan Pagu Penggunaan PNBK Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2025. Berdasarkan hasil penelaahan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024 disepakati bahwa target PNBK SDA Perikanan tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan kelemahan bahwa pemungutan PNBK pascaproduksi pada tiga Pelabuhan Perikanan belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2024. Tiga Pelabuhan Perikanan dimaksud adalah PP Muara Angke, PPS Cilacap, dan, PPS Nizam Zachman Jakarta. Hasil pemeriksaan atas pemungutan PNBK pascaproduksi pada tiga pelabuhan perikanan diketahui permasalahan dari indentifikasi data berdasarkan laporan kedatangan kapal sesuai STBLKK dan LPS yang dilaporkan lebih kecil dari data PIPP sehingga terjadi kurang penetapan PNBK.

Atas hasil temuan tersebut, PP Muara Angke telah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk membuat LPS sesuai nilai temuan dan melunasi PNBK tersebut. PPS Cilacap menindaklanjuti temuan tersebut dengan meminta klarifikasi kepada pelaku usaha dan meminta pelaku usaha membuat LPS sesuai nilai temuan dan dilanjutkan dengan pembayaran. PPS Nizam Zachman Jakarta telah melakukan pengecekan terhadap kertas kerja kapal Yordan dan hasil pengecekan menyatakan bahwa tidak ada selisih antara data PIPP tanggal STBLKK 14 Agustus 2024 dengan LPS kode billing 820240819542262 tanggal 19 Agustus 2024. Kedua dokumen tersebut menyatakan nilai yang sama yaitu Rp59.267.000,00.

B.1.1.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan Pendapatan BLU Lainnya.

Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan jasa layanan umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp55.032.771.602,00 dan sebesar Rp35.459.613.443,00. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan jasa layanan umum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.11
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	30.000	32.376	107,92	42.595	22.020	51,70	10.356	47,03
DJPB	991	1.362	137,44	4.568	2.249	0,00	(887)	100,00
BPPSDMKP	18.903	21.294	112,65	10.052	11.191	111,33	10.103	90,28
Total	49.894	55.032	110,30	57.215	35.460	61,98	19.572	55,19

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp55.032.771.602,00 atau sebesar 110,30% dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp49.894.761.000,00. Capaian melebihi realisasi ini didukung dari seluruh Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU di masing-masing Unit Eselon I melebihi target.

Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, mengalami kenaikan sebesar Rp 19.573.158.159,00 atau 55,19%.

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Layanan Umum pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

- a. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134) merupakan imbalan atas jasa layanan dana bergulir dari BLU LPMUKP yang disalurkan secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah kelautan dan perikanan, dengan tarif tetap (flat rate) sebesar 3% dan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman atau Pembiayaan (SP3) dan Akta Perjanjian Kredit. Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral merupakan pendapatan bunga atau jasa layanan.

Realisasi Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral tahun 2024 sebesar Rp24.808.612.183,00 yaitu 108,10% dari estimasi sebesar Rp22.950.000.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 45,83% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp17.012.415.260,00. Capaian realisasi 2024 yang melebihi target dan kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 disebabkan bertambahnya debitur baru.

- b. Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya (424139) merupakan pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya berupa biaya provisi.

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya tahun 2024 sebesar Rp7.567.718.183,00 atau 107,34% dari estimasi pendapatan sebesar Rp7.050.000.000,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 51,13% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.077.422.226,00. Meningkatnya pendapatan ini disebabkan adanya peningkatan pencairan dana bergulir kepada debitur pada tahun 2024.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Pendapatan Jasa Layanan Umum pada Ditjen Perikanan Budi Daya berasal dari pendapatan magang/PKL/magang mahasiswa, dosen, bimbingan teknis perikanan budidaya, pelayanan pengujian sampel laboratorium.

Merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi diantaranya berupa pembayaran magang/PKL/penelitian mahasiswa, pembayaran magang guru/dosen, dan pelatihan Bimtek perikanan budidaya sebesar Rp344.968.750,00. Pendapatan ini terdapat pada Satker BBPBAP Jepara sebesar Rp142.265.000,00 dan BPBAP Situbondo sebesar Rp202.703.750,00;
 - b. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya berupa pengujian laboratorium pada BBPBAP Jepara sebesar Rp295.263.000,00, BPBAP Situbondo sebesar Rp701.167.500,00, dan BLUPPB Karawang sebesar Rp20.729.000,00.
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari:

- a. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal

Antara lain merupakan pendapatan atas layanan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pendapatan atas layanan non pendidikan diantaranya berupa *Basic Safety Training* (BST), diklat *Basic Safety Training Fisheries* (BSTF), diklat Revalidasi BST, Diklat Upgrading SKK Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan (AN/ATKAPIN) III, Ujian Upgrading SKK AN/ATKAPIN sebesar Rp12.018.254.350,00 serta pendapatan penyediaan paket catering dan penjualan produk pengolahan yaitu produk yang dihasilkan dari *workshop* pengolahan ikan berupa produk olahan seperti otak-otak ikan, bakso ikan, nugget ikan, kaki naga sebesar Rp1.627.147.230,00. Produk yang dijual tersebut bukan hasil dari kegiatan pelatihan, namun produk yang memang dihasilkan dari kegiatan unit *workshop* pengolahan ikan.

b. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo

Antara lain merupakan yang berasal dari pendapatan atas:

1. penerimaan uang pendidikan dan penerimaan taruna baru sebesar Rp3.242.190.548,00;
2. pendapatan layanan dukungan akademik berupa biaya makan taruna, layanan dukungan akademis berupa makan taruna, perlengkapan seragam dan jaminan kesehatan sebesar Rp3.603.903.500,00;
3. hasil produksi budidaya diantaranya udang vaname, ikan patin, ikan bawal, dan ikan bandeng sebesar Rp475.698.000,00;
4. produk hasil pengolahan ikan diantaranya nugget ikan, rolade, otak-otak ikan, bandeng sebesar Rp140.416.410,00;
5. pendapatan jasa proses ikan/udang senilai 126.387.948,00; dan
6. pendapatan paket kunjungan edukatif (kegiatan outdoor learning untuk siswa TK/SD/SMP senilai Rp35.050.000,00.

Capaian Realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum Poltek KP Sidoarjo tahun 2024 melebihi target disebabkan kenaikan jumlah taruna yang menyebabkan penambahan pendapatan jasa pelayanan pendidikan di Poltek KP Sidoarjo.

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp71.009.136.247,00 dan sebesar Rp1.512.940.434,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.12
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			30 Desember 2023			Komparasi	
							Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
DJPB	0	66.073	100,00	0	0	0,00	66.073	100,00
BPPSDMKP	0	4.936	100,00	0	1.513	100,00	3.423	100,00
Total	0	71.009	100,00	0	1.513	100,00	69.496	4.593,45

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.422.922.813,00 atau 4.593,45% dari realisasi tahun lalu. Kenaikan realisasi pendapatan hasil kerja sama BLU disebabkan adanya pendapatan atas penyaluran keluar benih bening lobster di BPBAP Situbondo dan adanya beberapa pendapatan kerja sama di BPPP Tegal pada tahun 2024. Pendapatan ini diantaranya:

1. BPBAP Situbondo sebesar Rp66.073.273.000,00 berupa Pembayaran Kompensasi Prestasi Kerja Sama Benih Bening Lobster (BBL) oleh pihak ketiga melalui skema *Joint Venture* (JV);
2. BPPP Tegal sebesar Rp3.158.141.311,00 berupa Pendapatan dari kerjasama antara BPPP Tegal dengan *The Food and Agriculture Organization of The United Nations* (FAO) senilai Rp2.072.409.224,00 untuk kegiatan penyusunan modul pelatihan diversifikasi olahan sidat hasil budidaya, pendapatan kerja sama dari sewa kapal oleh PT Citra Mutiara Abadi senilai Rp962.570.880,00, pendapatan dari kerjasama antara BPPP Tegal dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) senilai Rp659.734.922,00 untuk kegiatan proyek percontohan untuk peningkatan operasional efisiensi perikanan Saumlaki. Dimana proyek percontohan tersebut bertujuan untuk

mempromosikan pembangunan perikanan berkelanjutan di pulau-pulau terluar Indonesia.

3. Poltek KP Sidoarjo sebesar Rp269.827.000,00 diantaranya berasal dari kerja sama dengan UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) terkait penyusunan kurikulum seluruh satuan pendidikan KKP sebesar Rp100.000.000,00 dan kerja sama dengan PT. TOPPAS terkait penyediaan perlengkapan untuk taruna baru senilai Rp169.827.000,00.

Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp56.614.479.885,00 dan sebesar Rp51.749.754.661,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Realisasi	
							Naik (Turun)	%
Setjen	11.739	28.433	242,21	18.349	39.208	213,68	(10.775)	(27,48)
DJPB	36.294	24.938	68,71	3.233	11.381	352,03	13.557	119,12
BPPSDMKP	2.279	3.244	142,34	1480,494	1.161	78,42	2.083	179,41
Total	50.312	56.615	112,53	23.062	51.750	224,39	4.865	9,40

Realisasi Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.864.725.224,00 atau 9,40% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang secara umum disebabkan adanya kenaikan pada Pendapatan Lain-lain BLU diantaranya sewa tanah, gedung, dan hasil produksi pakan mandiri.

Penjelasan atas Pendapatan BLU Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Antara lain dari pengelolaan dan penempatan dana LPMUKP di bank sebesar Rp28.396.464.098,00 dan penerimaan kembali belanja TAYL sebesar Rp35.235.000,00;

Terdapat penurunan pendapatan BLU Lainnya di Sekretariat Jenderal disebabkan berkurangnya pendapatan jasa perbankan yang berasal penempatan deposito dan giro. Pendapatan ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 karena berkurangnya penempatan dana *idle* di tahun 2024 yang disebabkan meningkatnya jumlah pencairan dana bergulir ke debitur.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yaitu pendapatan penjualan komoditas diantaranya berupa udang vaname, kerapu, ikan bandeng konsumsi, ikan nila konsumsi, dan pakan mandiri sebesar Rp23.702.244.699,00, sewa gedung berupa asrama dan aula sebesar Rp491.473.383,00 sewa tanah sebesar Rp179.474.390,00, dan jasa layanan perbankan yang merupakan bunga dari rekening sebesar Rp564.679.971,00.

Terdapat peningkatan pendapatan BLU Lainnya di Ditjen Perikanan Budi Daya disebabkan peningkatan penjualan komoditas dan pakan mandiri di tiga Satker BLU lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan dari BLU yang terdiri dari sewa sebesar Rp2.358.590.369,00, pendapatan Jasa Layanan Perbankan sebesar Rp221.028.675,00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp664.414.300,00.

Terdapat peningkatan pendapatan BLU Lainnya di BPPSDMKP bersumber dari pendapatan sewa dan pendapatan lain-lain. Pendapatan sewa diantaranya berupa sewa asrama Bahari Residence, Hotel Aquarium Indonesia, sewa auditorium, sewa TEFA VAP. Pendapatan lain-lain BLU diantaranya berupa pelayanan Surat Keterangan Sehat, penjualan tiket pemancingan dan kegiatan *outbond*.

Terdapat temuan atas pemeriksaan BPK RI yaitu pada BLU BLUPPB Karawang terdapat pendapatan dan belanja BLU tidak dicatat dan tidak melalui mekanisme SP2B oleh KPPN. BLU BLUPPB Karawang tidak melaporkan penerimaan pada SP3B yang akan diajukan ke KPPN Karawang untuk diterbitkan SP2B-nya sebagai bukti pengesahan penerimaan. BLU BLUPPB Karawang langsung menggunakan dana pada rekening tersebut untuk belanja retribusi ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kebumen, belanja operasional pembelian pakan, dan belanja ongkos panen Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen senilai Rp1.825.262.605,00.

B.1.1.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri atas Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-Lain.

Perbandingan rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.14
Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	48.945	64.754	132,30	46.399	78.838	169,91	(14.084)	(17,86)
Pendapatan Administrasi, Penegakan Hukum, dan Hubungan Internasional	744.092	868.466	116,71	369.328	755.318	204,51	113.148	14,98
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	2.167	39	1,80	1.575	1.632	103,62	(1.593)	(97,61)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	4.992	4.964	99,44	4.617	5.206	112,76	(242)	(4,65)
Pendapatan Jasa Lainnya	72.132	99.644	138,14	76.865	90.661	117,95	8.983	9,91
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	175	100,00	0	299	100,00	(124)	(41,47)
Pendapatan Denda	6.999	25.096	358,57	9.336	29.848	319,71	(4.752)	(15,92)
Pendapatan Lain-lain	0	10.712	100,00	0	11.734	100,00	(1.022)	(8,71)
TOTAL	879.327	1.073.850	122,12	508.120	973.536	191,60	100.314	10,30

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp64.754.057.946,00 dan sebesar Rp78.837.869.789,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk

periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.15
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan,
Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	18.939	21.042	111,10	18.577	21.768	117,18	(726)	(3,34)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	722	613	84,90	309	629	203,34	(16)	(2,54)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	101	100,00	0	49	100	52	106,12
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	100	6.862	6862,00	0	14.358	100	(7.496)	(52,21)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	163	100,00	0	608	100	(445)	(73,19)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.745	7.789	164,15	3.686	5.708	154,86	2.081	36,46
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	711	1.783	250,77	753	843	111,92	940	111,51
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	2.381	1.190	49,98	2.215	2.215	100	(1.025)	(46,28)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12	100,00	0	0	100	12	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	21.347	25.198	118,04	20.859	32.660	156,57	(7.462)	(22,85)
TOTAL	48.945	64.753	132,30	46.399	78.838	169,91	(14.085)	(17,87)

Tabel B.16
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan,
Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	1.239	1.629	131,48	62	891	1.437,10	738	82,83
Itjen	0	0	100,00	0	323	100,00	(323)	(100,00)
Ditjen PT	12.586	19.203	152,57	12.031	20.665	171,76	(1.462)	(7,07)
Ditjen PB	12.853	16.943	131,82	13.170	19.338	146,83	(2.395)	(12,38)
Ditjen PSDKP	0	371	100,00	0	2.556	100,00	(2.185)	(85,49)
Ditjen PDSPKP	7.397	8.627	116,63	8.401	13.869	165,09	(5.242)	(37,80)
Ditjen PKRL	2.381	1.663	69,84	2.215	3.599	162,48	(1.936)	(53,79)
BPPSDMKP	9.361	14.380	153,62	7.855	11.426	145,46	2.954	25,85
BPPMHKP	3.128	1.937	61,92	2.665	6.171	231,56	(4.234)	(68,61)
Total	48.945	64.753	132,30	46.399	78.838	169,91	(14.085)	(17,87)

Realisasi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.083.811.843,00 atau 17,86% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disebabkan antara lain:

1. Terdapat penurunan Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin di Ditjen PDSPKP yang disebabkan adanya penjualan Kapal Pengangkut Ikan (MV Silver Sea 2) senilai Rp5.412.850.000 di tahun 2023;
2. Terdapat penurunan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi di BPPMHKP yaitu pada Satker Balai KIPM Surabaya II yang disebabkan oleh perpindahan fungsi Karantina ke Badan Karantina Indonesia;
3. Terdapat penurunan Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin di Ditjen PSDKP disebabkan pada tahun 2023 terdapat penjualan dengan nilai signifikan berupa penjualan dalam bentuk *scrap* satu

unit bekas Kapal Pengawas Perikanan FV STS 50 dengan Gross Tonnage (GT) 379 Ton sebesar Rp1.779.346.000,00.

4. Terdapat penurunan Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan karena terdapat permohonan keringanan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun 2024 dan 2025 terhadap KSP di pulau Nipa, maka pembayaran dilakukan setengah dari yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2024 ini yaitu Rp1.190.351.664,00. Hal ini sesuai dengan surat persetujuan keringanan pembayaran dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 Hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Penjelasan atas pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran badan usaha pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan di Satker BPISDKP sebesar Rp5.668.000,00 berupa penjualan lelang bongkaran gedung pos jaga, rumah negara, dan mes BPISDKP;
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp122.339.951,00 dan satker BPISDKP sebesar Rp52.460.764,00 berupa penjualan lelang peralatan dan mesin. Realisasi pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin melebihi target pendapatan sebesar Rp50.000.000,00 hal ini disebabkan realisasi pada satker BPISDKP tidak memiliki target, target pendapatan hanya bersumber dari Biro Umum, tetapi realisasi pendapatan tersebut berasal dari satker Biro Umum yang merupakan pendapatan atas hasil penjualan bongkaran gedung yang teridentifikasi target pendapatannya dan dari satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP (BPISDKP) yang

merupakan pendapatan penjualan rumah negara dan mess yang tidak teridentifikasi target pendapatannya pada saat pengusulan T-2; dan

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp1.441.170.452,00 antara lain berupa sewa gedung bangunan di kantor pusat dan sewa Wisma Gracillaria dan di Satker BPISDKP sebesar Rp7.732.675,00 berupa sewa rumah dinas PNS. Realisasi pendapatan sewa tanah, Gedung, dan bangunan melebihi target pendapatan sebesar Rp1.178.289.000,00 hal ini disebabkan terdapat peningkatan volume permintaan atas sewa Wisma Gracillaria yang dikelola oleh satker Biro Umum dan PBJ.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp3.265.158.834,00 yang berasal dari sewa rumah dinas dan sewa asset yang berasal dari property investasi maupun asset lainnya yang nilainya meningkat secara signifikan karena adanya adanya perpindahan mengenai tarif dari PP 27 tahun 2019 ke PP Nomor 28 Tahun 2023. realisasi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan tidak memiliki target pendapatan tahun 2024, karena adanya kebijakan pada tahun berjalan terkait aset yang tergolong properti investasi seperti lahan di kawasan pelabuhan perikanan menggunakan dasar pemungutan PNBPN pengelolaan BMN (PP No 28 tahun 2023), pada saat pengusulan target pendapatan, lahan di kawasan menggunakan dasar pemungutan PNBPN pelayanan (PP No 85 tahun 2021);
- Penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp2.145.402.944,00 yang berasal dari satker BBPI berupa lelang atas 1 buah mobil jeep, 5 buah mobil mini bus dan 5 buah sepeda motor kapal visual mini dan printer, PPN Brondong berupa lelang atas 1

paket peralatan mesin kondisi rusak berat dan lelang Steam Pressure Gauge, PPN Karangantu berupa lelang atas 1 peralatan mesin, PPN Pemangkat berupa lelang atas 3 buah kendaraan bermotor, PPN Tual berupa lelang atas 2 kendaraan roda empat, PPS Belawan berupa lelang atas 1 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat, 3 kendaraan bermotor dan 2 paket scrap/limbah padat/besi tua, PPS Cilacap berupa lelang atas 7 kendaraan bermotor, PPS Nizam Zachman berupa lelang atas scrap forklift 73 unit meja kerja, lemari besi/metal dan lemari kayu kondisi rusak berat, 1 paket BMN berupa 50 unit peralatan mesin berupa meja besi, dan Sekretariat DJPT berupa lelang atas 3 kendaraan roda empat, 1 kendaraan mini bus, dan 3 unit sepeda motor;

- Pendapatan penjualan tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp16.719.000,00 pada satker PPN Pekalongan yang berasal dari lelang Gedung TPI Higienis;
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp 50.081.824,00 yang berasal dari satker Pada PPN Brondong berupa lelang atas 1 paket peralatan mesin rusak berat, PPN Pelabuhanratu berupa lelang atas 1 paket inventaris kantor dan mesin bekas perkantoran, Pada PPP Teluk Batang berupa lelang atas bongkaran tempat ibadah, PPS Nizam Zachman berupa lelang atas Paket Bongkaran terdiri dari ACP; Spandek Atap; WF 300.150,6,5,9; CNP; dan Wins Besi 32mm dengan berat keseluruhan 7.600 kg; dan
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi sebesar Rp13.725.887.605,00 yang berasal 23 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis yang jika dibandingkan dengan TA 2023 mengalami penurunan yang disebabkan oleh telah habisnya masa kontrak penggunaan tanah dan bangunan sehingga menimbulkan pendapatan atas kontrak penggunaan sarana dan prasarana yang baru.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp13.412.266.129,00 berupa penjualan benih ikan dan indukan terdapat pada 14 satker UPT. Realisasi pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp46.389.038.000,00. Hal ini disebabkan 3 (tiga) satker lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang menghasilkan pendapatan penjualan hasil kegiatan budidaya terbesar beralih menjadi satker BLU sehingga pendapatan PNBPN beralih menjadi pendapatan BLU;
- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp38.477.800,00 yang terdapat pada BPBL Batam;
- Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp2.014.396.347,00 terdapat pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam berupa Lelang 1 (satu) unit Kijang Standart KF 80 Merk Toyota, Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan Karangasem berupa peralatan dan mesin, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupa Lelang *Backhoe Loader* merk Sumitomo, *Crawler Excavator + Attachment* merk Komatsu, *Station Wagon* Merk Isuzu Panther, *Station Wagon* Merk Ford Ranger, *Station Wagon* Merk Toyota Innova, *Micro Bus* (Penumpang 15 S/D 29 Orang) Merk Mitsubhisi, Mobil Unit Monitoring Frekwensi Merk Suzuki APV, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berupa Lelang 1 (satu) Paket alsin, Balai Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Serang berupa Pendapatan penjualan BMN berupa Peralatan dan Mesin, dan Setditjen Perikanan Budi Daya berupa Peralatan dan Mesin;
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp27.918.000,00 terdapat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

Prov. Sulawesi Barat, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung berupa Lelang 1 unit mobil merk Toyota Kijang Grand Long dan 2 kendaraan roda tiga merk Viar, dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee Berupa Lelang 1 unit gedung pos jaga permanen;

- Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp743.111.147,00 berupa sewa rumah dinas dan dipotong melalui gaji pns terdapat di 14 satker UPT kecuali LP2IL Serang; dan
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi sebesar Rp707.176.924,00 berupa sewa guest house dan sewa ruang pertemuan terdapat pada 15 satker UPT.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp287.228.905,00 yang merupakan dari hasil lelang KPKNL pada satker Stasiun PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Lampulo, Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Ambon, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Biak, Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Papua, Pangkalan PSDKP Batam, Stasiun PSDKP Tarakan, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Pontianak, Pangkalan PSDKP Tual, Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Realisasi pendapatan penjualan peralatan dan mesin tidak memiliki target pendapatan tahun 2024. Hal ini disebabkan tidak teridentifikasi penerimaan pada saat pengusulan target (T-2);
- Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp58.307.816,00 yang berasal dari satker Stasiun PSDKP Kupang berupa sewa rumah yang dibayarkan perbulan melalui potongan SPM pembayaran Gaji pegawai yang bersangkutan

dengan Pengenaan sewa berdasarkan Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor KEP.016/kpapsdkpsta.3/I/2024 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang, Stasiun PSDKP Biak berupa sewa rumah yang dibayarkan perbulan melalui potongan SPM pembayaran Gaji pegawai yang bersangkutan pada Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2024, dan Pangkalan PSDKP Batam berupa sewa rumah yang dibayarkan perbulan melalui potongan SPM pembayaran Gaji pegawai;

- Pendapatan atas penjualan tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp20.933.146,00 yang berasal dari satker Pangkalan PSDKP Lampulo berupa penghapusan aset bongkaran bangunan Gedung kantor dan 1 paket BMN bangunan Gedung kantor permanen dan bak penyimpanan/tower air baku, untuk dibongkar; dan
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp4.468.987,00 yang berasal dari satker Stasiun PSDKP Belawan atas penghapusan aset berupa 1 (satu) paket bongkaran bangunan kantor dan satu paket BMN berupa bongkaran tiga unit taman dan Pangkalan PSDKP Jakarta berupa 1 unit BMN satu paket peralatan dan mesin yaitu instalasi komunikasi elektronik dalam kondisi limbah padat (*scrap*).

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp6.930.501.171,00 yang berasal dari Satker Setditjen PDSPKP senilai Rp1.230.745.965 berupa sewa akuarium dan peralatan pendukungnya Raiser Ikan Cibinong dan Kendaraan Berpendingin dan Satker BBP3KP senilai Rp5.699.755.205 berupa Tarif PP 85 atas penggunaan Coldstorage 1.000 Ton dan

Coldstorage 2.000 Ton Muara Baru. Realisasi pendapatan sarana dan prasarana sesuai tusi melebihi target pendapatan sebesar Rp3.983.081.000,00 hal ini disebabkan peningkatan volume layanan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi seperti pelayanan penggunaan peralatan dan mesin berupa *cold storage*, *plugging container*, layanan penggunaan transportasi berupa kendaraan berefrigasi/berpendingin, dan layanan penggunaan peralatan pengolahan;

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp48.619.000,00 yang berasal dari satker BBP3KP senilai Rp40.793.000 berupa pendapatan atas lelang alat Pengolahan hasil Prikanan dan alat lab dan senilai Rp.7.826.000 berupa Lelang Non Eksekusi BMN;
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp910.157.224,00 berasal dari Setditjen PDSPKP senilai Rp381.616.188 berupa Sewa Cold Storage 2000 Ton & Sarana Pendukungnya dan senilai Rp528.541.036 berupa Sewa Lapak Basah PIM Muara Baru, yang terdiri atas sewa dari banyak kios;
- Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp642.981.248,00 berasal dari Setditjen PDSPKP senilai Rp562.839.534 yang terdiri dari Rp193.186.000 berupa forklift 3 unit dari Direktorat Logistik, Nissan extrail nopol B.1451 PQR Dit. UI, penjualan Xtrail nopol B 1427 DQ, senilai Rp12.793.000 yang terdiri dari lelang non eksekusi BMN, senilai Rp169.718.000 yang terdiri dari penjualan 3 unit kendaraan pada Direktorat Logistik, senilai Rp91.963.312 berupa penjualan *Quadrupole Spectrometer/LC MS/MS*, *Waters*, *Quatroo Premier XE* di Kabupaten Bogor, *Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)* (Alat Laboratorium Pertanian), *Brand: Analytic Jena*; Model: Zenit 700 di Kabupaten Bogor; Diskanlut Provinsi DKI Jakarta senilai Rp6.000.000 berupa 6 unit peralatan dan mesin dalam kondisi

scrap (terdiri dari *refrigerated centrifuge, distillation equipment, kjedahi nitrogen digestion*, dll) serta 1 unit bangunan untuk dibongkar, kondisi rusak berat apa adanya; Diskanlut Provinsi Papua senilai Rp1.621.571 berupa HBL Lelang Non Eksekusi Wajib BMN; Diskanlut Provinsi Jambi senilai Rp258.775 berupa Hasil Bersih Lelang (peralatan laboratorium); BBP3KP senilai Rp72.267.420 berupa Penjualan mobil Inova Balai No B 2463 SQ; dan

- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 95.010.609,00 berasal dari satker Setditjen PDSPKP senilai Rp33.869.000 berupa sewa 1 unit Kendaraan Roda 4 Berpendingin, Nomor Polisi B 9597 PQV oleh PERINDO Jakarta untuk pemakaian 1 (satu) Tahun, senilai Rp61.141.609 berupa sewa Pembayaran PNPB atas penggunaan unit Kendaraan Bermotor Truk Roda 6 oleh PT. Perikanan Indonesia.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp427.360.838,00 yang terdapat pada satker BPSPL Padang senilai Rp187.832.107,00 dan BPSPL Makassar senilai Rp14.656.181,00, dan Satker Sekretariat PKRL sebesar Rp209.660.360,00,
- Pendapatan dari KSP tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp1.190.351.664,00 merupakan KSP di P. Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada aset tanah yang dimiliki satker Setditjen PKRL telah disetor sebesar Rp1.190.351.664,00 pada bulan April 2024 dari estimasi pembayaran tahun ini Rp2.380.703.327,62. Nilai tersebut merupakan setoran kesebelas dari KSP P. Nipa yang dimulai pada tahun 2014. Realisasi pendapatan dari KSP tanah, gedung dan bangunan tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp2.380.704.000,- hal ini disebabkan adanya permohonan keringanan

pembayaran kontribusi tetap kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa yang disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan No S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024 hal Keringanan Pembayaran Kontribusi Tetap Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan besaran keringanan pembayaran kontribusi tetap karena kondisi tertentu bencana non alam dengan faktor penyesuaian sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban pembayaran kontribusi tetap tahun 2024 dan 2025;

- Pendapatan atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi sebesar Rp1.250.000,00 berupa tiket masuk penggunaan Gallery BMKT; dan
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp43.839.911,00 terdapat pada tujuh satker UPT yaitu BPSPL Padang, BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong berupa pendapatan sewa rumah negara dengan jumlah dan tipe rumah negara yang berbeda-beda tiap satkernya.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya sebesar Rp7.629.372.052,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping Budidaya Udang, Kegiatan Pelatihan dan penjualan dari hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 27 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp6.637.516.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya melebihi target pendapatan sebesar Rp6.637.516.000,00 hal ini disebabkan peningkatan hasil penjualan praktek pelatihan TEFA pada balai – balai

pendidikan dan pelatihan lingkup BPPSDMKP berupa hasil praktik kegiatan Pendidikan dan pelatihan penangkapan ikan, budidaya ikan, dan pengolahan hasil perikanan;

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp613.430.700,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan hasil samping praktek TEFA yang terdapat pada 19 Satker dari estimasi pendapatan senilai Rp721.843.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya melebihi target pendapatan sebesar Rp721.843.000,00 hal ini disebabkan peningkatan hasil penjualan praktek pelatihan TEFA pada balai – balai pendidikan dan pelatihan lingkup BPPSDMKP berupa hasil praktik kegiatan Pendidikan dan pelatihan mekanisasi perikanan, dan produk biotik;
- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp19.678.490,00 merupakan hasil bersih lelang atau penghapusan BMN pada BBRPPBKP, BRPI, LRPT, dan BBRBLPP;
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp850.141.062,00 merupakan hasil bersih lelang atau penghapusan BMN pada 20 Satker;
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp32.110.182,00 merupakan pendapatan yang berasal dari LRBRL, Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan SUPM Pontianak berupa hasil lelang BMN Lainnya;
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp1.319.280.058,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Sewa Rumah dinas yang dipotong langsung dari SPM gaji Induk Januari sampai dengan Desember 2024, sewa pemanfaatan tanah peruntukan bangunan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan sewa lahan dari 32 Satker lingkup BPPSDMKP. Realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan

melebihi target pendapatan sebesar Rp678.733.000,00 hal ini disebabkan peningkatan volume permintaan sewa atas BMN di luar tugas dan fungsi pada satker-satker lingkup BPPSDMKP berupa rumah dinas dan tanah untuk kegiatan perbankan;

- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.687.944.503,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kapal Bawal Putih milik BPPP Ambon;
- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya sebesar Rp12.000.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa kapal latihan kegiatan pelatihan di SUPM Tegal; dan
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp2.216.262.450,00 merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Sewa Alat Selam, Sewa tambak Busmetik, Sewa Asrama, Sewa Ruang Rapat dan Kelas di 26 Satker lingkup BPPSDMKP.

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp1.617.000.000,00 merupakan pendapatan baru pada BPPMHKP sesuai dengan PP 85 Tahun 2021. Pendapatan ini berupa penggunaan lahan *container* dan *reach* staker di satker Balai KIPM Surabaya I (Puspa Agro) selama proses pengecekan klinis dilakukan. Realisasi pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp3.127.905.000,00 hal ini dikarenakan fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia, pelayanan kontainer disediakan untuk memberikan layanan pemeriksaan masa karantina ikan dan setelah masa karantina ikan/penitipan *container* sehingga ketika fungsi karantina ikan berpindah ke BKI maka realisasi mengalami penurunan;

- Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp298.980,00 merupakan pendapatan sewa rumah dinas pimpinan pada Stasiun KIPM Kendari; dan
- Pendapatan atas penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp319.560.554,00 merupakan hasil lelang Peralatan dan Mesin atas penghapusan BMN karena status aset rusak berat.

Terdapat temuan pemeriksa BPK RI terkait pendapatan sewa yaitu kekurangan penerimaan PNPB atas pengelolaan dan pemanfaatan PIM Muara Baru pada Ditjen PDSPKP senilai Rp1.087.686.161,00 dan pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran PNPB atas sewa PIM Muara Baru senilai Rp8.968.640,00.

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp868.465.662.961,00 dan sebesar Rp755.318.422.355,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.17

**Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Perizinan Lainnya	690.923	819.555	118,62	316.057	686.763	217,29	132.792	19,34
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	53.168	48.910	91,99	53.271	68.556	128,69	(19.646)	(28,66)
TOTAL	744.091	868.465	116,71	369.328	755.319	204,51	113.146	14,98

Tabel B.18

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

**Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
							Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	31	34	109,68	0	50	100,00	(16)	(32,00)
Ditjen PT	12	6	50,00	5	8	160,00	(2)	(25,00)
Ditjen PB	2.280	3.706	162,54	1.611	4.858	301,55	(1.152)	(23,71)
Ditjen PDSPKP	228	263	115,35	247	203	82,19	60	29,56
Ditjen PKRL	690.923	819.555	118,62	316.057	686.763	217,29	132.792	19,34
BPPSDMKP	31	67	216,13	721	139	19,28	(72)	(51,80)
BPPMHKP	50.586	44.834	88,63	50.688	63.298	124,88	(18.464)	(29,17)
Total	744.091	868.465	116,71	369.329	755.319	204,51	113.146	14,98

Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.147.240.606,00 atau 14,98% dari realisasi untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang secara umum disebabkan oleh peningkatan atas pendapatan perizinan lainnya berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPKRL) di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Penjelasan atas Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Perizinan Lainnya terdapat pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp819.555.281.761,00. Pendapatan Perizinan Lainnya berasal dari:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut berupa:
 - 1) Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya;
 - 2) Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN);
 - 3) Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Luar Negeri (SAJILN);

- 4) Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Dibatasi Pemanfaatannya, dan/atau Dilarang Ekspor dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - 5) Kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
 - 6) Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE);
 - 7) Pelaksanaan Reklamasi;
 - 8) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan;
 - 9) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km²;
 - 10) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berupa:
- 1) Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut;
 - 2) Pemanfaatan Ruang untuk Kabel Bawah Laut;
 - 3) Pemanfaatan Ruang untuk Pipa Bawah Laut.
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya terdapat pada
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp33.602.000,00 berada pada Satker BPISDKP berupa pengujian kualitas air laboratorium kualitas perairan BPISDKP. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya melebihi target pendapatan sebesar Rp31.025.000,00 disebabkan peningkatan volume permintaan pengujian laboratorium berupa pengujian kualitas air dan lingkungan pada satker BPISDKP;
 - b. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.000.000,00 terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari kerjasama alih teknologi hasil riset, 1% per kontrak Kerjasama. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp12.540.000,00 hal ini disebabkan

penurunan volume permintaan pengujian kerja sama alih teknologi hasil riset/pengembangan penangkapan pada satker BBPI;

- c. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.706.286.800,00 berupa pengujian sampel lab terdapat pada satker BPBAT Sungai Gelam, BBPBAT Sukabumi, BBPBL Lampung, BPIU2K, Karangasem, BPBAT Tatelu, BPBAP Situbondo, BPBAP Ujung Batee, BPBL Batam, BPBAT Mandiangin, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, BPBL Lombok dan BPKIL Serang. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya melebihi target pendapatan sebesar Rp2.785.902.000,00 hal ini disebabkan peningkatan permintaan volume layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium berupa:

- 1) pengujian kualitas air dan lingkungan,
- 2) pemeriksaan Kesehatan/penyakit ikan,
- 3) uji mutu hasil perikanan,
- 4) *bioassay*,
- 5) pengujian pakan alami, dan/atau
- 6) uji khusus sediaan biologik, farmasetik dan premiks.

Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp263.342.400,00 terdapat pada satker BBP3KP senilai berupa Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan - 2. Abiotik - cc. Uji Mineral dan Sedimen: - 2) Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)- Flame Nitros (Al, Ca dan Lain-Lain). Uji Arsen (As) berupa Pengujian Lab. Bobot Tuntas PT. Carvinna Trijaya Makmur, dan lain-lain. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya melebihi target pendapatan sebesar Rp228.075.000,00 hal ini disebabkan peningkatan volume layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium atas pemeriksaan:

- 1) Pengujian kualitas air dan lingkungan,
- 2) Uji mutu hasil perikanan, dan/atau

- 3) Bahan acuan, dan layanan teknis sertifikasi produk perikanan berupa:
- (a). Sertifikasi produk;
 - (b). Surat persetujuan penggunaan tanda SNI; dan/atau
 - (c). Surveilans sertifikasi produk.
- d. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp67.071.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari Hasil Laboratorium Pelayanan Pemeriksaan Analisis kualitas air tambak di BRPAPPP dan BRPSDI. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya melebihi target pendapatan sebesar Rp31.060.000,00 hal ini disebabkan peningkatan volume permintaan pemeriksaan layanan laboratorium berupa pengujian kualitas air dan lingkungan pada Balai – Balai di lingkup BPPSDMKP;
- e. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp44.834.079.000,00 merupakan pendapatan baru pada BPPMHKP sesuai dengan PP 85 Tahun 2021. Penerimaan ini berupa pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi Lainnya khusus untuk mutu pada BPPMHKP. Realisasi pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya tidak mencapai target pendapatan sebesar Rp51.144.207.000,00 hal ini disebabkan beralihnya fungsi karantina ikan ke Badan Karantina Ikan (BKI) sehingga pemeriksaan/pengujian laboratorium terkait fungsi karantina ikan (pemeriksaan klinis, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan/atau pemeriksaan hama) tidak bisa dilakukan, BPPMHKP melakukan layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium fungsi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp38.700.000,00 dan sebesar Rp1.632.470.000,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel B.19
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
BPPMHKP	2.167	39	1,80	1.575	1.632	103,62	(1.593)	(97,61)
Total	2.167	39	1,80	1.575	1.632	103,62	(1.593)	(97,61)

Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.593.770.000,00 atau 97,61% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perpindahan fungsi karantina ke Badan Karantina Indonesia yang juga mengakibatkan pendapatan di akun ini menjadi wewenang Badan Karantina Indonesia. Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan hanya terdapat pada BPPMHKP pada akun Pendapatan Jasa Karantina Perikanan yang antara lain merupakan pendapatan atas uji klinis, pengamatan dan pengasingan, pendapatan pengujian sertifikasi, serta kalibrasi.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.964.310.500,00 dan sebesar Rp5.206.243.030,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.20
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	557	4	0,72	416	315	75,72	(311)	(98,73)
Pendapatan Biaya Pendidikan	1.171	1.078	92,06	1.176	1.434	121,94	(356)	(24,83)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.232	3.865	119,59	3.002	3.427	114,16	438	12,78
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	3	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	1	100,00	0	0	0,00	1	100,00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	29	17	58,62	23	31	134,78	(14)	(45,16)
TOTAL	4.992	4.965	99,46	4.617	5.207	112,78	(242)	(4,65)

Tabel B.21
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	1	0	0,00	0	0	0,00	0	100,00
Ditjen PT	20	0	0,00	23	23	100,00	(23)	100,00
Ditjen PB	0	0	0,00	0	1	100,00	(1)	(100,00)
Ditjen PDS	0	0	0,00	0	3	100,00	(3)	100,00
BPPSDMKP	4.971	4.964	99,86	4.594	5.180	112,76	(216)	(4,17)
Total	4.992	4.964	99,44	4.617	5.207	112,78	(243)	(4,67)

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp241.932.530,00 atau 4,67% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada pendapatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pendapatan atas Layanan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sebesar Rp3.864.612.000,00. Selain pendapatan atas Layanan Pendidikan dan Pelatihan, terdapat pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp1.078.300.000,00, dan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek lainnya sebesar Rp17.000.000,00.

Realisasi Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi terdiri dari:

- a. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan senilai Rp3.800.000,00 berupa pendapatan dari ujian/seleksi masuk taruna Politeknik AUP;
- b. Pendapatan Biaya Pendidikan senilai Rp1.078.300.000,00 berupa pendapatan yang berasal dari Biaya SPP Politeknik dan SUPM di 12 Satker lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

- c. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan senilai Rp3.864.612.000,00 berupa pelatihan BST, BST-F, Revalidasi BST dan Upgrading SKK 60 Mil ke Ankapin/Atkapin III yang terdapat di 8 Satker lingkup BPPSDMKP.

Realisasi pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan melebihi target pendapatan sebesar Rp3.232.390.000,00 hal ini disebabkan peningkatan volume permintaan pelatihan sektor kelautan dan perikanan, diantaranya:

- 1) Pelayanan pelaksanaan ujian profesi Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN), Ahli Teknik Penangkapan Ikan (ATKAPIN), uji kompetensi, dan ujian *upgrading*;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - 3) Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
- d. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp598.500,00 berupa royalti vaksin ikan Satker BRPBATPP Bogor. Realisasi pendapatan royalti atas kekayaan intelektual tidak ditargetkan hal ini disebabkan pada saat usulan target PNPB 2024 (T-2 atau tahun 2022) sedang transisi perpindahan sebagian aset ke Badan Riset Indonesia (BRIN) pada saat itu belum ada kejelasan terkait pemanfaatan paten hasil riset. Di tahun 2024, aset yang menghasilkan paten tersebut tetap di KKP;
- e. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya senilai Rp17.000.000,00 berasal dari Satker LPTK Wakatobi yang merupakan jasa penjualan 56 unit Wakatobi *Automatic Identification System* (AIS) sebagai hasil kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Target pendapatan penelitian/riset, survey, pemetaan, dan pengembangan iptek lainnya sebesar Rp28.700.000,- terdiri dari Rp1.200.000,00 di Sekretariat Jenderal, Rp20.000.000,00 di Ditjen Perikanan Tangkap yang tidak terealisasi hal ini disebabkan

sudah tidak adanya fungsi riset yang dilakukan dan Rp7.500.000,00 di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP dimana realisasinya melebihi target pendapatan hal ini disebabkan peningkatan hasil layanan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendapatan Jasa Lainnya

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp99.644.150.219,00 dan sebesar Rp90.660.796.504,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.22
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	57.027	78.317	137,33	61.795	75.131	121,58	3.186	4,24
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	15.089	21.271	140,97	15.024	15.445	102,80	5.826	37,72
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	16	54	337,50	47	23	48,94	31	134,78
Pendapatan Jasa Lainnya	0	3	100,00	0	62	100,00	(59)	(95,16)
TOTAL	72.132	99.645	138,14	76.866	90.661	117,95	8.984	9,91

Tabel B.23

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	1	3	300,00	0	0	0,00	3	100,00
Ditjen PT	57.113	78.472	137,40	61.929	75.332	121,64	3.140	4,17
Ditjen PB	8	35	437,50	8	15	187,50	20	133,33
Ditjen PKRL	15.010	21.135	140,81	14.898	15.314	102,79	5.821	38,01
BPPSDMKP	0	0	0,00	30	0	0,00	0	0,00
Total	72.132	99.645	138,14	76.865	90.661	117,95	8.984	9,91

Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.983.353.715,00 atau 9,91% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang secara umum disebabkan oleh:

1. Adanya peningkatan pendapatan Jasa Pelabuhan karena adanya peningkatan yang cukup signifikan terutama pada PPN Ambon dan PPN Pekalongan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pada Pelabuhan perikanan yang menyebabkan meningkatnya pendapatan jasa pas masuk dan pendapatan jasa tambat labuh. Total kenaikan pendapatan jasa pelabuhan perikanan pada beberapa pelabuhan di KKP sebesar Rp3.186.623.197,00;
2. Kenaikan pada akun Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya berupa pungutan perdagangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya sebesar Rp21.270.644.636,00;

Selain itu terdapat Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 16.275.000,00, pada Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp34.500.000,00. Pada

Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.000.000,00 serta Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp2.493.288,00 pada Ditjen Perikanan Tangkap.

Penjelasan atas Pendapatan Jasa Lainnya pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Merupakan pendapatan atas Jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sebesar Rp3.000.000,00 pada Satker BPISDKP berupa bimtek pembuatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Antara lain merupakan pendapatan atas

- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan sebesar Rp78.317.237.295,00 yang terdapat pada 22 pelabuhan Unit Pelayanan Teknis berupa jasa pelayanan di pelabuhan perikanan. Jika dibandingkan dengan TA 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan terutama pada PPN Ambon dan PPN Pekalongan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pada Pelabuhan perikanan yang menyebabkan meningkatnya pendapatan jasa pas masuk dan pendapatan jasa tambat labuh.
- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp136.080.000,00 berupa pendapatan yang berasal dari pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan berupa pengujian mesin kapal.
- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sebesar Rp16.275.000,00 yang terdapat pada satker BBPI berupa konsultasi dan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan penangkapan ikan.
- Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp2.493.288,00 merupakan pendapatan yang terdapat pada PPN Karangantu atas temuan Inspektorat V dan PPN Prigi atas Pembagian Hasil Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi periode 16

Desember 2022 s.d 15 Desember 2023 sesuai amanat Peraturan Bupati Trenggalek No. 1 tahun 2015.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pendapatan atas Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi sebesar Rp 34.500.000,00 yang pada satker BBPBAT Sukabumi berupa jasa bimbingan teknis pembudidayaan ikan.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Antara lain merupakan pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya sebesar Rp21.134.564.636,00 yang berasal dari berasal dari satker pusat Setditjen PKRL dan seluruh satker UPT, baik yang mengelola kawasan konservasi maupun jenis ikan. Pendapatan pada satker Setditjen PKRL dan UPT pengelola jenis ikan (PSPL) yang merupakan mandat baru dari PP 85 Tahun 2021 yang bersumber dari Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/ Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan dan Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau Dibatasi sedangkan pada satker UPT pengelola kawasan konservasi perairan (UPT KKPN) yaitu LKKPN Pekanbaru dan BKKPN Kupang bersumber dari karcis masuk dan tanda masuk kawasan konservasi perairan yang dikelolanya berupa Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp175.159.746,00 dan sebesar Rp299.192.691,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan

Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.24
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1	0,00	0	0	100,00	1	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	174	100,00	0	286	100,00	(112)	(39,16)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	1	100,00	0	14	100,00	(13)	(92,86)
TOTAL	0	176	100,00	0	300	100,00	(124)	(41,33)

Tabel B.25
Rincian Estimasi dan Realisasi
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	73	100,00	0	0	0,00	73	100,00
Ditjen PT	0	1	100,00	0	14	100,00	(13)	(92,86)
Ditjen PB	0	5	100,00	0	0	0,00	5	100,00
Ditjen PSDKP	0	4	100,00	0	0	0,00	4	100,00
Ditjen PKRL	0	0	0,00	0	4	100,00	(4)	(100,00)
BPPSDMKP	0	0	0,00	0	57	100,00	(57)	(100,00)
BPPMHKP	0	93	100,00	0	225	100,00	(132)	58,67
Total	0	176	100,00	0	300	100,00	(124)	(41,33)

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp124.032.945,00 atau sebesar 41,33% yang secara umum disebabkan adanya penurunan setoran penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penjelasan atas Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Antara lain merupakan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri Bukan Bendahara berupa Pengunduran diri Pegawai Biro Hukum atas ikatan dinas Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp72.960.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Antara lain merupakan Tuntutan Ganti Rugi Bendahara berupa pembayaran cicilan piutang bendahara pada Satker PPS Bitung sebesar Rp1.000.000,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Antara lain merupakan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada BPBAT Sungai Gelam sebesar Rp4.800.000,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Terdapat pendapatan atas Jasa Giro sebesar Rp320,00 yang berasal dari bunga rekening RPL kapal pengawas dan TGR pegawai Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp3.500.000,00.

5. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain pada Sekretariat BPPMHKP sebesar Rp92.899.426,00.

Pendapatan Denda

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp25.095.541.265,00 dan sebesar Rp29.848.322.009,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Denda pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.26
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3.541	100,00	0	2.294	100,00	1.247	54,36
Pendapatan Denda Lainnya	6.999	21.554	307,95	9.336	27.555	295,14	(6.001)	(21,78)
TOTAL	6.999	25.095	358,55	9.336	29.849	319,72	(4.754)	(15,93)

Tabel B.27
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	52	0,00	0	12	100,00	40	333,33
Ditjen PT	0	1.758	100,00	0	227	100,00	1.531	674,45
Ditjen PB	0	1.249	0,00	0	1.138	100,00	111	9,75
Ditjen PSDKP	6.999	21.701	310,06	9.336	27.734	297,07	(6.033)	(21,75)
Ditjen PDSPKP	0	53	0,00	0	350	100,00	(297)	(84,86)
Ditjen PKRL	0	173	100,00	0	306	100,00	(133)	(43,46)
BPPSDMKP	0	105	100,00	0	77	100,00	28	36,36
BPPMHKP	0	4	100,00	0	5	0,00	(1)	100,00
Total	6.999	25.095	358,55	9.336	29.849	319,72	(4.754)	(15,93)

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.752.780.744,00 atau 15,93% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang secara umum disebabkan kenaikan atas denda penyelesaian pekerjaan.

Penjelasan atas Pendapatan Denda dirinci sebagai berikut.

1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp52.168.626,00 berupa potongan SPM atas pengadaan fasilitasi pendukung *Mirroring War Room/Command Center* sebesar Rp5.900.000,00 dan potongan SPM atas renovasi ruangan sebesar Rp46.268.676,00;
- b. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.757.651.271,00 antara lain berupa denda yang terdapat pada Setditjen DJPT atas wanprestasi pekerjaan pembangunan/pengembangan/rehabilitasi fasilitas di Pelabuhan Lampulo Provinsi Aceh sebesar Rp1.373.765.341,00;
- c. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.249.447.622,00 merupakan pendapatan denda yang diantaranya berasal dari Setditjen PB sebesar Rp943.636.661,00 berupa denda pekerjaan modeling rumput laut di kabupaten Rote Ndao sebesar Rp440.601.476,00, denda keterlambatan termin 3 modeling maltra sebesar Rp190.808.000,00, denda jasa konsultasi konstruksi penyusunan AMDAL budidaya ISF sebesar Rp42.160.000,00, BLUPPB Karawang sebesar Rp82.484.000,00 berupa denda keterlambatan penyelesaian dan kekurangan volume pekerjaan Bioflok PT. Mahkota Selatan Mekarwangi, BPBAP Situbondo sebesar Rp53.042.095,00 diantaranya berupa Denda Keterlambatan Pembangunan Modeling Kepiting Pasuruan sebesar Rp47.032.432,00, Denda Keterlambatan Pengadaan Pengadaan PJU Kepiting Pasuruan sebesar Rp3.272.973,00;

- d. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp153.698.996,00 antara lain berupa denda atas pekerjaan *overhaul main engine* HIU 3 di PSDKP Batam sebesar Rp90.229.880,00, denda atas pekerjaan renovasi pos pengawasan PSDKP Belawan sebesar Rp20.430.180,00, dan denda atas pekerjaan renovasi pos pengawasan PSDKP Tahuna sebesar Rp12.009.352,00;
- e. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp52.081.740,00 antara lain berupa denda atas perencanaan teknis dan studi kelayakan pembangunan gudang beku termin I di Biak Numfor sebesar Rp15.015.135,00, perencanaan teknis dan studi kelayakan pembangunan gudang beku termin I di Merauke sebesar Rp14.917.230,00, dan pendapatan denda pembayaran pengadaan gudang beku portabel di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Wakatobi dan Kota Tual Rp13.038.000,00;
- f. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp172.777.623,00 berupa setoran denda pada Satker Setditjen PRL dan LKKPN Pekanbaru. Setoran tersebut diantaranya atas keterlambatan pekerjaan senilai Rp878.378,00 untuk pekerjaan pengadaan sarana usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Kebumen, setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp377.027,00 untuk pekerjaan Pengadaan Landmark dan toilet di Kabupaten Pidie, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp1.452.351,00 untuk pekerjaan Pembangunan GGR Kabupaten Sumenep, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp20.281.081,00 untuk pekerjaan Pembangunan GGR di Kabupaten Pamekasan, Setoran denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp99.508.000,00 untuk pekerjaan belanja barang sesuai kontrak nomor 597/PPK/DJPKRL.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, Addendum Kontrak nomor

2627/PPK/DJPKRL.3/XI/2024 tanggal 5 November 2024. Setoran pada LKKPN Pekanbaru berasal dari setoran denda keterlambatan pembangunan prasarana layanan Pulau Pieh senilai Rp25.483.402,00;

- g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp99.534.491,00 merupakan denda yang terdapat pada 11 Satker BPPSDMKP;
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.124.054,00 merupakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Satker BKIPM Makassar sebesar Rp1.4700.000,00 dan BKIPM Jakarta II sebesar Rp2.654.054,00.

2. Pendapatan Denda Lainnya

- a. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp21.547.019.784,00 merupakan PNBP fungsional pada Direktorat Jenderal PSDKP berupa denda administratif atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta ganti kerugian atas penyelesaian sengketa;
- b. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.429.058,00 berupa denda keterlambatan pembayaran *plugging container* dan CS 2000 ton;
- c. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.608.000,00 berupa denda atas keterlambatan penyetoran PNBP Pelatihan yang terdapat di Satker BPPP Medan dan BPPP Ambon.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada pos Pendapatan Denda yaitu denda keterlambatan yang belum dikenakan atas pekerjaan Asrama Bahari Residence III pada BPPSDMKP sebesar Rp267.492.283,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja Pimpinan Ditjen PKRL sebesar Rp40.370.000,00.

Pendapatan Lain-Lain

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp10.711.582.944,00 dan sebesar Rp11.733.526.429,00. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan Lain-Lain pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 and 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.28
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik/ (Turun)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.534	100,00	0	953	100,00	581	60,97
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7.201	100,00	0	4.599	100,00	2.602	56,58
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.807	100,00	0	4.655	100,00	(2.848)	(61,18)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	112	100,00	0	115	100,00	(3)	(2,61)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1	100,00	0	39	100,00	(38)	(97,44)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	57	100,00	0	1.372	100,00	(1.315)	(95,85)
TOTAL	0	10.712	100,00	0	11.733	100,00	(1.021)	(8,70)

Tabel B.29
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Estimasi	Realisasi	%	Estimasi	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	0	434	100,00	0	457	100,00	(23)	(5,03)
Itjen	0	24	100,00	0	98	100,00	(74)	(75,51)
Ditjen PT	0	1.751	100,00	0	2.947	100,00	(1.196)	(40,58)
Ditjen PB	0	2.705	100,00	0	4.279	100,00	(1.574)	(36,78)
Ditjen PSDKP	0	1.385	100,00	0	323	100,00	1.062	328,79
Ditjen PDSPKP	0	410	100,00	0	802	100,00	(392)	(48,88)
Ditjen PKRL	0	783	100,00	0	1.050	100,00	(267)	(25,43)
BPPSDMKP	0	2.799	100,00	0	1.307	100,00	1.492	114,15
BPPMHKP	0	421	100,00	0	470	100,00	(49)	(10,43)
Total	0	10.712	100,00	0	11.733	100,00	(1.021)	(8,70)

Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.021.943.485,00 atau sebesar 8,70% dari Realisasi Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang secara umum disebabkan karena berkurangnya Penerimaan Kembali Belanja dibandingkan dengan tahun 2023.

Penjelasan atas Pendapatan Lain-Lain pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Antara lain merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp58.813.226,00, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp57.890.461,00, penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp205.575.131,00 dan pendapatan setoran dari sisa utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp111.526.035,00.

2. Inspektorat Jenderal

Merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp23.878.250,00.

3. Ditjen Perikanan Tangkap

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp99.468.235,00 berupa kelebihan pembayaran tunjangan dan uang makan, serta pengembalian tunjangan umum dan tunjangan fungsional tugas belajar;
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.525.719.542,00 berupa pendapatan atas belanja barang seperti listrik dan air Desember TA 2023 yang dibayar pada TA 2024 dan temuan BPK atas belanja barang;
- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp68.656.811,00 berupa pendapatan yang diterima atas temuan pengembalian belanja modal berupa kekurangan volume;
- Pendapatan anggaran lain-lain yang terdapat pada 2 satker yaitu PPS Nizam Zachman dan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang merupakan pendapatan atas setoran temuan Itjen.

4. Ditjen Perikanan Budi Daya

Antara lain merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp392.446.010,00, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp2.281.873.298,00, penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp29.102.029,00, dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp1.451.560,00.

5. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp170.711.183,00 berupa kelebihan pembayaran

belanja pegawai tunjangan umum dan tunjangan fungsional PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;

- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp158.626.133,00 berupa kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pegawai; dan
- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.055.261.529,00 berupa Temuan BPK atas Pekerjaan Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan pada Stasiun PSDKP Belawan dan kelebihan pembayaran pekerjaan bangunan kapal dalam pengadaan kapal pengawas perikanan kelas II (MYC) pada Sekretariat Ditjen PSDKP.

6. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp16.799.906,00 yang terdapat pada satker Setditjen PDSPKP senilai Rp2.620.000,00 berupa pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja bulan Desember TA.2023 dan setoran otomatis dari palikasi GPP berupa pembayaran kekurangan tunjangan fungsional pegawai dan satker BBP3KP senilai Rp14.179.906,00 berupa pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja.
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp393.602.992,00 yang terdapat pada satker Setditjen PDSPKP senilai Rp61,225,000,00 berupa Pengembalian Pembayaran Pekerjaan Peresmian Gerai Pemasaran Ikan di Jakarta Timur, Rp254,905,856,00 berupa Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es, Sentra Kuliner, Gudang Beku Portabel, Gedung Sarana Pasca Panen, dll. Rp49,084,238,00 berupa pembayaran kekurangan volume pekerjaan lantai jemur DKP Kab. Bombana TA. 2015 temuan kelebihan Pembayaran CV Putra Tiga Utama terkait LHP BPK atas LK 2016 (Kab. Kolaka) temuan kelebihan

Pembayaran CV Putra Tiga Utama terkait LHP BPK atas LK 2016 (Kab. Konawe). Senilai Rp3.819.000,00 berupa Temuan perdin Konawe LK 2016 a.n. Hendrawan S. dan pada Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara senilai sebesar Rp10.300.000,00 berupa Setoran atas Hasil Audit pada Satker TA. 2013 oleh Itjen pada Tahun 2014.

7. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp45.370.788,00 berupa kelebihan pembayaran gaji, tunjangan kinerja PNS yang melakukan tugas belajar, dan pengembalian uang makan.
- Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp734.367.499,00 berupa pengembalian atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri, kelebihan pembayaran honor, dan setoran atas temuan Inspektorat Jenderal.
- Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3.209.541,00 pada satker BPSPL berupa temuan Itjen atas kelebihan pembayaran pembangunan Mushalla.

8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp607.080.744,00 berupa pengembalian uang makan, tunjangan kinerja PNS, tunjangan fungsional TA 2023 dari 35 Satker lingkup BPPSDMKP;
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL senilai Rp1.825.690.598,00 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas, belanja bahan, belanja persediaan, belanja barang dan jasa, dan belanja pemeliharaan pada 22 satker BPPSDMKP;

- Penerimaan kembali belanja modal TAYL senilai Rp365.994.450,00 dari pada 5 satker BPPSDMKP yang merupakan setoran atas temuan BPK dan Itjen KKP;
- Pendapatan anggaran lain-lain senilai Rp90.721,00 pada satker BPPP Banyuwangi yang merupakan kelebihan pengembalian TUP.

9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.124.054,00

Antara lain merupakan pendapatan atas:

- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL merupakan pengembalian gaji, tunjangan kinerja, uang makan sebesar Rp119.115.291,00 setoran dilakukan melalui (dua) cara, dengan disetorkan menggunakan SSBP dan dengan memotong SPM;
- Penerimaan kembali belanja barang TAYL merupakan pengembalian perjalanan dinas, kelebihan pembayaran pemeliharaan, kelebihan pembayaran honor dan lembur, dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp222.792.020,00 yang terdapat pada 16 satker;
- Penerimaan kembali belanja modal TAYL yang merupakan pengembalian kekurangan volume pengadaan pekerjaan, kelebihan pembayaran pekerjaan berdasarkan hasil audit APIP sebesar Rp79.370.600,00 yang terdapat pada satker Balai KIPM Denpasar dan Stasiun KIPM Cirebon;
- Pendapatan anggaran lain-lain yang merupakan pendapatan dari kelebihan Pengembalian UP akhir tahun pada Balai KIPM Tanjung Pinang sebesar Rp9.775.000,00.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin

terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.299.997.586.481,00 atau 86,92% dari pagu anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp7.248.311.610.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja per jenis belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.30
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.899.944.432.000	1.891.758.893.702	99,57
Belanja Barang	4.469.224.914.000	3.885.910.376.345	86,95
Belanja Modal	879.142.264.000	522.328.316.434	59,41
Total	7.248.311.610.000	6.299.997.586.481	86,92

Sedangkan rincian pagu dan realisasi belanja pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.31
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Setjen	902.569.227.000	822.863.865.685	91,17
Itjen	86.789.911.000	84.427.641.894	97,28
Ditjen PT	984.561.316.000	860.627.463.236	87,41
Ditjen PB	1.227.143.203.000	992.008.206.671	80,84
Ditjen PSDKP	1.142.452.116.000	995.498.070.995	87,14
Ditjen PDSPKP	386.899.151.000	324.896.904.773	83,97
Ditjen PKRL	684.053.244.000	471.154.781.232	68,88
BRPPSDM KP	1.489.964.596.000	1.423.646.688.907	95,55
BPPMHKP	343.878.846.000	324.873.963.088	94,47
Total	7.248.311.610.000	6.299.997.586.481	86,92

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.299.997.586.481,00. Jika

dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2023, realiasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.598.338.836,00 atau sebesar 0,56%. Rincian perbandingan realisasi belanja per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.32
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Pegawai	1.891.758.893.702	1.777.377.905.274	114.380.988.428	6,44
Belanja Barang	3.885.910.376.345	3.879.529.145.356	6.381.230.989	0,16
Belanja Modal	522.328.316.434	678.688.874.687	(156.360.558.253)	(23,04)
Total	6.299.997.586.481	6.335.595.925.317	(35.598.338.836)	(0,56)

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.891.758.893.702,00 atau 99,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.899.944.432.000,00.

Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut akun 3 *digit* untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.33
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	954.502.725.000	950.188.749.527	99,55
Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	945.441.707.000	941.570.144.175	99,59
Total	1.899.944.432.000	1.891.758.893.702	99,57

Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai per Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.34
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Setjen	88.615.123.000	88.003.866.196	99,31
Itjen	36.583.468.000	36.574.103.727	99,97
Ditjen PT	230.159.600.000	229.794.101.063	99,84
Ditjen PB	186.783.785.000	185.892.176.729	99,52
Ditjen PSDKP	201.373.771.000	201.180.090.787	99,90
Ditjen PDSPKP	65.466.051.000	65.318.878.226	99,78
Ditjen PKRL	112.500.887.000	112.074.699.246	99,62
BPPSDMKP	819.729.572.000	816.743.026.817	99,64
BPPMHKP	158.732.175.000	156.177.950.911	98,39
Total	1.899.944.432.000	1.891.758.893.702	99,57

Pagu anggaran belanja pegawai terbesar berada pada Unit Eselon I BPPSDMKP sehubungan dengan jumlah pegawai terbanyak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.35
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	950.188.749.527	905.481.010.515	44.707.739.012	4,94
Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	941.570.144.175	871.896.894.759	69.673.249.416	7,99
Total	1.891.758.893.702	1.777.377.905.274	114.380.988.428	6,44

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp114.380.988.428,00 atau 6,44% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan realisasi ini disebabkan terdapat penambahan formasi PPPK di tahun 2024 sejumlah 716 pegawai, adanya penambahan pejabat negara dan pemberlakukan pajak penghasilan PPh 21 dengan skema tarif efektif rata-rata (TER) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi.

Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp950.188.749.527,00 dan Rp905.481.010.515,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.36
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	40.985	40.725	99,37	35.591	34.592	97,19	6.133	17,73
Itjen	16.173	16.164	99,94	15.350	15.139	98,63	1.025	6,77
Ditjen PT	118.368	118.106	99,78	98.936	97.734	98,79	20.372	20,84
Ditjen PB	94.722	94.139	99,38	86.825	84.970	97,86	9.169	10,79
Ditjen PSDKP	99.448	99.308	99,86	85.293	85.013	99,67	14.295	16,82
Ditjen PDSPKP	31.348	31.204	99,54	27.238	26.577	97,57	4.627	17,41
Ditjen PKRL	52.935	52.630	99,42	48.843	47.685	97,63	4.945	10,37
BRPPSDM KP	421.509	419.873	99,61	390.495	385.402	98,70	34.471	8,94
BPPMHKP	79.015	78.040	98,77	130.160	128.370	98,62	(50.330)	(39,21)
Total	954.503	950.189	99,55	918.731	905.482	98,56	44.707	4,94

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp44.707.739.012,00 atau 4,94% dari realisasi periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini diantaranya disebabkan adanya Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara di tahun 2024. Selain itu juga terdapat kenaikan yang signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PPPK sehubungan dengan adanya penerimaan PPPK di tahun 2024. Jumlah PPPK tahun 2024 bertambah sejumlah 716 pegawai dari total PPPK 2023 sejumlah 1172. Penambahan signifikan ini disebabkan pada tahun 2023, PPPK mulai bekerja di bulan Agustus dan November 2023 sehingga belanja pegawai 2023 tidak setinggi belanja pegawai 2024.

Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp941.570.144.175,00 dan sebesar Rp871.896.894.759,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito pada menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.37

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Menurut Unit Eselon I Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	47.630	47.279	99,26	41.995	40.645	96,79	6.634	16,32
Itjen	20.410	20.410	100,00	18.645	18.600	99,76	1.810	9,73
Ditjen PT	111.791	111.689	99,91	91.368	90.552	99,11	21.137	23,34
Ditjen PB	92.062	91.753	99,66	81.828	80.493	98,37	11.260	13,99
Ditjen PSDKP	101.926	101.872	99,95	85.043	84.498	99,36	17.374	20,56
Ditjen PDSPKP	34.118	34.115	99,99	29.262	28.234	96,49	5.881	20,83

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PKRL	59.565	59.445	99,80	51.399	50.948	99,12	8.497	16,68
BRPPSDM KP	398.221	396.870	99,66	352.418	348.634	98,93	48.236	13,84
BPPMHKP	79.718	78.138	98,02	130.312	129.293	99,22	(51.155)	(39,57)
Total	945.441	941.571	99,59	882.270	871.897	98,82	69.674	7,99

Realisasi Belanja Honorarium/Lembur/Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.673.249.416,00 atau 7,99% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ini disebabkan adanya penerimaan PPPK di tahun 2024 yang menyebabkan kenaikan tunjangan kinerja untuk para PPPK.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat pada Ditjen PSDKP sebesar Rp9.214.775,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp7.020.800,00 pada tanggal 25 April 2025 dengan NTPN AEA0B1JNG89U9IG3 dan sebesar Rp2.193.975,00 pada tanggal 24 April 2025 dengan NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ;
2. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat pada BPPSDMKP sebesar Rp36.784.000,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp36.784.000,00 pada tanggal 2 Mei 2025 dengan NTPN 321993CIFTERKA8K.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.885.910.376.345,00 atau 86,95% dari pagu anggaran Belanja Barang sebesar Rp4.469.224.914.000,00.

Tabel B.38
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	1.476.918.818.000	1.325.453.972.546	89,74
Belanja Jasa	862.922.156.000	689.698.165.896	79,93
Belanja Pemeliharaan	367.344.790.000	355.011.705.003	96,64
Belanja Perjalanan Dinas	1.029.244.238.000	831.013.130.715	80,74
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	93.152.539.000	80.546.714.025	86,47
Belanja Barang Untuk Dserahkan Kepada Masyarakat	639.642.373.000	604.186.688.160	94,46
Total	4.469.224.914.000	3.885.910.376.345	86,95

Rincian realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.39
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Setjen	577.216.135.000	505.487.028.941	87,57
Itjen	47.498.733.000	45.145.930.992	95,05
Ditjen PT	686.991.796.000	574.745.291.645	83,66
Ditjen PB	732.542.591.000	711.938.177.892	97,19
Ditjen PSDKP	850.488.264.000	734.735.579.738	86,39
Ditjen PDSPKP	312.725.337.000	253.163.217.877	80,95
Ditjen PKRL	470.570.648.000	340.478.444.137	72,35
BPPSDMKP	612.820.358.000	557.961.509.231	91,05
BPPMHKP	178.371.052.000	162.255.195.892	90,96
Total	4.469.224.914.000	3.885.910.376.345	86,95

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.40
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Barang	1.325.453.972.546	1.454.741.501.021	(129.287.528.475)	(8,89)
Belanja Jasa	689.698.165.896	541.485.015.146	148.213.150.750	27,37
Belanja Pemeliharaan	355.011.705.003	356.827.468.095	(1.815.763.092)	(0,51)
Belanja Perjalanan Dinas	831.013.130.715	866.698.165.053	(35.685.034.338)	(4,12)

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	80.546.714.025	45.545.097.060	35.001.616.965	76,85
Belanja Barang Untuk Dserahkan Kepada Masyarakat	604.186.688.160	614.231.898.981	(10.045.210.821)	(1,64)
Total	3.885.910.376.345	3.879.529.145.356	6.381.230.989	0,16

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.381.230.989,00 atau 0,16% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang secara umum disebabkan kenaikan pada realisasi belanja jasa dan belanja pada Satuan kerja Badan Layanan Umum.

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.325.453.972.546,00 dan sebesar Rp1.454.741.501.021,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.41
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	150.220	138.086	91,92	129.601	128.827	99,40	9.259	7,19
Itjen	6.077	6.074	99,95	6.249	6.245	99,94	(171)	(2,74)
Ditjen PT	132.971	119.915	90,18	152.992	148.300	96,93	(28.385)	(19,14)
Ditjen PB	167.939	166.311	99,03	203.670	202.120	99,24	(35.809)	(17,72)
Ditjen PSDKP	495.555	419.462	84,64	445.832	444.687	99,74	(25.225)	(5,67)
Ditjen PDSPKP	80.488	65.671	81,59	63.194	62.693	99,21	2.978	4,75
Ditjen PKRL	57.130	55.002	96,28	57.119	55.501	97,17	(499)	(0,90)
BRPPSDM KP	321.722	292.223	90,83	314.237	310.102	98,68	(17.879)	(5,77)
BPPMHKP	64.817	62.709	96,75	98.189	96.266	98,04	(33.557)	(34,86)
Total	1.476.919	1.325.453	89,74	1.471.083	1.454.741	98,89	(129.288)	(8,89)

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.325.453.972.546,00 atau 89,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.476.918.818.000,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp129.287.528.475,00 atau 8,89% yang disebabkan menurunnya realisasi belanja pada pos belanja keperluan perkantoran, ekstrakomptabel, dan persediaan barang konsumsi. Diantara penurunan yang terjadi berada di pos belanja barang non operasional di Ditjen PSDKP yang disebabkan oleh berkurangnya hari pengawasan.

Terdapat blokir anggaran pada belanja barang sebesar Rp70.282.428.000,00 atau 4,76% dari pagu anggaran belanja barang KKP tahun 2024.

Realisasi belanja barang yang cukup signifikan diantaranya:

1. Bahan bakar minyak pada Satker Setditjen PSDKP sebesar Rp195.352.250.000,00;
2. Bahan bakar minyak pada Satker PSDKP Tual sebesar Rp19.078.151.000,00;
3. Jasa tenaga satuan pengamanan gedung kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp17.664.529.356,00;
4. Pekerjaan pengadaan jasa tenaga kebersihan kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp16.481.022.990,00;
5. Pekerjaan pengadaan jasa tenaga teknisi gedung kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15.000.518.800,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Barang yaitu kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Jasa Alih Daya pada Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sebesar Rp314.096.700,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp415.408.681,00 pada tanggal 28 Februari 2025

dengan NTPN C2C5D6U8F7I8G9PN. Selisih setoran tersebut merupakan temuan atas pekerjaan 2023.

Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp423.449.411.971,00 dan sebesar Rp313.769.444.467,00. Rincian pagu dan realisasi belanja jasa menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.42
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	96.484	96.184	99,69	83.614	83.277	99,60	12.907	15,50
Itjen	1.446	1.446	100,00	452	451	99,78	995	220,62
Ditjen PT	181.017	146.223	80,78	117.182	105.771	90,26	40.452	38,24
Ditjen PB	104.587	100.392	95,99	91.516	88.995	97,25	11.397	12,81
Ditjen PSDKP	115.541	110.635	95,75	77.657	77.171	99,37	33.464	43,36
Ditjen PDSPKP	50.921	42.504	83,47	36.926	36.625	99,18	5.879	16,05
Ditjen PKRL	164.468	55.608	33,81	39.509	37.549	95,04	18.059	48,09
BRPPSDM KP	104.590	101.056	96,62	76.664	75.770	98,83	25.287	33,37
BPPMHKP	43.868	35.650	81,27	36.740	35.875	97,65	(225)	(0,63)
Total	862.922	689.698	79,93	560.258	541.485	96,65	148.213	27,37

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp689.698.165.896,00 atau 79,93% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp862.922.156.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja jasa sebesar Rp134.410.964.000,00 atau 15,58% dari total pagu belanja jasa KKP tahun 2024.

Realisasi belanja jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp109.679.967.504,00 atau sebesar 34,96% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disebabkan kenaikan realisasi pada pos belanja Sewa dan belanja Jasa Lainnya.

Realisasi Belanja Jasa yang cukup signifikan diantaranya:

1. Pengadaan Jasa Lainnya *bandwidth* internet pusat tahun 2024 pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp13.531.852.364,00;
2. *Broodstock and Multiplication Centers Advisory Services Infrastructure Improvement For Shrimp Aquaculture Project* (IISAP) ADB LOAN No.4283-INO pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.542.223.250,00;
3. Sewa pesawat udara dalam rangka Operasi Pengawasan SDKP melalui udara tahun 2024 pada Satker Setditjen PSDKP sebesar Rp55.963.611.043,00;
4. Pengadaan *catering* Politeknik AUP Agustus 2024 -Desember 2024 sebesar Rp4.791.993.000,00;
5. Pengadaan jasa konsultasi untuk *Construction Management Consultant Proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I* lender IsDB sebesar Rp3.652.417.500,00;
6. Pekerjaan *Project Management and Technical Consultant* (PMTTC) *Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project* (IISAP), ADB Loan No. 4283-INO sebesar Rp3.449.226.257,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Jasa diantaranya:

1. Perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan pengadaan *bandwidth* internet kantor pusat KKP sebesar Rp556.995.747,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp556.995.747,00 pada tanggal 3 Maret 2025 dengan NTPN C91EF6U8F7ICVP4J;
2. Kelebihan pembayaran jasa *catering* pada Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp125.932.419,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp125.932.419,00 pada tanggal 14 April 2025 dengan NTPN C073A3CIFTEE72LR.

Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp355.011.705.003,00 dan Rp356.827.468.095,00. Rincian pagu dan realisasi belanja pemeliharaan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.43
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	74.947	73.504	98,07	53.722	53.257	99,13	20.247	38,02
Itjen	1.170	1.168	99,83	944	944	100,00	224	23,73
Ditjen PT	45.863	43.660	95,20	48.303	47.666	98,68	(4.006)	(8,40)
Ditjen PB	38.001	37.875	99,67	34.002	33.763	99,30	4.112	12,18
Ditjen PSDKP	92.279	87.173	94,47	75.894	75.624	99,64	11.549	15,27
Ditjen PDSPKP	6.614	6.557	99,14	9.547	9.335	97,78	(2.778)	(29,76)
Ditjen PKRL	8.342	8.096	97,05	10.309	10.130	98,26	(2.034)	(20,08)
BRPPSDM KP	74.897	72.878	97,30	100.229	98.852	98,63	(25.974)	(26,28)
BPPMHKP	25.232	24.101	95,52	27.808	27.257	98,02	(3.156)	(11,58)
Total	367.345	355.012	96,64	360.758	356.828	98,91	(1.816)	(0,51)

Realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp355.011.705.003,00 atau 56,52% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 361.901.290.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja pemeliharaan sebesar Rp7.902.062.000,00 atau 2,15% dari total pagu belanja pemeliharaan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, realisasi belanja pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.815.763.092,00 atau 0,51%. Penurunan ini disebabkan antara lain adanya blokir anggaran pada pos belanja pemeliharaan.

Realisasi Belanja Pemeliharaan yang cukup signifikan antara lain:

1. Pengadaan jasa lainnya pekerjaan ATS *Colaboration Office* (ATS *Coofis Ultimate Digital Touch Point*, ATS *Coofis Ultimate Collaboration System*, ATS *Coofis Ultimate Content & Knowledge Management*) sebesar Rp9.470.860.000;
2. Pengadaan jasa lainnya pekerjaan ATS *Command Center* (ATS *Auxiseyes Satellite Imagery Analysis System For Vessel Detection*, ATS *Auxiseyes Maritime Surveillance Platform*, ATS *Auxiseyes Anomaly Detection & Risk Management*) sebesar Rp6.996.653.000,00;
3. Pengadaan suku cadang mesin induk MTU sebesar Rp4.999.650.000,00;
4. Pekerjaan peningkatan kapasitas sarana sistem radar terminal dan pengadaan data citra satelit radar sebesar Rp3.047.100.000,00;
5. *Docking* kapal pengawas ORCA 04 sebesar Rp2.896.559.000,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pemeliharaan diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan kantor Stasiun PSDKP Cilacap sebesar Rp24.632.184,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.632.852,00 pada tanggal 14 April 2025 dengan NTPN 023CF6U8F7NTLBTM;
2. Kelebihan pembayaran pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja Ditjen PKRL Senilai Rp69.364.338,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 69.364.338,00 pada tanggal 14 Mei 2025 dengan NTPN CDC2461QVD8EQ2GQ.

Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp831.013.130.715,00 dan sebesar Rp866.698.165.053,00. Rincian pagu dan realisasi belanja Perjalanan Dinas pada masing-masing Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.44
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	132.545	93.085	70,23	84.363	83.470	98,94	9.615,00	11,52
Itjen	38.806	36.458	93,95	31.868	31.858	99,97	4.599,99	14,44
Ditjen PT	217.343	162.362	74,70	190.463	183.563	96,38	(21.200,63)	(11,55)
Ditjen PB	103.352	91.851	88,87	134.970	130.695	96,83	(38.844,10)	(29,72)
Ditjen PSDKP	147.113	117.464	79,85	97.396	96.162	98,73	21.302,88	22,15
Ditjen PDSPKP	84.914	65.403	77,02	72.434	71.863	99,21	(6.459,99)	(8,99)
Ditjen PKRL	168.361	150.666	89,49	136.993	129.300	94,38	21.366,62	16,52
BPPSDM KP	92.356	73.929	80,05	80.484	79.269	98,49	(5.339,90)	(6,74)
BPPMHKP	44.454	39.795	89,52	62.202	60.520	97,30	(20.724,89)	(34,24)
Total	1.029.244	831.013	80,74	891.174	866.698	97,25	(35.685,03)	(4,12)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp831.013.130.715,00 atau 80,74% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.029.244.238.000,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.685.034.338,00 atau 4,12% dari realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan adanya blokir anggaran terkait penghematan perjalanan dinas yang terjadi di triwulan IV tahun 2024.

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk melaksanakan penugasan yang dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp791.549.068.127,00 dan realisasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp39.464.062.588,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Perjalanan Dinas yaitu:

Tabel B.45
Rincian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Perjalanan Dinas
Menurut Unit Eselon I

No	Unit Eselon I	Nilai Temuan	Nilai Penyetoran	Sisa Nilai Temuan
1	Ditjen PKRL	103.434.130	103.434.130	0
2	Ditjen Perikanan Tangkap	29.142.920	0	29.142.920
3	Ditjen Perikanan Budi Daya	19.419.499	19.419.499	0
4	Ditjen PSDKP	8.543.931	8.543.931	0
5	Ditjen PDSPKP	30.998.932	30.998.932	0
6	Sekretariat BPPSDM	30.546.453	30.546.453	0
7	Sekretariat BPPMHKP	17.060.364	17.060.364	0
8	Sekretariat Jenderal	109.732.112	93.692.218	16.039.894
	Jumlah	348.878.341	303.695.527	45.182.814

Belanja Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp80.546.714.025,00 dan Rp45.545.097.060,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.46
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja BLU Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	39.558	30.687	77,57	56.880	37.418	65,78	(6.731)	(17,99)
Ditjen PB	34.339	31.984	93,14	1.148	1.135	98,87	30.849	2.717,97
BPPSDMKP	19.256	17.876	92,83	11.532	6.993	60,64	10.883	155,63
Total	93.153	80.547	86,47	69.560	45.546	65,48	35.001	76,85

Realisasi Belanja Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp80.546.714.025,00 atau 86,47% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp93.152.539.000,00. Realisasi Belanja Badan Layanan Umum

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp35.001.616.965,00 atau sebesar 76,85% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Hal ini selaras dengan kenaikan pagu anggaran belanja Badan Layanan Umum di Ditjen Perikanan Budi Daya dan BPPSDMKP pada tahun 2024.

Belanja Badan Layanan Umum yang cukup signifikan berupa Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU pada Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp22.055.564.857,00 antara lain berupa pembelian pakan dan benih, Belanja Barang pada BLU di lingkup BPPSDMKP sebesar Rp8.231.332.628,00 antara lain berupa perlengkapan pelatihan, diklat dan taruna dan Belanja Jasa pada BLU di lingkup BPPSDMKP antara lain berupa pembayaran honor pengajar pelatihan dan diklat sebesar Rp7.686.807.001,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada Belanja BLU diantaranya:

1. Perjalanan Dinas LN pada LPMUKP sebesar Rp3.253.536,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke rekening RPL 175 BLU LPMUKP sebesar Rp3.253.536,00 pada tanggal 29 April 2025;
2. Perjalanan Dinas DN pada LPMUKP sebesar Rp16.526.639,00. Atas hal ini telah dilakukan RPL 175 BLU LPMUKP sebesar Rp16.526.639,00 pada tanggal 5 Mei 2025;
3. Terdapat belanja BLU pada BLUPPB Karawang yang tidak dicatat dan tidak melalui mekanisme SP3B dan SP2B oleh KPPN sebesar Rp1.825.262.605. Nilai tersebut merupakan penerimaan BLU yang langsung digunakan untuk belanja/membayar ke pihak ketiga. Atas temuan tersebut, BLUPPB Karawang akan melakukan penyesuaian/koreksi dan menuangkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp604.186.688.160,00 dan Rp614.231.898.981,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.47
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
							Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	83.461	73.942	88,59	13.218	13.135	99,37	60.807	462,94
Ditjen PT	109.798	102.585	93,43	109.272	107.784	98,64	(5.199)	(4,82)
Ditjen PB	284.324	283.526	99,72	341.932	341.051	99,74	(57.525)	(16,87)
Ditjen PDSPKP	89.789	73.028	81,33	98.869	98.572	99,70	(25.544)	(25,91)
Ditjen PKRL	72.270	71.106	98,39	54.844	53.689	97,89	17.417	32,44
Total	639.642	604.187	94,46	618.135	614.231	99,37	(10.044)	(1,64)

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp604.186.688.160,00 atau 94,46% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp639.642.373.000,00. Terdapat blokir pada pos belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp23.570.129.000,00 atau 3,96% dari total pagu anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.045.210.821,00 atau sebesar 1,64% jika dibandingkan dengan realisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya blokir *automatic*

adjustment pada pos Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang cukup signifikan antara lain:

1. Pengadaan alat berat (Excavator)-I (80 Unit) pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp96.712.000.000,00;
2. Pengadaan alat berat (Excavator) Paket II pada Satker Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp14.366.700.000,00;
3. Pengadaan bangunan dan mesin *washing plant* Bima sebesar Rp10.730.000.000,00;
4. Pengadaan gudang beku portabel pada Satker Setditjen PDSPKP sebesar Rp16.675.000.000,00;
5. Bantuan sarana modeling budi daya rumput laut di Kab. Maluku Tenggara sebesar Rp8.060.049.270,00;
6. Paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan kapal penangkap ikan ukuran kurang dari 5GT sebesar Rp7.367.000.000,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda diantaranya:

1. Bantuan Sarana Modeling Budidaya Rumput Laut di Kab. Rote Ndao sebesar Rp36.908.336,88. Atas hal ini telah dilakukan pengembalian ke kas negara melalui SPM No. 00150A tanggal 15 Februari 2025 sebesar Rp26.917.578,00 dan penyetoran ke kas negara sebesar Rp10.908.400,00 pada tanggal 7 Maret 2025 dengan NTPN 8008A6U8F7KQDHRI;
2. Unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan bangunan pendukung di Kab. Rote Ndao sebesar Rp82.727.460,00. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp82.727.460,00 pada tanggal 25 April 2025 dengan NTPN OCDCC7QLV2AMA95B;
3. Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah di Kota Pekalongan sebesar Rp39.995.200,27. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas

negara sebesar Rp10.000.000,00 pada tanggal 1 Mei 2025 dengan NTPN 5DD0F3CIFTE08TV1;

4. Pengadaan Penataan Kawasan UPI Bernilai Tambah Pekalongan sebesar Rp24.074.330,67. Atas hal ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 24.074.331,00 pada tanggal 17 Februari 2025 dengan NTPN 835800NA0DH7KT71;
5. Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal sebesar Rp31.401.720,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9.410.217,00 pada tanggal 25 April 2025 dengan NTPN 064C748VVO17VIJD;
6. Pembangunan Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon sebesar Rp9.410.217,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp31.401.720,00 dengan NTPN 2D8880NA0DPSH0GP;
7. Pengadaan Bangunan dan Mesin Washing Plan Bima sebesar Rp207.104.577,20. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp207.104.577,00 pada tanggal 15 Mei 2025 dengan NTPN 783451JNG8CGNDRD;
8. Kelebihan pembangunan prasarana dan sarana di luar kawasan pelabuhan SKPT MOA Sebesar Rp349.337.518,70. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke rekening BNI dengan nomor rekening 20241129145125941727 pada RPL 140 PDHL Biro Umum dan PBJ KKP dari PT Kurnia Alam Sentosa pada tanggal 9 Desember 2024;
9. Indikasi kemahalan harga atas jasa pengiriman excavator sebesar Rp159.350.000,00. Atas temuan ini, sedang dilakukan proses tindak lanjut di Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B.2.3 Belanja Modal

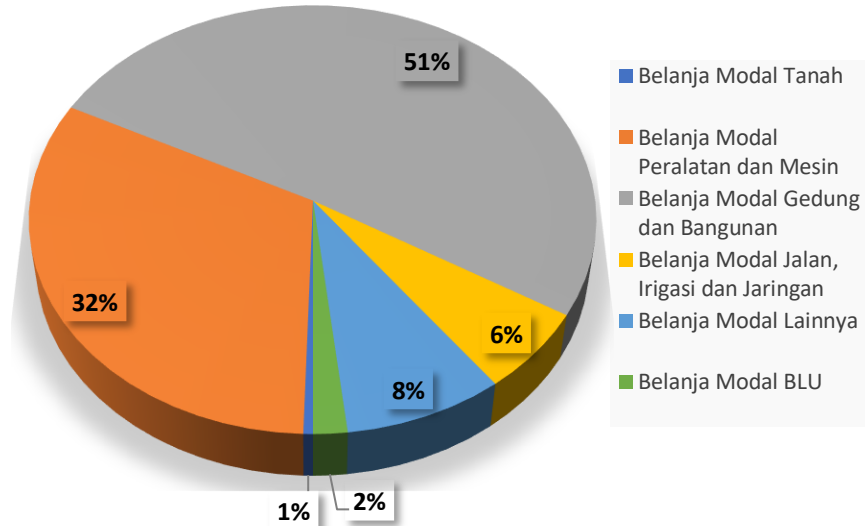
Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp522.328.316.434,00 atau 59,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp879.142.264.000,00.

Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.48
Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Jenis Akun	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	2.792.735.000	2.599.446.303	93,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.206.292.000	167.334.008.148	56,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	492.038.793.000	266.701.902.287	54,20
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.421.008.000	32.204.565.667	93,56
Belanja Modal Lainnya	44.836.037.000	44.108.098.940	98,38
Belanja Modal BLU	9.847.399.000	9.380.295.089	95,26
Total	879.142.264.000	522.328.316.434	59,41

Komposisi realisasi belanja modal KKP tahun 2024 dalam bentuk diagram disajikan di bawah ini:



Sedangkan rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.49
Rincian Realisasi Belanja Modal Menurut Unit Eselon I
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Setjen	236.737.969.000	229.372.970.548	96,89
Itjen	2.707.710.000	2.707.607.175	100,00
Ditjen Perikanan Tangkap	67.409.920.000	56.088.070.528	83,20
Ditjen Perikanan Budi Daya	307.816.827.000	94.177.852.050	30,60
Ditjen PSDKP	90.590.081.000	59.582.400.470	65,77
Ditjen PDSPKP	8.707.763.000	6.414.808.670	73,67
Ditjen PKRL	100.981.709.000	18.601.637.849	18,42
BPPSDM KP	57.414.666.000	48.942.152.859	85,24
BPPMHKP	6.775.619.000	6.440.816.285	95,06
Total	879.142.264.000	522.328.316.434	59,41

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdapat belanja modal yang signifikan antara lain:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berupa pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Morotai sebesar Rp70.497.840.646,00.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berupa paket pengadaan *water cannon* pada Satker Ditjen PSDKP sebesar Rp13.996.000.000,00.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal per akun untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.50
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	2.599.446.303	439.146.499	2.160.299.804	491,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.334.008.148	388.474.205.810	(221.140.197.662)	(56,93)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.701.902.287	199.428.086.339	67.273.815.948	33,73
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.204.565.667	15.009.459.521	17.195.106.146	114,56
Belanja Modal Lainnya	44.108.098.940	71.919.535.185	(27.811.436.245)	(38,67)

Nama Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Modal BLU	9.380.295.089	3.418.441.333	5.961.853.756	174,40
Total	522.328.316.434	678.688.874.687	(156.360.558.253)	(23,04)

Terdapat penurunan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp156.360.558.253,00 atau 23,04% dari realisasi belanja modal tahun 2023 yang disebabkan adanya blokir anggaran pada belanja modal sebesar Rp347.971.409.000,00 atau 39,58% dari total pagu anggaran belanja modal KKP tahun 2024.

Terdapat belanja modal KKP tahun 2024 yang menggunakan mekanisme RPATA pada akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan tahun 2025 yaitu:

1. Pembangunan bangunan sayap gedung direktorat pada Satker SUPM Tegal sebesar Rp6.831.117.000,00;
2. Konsultan perencanaan bangunan sayap gedung direktorat TA 2024 pada Satker SUPM Tegal sebesar Rp95.159.467,00;
3. Pembangunan pos pengawasan SDKP Sorong pada Satker PSDKP Tual sebesar Rp299.378.870,00;
4. Pekerjaan peningkatan kapasitas sarana sistem radar terminal dan pengadaan data citra satelit radar pada Satker BPISDKP sebesar Rp10.518.861.000,00.
5. Pekerjaan pembangunan Asrama Permanen sebesar pada Satker BPPP Tegal sebesar Rp983.543.011,00.

Penjelasan atas realisasi Belanja Modal menurut jenis akun kami sajikan di bawah ini:

Belanja Modal Tanah

Rincian Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.599.446.303,00 dan Rp439.146.499,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah menurut Unit Eselon I untuk periode yang

berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel B.51
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Realisasi	
							Naik (Turun)	%
Ditjen PT	70	50	71,43	356	353	99,16	(303)	(85,84)
Ditjen PB	252	252	100,00	0	0	0	252	100
Ditjen PSDKP	1.826	1.826	100,00	22	22	100,00	1.804	8.200,00
BPPSDMKP	644	471	73,14	0	0	0,00	471	100!
BPPMHKP	0	0	0	65	65	100,00	(65)	(100,00)
Total	2.792	2.599	93,09	443	440	99,32	2.159	490,68

Realisasi belanja modal tanah tahun 2024 sebesar Rp2.599.446.303,00 atau 93,09% dari pagu belanja modal tanah sebesar Rp2.792.735.000,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.160.299.804,00. Kenaikan ini disebabkan kenaikan pagu anggaran belanja modal tanah KKP tahun 2024.

Pengadaan belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu:

1. Satker Pangkalan SDKP Jakarta sebesar Rp1.826.222.521,00 berupa pematangan lahan pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Satker BPBAT Sungai Gelam sebesar Rp252.133.501,00 berupa pengadaan timbunan dan pembangunan konstruksi instalasi produksi ikan Dharmasraya;
3. Satker SUPM Tegal sebesar Rp471.223.002,00 berupa pengurukan dan pematangan tanah; dan
4. Satker PPN Pekalongan sebesar Rp49.867.279,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada pos Belanja Modal Tanah diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran Pematangan Lahan pada Satker Pangkalan PSDKP Jakarta senilai Rp8.105.536,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp8.105.536,00 pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN 16CC155DFIG4VMC;
2. Kelebihan pembayaran Pengurukan dan Pematangan tanah Satker SUPM Tegal sebesar Rp24.485.605,89. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.483.000,00 pada tanggal 6 Mei 2025 dengan NTPN 70D1945VVO3IHJG9. Selisih temuan tersebut akan dipotong melalui jaminan yang belum dibayarkan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp167.334.008.148,00 dan Rp388.474.205.810,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.52

**Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
							Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	32.683	26.234	80,27	21.841	21.589	98,85	4.645	21,52
Itjen	2.708	2.708	100,00	2.158	2.157	99,95	551	25,54
Ditjen PT	40.338	36.005	89,26	28.946	28.559	98,66	7.446	26,07
Ditjen PB	27.325	27.292	99,88	34.074	33.705	98,92	(6.413)	(19,03)
Ditjen PSDKP	66.552	36.021	54,12	248.767	248.715	99,98	(212.694)	(85,52)
Ditjen PDSPKP	5.012	3.172	0,00	5.112	5.013	98,06	(1.841)	(36,72)
Ditjen PKRL	95.643	13.294	0,00	14.126	14.034	99,35	(740)	(5,27)
BPPSDM KP	19.829	17.765	89,59	16.111	16.085	99,84	1.680	10,44
BPPMHKP	5.116	4.843	94,66	19.066	18.618	97,65	(13.775)	(73,99)
Total	295.206	167.334	56,68	390.201	388.475	99,56	(221.141)	(56,93)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp167.334.008.148,00 atau 56,68% dari pagu belanja sebesar

Rp295.206.292.000,00. Terdapat penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dari tahun sebelumnya sebesar Rp221.140.197.662,00 atau 56,93%. Adanya deviasi antara pagu anggaran dan realisasi serta penurunan realisasi belanja modal tahun 2023 dibandingkan 2024 diantaranya disebabkan oleh blokir anggaran pada pos belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp124.141.606.000,00,00 atau 42,05% dari total pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2024 yang signifikan diantaranya:

1. Pengadaan *water cannon* pada Setditjen PSDKP sebesar Rp13.996.000.000;
2. Pekerjaan peningkatan kapasitas sarana sistem radar terminal dan pengadaan data citra satelit radar sebesar Rp10.518.861.000,00;
3. Pengadaan alat berat (excavator) pada Setditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.934.800.000,00;
4. Pekerjaan *general overhoul main engine* kapal pengawas Hiu 03 Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp1.926.060.900,00;
5. Pengadaan *Submersible Pump* sebesar Rp1.784.720.000 pada Setditjen Perikanan Budi Daya;
6. *Video Wall* sebesar Rp984.000.000 pada Biro Umum dan PBJ;
7. Pengadaan alat berat pengangkutan sampah di PPS Nizam Zachman sebesar Rp1.276.500.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp266.701.902.287,00 dan Rp199.428.086.339,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.53
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Realisasi	
							Naik (Turun)	%
Setjen	160.790	160.718	99,96	69.750	69.712	99,95	91.006	130,55
Ditjen PT	19.500	14.112	72,37	18.889	18.415	97,49	(4.303)	(23,37)
Ditjen PB	255.750	42.345	16,56	86.823	86.778	99,95	(44.433)	(51,20)
Ditjen PSDKP	19.661	19.620	99,79	6.748	6.285	93,14	13.335	212,17
Ditjen PDSPKP	1.476	1.179	79,88	200	198	99,00	981	495,45
Ditjen PKRL	5.339	5.307	99,40	470	462	98,30	4.845	1.048,70
BPPSDM KP	27.864	21.822	78,32	16.484	16.419	99,61	5.403	32,91
BPPMHKP	1.659	1.598	96,32	1.164	1.158	99,48	440	38,00
Total	492.039	266.701	54,20	200.528	199.427	99,45	67.274	33,73

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp266.701.902.287,00 atau 54,20% dari pagu belanja sebesar Rp492.038.793.000,00. Terdapat blokir anggaran pada pos belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp221.373.797.000,00 atau 44,99% dari total pagu anggaran belanja modal gedung dan bangunan. Penurunan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan adanya pagu blokir pada belanja modal gedung dan bangunan.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang signifikan diantaranya:

1. Pembayaran termin 1 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Morotai sebesar Rp19.516.267.042,00;
2. Pembayaran termin 2 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Morotai sebesar Rp25.490.786.802,00;
3. Pembayaran termin 3 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Morotai sebesar Rp25.490.786.802,00;

4. Pembayaran termin 3 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki sebesar Rp25.528.111.954,00;
5. Pembayaran termin 4 pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki sebesar Rp28.174.832.558,00;
6. Pekerjaan pembangunan tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) sebesar Rp15.838.000.000,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi ruang kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp54.779.662,00. Atas temuan ini masih dalam proses penagihan kepada pihak ketiga;
2. Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki senilai Rp1.790.413.665,00. Atas temuan ini akan dilakukan penyetoran melalui pemotongan pembayaran SP2HL pada tahun 2025;
3. Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan bangunan sayap gedung direktorat pada SUPM Tegal sebesar Rp180.908.364,36. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara melalui pemotongan SPM nomor 00137A tanggal 9 April 2025;
4. Kelebihan pembayaran pekerjaan gedung dan bangunan pada Poltek AUP Jakarta sebesar Rp109.125.924,00. Atas temuan ini seluruhnya telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp109.125.924,00 yaitu:
 - pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp1.694.130,00 dengan NTPN 770E345KQ6H0975B dan sebesar Rp62.468.994 dengan NTPN 03A4E45KQ6H094E7;
 - pada tanggal 13 Desember 2024 sebesar Rp23.639.250,00 dengan NTPN 458D245KQ6I1QKEJ, sebesar Rp3.858.250,00, sebesar Rp2.987.850,00 dengan NTPN C4F260JUS8G6N7F;

- pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp6.091.800,00 dengan NTPN D05060NA0DHN80UU dan sebesar Rp8.385.650,00 dengan NTPN 128E80NA0DH08H78;
5. Kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai sebesar Rp2.458.231.648,02. Atas temuan ini akan dilakukan penyetoran melalui pemotongan pembayaran SP2HL pada tahun 2025.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp32.204.565.667,00 dan Rp15.009.459.521,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.54
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Ditjen PT	0	0	0,00	143	142	99,30	(142)	(100,00)
Ditjen PB	6.677	5.098	76,35	10.353	10.310	99,58	(5.212)	(50,55)
Ditjen PSDKP	23.609	23.411	99,16	2.320	2.314	99,74	21.097	911,71
Ditjen PDSPKP	2.551	2.115	82,91	1.042	1.042	100,00	1.073	102,98
Ditjen PKRL	1.584	1.581	99,81	998	996	99,80	585	58,73
BPPSDM KP	0	0	0,00	209	205	98,09	(205)	(100,00)
Total	34.421	32.205	93,56	15.065	15.009	99,63	17.196	114,57

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan yang disebabkan kenaikan signifikan pada Ditjen Perikanan Budi Daya pada Satker BLUPPB Karawang dan BBPBAT Sukabumi. Beberapa belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai signifikan diantaranya:

1. Pengadaan rehabilitasi jalan produksi blok D pada Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp5.517.793.325,00;
2. Pemasangan turap/dinding penahan tanah pusat produksi benih dan induk di Kabupaten Mesuji pada Satker BBPBAT Sukabumi sebesar Rp4.438.753.602,00;
3. Pengadaan jalan kampus pada Satker Poltek KP Kupang sebesar Rp1.459.866.660,00;
4. Pekerjaan preservasi jalan akses pada BLUPPB Karawang sebesar Rp949.588.000,00;
5. Pengadaan pipa PVC irigasi pada Satker BLUPPB Karawang sebesar Rp882.272.400,00;
6. Pengadaan pipa tambak modeling sebesar Rp760.600.000,00.

Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan diantaranya:

1. Kelebihan pembayaran pekerjaan preservasi jalan akses helipad pada BLUPPB Karawang senilai Rp69.360.003,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp69.361.000,00 pada tanggal 25 Maret 2025 dengan NTPN ABF470NA0DKK8DGO;
2. Kelebihan pembayaran pemasangan turap/dinding penahan tanah pusat produksi benih dan induk di Kabupaten Mesuji pada BBPBAT Sukabumi senilai Rp159.031.530,00. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp159.031.530,00 pada tanggal 24 Februari 2025 dengan NTPN FDB562G502MCJTJS.

Belanja Modal Lainnya

Rincian Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp44.108.098.940,00 dan Rp71.919.535.185,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.55
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	41.084	40.533	98,66	65.767	65.690	99,88	(25.157)	(38,30)
Ditjen PT	825	822	99,64	3.757	3.672	97,74	(2.850)	(77,61)
Ditjen PB	95	95	100,00	239	239	100,00	(144)	(60,25)
Ditjen PDSPKP	2.220	2.065	93,02	499	494	99,00	1.571	318,02
BPPSDM KP	612	594	97,06	1.857	1.825	98,28	(1.231)	(67,45)
Total	44.836	44.109	98,38	72.119	71.920	99,72	(27.811)	(38,67)

Terdapat penurunan realisasi belanja modal lainnya dibandingkan tahun sebelumnya yang secara umum disebabkan penurunan pagu anggaran modal lainnya. Beberapa belanja modal lainnya yang signifikan diantaranya:

1. Pembangunan platform portal dan *big data engine* digitalisasi perizinan pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp12.900.000.000,00;
2. Pengadaan keamanan siber dan infrastruktur dan data analitik pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp9.880.000.000,00;
3. Pembangunan *platform* Integrasi Perizinan KKP pada Satker Biro Umum dan PBJ sebesar Rp7.000.000.000,00;
4. Pengembangan Aplikasi STELINA pada Satker Sekretariat PDSPKP sebesar Rp921.133.500,00;
5. Rehab Trestle Dermaga pada PPN Pengambengan sebesar Rp705.566.847,00;
6. Pekerjaan Swakelola Pengadaan Alat Ukur Uji Kompetensi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp599.405.550,00;
7. Pekerjaan Swakelola Pengadaan Alat Ukur Uji Potensi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp676.023.300,00.

Belanja Modal BLU

Rincian Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.380.295.089,00 dan Rp3.418.441.333,00. Rincian pagu dan realisasi Belanja Modal BLU menurut Unit Eselon I untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel B.56
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023			Komparasi	
							Realisasi	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Naik (Turun)	%
Setjen	2.181	1.888	86,57	295	41	13,90	1.847	4.504,88
Ditjen PB	786	783	99,62	891	880	98,77	(97)	(11,02)
BPPSDM KP	6.881	6.709	97,50	3.769	2.498	66,28	4.211	168,57
Total	9.848	9.380	95,25	4.955	3.419	69,00	5.961	174,35

Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi Belanja Modal BLU mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar Rp5.961.853.756,00 yang disebabkan adanya kenaikan pagu anggaran Belanja Modal BLU. Peningkatan yang signifikan berada di Satker LPMUKP dan BP3 Tegal. Belanja Modal BLU yang cukup signifikan antara lain:

1. Pembangunan asrama bahari *residence* III pada Satker BPPPP Tegal sebesar Rp3.589.752.099,00;
2. Kendaraan bermotor berpenumpang pada Satker LPMUKP sejumlah 2 unit sebesar Rp635.400.000,00;
3. *Smart board* pada Satker LPMUKP sejumlah 4 unit sebesar Rp610.000.000,00;
4. Pengadaan meubelair pendidikan pada Satker BPPP Tegal sebesar Rp655.832.000,00;
5. Pengadaan meubelair perkantoran pada Satker BPPP Tegal sebesar Rp420.437.000,00.

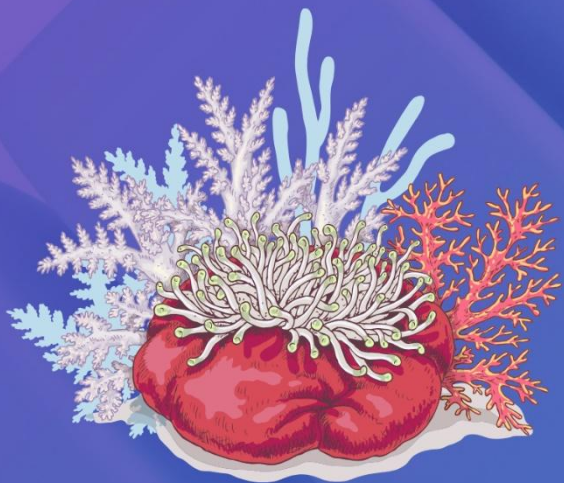
Terdapat temuan pemeriksaan BPK RI pada pos Belanja Modal BLU yaitu kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan asrama bahari *residence* III sebesar Rp211.076.224,55. Atas temuan ini telah dilakukan penyetoran ke rekening RPL 118 BLU BPPP Tegal sebesar Rp211.076.224,55 pada tanggal 24 April 2025. Selain hal tersebut, penyelesaian pekerjaan pembangunan asrama bahari *residence* III terlambat dan belum dikenakan denda senilai Rp267.492.283,00.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.1
Rincian Saldo Aset Lancar Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	215.583.279	206.500	215.376.779	104.298,68
Kas di Bendahara Penerimaan	0	81.395.000	(81.395.000)	(100,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	247.271.846.142	481.649.921.126	(234.378.074.984)	(48,66)
Kas pada Badan Layanan Umum	210.657.196.390	30.779.421.970	179.877.774.420	584,41
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	23.450.000.000	110.950.000.000	(87.500.000.000)	(78,86)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	853.731.100	1.856.560.265	(1.002.829.165)	(54,02)
Uang Muka Belanja (prepayment)	0	0	0	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21.667.904.525	23.106.014.631	(1.438.110.106)	(6,22)
Piutang Bukan Pajak	58.098.228.477	47.500.916.438	10.597.312.039	22,31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(37.330.326.609)	(36.242.472.804)	(1.087.853.805)	3,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	20.767.901.868	11.258.443.634	9.509.458.234	84,47
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	105.339.479	0	105.339.479	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan	(526.698)	0	(526.698)	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	104.812.781	0	104.812.781	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	40.334.387.105	28.745.692.709	11.588.694.396	40,31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(28.682.135.319)	(20.423.296.818)	(8.258.838.501)	40,44
Piutang dari Kegiatan Operasional (Netto)	11.652.251.786	8.322.395.891	3.329.855.895	40,01
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	19.780.175	35.235.000	(15.454.825)	(43,86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU	(98.901)	(35.235.000)	35.136.099	(99,72)
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	19.681.274	0	19.681.274	0,00
Persediaan	159.570.028.616	91.244.601.839	68.325.426.777	74,88
Total	696.230.937.761	759.248.960.856	(63.018.023.095)	(8,30)

C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp215.583.279,00 dan Rp206.500,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa kas uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) adalah sebagai berikut.

Tabel C.2
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Sisa Kas UP	2.000.000	206.500	1.793.500	868,52
Sisa Kas TUP	213.583.279	0	213.583.279	0,00
Total	215.583.279	206.500	215.376.779	104.298,68

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu sebagai berikut.

Tabel C.3
Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah	Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah
1	Ditjen PT	2.000.000	0	2.000.000	206.500	0	206.500
2	BPPSDM KP	0	213.583.279	213.583.279	0	0	0
Total		2.000.000	213.583.279	215.583.279	206.500	0	206.500

Penjelasan ringkas atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan sisa UP pengadaan persediaan yang belum disetor

sebesar Rp2.000.000,00 pada satker DKP Prov. Sulawesi Tenggara. Atas sisa UP tersebut telah disetor ke Kas Negara pada 21 Januari 2025 tanggal dengan NTPN 31F1D2CPT2C2GJ7Q.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan sisa pertanggungjawaban TUP sebesar Rp213.583.279,00 pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP. Atas sisa UP tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2025 dengan NTPN 121FE0JUTF27HDC7.

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari sisa uang penerimaan negara bukan pajak yang belum sempat disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp81.395.000,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.4
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	0	81.395.000	(81.395.000)	(100,00)
Total	0	81.395.000	(81.395.000)	(100,00)

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan pendapatan atas penjualan barang hasil kegiatan penyuluhan dan setoran biaya pendidikan.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp247.271.846.142,00 dan Rp481.649.921.126,00.

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut.

Tabel C.5
Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	21.814.415	21.420.000	394.415	1,84
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	237.152.919.019	481.490.774.994	(244.337.855.975)	(50,75)
Kas Lainnya di BLU	10.097.112.708	137.726.132	9.959.386.576	7.231,30
Total	247.271.846.142	481.649.921.126	(234.378.074.984)	(48,66)

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari Uang Persediaan, dapat berupa bunga jasa giro yang belum disetor ke kas negara, uang pihak ketiga yang belum diserahkan atau pajak yang belum disetor. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.814.415,00 dan Rp21.420.000,00.

Rincian saldo Kas di Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.6
Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	0	21.420.000	(21.420.000)	(100,00)
Ditjen PKRL	113.000	0	113.000	0,00
BPPSDM KP	21.701.415	0	21.701.415	0,00
Total	21.814.415	21.420.000	394.415	1,84

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan pajak honor validator yang belum disetor sebesar Rp113.000,00 pada satker DKP Prov. Sulawesi Tenggara. Pajak tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2025 dengan NTPN 167D75BBSE08HL5Q.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan pajak yang belum disetor berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp9.620.672,00 dan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp12.080.743,00 pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP. Rincian setoran atas pajak tersebut ke Kas Negara dapat dilihat pada lampiran 12 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 ini.

C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp237.152.919.019,00 dan Rp481.490.774.994,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.7
Rincian Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	235.465.034.456	480.157.103.421	(244.692.068.965)	(50,96)
Ditjen PT	306.932.062	450.480.375	(143.548.313)	(31,87)
Ditjen PKRL	1.380.952.501	883.191.198	497.761.303	56,36
Total	237.152.919.019	481.490.774.994	(244.337.855.975)	(50,75)

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Merupakan saldo kas terkait proyek *Development of Fisheries Sector in Outer Islands* dari hibah ODA-Japan *International Cooperation Agency* (JICA) yang dicatat pada Biro Umum dan PBJ. Hibah langsung Pemerintah Jepang melalui JICA untuk pembangunan 6 (enam) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Biak dan Moa berupa pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan yang dimulai dari tahun 2019 dan direncanakan selesai pada tahun 2026. Pengelolaan 6 (enam) SKPT tersebut berada di bawah eselon I Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP.

Hibah tersebut di atas diberikan pada 2 (dua) fase yaitu sebagai berikut.

- a. Fase I dengan sebesar ¥2.500.000,00 dengan nomor register hibah 2FMFRX6A, sesuai *Grant Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2018;
- b. Fase II dengan sebesar ¥3.000.000,00 dengan nomor register hibah 2CK4LTSA, sesuai *Grant Agreement* yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2021.

Dana setiap fase ditempatkan rekening penyalur (dalam mata uang Yen Jepang) dan rekening penampung (dalam mata uang Rupiah Indonesia) yang berbeda. Rekening penampung adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menampung dana hibah dalam mata uang Yen Jepang, sedangkan rekening penyalur adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana Hibah yang berasal dari Rekening penampung. Rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per rekening per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.8
Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening
Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Per 31 Desember 2023 (rekening koran)

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening>Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2023	Kurs Penutup BI	Saldo Neraca Per 31 Des 2023 (dalam Rp)
FASE I				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690254 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.066.088	109,21	109.217.217.470
2	Rekening penyalur - IDR 1960690243 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	65.053.384.739		65.053.384.739
Subtotal				174.270.602.209
FASE II				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690232	2.100.075.250	109,21	229.349.218.053

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening>Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2023	Kurs Penutup BI	Saldo Neraca Per 31 Des 2023 (dalam Rp)
	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa			
2	Rekening penyalur - IDR 1960690221 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	76.537.283.159		76.537.283.159
Subtotal				305.886.501.212
TOTAL				480.157.103.421

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek SKPT JICA per 31 Desember 2024 dalam mata uang rupiah adalah sebagai berikut.

Tabel C.9
Ringkasan Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek SKPT JICA
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah
I	Fase I (No. Register 2FMFRX6A)	
	Saldo Awal per 31 Desember 2023	174.270.602.209
A	Mutasi Tambah	1.538.784.132
1	Penerimaan temuan pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2023 oleh BPK RI 133.813.000	
2	Penerimaan temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja barang dan belanja modal Tahun 2023-2024 di SKPT Moa 349.340.330	
3	Penerimaan temuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja barang dan belanja modal Tahun 2023-2024 pada pekerjaan di SKPT Morotai 118.344.183	
4	Pengesahan pendapatan jasa giro Tahun 2024 937.269.976	
B	Mutasi Kurang	88.413.255.219
1	Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah 82.327.785.873	
2	Selisih Kurs Terealisasi (¥375.000.000 X [104,40 - 109,21]) 1.803.750.000	
3	Selisih Kurs Belum Terealisasi (¥625.073.959 X [102,36 - 109,21]) 4.281.719.346	
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	87.396.131.122
II	Fase II (No. Register 2CK4LTSA)	
	Saldo Awal per 31 Desember 2023	305.886.501.212
A	Mutasi Tambah	1.237.563.873
1	Pengesahan Pendapatan Jas Giro Tahun 2024 1.237.563.873	
B	Mutasi Kurang	159.055.161.751
1	Pengesahan Belanja dari Rekening Rupiah 147.256.619.923	

No	Uraian	Jumlah
2	Selisih Kurs Terealisasi:	
a	Koversi Yen ke Rupiah (¥750.000.000 X 3.607.500.000 [104,40 - 109,21])	
b	Selisih pengesahan karena pagu atas beban kurs yang disetujui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta hanya sebesar Rp2.550.491.000,00. Nilai ini juga menyebabkan saldo rekening per 31 Desember 2025 lebih rendah dari saldo neraca per 31 Desember 2025 (1.057.009.000)	
3	Selisih Kurs Belum Terealisasi (¥1.350.091.997 X 9.248.050.828 [102,36 - 109,21])	
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	148.068.903.334
	Total Saldo Rekening Fase I dan Fase II	235.465.034.456

Rincian pengesahan hibah dari rekening Fase I dan Fase II dapat dilihat pada lampiran 11 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 ini.

Berdasarkan tabel C.9, rincian saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per rekening per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.10
Rincian Saldo Kas di K/L dari Hibah Per Rekening
Pada Satker Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Per 31 Desember 2024 (rekening koran)

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening>Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2024	Kurs Penutup BI	Saldo Neraca Per 31 Des 2024 (dalam Rp)
FASE I				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690254 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	625.073.959	102,36	63.982.570.443
2	Rekening penyalur - IDR 1960690243 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	23.413.560.679		23.413.560.679
Subtotal				87.396.131.122
FASE II				
1	Rekening penampungan - JPY 1960690232 Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.091.997	102,36	138.195.416.813
2	Rekening penyalur - IDR 1960690221	8.816.477.521		8.816.477.521

No.	Jenis Rekening/Mata Uang/Nomor Rekening>Nama Rekening	Saldo Rekening Per 31 Des 2024	Kurs Penutup BI	Saldo Neraca Per 31 Des 2024 (dalam Rp)
	Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa			
Subtotal				147.011.894.334
TOTAL				234.408.025.456

Belanja pada hibah JICA merupakan pembayaran pekerjaan pembangunan pada SKPT antara lain Konstruksi proteksi tiang pancang dermaga tambahan PPI Fandoi SKPT Biak sebesar Rp750.988.000,00; Pengawasan pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Morotai sebesar Rp327.198.625,00; Konstruksi pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Mototai sebesar Rp7.579.125.075,00; Perizinan reklamasi untuk pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Natuna sebesar Rp99.250.000,00 dan Konstruksi pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Sabang sebesar Rp13.076.800.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan saldo kas terkait proyek *The Eco-System Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia* dari hibah *Global Environmental Facility (GEF-6)* pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Project GEF merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *WWF-US GEF Agency*. Program ini merupakan bagian dari program perikanan global yang disebut CFI (*Coastal Fisheries Initiative*) yang mencakup 3 wilayah geografi, yaitu Amerika Latin, Afrika Barat dan Indonesia. Dengan demikian, program ini memberi kesempatan kepada setiap negara di wilayah ini untuk saling berbagi pengetahuan, inovasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam pengelolaan perikanan pantai. Hibah GEF-6 CFI untuk Indonesia ini diawali dengan penandatanganan *grant agreement* antara Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan *WWF-US GEF Agency* pada tanggal 23 Desember 2019 serta telah didaftarkan sebagai hibah langsung barang dan jasa ke Kementerian Keuangan, dengan register No. 2QTS8A9A per tanggal 10 Februari 2020.

Dalam struktur pelaksanaan hibah, Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap bertindak sebagai *Executing Agency*, sedangkan *WWF GEF Agency* merupakan *Implementing Agency*. Dalam dokumen *grant agreement* kegiatan GEF ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2025. Poyek Hibah ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Implementasi EAFM (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) di Indonesia Timur (*Area Manajemen Perikanan* (FMA) 715, 717 & 718), dimana dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi atas 3 komponen, yaitu.

- a. Komponen A: Penerapan EAFM pada FMA 715,717 & 718;
- b. Komponen B: Penerapan Proyek Perbaikan Perikanan pada FMA 715,717 & 718; dan
- c. Komponen D: Penerapan pengelolaan pengetahuan, Pengawasan dan Evaluasi perikanan pesisir yang berkelanjutan pada FMA 715, 717 & 718.

Total Hibah yang Diterima (dalam bentuk uang) sebesar \$7.375.690 atau Rp103.093.706.975,00 (Kurs 1 US\$ = Rp13.977,50 tanggal 23 Desember 2019). Jumlah hibah yang telah digunakan sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp43.013.363.337,00 sedangkan saldo kas pada rekening per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp450.480.375,00.

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek GEF-6 per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.11
Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada Proyek GEF-6
Per 31 Desember 2024

Uraian			Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2024			450.480.375
Mutasi Tambah:			25.654.255.330
1	Penambahan kas Hibah	19.997.323.268	
2	Penambahan kas Hibah	5.656.932.062	
Mutasi Kurang:			(25.797.803.643)
1	Pengesahan Belanja Nomor 01507T/238720/2024	450.000.000	
2	Pengesahan Belanja Nomor 03694T/238720/2024 dan 03701T/238720/2024	25.347.803.643	
Saldo Per 31 Desember 2024			306.932.062

Penjelasan pengesahan belanja pada hibah GEF-6 adalah sebagai berikut.

- a. Pengesahan Nomor 01507T/238720/2024 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan pengesahan belanja *Project Steering Comitee* GEF-6 dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp150.00.000,00 dan Monitoring pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP NRI) nomor 715, 717 dan 718 sebesar Rp300.000.000,00.
- b. Pengesahan nomor 03694T dan 03701T/238720/2024 sebesar Rp25.347.803.643,00 merupakan pengesahan belanja antara lain Konsultasi publik RPP ikan terbang di WPPNRI 718 sebesar Rp377.356.000,00; Legalitas produk olahan perikanan dan digital marketing bagi kelompok wanita nelayan di Maluku Tenggara sebesar Rp340.220.000,00; Pengadaan bantuan alat sistem pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)-VMS sebesar Rp431.400.000,00; Fasilitasi stakeholders meeting dan konsultasi publik rencana pengelolaan perikanan (RPP) kepiting bakau sebesar Rp655.236.000,00; Survei ekologi dan sosial monitoring kawasan konservasi baru (*New MPA*) Pulau Buru Selatan, Kab. Buru Selatan sebesar

Rp402.472.000,00; Ekspedisi penangkapan ikan terukur di Pulau Buru, Kab. Buru sebesar Rp1.149.656.933,00; Fasilitas sistem manajemen pengetahuan bagi para enumerator/penyuluh perikanan di WPP 715, 717, dan 718 sebesar Rp300.000.000,00; Optimasi peran masyarakat dan pengusaha dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui peningkatan produk bernilai tambah, komersial tinggi dan berbasis sumber daya lokal sebesar Rp323.191.000,00; Pertemuan regional LPP WPP NRI 715 dalam rangka sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2023 sebesar Rp355.895.000,00; Seminar internasional penangkapan ikan terukur (ISOSS) 2024 sebesar Rp473.118.000,00; konsultasi publik RPP WPP NRI 715 sebesar Rp384.381.000,00; konsultasi publik RPP WPP NRI 717 sebesar Rp377.651.000,00; *Annual reflection meetings* tahun 2024 dan penyusunan AWPB tahun 2025 sebesar Rp774.588.632,00; Fasilitas peningkatan kapasitas petugas pendata PNBK perikanan tangkap sebesar Rp567.631.000,00; Fasilitas peningkatan kapasitas observer dalam mendukung penangkapan ikan terukur sebesar Rp500.000.000,00; Pertemuan regional LPP WPP NRI 717 dalam rangka sosialisasi pp 11 tahun 2023 sebesar Rp307.946.000,00; Pertemuan regional LPP WPP NRI 718 dalam rangka sosialisasi PP Nomor 11 tahun 2023 sebesar Rp400.000.000,00; *The 10th GEF Biennial International Waters Conference (IWC10)* - uruguay sebesar Rp571.112.000,00; *Knowledge Exchange* (menghadiri Sustainable Water Management and Resource Adaptation) di Paris sebesar Rp511.675.000,00; dan *WWF US visit* di Indonesia sebesar Rp516.311.000,00.

3. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan hibah luar negeri berasal dari *Korea Maritime and Ocean University Concorcium* (KMOUC) dengan kegiatan *The Establishment of Marine and Fisheries Scientific and Technical Cooperation* yang merupakan pemindahan saldo kas hibah dari Unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP pada satker Pusat Riset Perikanan dengan nilai awal Rp1.054.044.198,00.

Pemindahan pengelolaan kerja sama dikarenakan secara strategis proyek kerja sama ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi pada satker Direktorat Jasa Kelautan yang ada pada Unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan bangunan dan instalasi laut dan wisata bahari. Selain itu kegiatan ini mendukung kebijakan pengelolaan pesisir dalam rencana Tata Ruang maupun rencana Zonasi kawasan RZP di kawasan yang memiliki anjungan minyak dan gas lepas pantai pasca produksi sebagaimana tugas fungsi Ditjen PKRL.

Ringkasan mutasi Nilai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah pada proyek KMOUC per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.12
Rincian Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah Pada KMOUC
Per 31 Desember 2024

Uraian					Nilai
Saldo per 1 Januari 2024					883.191.198
Mutasi Tambah:					1.008.181.303
1	Pengesahan Kas Hibah Nomor 1271T/622145/2024			1.008.181.303	
Mutasi Kurang:					510.420.000
2	Pengesahan Belanja:			503.447.060	
	a.	03246T/622145/2024	382.308.110		
	b.	03785T/622145/2024	37.456.500		
	c.	04077T/622145/2024	11.592.092		

Uraian					Nilai
	d.	04143T/622145/2024	21.199.020		
	e.	04926T/622145/2024	50.891.338		
3	Pengembalian hibah			6.972.940	
Saldo Per 31 Desember 2024					1.380.952.501

Belanja pada hibah KMOUC merupakan pembiayaan koordinasi dan survei (monitoring) dampak ekologi dan sosial ekonomi terhadap kegiatan *pilot project rig to reef* di Kota Bontang.

C.1.3.3 Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU)

Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.097.112.708,00 dan Rp137.726.132,00.

Rincian saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.13
Rincian Saldo Kas Lainnya di Badan Layanan Umum
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	202.075.608	77.540.831	124.534.777	160,61
Ditjen PB	9.684.074.100	30.000.001	9.654.074.099	32.180,25
BPPSDM KP	210.963.000	30.185.300	180.777.700	598,89
Total	10.097.112.708	137.726.132	9.959.386.576	7.231,30

Penjelasan ringkas atas saldo Kas Lainnya di BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Kas Lainnya di BLU pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker LPMUKP yang merupakan uang masuk ke rekening BLU yang belum atau tidak diakui sebagai haknya BLU. Terdiri atas transaksi yang masih dalam proses identifikasi, kelebihan pembayaran oleh Debitur yang sudah lunas (akan

ditransfer kembali ke debitur yang bersangkutan) dan penerimaan pembayaran provisi atas dana bergulir yang belum dicairkan sebesar Rp202.075.608,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen Perikanan Budi Daya hanya terdapat satker BPBAP Situbondo yang merupakan dana pihak ketiga berupa uang muka dari perusahaan *Joint Venture* terkait kerja sama BLU Budidaya benih bening lobster (BBL) sebesar Rp9.684.074.100,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker BPPP Tegal yang merupakan pembayaran uang muka dari peserta untuk pelatihan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 sebesar Rp210.963.000,00.

C.1.4 Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo yang berasal dari akumulasi bersih pengesahan pendapatan PNPB BLU dan belanja BLU yang bersumber dari PNPB. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp210.657.196.390,00 dan Rp30.779.421.970,00.

Rincian saldo Kas Lainnya Pada Layanan Umum adalah sebagai berikut.

Tabel C.14
Rincian Saldo Kas dan Bank BLU Per Satker
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Satker	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	137.803.500.539	14.569.316.359	123.234.184.180	845,85
- LPMUKP	137.803.500.539	14.569.316.359	123.234.184.180	845,85
Ditjen PB	68.221.487.743	13.966.932.778	54.254.554.965	388,45
- BBPBAP Jepara	2.060.041.640	1.639.456.096	420.585.544	25,65
- BLUPPB Karawang	6.357.920.758	9.620.289.550	(3.262.368.792)	(33,91)

Nama Satker	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
- BPBAP Situbondo	59.803.525.345	2.707.187.132	57.096.338.213	2.109,07
BPPSDMKP	4.632.208.108	2.243.172.833	2.389.035.275	106,50
- BPPP Tegal	1.116.089.695	963.979.677	152.110.018	15,78
- Poltek KP Sidoarjo	3.516.118.413	1.279.193.156	2.236.925.257	174,87
Total	210.657.196.390	30.779.421.970	179.877.774.420	584,41

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp179.877.774.420,00 atau 584,41% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, hal ini disebabkan antara lain.

- Pencairan Investasi jangka pendek (deposito) oleh LPMUKP pada akhir tahun 2024. Terlihat pada penurunan saldo investasi jangka pendek LPMUKP per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.000.000.000,00 atau sebesar 88,78% dibanding periode 31 Desember 2023;
- Peningkatan pendapatan yang cukup signifikan pada BLU BPBAP Situbondo.

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum tersimpan dalam beberapa rekening bank yang dimiliki satker BLU (Rekening RPL) yang secara umum fungsinya sebagai penampung penerimaan dan untuk pengeluaran. Rincian saldo rekening bank pada masing-masing satker BLU per rekening Bank per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah berikut ini.

Tabel C.15
Rincian Saldo Rekening Operasional BLU
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Nama Bank	Peruntukan	Saldo	
			31 Des 2024	31 Des 2023
Sekretariat Jenderal			139.823.420.379	14.714.971.855
Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP			139.823.420.379	14.714.971.855
1	Bank Negara Indonesia	Rekening Operasional Penerimaan	30.769.826.102	13.537.659.317
2	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Penerimaan	109.053.594.277	1.177.312.538
3	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Pengeluaran	0	0
4	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Divisi Keuangan dan Pengelolaan Risiko	0	0

No.	Nama Bank	Peruntukan	Saldo	
			31 Des 2024	31 Des 2023
5	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Divisi Sistem Pengendalian Intern	0	0
6	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Divisi Perencanaan dan Umum	0	0
7	Bank Rakyat Indonesia	Rekening Operasional Divisi Operasional dan Kemitraan Usaha	0	0
Ditjen Perikanan Budi Daya			77.905.561.852	13.966.932.782
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang			6.357.920.758	9.620.289.551
1	Bank Jawa Barat	Rekening Operasional Penerimaan 1	6.357.920.758	9.620.289.551
2	Bank Jawa Barat	Rekening Operasional Penerimaan 2	0	0
3	Bank Jawa Barat	Rekening Dana Kelola	0	0
4	Bank Jawa Barat	Rekening PKE	0	0
Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara			2.060.041.647	1.639.456.098
1	Bank Tabungan Negara	Rekening Operasional 1	40.582	10.508.592
2	Bank Tabungan Negara	Rekening Operasional 2	0	0
3	Bank Tabungan Negara	Rekening PKE	2.059.967.778	1.628.947.506
4	Bank Tabungan Negara	Rekening Dana Kelolaan	33.287	0
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo			69.487.599.447	2.707.187.133
1	Bank Mandiri	Rekening Operasional Penerimaan	59.749.027.036	2.707.167.167
2	Bank Mandiri	Rekening Operasional Pengeluaran	16.779	0
3	Bank Mandiri	Rekening Dana Kelolaan	9.738.555.632	19.966
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP			4.843.169.710	2.267.571.923
Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal			1.327.051.288	988.378.677
1	Bank Tabungan Negara	Rekening Operasional Penerimaan	1.115.869.564	963.969.297
2	Bank Tabungan Negara	Rekening Operasional Pengeluaran	140.902	6.684
3	Bank Tabungan Negara	Rekening Dana Kelolaan	211.039.318	24.400.403
4	Bank Tabungan Negara	Rekening Pengelolaan Kas	984	984
5	Bank Tabungan Negara	Rekening Operasional Penerimaan (Bahari Residence)	520	1.309
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo			3.516.118.422	1.279.193.246
1	Bank Mandiri	Rekening Operasional Dana Kelola	5.180	0
2	Bank Mandiri	Rekening Pengelolaan Operasional Mahasiswa Baru	1.093.594.869	0
3	Bank Mandiri	Rekening Operasional Penerimaan	2.422.462.561	1.279.149.701
3	Bank Mandiri	Rekening Operasional Pengeluaran	55.812	43.545
Total			222.572.151.940	30.949.476.560

Kas pada Badan Layanan Umum pada Neraca per 31 Desember 2024 dan akumulasi saldo rekening bank per 31 Desember 2024 adalah

masing-masing sebesar Rp220.754.309.098,00 dan Rp222.572.151.940,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.817.842.842,00 lebih besar saldo rekening Bank dibandingkan dengan saldo pada neraca dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel C.16
Perbandingan Saldo Kas dan Bank BLU pada Neraca dengan
Saldo Rekening BLU per 31 Desember 2024

No	Badan Layanan Umum	Neraca 31 Des 2024			Saldo Rekening Bank Per 31 Des 2024	Selisih
		Kas Pada BLU	Kas Lainnya	Total		
1	LPMUKP	137.803.500.539	202.075.608	138.005.576.147	139.823.420.379	(1.817.844.232)
2	BLUPPB Karawang	6.357.920.758	-	6.357.920.758	6.357.920.758	-
3	BBPBAP Jepara	2.060.041.640	-	2.060.041.640	2.060.041.647	(7)
4	BPBAP Situbondo	59.803.525.345	9.684.074.100	69.487.599.445	69.487.599.447	(2)
5	BP3 Tegal	1.116.089.695	210.963.000	1.327.052.695	1.327.051.288	1.407
6	Poltek KP Sidoarjo	3.516.118.413	-	3.516.118.413	3.516.118.422	(9)
Total		210.657.196.390	10.097.112.708	220.754.309.098	222.572.151.940	(1.817.842.842)

Penjelasan selisih antara Saldo Kas pada Badan Layanan Umum pada Neraca per 31 Desember 2024 dengan akumulasi saldo rekening bank per 31 Desember 2024 pada masing-masing satker BLU adalah sebagai berikut.

1. Pada BLU LPMUKP, saldo rekening koran lebih besar Rp1.817.844.232,00 dibandingkan saldo neraca, dengan penjelasan per tanggal 31 Desember 2024 masih terdapat:
 - a. Angsuran pokok di rekening Operasional senilai Rp2.150.548.830,00, yaitu pada rekening BRI RPL 175 sebesar Rp1.292.739.919,00 dan rekening BNI RPL 175 sebesar Rp857.808.911,00. Total nilai sebesar Rp2.150.548.830,00 telah dipindahbukukan ke Rekening Dana Kelolaan pada tanggal 30 Januari 2025.
 - b. Angsuran jasa layanan di rekening Dana Kelolaan senilai (Rp313.321.097,00), yaitu pada rekening BRI RPL 019 sebesar Rp127.075.374,00 dan rekening BNI RPL 019 sebesar

Rp186.245.723,00. Total nilai sejumlah Rp313.321.097,00 telah dipindahbukukan ke Rekening Operasional Penerimaan pada tanggal 30 Januari 2025.

- c. Pembayaran Provisi sebesar Rp15.000.000,00 di rekening Dana Kelolaan dan telah dipindahbukukan ke rekening Operasional penerimaan pada tanggal 30 Januari 2025.
 - d. Kas Lainnya-BLU pada rekening Dana Kelolaan sejumlah Rp4.383.500,00 dan telah dipindahbukukan ke rekening Operasional penerimaan pada tanggal 30 Januari 2025.
2. Pada BLU BPPP Tegal terdapat selisih sebesar Rp1.407,00 yang merupakan bunga atas rekening dana kelolaan akhir tahun 2023 yang disahkan dua kali, akan dikoreksi pada semester TA 2025.
 3. Pada BLU BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, dan Poltek KP Sidoarjo terdapat selisih masing-masing sebesar Rp7,00; Rp2,00; dan 9,00; merupakan akumulasi dari pencatatan di belakang koma yang tidak terakomodasi dalam aplikasi SAKTI.

C.1.5 Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum adalah investasi pada deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya dari kas dari bank BLU yang dibatasi penggunaannya. Saldo Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.450.000.000,00 dan Rp110.950.000.000,00.

Rincian saldo Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut.

Tabel C.17
Rincian Saldo Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	12.000.000.000	107.000.000.000	(95.000.000.000)	(88,79)
DJPB	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0,00
BPPSDM KP	6.450.000.000	3.950.000.000	2.500.000.000	63,29
Total	23.450.000.000	110.950.000.000	(87.500.000.000)	(78,86)

Daftar rincian deposito pada masing-masing satker adalah sebagai berikut.

Tabel C.18
Rincian Saldo Deposito BLU pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Bank	Jangka Waktu	Nominal	Keterangan
Sekretariat Jenderal			12.000.000.000	
Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP			12.000.000.000	
1	Bank BRI	3 Bulan	10.000.000.000	
2	Bank BRI	3 Bulan	2.000.000.000	
Ditjen Perikanan Budi Daya			5.000.000.000	
BPBAP Situbondo			5.000.000.000	
1	Bank BTN	3 Bulan	5.000.000.000	
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP			6.450.000.000	
Badan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal			5.850.000.000	
1	Bank Tabungan Negara	3 bulan	1.350.000.000	
2	Bank Tabungan Negara	3 bulan	1.000.000.000	
3	Bank Tabungan Negara	3 bulan	1.000.000.000	
4	Bank Tabungan Negara	3 bulan	1.000.000.000	
5	Bank Tabungan Negara	3 bulan	1.500.000.000	
Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo			600.000.000	
1	Bank Mandiri	3 bulan	600.000.000	
Total			23.450.000.000	

C.1.6 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 hanya berupa Belanja Dibayar Dimuka. Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp853.731.100,00 dan Rp1.856.560.265,00.

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.19
Rincian Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	0	332.816.000	(332.816.000)	(100,00)
Ditjen PSDKP	108.964.167	224.264.582	(115.300.415)	(51,41)
Ditjen PKRL	0	548.385.782	(548.385.782)	(100,00)
BPPSDM KP	676.058.333	616.441.667	59.616.666	9,67
BPPMH KP	68.708.600	134.652.234	(65.943.634)	(48,97)
Total	853.731.100	1.856.560.265	(1.002.829.165)	(54,02)

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu sebagai berikut.

a. Pangkalan PSDKP Lampulo

Merupakan sewa gedung satuan pengawas Aceh Barat sebesar Rp1.250.000,00; sewa gedung satuan pengawas Simeulue sebesar Rp1.250.000,00 dan sewa gedung Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp4.166.667,00.

b. Stasiun PSDKP Ambon

Merupakan sewa bangunan untuk gudang arsip sebesar Rp8.000.000,00 dan sewa gedung wilayah kerja Masohi sebesar Rp8.000.000,00.

c. Pangkalan PSDKP Benoa

Merupakan sewa kantor di Gili Air, Lombok Utara sebesar Rp52.500.000,00.

d. Stasiun PSDKP Belawan

Merupakan sewa gedung dan bangunan sebesar Rp33.797.500,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan biaya pendidikan ASN sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang tugas belajar sebesar Rp676.058.333,00.

3. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat 4 (empat) pada satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai KIPM Medan I

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp3.750.000,00.

b. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan sewa *digi sign Slim Floorstand* 55 inchi sebesar Rp27.200.000,00.

c. Balai KIPM Lampung

Merupakan sewa gudang arsip sebesar Rp7.500.000,00.

d. Stasiun KIPM Sorong

Merupakan biaya langganan internet sebesar Rp30.258.600,00.

C.1.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Berdasarkan perhitungan secara akuntansi, yang sudah menjadi hak pemerintah tersebut dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima dan diakui sebagai pendapatan di periode berjalan. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.667.904.525,00 dan Rp23.106.014.631,00.

Rincian saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.20
Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	661.683.530	1.275.611.868	(613.928.338)	(48,13)
Ditjen PT	20.895.800.631	19.813.818.803	1.081.981.828	5,46
BPPSDM KP	110.420.364	2.016.583.960	(1.906.163.596)	(94,52)
Total	21.667.904.525	23.106.014.631	(1.438.110.106)	(6,22)

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretraiat Jenderal

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Sekretariat Jenderal hanya terdapat satker BLU LPMUKP yang merupakan:

- a. Bunga penempatan deposito pada BLU LPMUKP yang sudah menjadi hak BLU Lembaga Pengelolaan Modal Usaha KP sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebesar Rp36.164.384,00. Penempatan deposito tersebut berasal dari dana menganggur (*idle cash*) dari Kas BLU (Investasi Jangka Pendek – BLU) dan Dana Kelolaan BLU.
- b. Pendapatan jasa layanan yang sudah menjadi hak BLU LPMUKP sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo. Pendapatan tersebut dihitung secara proporsional selama 6 (enam) hari dari tanggal 26 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp625.519.146,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat 20 (dua puluh) pada satker yaitu sebagai berikut.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan PNPB pascaproduksi dari lembar penilaian sendiri (LPS) dari 173 (seratus tujuh puluh tiga) kapal yang belum terkonfirmasi sebesar Rp3.465.510.827,00.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 30 (tiga puluh) kapal sebesar Rp273.136.408,00.

c. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 251 (dua ratus lima puluh satu) kapal sebesar Rp241.496.283,00 serta jasa penggunaan air dan listrik yang jatuh tempo pada bulan Januari 2025 masing-masing sebesar Rp294.680,00 dan Rp18.449.703,00.

d. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman

Merupakan jasa tambat labuh dari kapal perikanan sebesar Rp13.917.379.829,00 dan kapal non perikanan sebesar Rp199.939.600,00 serta kebersihan kolam dari kapal perikanan sebesar Rp1.383.457.538,00 dan kapal non perikanan sebesar Rp57.205.650,00. Terdapat Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman yang tidak dapat ditelusuri sehingga berpotensi tidak dapat tertagih dengan rincian per 4 Maret 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C.21
Rincian Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Pada Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman
Per 31 Desember 2024

No	Jumlah Kapal	Nilai PYMHD	Keterangan
1	224	2.035.236.640	PYMHD kapal perikanan masuk kolam pelabuhan tahun 2024 yang teridentifikasi dapat membayar
2	4	38.076.050	PYMHD kapal non perikanan masuk kolam pelabuhan tahun 2024 yang teridentifikasi dapat membayar
3	96	8.665.565.186	PYMHD kapal perikanan yang masuk kolam pelabuhan PPS Nizam Zachman tahun 2020 s.d. 2023 yang teridentifikasi tidak dapat membayar

No	Jumlah Kapal	Nilai PYMHD	Keterangan
4	12	2.991.407.970	PYMHD kapal perikanan dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi serta berpotensi tidak tertagih
Total		13.730.285.846	

e. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan

Merupakan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari 176 (seratus tujuh puluh enam) kapal sebesar Rp892.265.715,00 serta jasa penggunaan air dan listrik yang jatuh tempo pada bulan Januari 2025 masing-masing sebesar Rp34.658.804,00 dan Rp24.089.122,00.

f. Satuan Kerja Lainnya

Merupakan jasa tambat dan labuh, biaya kebersihan kolam, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tuisi (listrik, air dan lain-lain) sampai dengan 31 Desember 2024 pada 15 (lima belas) satuan kerja sebesar Rp387.916.472,00.

3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP hanya terdapat pada satker BP3 Tegal yang merupakan.

- Pengakuan pendapatan kompensasi tetap KSO pemanfaatan aquarium Indonesia periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023 belum jatuh tempo sebesar Rp64.153.537,00.
- Pengakuan pendapatan hotel aquarium Indonesia periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2023 belum jatuh tempo sebesar Rp9.004.500,00.
- Bunga penempatan deposito pada BLU LPMUKP yang sudah menjadi hak BLU BP3 Tegal sampai dengan 31 Desember 2023 namun belum jatuh tempo sebesar Rp37.262.327,00.

C.1.8 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Piutang diakui apabila memenuhi kondisi sebagai berikut.

1. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai ketentuan hukum tetap.
2. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah sebagai berikut.

Tabel C.22
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan	

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.098.228.477,00 dan Rp47.500.916.438,00. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.23
Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun / Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	30.053.705.189	32.227.900.374	(2.174.195.185)	(6,75)
Ditjen PT	22.669.504.139	28.360.451.003	(5.690.946.864)	(20,07)
Ditjen PB	84.000.000	230.440.000	(146.440.000)	(63,55)
Ditjen PSDKP	2.502.785.101	184.302.000	2.318.483.101	1.257,98
Ditjen PDSPKP	1.839.391.122	892.546.543	946.844.579	106,08
Ditjen PKRL	2.559.256.077	2.380.703.328	178.552.749	7,50
BPPSDM KP	398.768.750	179.457.500	219.311.250	122,21
Piutang Lainnya	28.044.523.288	15.273.016.064	12.771.507.224	83,62
Setjen	1.367.029.603	379.746.636	987.282.967	259,98
Itjen	0	23.878.250	(23.878.250)	(100,00)
Ditjen PT	7.158.223.258	6.424.758.512	733.464.746	11,42
Ditjen PB	5.521.882.227	1.633.792.809	3.888.089.418	237,98
Ditjen PSDKP	94.024.497	1.357.116.695	(1.263.092.198)	(93,07)
Ditjen PDSPKP	132.996.271	424.636.073	(291.639.802)	(68,68)
Ditjen PKRL	8.680.635.245	451.695.122	8.228.940.123	1.821,79
BPPSDM KP	5.076.651.871	4.487.586.195	589.065.676	13,13
BPPMH KP	13.080.316	89.805.772	(76.725.456)	(85,43)
Total	58.098.228.477	47.500.916.438	10.597.312.039	22,31

Saldo Piutang PNBPN yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Piutang PNBPN pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.318.483.101,00 yang secara umum disebabkan oleh piutang atas pelanggaran administratif pada 2 (dua) debitur masing-masing sebesar Rp1.143.538.189,00 dan Rp1.067.996.160,00.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Piutang PNBPN pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.690.946.864,00 yang secara umum disebabkan oleh pembayaran tunggakan pungutan hasil perikanan sebesar Rp2.080.024.844,00 pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dan pelunasan piutang atas nama PT HOI sebesar Rp3.326.398.332,00 (termasuk pelunasan pada *crash* program sebesar Rp2.155.730.804,00) pada satker PPN Kejawatan.

Sedangkan saldo Piutang Lainnya yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Piutang Lainnya pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.888.089.418,00 yang secara umum disebabkan oleh pembukuan piutang atas temuan pemeriksaan APIP terkait honor fasilitator kegiatan yang didanai oleh IISAP (pinjaman luar negeri) sebesar Rp4.090.275.00,00 dan pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8.228.940.123,00 yang secara umum disebabkan oleh pembukuan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi a.n EMPG Ltd sebesar Rp622.088.463,00 dan a.n PT VI sebesar Rp7.651.385.844,00.

2. Penurunan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Piutang Lainnya pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar

Rp1.263.092.198,00 yang secara umum disebabkan oleh pelunasan piutang atas temuan kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp270.000,00, kekurangan volume atas Pekerjaan Renovasi Konstruksi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan sebesar Rp175.802.712,00, kelebihan pembayaran uang makan ASN bulan Desember 2023 sebesar Rp17.834.650,00, kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka Diklat Dasar JF Pengawas Perikanan Keahlian di Ambon dan Medan sebesar Rp149.954.864,00, kelebihan pembayaran tunjangan kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp60.645.600,00 dan kelebihan Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) senilai Rp879.458.815,00.

Pada Tahun 2024 Kementerian Keuangan program optimalisasi penyelesaian Piutang Negara (*crash program*). Program ini memberikan keringanan utang berupa pengurangan pembayaran utang kepada penanggung utang. Keringanan utang ini dapat berupa pengurangan pokok, bunga, denda, dan/atau ongkos/biaya lainnya. Adapun debitur KKP yang mengikuti *crash program* adalah sebagai berikut.

1. Piutang atas temuan pemeriksaan BPK nomor 19.C/LHP/XVII/05/2012 tanggal 21 Mei 2012 a.n. PT CBI sebesar Rp832.996.000,00 pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
2. Piutang atas temuan pemeriksaan BPK nomor 05/LHP/XVII/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 berupa denda keterlambatan pekerjaan proyek pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. a.n. PT LFG sebesar Rp280.964.200,00;
3. Piutang atas temuan pemeriksaan BPK-RI nomor 4.C/LHP/XVII/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 a.n. PT PKB sebesar Rp182.700.065,00 pada satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bulukumba;

4. Piutang atas temuan pemeriksaan BPK nomor 25/LHP/XVH/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 berupa kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan a.n. PT KM sebesar Rp597.936.000,00 pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
5. Piutang atas temuan pemeriksana BPK nomor 25/LHP/XVH/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 berupa denda keterlambatan pekerjaan a.n. PT KMM pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;
6. Piutang atas tunggakan PNBPN sumber daya alam perikanan yang bersumber dari pungutan hasil perikanan (PHP) a.n. PT Hdg sebesar Rp1.630.391.355,00;
7. Piutang PNBPN jasa tambat labuh dan kebersihan kolam untuk kapal non perikanan serta biaya pemeliharaan dan kebersihan kawasan untuk sewa tanah a.n. PT HOI sebesar Rp2.155.730.804,00 pada satker PPN Kejawanan; dan
8. Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI nomor 22C/LHP/XVII/06/2017 Tanggal 16 Juni 2017 berupa kekurangan volume alat komunikasi dan peralatan monitoring pokmaswas a.n. CV PRM sebesar Rp24.450.000,00 pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Penjelasan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.1.8.1 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penjelasan rinci atas saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 9 (sembilan) satker yaitu sebagai berikut.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan piutang sebagai berikut.

- Piutang atas tunggakan pungutan hasil perikanan (PHP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai LHP Nomor 39/LHP/XVII/11/2013 tanggal 19 November 2013 yang disebabkan penyesuaian harga patokan ikan pada peraturan Menteri Perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 sebesar Rp28.876.531.364,00 yang berasal dari 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) kapal di atas 30 GT milik 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp14.228.126.264,00 (termasuk *crash program* PT H sebesar Rp1.110.390.866,00) sehingga saldo piutang PHP per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.648.405.100,00. Piutang ini diklasifikasikan sebagai piutang macet karena setelah dilakukan penagihan lebih dari 3 (tiga) kali terhadap 468 (empat ratus enam puluh delapan) kapal penunggak pungutan hasil perikanan sampai 31 Desember 2024 belum melunasi kewajibannya dan sudah disisihkan 100% sebagai piutang tidak tertagih; dan
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa selisih laporan perhitungan sendiri (LPS) PNBK pasca produksi pada 3 (tiga) kapal yaitu atas nama kapal JM-1 sebesar Rp20.774.042,00,00; kapal EN sebesar Rp1.882.785,00 dan Kapal BCS sebesar Rp990.000,00.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Merupakan piutang atas jasa pelayanan pelabuhan, air, dan *cold storage* sebesar Rp19.459.538,00.

c. Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman

Merupakan piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, serta piutang atas tagihan jasa listrik, jasa gedung bangunan dan jasa kebersihan yang berasal dari LHA

Itjen, LHP BPK dan Piutang PNBPN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.24
Rincian saldo Piutang PNBPN pada PPS Nizam Zachman
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023
LHA Itjen 2022 (Periode Aktivitas 2019-2020)	68.210.375	503.677.626
Piutang non tambat 2021	31.080.000	45.720.000
LHP BPK RI 2021 (22M) (Periode Aktivitas 2019-2020)	59.054.131	62.073.990
Piutang Tambat Labuh 2023 (KM. AS - II)	0	79.739.000
Jumlah	158.344.506	691.210.616

d. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari

Merupakan piutang atas piutang atas penggunaan sarana dan prasarana atas nama CV. BC (sudah diserahkan ke PUPN pada tahun 2021) sebesar Rp11.509.294,00 dan piutang penggunaan sarana dan prasarana sebanyak 7 (tujuh) debitur sebesar Rp132.532.659,00 serta piutang atas penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi di PP Untia atas nama Koperasi P sebesar Rp 4.307.016,00 dan atas nama CV. MI (sudah diserahkan ke PUPN pada tanggal 26 September 2024) sebesar Rp37.474.918,00.

e. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Piutang atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam PT HOI sebesar Rp14.070.311.650,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN). Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama sebesar Rp11.914.580.846,00 pada tanggal 18 Februari 2018 dan penyerahan kedua sebesar Rp2.155.730.804,00 pada tanggal 4 Februari 2019. Selama tahun 2024 terdapat pembayaran sebesar Rp3.326.398.332,00 yang diantaranya merupakan pelunasan penyerahan piutang tahap kedua sebesar Rp2.155.730.804,00 (memanfaatkan

crash program dari Pemerintah). Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.543.913.324,00.

f. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

Merupakan piutang atas jasa pelabuhan perikanan berupa tambat labuh, kebersihan kolam dan lain-lain dari 16 (enam belas) debitur sebesar Rp82.578.057,00.

g. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Merupakan piutang jasa kebersihan penggunaan kawasan pelabuhan oleh Pemerintah Kota Bitung yang sudah jatuh tempo sebesar Rp2.801.400,00 dan piutang atas kebersihan kawasan a.n. H. R. serta KSU V.I sebesar Rp4.531.500,00.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Perikanan Budi Daya hanya terdapat pada satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang yang merupakan piutang atas penggunaan lahan tambak intensif oleh Perum Perindo pada satker BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang sebesar Rp350.000.000,00. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada PUPN. Adapun penyerahannya melalui 2 (dua) tahap, penyerahan pertama pada tanggal 31 Mei 2023 dan penyerahan kedua pada tanggal 6 Juli 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang disetor ke kas negara sebesar Rp266.000.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.000.000,00.

3. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Piutang PNBP atas pelanggaran administratif atas nama Sdr. R sebesar Rp1.143.538.189; Kapal Motor (KM) Sw sebesar Rp1.067.996.160,00; KM PH II sebesar Rp139.856.640,00; KM PM sebesar Rp77.400.000,00; KM MM I sebesar Rp43.344.000,00; KM IH 02 sebesar Rp11.232.000,00 dan KM SS sebesar Rp19.418.112,00.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk KP

Merupakan sewa peralatan dan mesin berupa kendaraan berpendingin sebesar Rp1.857.764,00.

b. Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Merupakan piutang sebagai berikut:

- Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru dan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 7 September s.d. 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp553.384.148,00 dan Rp44.270.732,00;
- Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru dan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 1 Januari s.d. 16 Februari 2024 masing-masing sebesar Rp224.216.137,00 dan Rp4.484.247,00;
- Sewa peralatan dan mesin sebesar Rp143.223.677,00;
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.
 - i. Kekurangan denda keterlambatan pembayaran sewa periode 1 Januari s.d. 16 Februari 2024 sebesar Rp4.484.247,00; dan
 - ii. Sewa Pasar Ikan Modern Muara Baru periode Februari s.d. Agustus 2024 sebesar Rp863.470.170,00.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan piutang atas kontribusi tetap (tahun 2025) dari perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan PT SMA pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.559.256.077,00. Atas kontribusi tetap tahun 2025, PT SMA mendapat keringanan pembayaran sebesar

50% dari nilai kontribusi tetap sejumlah Rp1.279.628.039,00 (Rp2.559.256.077,00 x 50%) berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-362/MK.6/2024 tanggal 9 Mei 2024. Keringanan tersebut akan dibukukan setelah pembayaran sebesar Rp1.279.628.039,00 disetor ke Kas Negara oleh PT SMA pada tahun 2025.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan piutang atas pemanfaatan lahan dengan cara sewa oleh Koperasi Produsen LMS & S dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 pada satker Balai Riset Pemuliaan Ikan sebesar Rp89.728.750,00 dan sewa lahan PT BNP serta PT WCI selama 2 tahun sebesar Rp309.040.000,00.

C.1.8.2 Piutang Lainnya

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Piutang Lainnya pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker Biro Umum dan PBJ yang merupakan:

- a. Piutang kelebihan pembayaran uang makan PNS periode Desember 2024 sebesar Rp17.180.443,00;
- b. Piutang kelebihan pembayaran uang makan PPPK periode Desember 2024 sebesar Rp1.335.100,00;
- c. Piutang kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS periode Desember 2024 sebesar Rp3.852.458,00;
- d. Piutang kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PPPK periode Desember 2024 sebesar Rp335.924,00;
- e. Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa:
 - Pengadaan pekerjaan jasa alih daya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp41.5408.681,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 28 Februari 2025 dengan NTPN C2C5D6U8F7I8G9PN;

- Perencanaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan pengadaan *bandwidth* internet kantor pusat KKP tidak sesuai ketentuan sebesar Rp556.995.747,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 3 Maret 2025 dengan NTPN C91EF6U8F7ICVP4J;
- Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebesar Rp305.102.130,00;
- Kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar Rp54.779.662,00;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.050.908,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 27 Februari 2025 dengan NTPN 8FBA81JNG843KH1J;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.514.550,00;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp512.000,00;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp450.000,00;
- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp512.000,00; dan
- Pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki tidak sesuai kontrak senilai Rp1.790.413.665,13. Piutang ini tidak dibukukan sebagai piutang pada Tahun 2024 karena pembayaran atas temuan pemeriksaan tersebut akan dibayarkan penyedia jasa dengan mekanisme

potong SPM pembayaran pelunasan pekerjaan pada Tahun 2025.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 12 (dua belas) satker antara lain.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Lainnya pada satker Setditjen Perikanan Tangkap merupakan.

- Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2017, terdapat temuan atas Pembangunan Kapal dan Direktorat KAPI yang sudah diserahkan ke KPKNL berupa.
 - i. PDTT Kapal dan Pelabuhan TA.2015-2016 berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan atas 45 (empat puluh lima) unit kapal perikanan a.n. CV. SP sebesar Rp1.439.008.570,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
 - ii. Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 yang tidak diyakini kewajarannya a.n. PT. IFT sebesar Rp435.420.000,00. Piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
 - iii. Pembayaran pembangunan kapal untuk diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan TA 2017 yang tidak diyakini kewajarannya a.n PT. AC sebesar Rp588.574.400,00. Piutang tersebut telah diterima PSBDT dan telah diajukan penghapusan piutangnya ke DJKN Kementerian Keuangan; dan

- iv. Denda atas kekurangan penyelesaian pekerjaan pengadaan kapal perikanan KM Mina Maritim 122 oleh CV. MKU sebesar Rp260.375.000,00. Pada tanggal 2 November 2024 piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet.
- Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengadaan kapal dan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim tahun 2016-2017 berupa.
 - i. Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan kapal 5 GT sebanyak 13 (tiga belas) unit oleh CV. KB sebesar Rp103.624.449,00; dan
 - ii. Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan Kapal 10 GT sebanyak 15 (lima belas) kapal oleh PT YA, sebesar Rp548.001.686,00.
 - Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pembangunan dan pengerukan PPI Cikidang oleh PT BIP masing-masing sebesar Rp2.363.812.906,55 dan sebesar Rp593.948.800,00. Pada tahun 2016 PT BIP telah mengangsur denda sebesar Rp200.000.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.753.331.310,00;
 - Merupakan temuan TGR a.n. Sdr. AWS dengan nilai temuan sebesar Rp125.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah menyetor 23 (dua puluh tiga) kali angsuran ke Kas Negara sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.000.000,00;
 - Piutang atas temuan pemeriksaan BPK RI eks satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw sebesar Rp3.015.000,00; dan

- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan Kemensetneg sebesar Rp54.364.851,00.
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Merupakan piutang atas pencairan jaminan asuransi atas pekerjaan kapal yang tidak selesai. Saat ini sedang proses pengalihan penagihan piutang ke PUPN sebesar Rp537.727.080,00.
- c. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
- Merupakan piutang atas jasa kapal keruk sebesar Rp325.600.000,00.
- d. PPS Nizam Zachman
- Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran 3 (tiga) paket pekerjaan belanja modal sebesar Rp35.794.406,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 6 Februari 2025 dengan NTPN FD22661QVCT67M2Q sebesar Rp12.590.825,00; tanggal 7 Februari dengan BF8CD61QVCT691VK sebesar Rp1.188.000,00; tanggal 7 Februari 2025 dengan NTPN 42CE148VVNODDMT9 sebesar Rp5.719.145,00; tanggal 7 Februari 2025 dengan NTPN 828DD6U8F7FIM2G5 sebesar Rp7.937.022,00; tanggal 7 Februari 2025 dengan NTPN 8FCAD48VVNODF2RQ sebesar Rp5.759.290,00 dan tanggal 7 Februari 2025 dengan NTPN C93D66U8F7FIMD9G sebesar Rp2.600.124,00.
- e. Satker Lainnya
- Terdapat pada 8 (delapan) satker yang merupakan piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp11.070.756,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 5 (lima) satker antara lain.

a. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan Jembatan Lingkungan PPBI Mesuji dan Pemasangan Turap/Dinding Penahan Tanah Pusat Produksi Benih dan Induk Di Kabupaten Mesuji masing-masing sebesar Rp159.031.530,00 dan Rp2.800.351,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 24 Februari dengan NTPN FDB562G502MCJTJS sebesar Rp159.031.530,00 dan NTPN 58D3D3CIFT8P0V7D sebesar Rp2.800.351,00;

b. Balai Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi preservasi jalan akses helipad sebesar Rp69.360.003,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 25 Maret 2025 dengan NTPN ABF470NA0DKK8DG0.

c. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Modeling Kepiting sebesar Rp.17.180.031,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 21 Februari 2025 dengan NTPN BFA7E48VVNR36UA2.

d. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee

Merupakan piutang atas moda perjalanan dinas sebesar Rp10.053.320,00.

e. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen Budidaya merupakan.

- Piutang atas kurang volume pengadaan paket bantuan sarana budidaya ikan lele sistem bioflok Tahun 2018 atas nama CV. CA sebesar Rp314.626.646,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp267.710.337,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.916.309,00;
- Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan antara lain kelebihan pembayaran pengadaan sarana budidaya rumput laut. Selama Tahun 2024 terdapat penyetoran angsuran pembayaran piutang sebesar Rp25.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp275.823.040,00;
- Piutang atas ketidaksesuaian kontrak atas pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur atas nama CV SRH. Selama Tahun 2024 terdapat penyetoran angsuran pembayaran piutang sebesar Rp10.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.830.000,00;
- Piutang atas ketidaksesuaian kontrak atas pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur atas nama CV CP sebesar Rp101.438.788,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp72.719.394,00, sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp28.719.394,00;
- Piutang atas temuan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atas bantuan kekerangan tahun 2017 sebesar Rp197.690.000,00. Sampai dengan tahun 2017 yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp60.000.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.690.000,00. Piutang ini diklasifikasikan sebagai

piutang macet karena setelah tahun 2017 belum ada pembayaran angsuran atas piutang ini;

- Piutang atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan gudang beku terintegrasi 100 ton di kota Sabang atas nama PT TKM sebesar Rp250.735.763,00 (Rp350.245.763,35–Rp99.510.000,00). Pada tanggal 26 Oktober 2020 piutang tersebut telah diserahkan ke PUPN untuk pengurusan penagihan dan sudah dikategorikan Piutang Macet;
- Piutang atas temuan Inspektorat Jenderal terkait honor fasilitator kegiatan yang didanai oleh IISAP (pinjaman luar negeri) sebesar Rp4.090.275.00,00;
- Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp93.196.598,00;
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.
 - i. Kelebihan pembayaran jasa catering sebesar Rp125.932.419,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 14 April 2025 dengan NTPN C073A3CIFTEE72LR;
 - ii. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan (Kemensetneg) sebesar Rp 33.702.672,00;
 - iii. Pekerjaan bantuan sarana modeling budi daya rumput laut di Kab. Rote Ndao tidak sesuai kontrak sebesar Rp36.908.337,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 7 Maret 2025 dengan NTPN 8008A6U8F7KQDHRI; dan
 - iv. Pekerjaan unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan bangunan pendukung di Kab. Rote Ndao tidak sesuai kontrak sebesar Rp82.727.460,00. Sudah

dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 25 April 2025 dengan NTPN 0CDCC7QLV2AMA95B.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 5 (lima) satker antara lain.

a. Stasiun PSDKP Cilacap

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan kantor sebesar Rp24.632.852,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 14 April 2025 dengan NTPN 023CF6U8F7NTLBTM.

b. Stasiun PSDKP Kupang

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan konstruksi pendopo senilai Rp4.775.085,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 19 Februari 2025 dengan NTPN 5C2821JNG83RPO98.

c. Pangkalan PSDKP Jakarta

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa:

- Kelebihan pembayaran pekerjaan pematangan lahan pangkalan sebesar Rp8.105.536,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN 16CC155DFIG4VMCB; dan
- Kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi pagar kantor sebesar Rp12.868.195,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN 7F4700NA0DK6UN7D.

d. Pangkalan PSDKP Bitung

Saldo Piutang Lainnya pada satker Pangkalan PSDKP Bitung merupakan.

- Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi pembangunan pos pengawasan SDKP Morowali sebesar Rp24.270.573,00; dan
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebesar Rp2.193.975,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 24 April 2025 dengan NTPN 6E6227QLV2AL6GKJ.

e. Sekretariat Ditjen PSDKP

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen PSDKP merupakan.

- Kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp1.613.550,00;
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.
 - i. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebesar Rp7.020.800,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 25 April 2025 dengan NTPN AEA0B1JNG89U9IG3; dan
 - ii. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan Kemensetneg sebesar Rp8.543.931,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 23 April 2025 sebesar Rp4.714.080,00 dengan NTPN 3333361QVD5R8NQ, C6A1E7QLV2AK20DP, D61633CIFTEM10NT, 8336D6U8F707LRFO, C780B2G50259KRNC,

E888B2G50259KRU4, 173801JNG89T755R,
 46C562G50259KSDR, B4D883CIFTEM1TOV,
 1E6C055DFIJERSOK, OCC073CIFTEM1T7K dan
 AOF5961QVD5R8TDN serta sebesar Rp3.829.824,00
 dengan NTPN E439E61QVD5R9GOT.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu.

a. Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan.

- Piutang kelebihan uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp1.518.125,00;
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.
 - i. Pekerjaan pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah di Kota Pekalongan tidak sesuai kontrak sebesar Rp39.995.200,00; dan
 - ii. Pekerjaan penataan kawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah di Kota Pekalongan tidak sesuai kontrak sebesar Rp24.074.331,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 17 Februari 2025 dengan NTPN 835800NA0DH7KT71.

b. DKP Prov. Sulawesi Tenggara

Merupakan piutang atas temuan aparat pengawas intern pemerintah atas program strategis pada tahun anggaran 2015 berupa pengadaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp26.300.000,00 dan pengelolaan keuangan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp55.263.000,00. Sampai dengan Tahun 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar

Rp59.240.000,00. Saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.323.000,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Saldo Piutang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 5 (lima) satker antara lain.

a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar

Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas kegiatan proyek Lautra (pinjaman luar negeri) Tahun 2024 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp469.400,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 25 Januari 2025 dengan NTPN 3738E5UFSEM9M8G.

b. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar

Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa pertanggungjawaban keuangan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.000.000,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 31 Januari 2025 melalui Pembayaran dengan NTPN BE2C53CIFT5VRQPK.

c. Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa pertanggungjawaban keuangan kegiatan perjalanan dinas proyek Lautra (pinjaman luar negeri) Tahun 2024 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp305.126,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 6 Februari 2025 dengan NTPN 270B83CIFT5VU3RQ.

d. Balai Kawasan Konsservasi Perairan Nasional Kupang

Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp580.000,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan NTPN 820250311369438.

e. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Piutang lainnya pada satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan.

- Temuan pemeriksaan oleh BPKP pada proyek *Coremap-CTI* pada tahun anggaran 2014 pada satker Dinas KP Kabupaten Buton (inaktif) sebesar Rp123.046.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2024 terdapat pembayaran angsuran piutang sebesar Rp2.000.000,00 sehingga sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp106.300.000,00. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.746.000,00;
- Temuan pemeriksaan pada satker DKP Kab. Buton yang sudah dilimpahkan ke PUPN yang terdiri dari.
 - i. Pengadaan perlengkapan perahu oleh CV. YJ (Sdr. R) sebesar Rp88.500.000,00;
 - ii. Pengadaan *publication material of coremap* oleh CV. LB (Sdr. WOA) sebesar Rp12.019.802,00;
 - iii. Pekerjaan pembuatan perahu pokmaswas multifungsi pada CV. L (Sdr. S) sebesar Rp28.000.250,00;
- Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa pertanggungjawaban keuangan kegiatan perjalanan dinas proyek Lautra (pinjaman luar negeri) Tahun 2024 tidak sesuai ketentuan, dengan rincian dinas luar negeri sebesar Rp3.758.238,00 serta perjalanan dinas biasa sebesar Rp3.301.821,00 dan Rp6.563.787,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 4 Maret 2025 sebesar Rp6.392.238,00 dengan NTPN 520C861QVD2AMOF0 dan sebesar Rp17.500,00 dengan NTPN 1E9313CIFTB5FOUC; tanggal 7 Maret 2025 sebesar Rp464.000,00 dengan NTPN 02F9F7QLV273GNJS dan sebesar Rp186.321,00 dengan NTPN 52E342G502OP2PML; tanggal 11 Maret 2025 sebesar

Rp510.000,00 dengan NTPN 16F6B55DFIG3QVGO, sebesar Rp44.200,00 dengan NTPN 5E78261QVD2G8C2I, sebesar Rp700.167,00 dengan NTPN A6ED50NA0DK5QKVB; sebesar Rp202.440,00 dengan NTPN 94FDB2G502OUKM5S, sebesar Rp900.800,00 dengan NTPN 49A6B55DFIG3RNS1, sebesar Rp319.180,00 dengan NTPN 052507QLV2792P7Q dan sebesar Rp876.800,00 dengan NTPN 69BCA1JNG86I7QOU;

- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.
 - i. Piutang atas izin pelaksanaan reklamasi EMPG Ltd sebesar Rp622.088.463,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh debitur pada tanggal 22 April 2025 dengan NTPN 5A20161QVD5MR9AI. Piutang ini seharusnya dibukukan sebagai piutang PNBPN;
 - ii. Piutang atas izin pelaksanaan reklamasi oleh PT VI sebesar Rp7.651.385.844,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh debitur pada tanggal 21 Februari 2025 dengan NTPN AE9C17QLV24IKI61;
 - iii. Pengadaan Pondok Informasi Wisata Bahari Kab. Kendal tidak sesuai kontrak sebesar Rp31.401.720,00;
 - iv. Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) di Kota Cirebon tidak sesuai kontrak sebesar Rp9.410.217,00; dan
 - v. Pengadaan bangunan dan mesin *Washing Plan* di Kab Bima tidak sesuai kontrak sebesar Rp207.104.577,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 20 (dua puluh) satker sebagai berikut.

- a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal

Merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan bangunan sayap Gedung Direktorat sebesar Rp205.393.970,00. Kelebihan pembayaran sebesar Rp180.908.364,00 dibayarkan penyedia jasa melalui mekanisme potong SPM pembayaran pelunasan pekerjaan pada Tahun 2025. Sedangkan sisanya sebesar Rp24.485.605,00 akan disetorkan ke Kas Negara.

b. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Pencatatan piutang atas temuan BPK tahun 2019 berupa denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan pengadaan KM Bawal Putih III yang telah diserahkan pengurusannya ke PUPN atas nama PT CBI sebesar Rp1.428.485.977,00.

c. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Saldo Piutang Lainnya pada satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal merupakan.

- Piutang kelebihan pembayaran uang makan PNS periode Desember 2024 sebesar Rp491.500,00;
- Piutang kelebihan pembayaran uang makan PPPK periode Desember 2024 sebesar Rp246.050,00;
- Piutang kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS periode Desember 2024 sebesar Rp2.425.573,00;
- Piutang kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PPPK periode Desember 2024 sebesar Rp94.030,00;
- Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Asrama Bahari Residence III sebesar Rp19.136.456,00;
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa.

- i. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Asrama Bahari Residence III sebesar Rp211.076.224,55;
- ii. Denda keterlambatan pekerjaan pembangunan Asrama Bahari Residence III sebesar Rp151.984.252,00; dan
- iii. Kurang setor penerimaan penjualan Mall Ikan Tegal (MIT) sebesar Rp13.223.870,00.

d. Pusat Riset Kelautan dan Perikanan

Saldo Piutang Lainnya pada satker Pusat Riset Kelautan dan Perikanan merupakan.

- Merupakan temuan pemeriksaan BPK-RI pada LK KKP TA 2019 atas kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan kelembagaan *Morotai Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (MIAMARI) Pangandaran yang dilaksanakan oleh PT TGP pada satker Pusat Riset Kelautan sebesar Rp1.003.754.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp203.754.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp800.000.000,00;
- Merupakan temuan pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2019 yaitu kelebihan pembayaran rancang dan bangun (*design and build*) pekerjaan pembangunan *Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute* (PIAMARI) yang dilaksanakan oleh KSO PT PM – PT DCD sebesar Rp1.896.388.393,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut KKP telah menerbitkan 4 (empat) kali surat teguran kepada KSO PT PM – PT DCD. Karena tidak ada itikad baik dari KSO PT PM – PT DCD untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada negara, melalui surat nomor B.4567/BPPSDM.1/KU.420/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, penagihan kelebihan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara

(PUPN). Pada tahun 2023 dilakukan mediasi antara PUPN dengan KSO PT PM – PT DCD namun tidak membuahkan hasil. Sampai saat ini penagihan piutang KSO PT PM – PT DCD masih dalam proses oleh PUPN; dan

- Temuan pemeriksaan atas LK KKP Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp97.471.950,00. Sampai dengan tahun 2024 yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp555.000,00, sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp96.916.950,00.

e. Poltek KP Karawang

Piutang temuan pemeriksaan LK KKP Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp39.911.080,00.

f. Poltek KP Pangandaran

Piutang temuan pemeriksaan LK KKP Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kinerja kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp16.500.000,00.

g. Poltek Ahli Usaha Perikanan Jakarta

Saldo Piutang Lainnya pada satker Poltek Ahli Usaha Perikanan Jakarta merupakan.

- Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Interior lantai I Gedung Rektorat sebesar Rp900.600,00;
- Piutang atas temuan pemeriksaan APIP berupa kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi kolam renang sebesar Rp4.683.300,00;
- Kelebihan kelebihan tunjangan kinerja PNS sebesar Rp21.552.932,00;

- Kelebihan kelebihan uang makan PNS sebesar Rp27.084.300,00; dan
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sebesar Rp14.477.450,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh penyedia jasa pada tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp6.091.800,00 dengan NTPN D05060NA0DHN80UU dan sebesar Rp8.385.650,00 dengan NTPN 128E80NA0DHO8H78.

h. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru

Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin berat sebesar Rp36.784.000,00.

i. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

Merupakan piutang atas pengembalian sewa rumah negara yang dikuasai oleh mantan pegawai berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung sebesar Rp105.000.000,00.

j. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Piutang Lainnya pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan.

- Piutang atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp1.141.700,00; dan
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan Kemensetneg sebesar Rp41.302.387,00.

k. Poltek KP Sorong

Piutang temuan pemeriksaan LK KKP Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dan tunjangan

kinerja kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp79.286.291,00.

l. Satker Lainnya

Terdapat pada 9 (sembilan) satker yang merupakan kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp43.072.951,00.

8. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Saldo Piutang Lainnya pada Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP terdapat pada 9 (sembilan) satker sebagai berikut.

a. Sekretariat Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Piutang lainnya pada satker Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP merupakan.

- Piutang atas kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp9.569.000,00; dan
- Piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024, terdapat temuan pemeriksaan berupa kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri dan perjalanan dinas luar negeri yang tanpa persetujuan Kemensetneg sebesar Rp2.134.576,00. Sudah dilakukan penyetoran ke kas Negara oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 13 Februari 2025 dengan NTPN BD5F855DFID5LFSQ.

b. Satker Lainnya

Terdapat pada 8 (delapan) satker yang merupakan kelebihan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja periode Desember 2024 sebesar Rp1.376.740,00.

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.330.326.609,00 dan Rp36.242.472.804,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.25
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun / Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang – Piutang PNB	(25.186.969.274)	(27.677.005.543)	2.490.036.269	(9,00)
Ditjen PT	(22.411.674.048)	(27.413.485.296)	5.001.811.248	(18,25)
Ditjen PB	(84.000.000)	(230.002.200)	146.002.200	(63,48)
Ditjen PSDKP	(2.371.468.981)	(16.254.510)	(2.355.214.471)	14.489,61
Ditjen PDSPKP	(305.036.121)	(4.462.732)	(300.573.389)	6.735,19
Ditjen PKRL	(12.796.279)	(11.903.517)	(892.762)	7,50
BPPSDM KP	(1.993.845)	(897.288)	(1.096.557)	122,21
Penyisihan Piutang – Piutang Lainnya	(12.143.357.335)	(8.565.467.261)	(3.577.890.074)	41,77
Setjen	(6.835.150)	(1.888.448)	(4.946.702)	261,95
Itjen	0	(119.391)	119.391	(100,00)
Ditjen PT	(6.995.495.133)	(5.995.442.067)	(1.000.053.066)	16,68
Ditjen PB	(824.320.347)	(804.879.898)	(19.440.449)	2,42
Ditjen PSDKP	(470.123)	(6.785.584)	6.315.461	(93,07)
Ditjen PDSPKP	(657.391)	(129.311.261)	128.653.870	(99,49)
Ditjen PKRL	(185.952.898)	(182.827.709)	(3.125.189)	1,71
BPPSDM KP	(4.129.560.892)	(1.443.763.875)	(2.685.797.017)	186,03
BPPMH KP	(65.401)	(449.028)	383.627	(85,43)
Total	(37.330.326.609)	(36.242.472.804)	(1.087.853.805)	3,00

C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TGR) adalah bagian TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp105.339.479,00 dan Rp0,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TGR) hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP yang merupakan kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/ITJ.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Sdr. RS sebesar Rp101.552.541,00 dan atas nama Sdr. THP sebesar Rp14.516.594,00. Piutang tersebut diklasifikasikan sebagai piutang lancar sehingga disisihkan sebesar 0,5% senilai Rp526.698,00 ($105.339.479,00 \times 0,5\%$).

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp526.698,00 dan Rp0,00.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP yang merupakan pencadangan atas piutang kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/ITJ.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Sdr. RS sebesar Rp101.552.541,00 dan atas nama Sdr. THP.

C.1.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.334.387.105,00 dan Rp28.745.692.709,00.

Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.26
Rincian Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	11.800.000	16.767.000	(4.967.000)	(29,62)
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	166.243.450	0	166.243.450	0,00
Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	40.143.368.655	28.726.675.709	11.416.692.946	39,74
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	12.975.000	2.250.000	10.725.000	476,67
Total	40.334.387.105	28.745.692.709	11.588.694.396	40,31

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.1.12.1 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker BLU Poltek KP Sidoarjo yang merupakan biaya pendidikan atas 13 (tiga belas) taruna yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024. Atas piutang tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh 13 taruna (tiga belas) tersebut pada bulan Januari 2025.

C.1.12.2 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budidaya di satker BBPBAP Jepara yang merupakan Penjualan Pakan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 14.647 kilogram sebesar Rp166.243.450,00.

C.1.12.3 Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir

Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir terdapat pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker BLU LPMUKP yang merupakan akumulasi tunggakan jasa layanan debitur yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran atau pelunasan sebesar Rp40.143.368.655,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023, Piutang BLU Pengelolaan Dana Bergulir mengalami kenaikan sebesar 39,74% yang disebabkan bertambahnya tunggakan jasa layanan debitur selama tahun berjalan.

C.1.12.4 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional

Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional terdapat di unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan uang makan taruna dan sewa asrama yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp11.400.000,00 dan Rp1.575.000,00. Atas piutang tersebut sebagian sudah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2025.

C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per 31

Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.682.135.319,00 dan Rp20.423.296.818,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.27
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Kegiatan Operasional BLU
Per Akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(59.000)	(83.835)	24.835	(29,62)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(831.217)	0	(831.217)	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola dana Bergulir	(28.681.180.227)	(20.423.201.733)	(8.257.978.494)	40,43
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(64.875)	(11.250)	(53.625)	476,67
Total	(28.682.135.319)	(20.423.296.818)	(8.258.838.501)	40,44

C.1.13.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP di satker Poltek KP Sidoarjo yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang biaya pendidikan atas 13 (tiga belas) taruna yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp59.000,00.

C.1.13.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya di satker BLU BPBAP Jepara yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang terhadap Penjualan Pakan. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp831.217,00.

C.1.13.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pengelolaan Dana Bergulir hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMUKP yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang BLU Pengelola Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Dalam menghitung pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, LPMUKP memperhitungkan jumlah tunggakan atau besaran piutang, kualitas piutang dan nilai barang agunan atau jaminan. Nilai agunan atau barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai komponen pengurang terhadap piutang, lalu dikalikan dengan persentase sesuai dengan kualitas piutangnya. Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Direktur LPMUKP Nomor 6/PER-LPMUKP/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang. Rincian perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut.

Tabel C.28
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU
Pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan kualitas
Per 31 Desember 2024

Kualitas Piutang PNPB	Nilai Piutang	Nilai Piutang - Jaminan (LPMUKP)	%	Penyisihan Piutang
Lancar	251.531.391	173.838.138	0,50%	869.191

Kualitas Piutang PNB	Nilai Piutang	Nilai Piutang - Jaminan (LPMUKP)	%	Penyisihan Piutang
Kurang Lancar	593.003.825	456.093.683	10%	45.609.368
Diragukan	80.436.500	34.377.668	50%	17.188.834
Macet	39.218.396.939	28.617.512.834	100%	28.617.512.834
Jumlah	40.143.368.655			28.681.180.227

C.1.13.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang uang makan taruna dan sewa asrama yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024. Piutang tersebut dikategorikan kualitas lancar dengan perhitungan persentase penyisihan sebesar 0,5%, sehingga saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp64.875,00.

C.1.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang bukan merupakan kegiatan utama dari BLU dan belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.780.175,00 dan Rp35.235.000,00.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMUKP yang merupakan piutang terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024 berupa kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3.253.536,00 dan kelebihan pembayaran BBM atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp16.526.639,00.

C.1.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.901,00 dan Rp35.235.000,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari kegiatan Non Operasional BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal di satker LPMUKP yang merupakan pencadangan atas piutang kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri di LPMUKP.

C.1.16 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.29
Rincian Saldo Persediaan Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Persediaan Operasional	71.815.406.769	59.980.292.329	11.835.114.440	19,73
Barang Konsumsi	19.483.236.542	18.253.028.846	1.230.207.696	6,74
Amunisi	1.783.377.246	1.723.772.388	59.604.858	3,46
Bahan untuk Pemeliharaan	841.004.388	702.922.199	138.082.189	19,64
Suku Cadang	32.887.259.703	22.630.026.225	10.257.233.478	45,33
Bahan Baku	8.369.341.132	10.122.608.929	(1.753.267.797)	(17,32)
Persediaan Lainnya	8.451.187.758	6.547.933.742	1.903.254.016	29,07

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	87.754.621.847	31.264.309.510	56.490.312.337	180,69
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	44.711.306.208	299.395.000	44.411.911.208	14.833,89
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	12.297.178.010	15.514.070.890	(3.216.892.880)	(20,74)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	426.892.990	0	426.892.990	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	0	0	0	0,00
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	884.672.250	140.202.000	744.470.250	531,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	1.025.355.500	825.418.530	199.936.970	24,22
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	28.409.216.889	14.485.223.090	13.923.993.799	96,13
Total	159.570.028.616	91.244.601.839	68.325.426.777	74,88

Selain saldo Persediaan pada tabel diatas terdapat Persediaan dalam kondisi rusak atau usang yang masih dalam proses penghapusan. Rincian saldo Persediaan dalam kondisi rusak atau usang masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.30
Rincian Saldo Persediaan Dalam Kondisi Usang dan Rusak
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Usang	Rusak	Total
Ditjen PT	24.360.350	0	24.360.350
Ditjen PB	21.671.698	17.459.600	39.131.298
BPPSDMKP	0	35.869.000	35.869.000
BPPMHKP	0	67.759	67.759
Total	46.032.048	53.396.359	99.428.407

Penjelasan Persediaan per masing-masing akun adalah sebagai berikut:

C.1.16.1 Persediaan Untuk Operasional

Saldo Persediaan untuk Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp71.602.575.034,00 dan Rp59.980.292.329,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Operasional pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.31
Rincian Saldo Persediaan Untuk Operasional
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	2.431.118.400	1.654.405.541	776.712.859	46,95
Itjen	91.253.504	103.441.128	(12.187.624)	(11,78)
Ditjen PT	813.307.086	1.245.720.542	(432.413.456)	(34,71)
Ditjen PB	21.484.548.873	18.450.744.138	3.033.804.735	16,44
Ditjen PSDKP	34.819.568.708	25.723.039.276	9.096.529.432	35,36
Ditjen PDSPKP	219.079.526	263.455.020	(44.375.494)	(16,84)
Ditjen PKRL	27.522.162	17.291.935	10.230.227	59,16
BPPSDM KP	5.258.394.846	4.298.315.570	960.079.276	22,34
BPPMH KP	6.670.613.664	8.223.879.179	(1.553.265.515)	(18,89)
Total	71.815.406.769	59.980.292.329	11.835.114.440	19,73

Saldo Persediaan untuk Operasional yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Persediaan untuk Operasional pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp9.096.529.432,00 yang secara umum disebabkan oleh pengadaan suku cadang kapal yang cukup besar pada Tahun 2024.

2. Penurunan signifikan

Penurunan signifikan pada saldo Persediaan untuk Operasional terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp485.600.000,00 yang secara umum disebabkan oleh penghibahan rumah ikan

kepada kelompok nelayan Mailan serta pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP yang secara umum disebabkan oleh pemakaian barang konsumsi yang cukup besar pada Tahun 2024.

Daftar ringkas barang Persediaan untuk Operasional pada masing-masing unit Eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.32
Daftar Barang Persediaan untuk Operasional
Per 31 Desember 2024

Nama Es1	Kode>Nama Barang	Nilai
Setjen		2.431.118.400
	10101-Bahan	114.218.498
	10102-Suku Cadang	58.518.466
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.165.562.312
	10104-Obat-Obatan	53.033.978
	10201-Komponen	29.107.213
	10202-P I P A	10.677.933
Itjen		91.253.504
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	91.253.504
Ditjen PT		813.307.086
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	813.307.086
Ditjen PB		21.484.548.873
	10101-Bahan	3.985.129.192
	10102-Suku Cadang	1.373.982.570
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.479.168.568
	10104-Obat-Obatan	621.794.418
	10107-Natura Dan Pakan	7.951.363.739
	10108-Persediaan Penelitian	4.989.260.751
	10201-Komponen	71.298.635
	10202-P I P A	12.551.000
PSDKP		34.819.568.708
	10101-Bahan	1.783.377.246
	10102-Suku Cadang	31.094.421.390
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.941.770.072
PDSPKP		219.079.526
	10101-Bahan	173.523.023
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	15.077.503
	10108-Persediaan Penelitian	30.479.000

Nama Es1	Kode>Nama Barang	Nilai
DJPKRL		27.522.162
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	27.522.162
BP2SDM		5.258.394.846
	10101-Bahan	428.017.666
	10102-Suku Cadang	124.094.115
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.671.551.349
	10104-Obat-Obatan	74.779.150
	10107-Natura Dan Pakan	401.746.886
	10108-Persediaan Penelitian	2.543.835.430
	10201-Komponen	14.370.250
BP2MH		6.670.613.664
	10101-Bahan	3.696.914.727
	10102-Suku Cadang	236.243.162
	10103-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	2.736.418.975
	10107-Natura Dan Pakan	1.036.800
Total		71.815.406.769

Ringkasan mutasi akun Persediaan untuk Operasional per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.33
Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Operasional
Per Jenis Transaksi Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		59.980.292.329
Mutasi Tambah:		205.702.700.770
M01	Saldo Awal	502.175.877
M02	Pembelian	183.089.435.945
M03	Transfer Masuk	3.096.210.847
M06	Perolehan Lainnya	6.989.104.005
M10	Reklasifikasi Masuk	1.609.009.754
M11	Reklasifikasi Dari Aset	406.503.493
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	26.970.500
M98	Koreksi Nilai Tambah	8.943.614.893
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	198.746.134
P01	Hasil Opname Fisik	840.929.322
Mutasi Kurang:		(193.867.586.330)
K01	Habis Pakai	(163.288.040.082)
K02	Transfer Keluar	(3.166.637.847)

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
K03	Hibah Keluar	(485.600.000)
K04	Usang	(184.573.304)
K05	Rusak	(110.313.214)
K06	Keluar Lainnya	(8.119.611.948)
K10	Reklasifikasi Keluar	(4.019.059.470)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(209.670.000)
K98	Koreksi Nilai Kurang	(185.285.000)
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(9.028.738.153)
P01	Hasil Opname Fisik	(5.070.057.312)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		71.815.406.769

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Persediaan untuk Operasional adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Saldo Awal terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.467.268,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp20.312.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.009.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.600.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp469.787.109,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp8.594.124.168,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp261.055.898,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp8.362.684.426,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp102.099.402.874,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp32.458.949.611,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp725.946.128,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp996.024.040,00; unit Eselon I Badan

- Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp18.938.691.298,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp10.652.557.502,00;
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.051.950.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp9.091.500,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.035.169.347,00;
 4. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp25.339.327,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp6.501.316.988,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp45.257.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp416.554.190,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp636.000,00;
 5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.936.334,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp591.423,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp844.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.365.121.380,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp167.771.332,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.370.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp6.194.550,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp38.909.737,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp16.270.498,00;
 6. Transaksi Reklasifikasi Dari Aset terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya

- KP sebesar Rp45.470.800,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp355.532.693,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.500.000,00;
7. Transaksi Koreksi Transfer Keluar *Online* hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp26.970.500,00;
 8. Transaksi Koreksi Nilai Tambah terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp41.250.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp65.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8.902.299.893,00;
 9. Transaksi Koreksi Kuantitas Tambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.496.133,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp197.220.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp30.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1,00;
 10. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.023.500,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp5.296.091,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.825.850,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp479.367.903,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp41.511.348,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.092.700,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp103.878.404,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp206.933.526,00;
 11. Transaksi Habis Pakai terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.798.461.011,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp278.539.613,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap

- sebesar Rp8.310.375.332,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp91.761.647.232,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp23.000.799.844,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.154.607.114,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp917.525.013,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp17.846.153.396,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp12.219.931.527,00;
12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.051.950.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp9.091.500,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.105.596.347,00;
 13. Transaksi Hibah Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp485.600.000,00;
 14. Transaksi Usang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp81.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.773.684,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp32.811.500,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp148.907.120,00;
 15. Transaksi Rusak terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp91.169.600,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp4.865.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp13.550.900,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp727.214,00;
 16. Transaksi Keluar Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar

- Rp8.119.312.948,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp299.000,00;
17. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.936.334,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp591.423,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp644.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.750.581.395,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp165.891.532,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.055.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp69.706.050,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp4.029.737,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp14.623.499,00;
 18. Transaksi Reklasifikasi ke Aset terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp161.969.800,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.500.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp46.200.200,00;
 19. Transaksi Koreksi Nilai Kurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp185.220.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp65.000,00;
 20. Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp92.168.258,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp748.900,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp19.500.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.009.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp11.984.201,00; unit

- Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp8.902.299.894,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp27.900,00; dan
21. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp891.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.785.768,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.536.762.251,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp415.871.783,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp7.450.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.103.307.229,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.989.281,00.

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP TA 2024 terdapat temuan pemeriksaan terkait Persediaan untuk Operasional berupa kurang saji persediaan pada unit mall ikan tegal (MIT) sebesar Rp139.735.474,00. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi/penyesuaian pada saldo Persediaan untuk Operasional.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Persediaan untuk Operasional dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.1.16.2 Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

Saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp87.754.621.847,00 dan Rp31.264.309.510,00.

Rincian saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.34
Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual Atau
Diserahkan kepada Masyarakat Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	24.313.321.651	13.001.185.440	11.312.136.211	87,01
Ditjen PT	44.100.520.208	439.597.000	43.660.923.208	9.932,03
Ditjen PB	17.502.595.938	16.318.301.420	1.184.294.518	7,26
Ditjen PDSPKP	223.911.800	473.056.800	(249.145.000)	(52,67)
Ditjen PKRL	1.614.272.250	1.010.980.850	603.291.400	59,67
BPPSDM KP	0	21.188.000	(21.188.000)	(100,00)
Total	87.754.621.847	31.264.309.510	56.490.312.337	180,69

Saldo Persediaan untuk Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Persediaan untuk Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp43.660.923.208,00 yang secara umum disebabkan oleh adanya transfer pekerjaan SKPT Moa dari unit Eselon I Sekretariat Jenderal.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Persediaan untuk Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp249.145.000,00 yang secara umum disebabkan oleh banyak pekerjaan terkait bantuan untuk masyarakat yang telah selesai dan langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penjelasan ringkas atas saldo Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Sekretariat Jenderal antara lain berupa pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Biak di Prov. Papua, SKPT Morotai Prov. Maluku Utara dan SKPT Le Meulee di Prov. Aceh.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Moa di Prov. Maluku dan perencanaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa bantuan bioflok, bahan baku tepung ikan, benih ikan, calon indukan, *excavator*, peralatan unit produksi bibit rumput laut, peralatan pembuat pakan apung dan lain-lain.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa peralatan pengolah ikan, *Chest Freezer*, Pabrik Es, *Cool Box*, Peralatan Pemasaran, Pasar Ikan Bersih dan Sentra Kuliner.

5. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa Penanaman Sabuk Mangrove, Penyulaman Mangrove, Bantuan KOMPAK dan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Ringkasan mutasi akun Persediaan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.35
Ringkasan Mutasi Persediaan untuk Dijual atau
Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		31.264.309.510
Mutasi Tambah:		1.276.204.563.968
M01	Saldo Awal	400.000
M02	Pembelian	655.237.443.929
M03	Transfer Masuk	63.170.398.225
M06	Perolehan Lainnya	121.344.015.229
M10	Reklasifikasi Masuk	76.322.809.139
M11	Reklasifikasi Dari Aset	302.578.000
M15	Persediaan Dalam Proses Masuk	354.025.155.150
M98	Koreksi Nilai Tambah	3.943.200.000
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	36.911.546
P01	Hasil Opname Fisik	1.821.652.750
Mutasi Kurang:		(1.219.714.251.631)
K01	Habis Pakai	(597.492.541.588)
K02	Transfer Keluar	(63.170.398.225)
K03	Hibah Keluar	(384.000.000)
K04	Usang	(396.331.000)
K05	Rusak	(142.500.000)
K06	Keluar Lainnya	(68.616.946.968)
K10	Reklasifikasi Keluar	(73.765.889.423)
K11	Reklasifikasi ke Aset	(3.651.800.000)
K15	Persediaan Dalam Proses Keluar	(309.644.269.046)
K98	Koreksi Nilai Kurang	(46.282.252.338)
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	(56.017.877.789)
P01	Hasil Opname Fisik	(149.445.254)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		87.754.621.847

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Saldo Awal hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp400.000,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar

- Rp127.485.065.258,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp102.167.564.423,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp280.894.178.040,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.999.800,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp73.096.679.300,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp71.522.669.015,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp67.641.094,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.646.999,00;
3. Transaksi Transfer Masuk hanya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp43.960.318.208,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp658.724.150,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp18.266.040.567,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp285.315.300,00;
 4. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp120.277.904.829,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp532.500.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp14.500.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp519.110.400,00;
 5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.004.509.242,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp26.893.385.865,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp37.187.900.286,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.237.003.746,00;

6. Transaksi Reklasifikasi Dari Aset terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp77.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp225.578.000,00;
7. Transaksi Persediaan Dalam Proses Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp19.017.028.567,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp110.834.677.696,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp159.571.043.143,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp18.476.523.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp46.125.882.244,00;
8. Transaksi Koreksi Nilai Tambah hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.943.200.000,00;
9. Transaksi Koreksi Kuantitas Tambah hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp36.911.546,00;
10. Transaksi Hasil Opname Fisik terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp55.136.750,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.666.400.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp99.900.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp216.000,00;
11. Transaksi Habis Pakai terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp597.492.541.588,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.327.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp102.082.759.423,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp332.441.398.719,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp120.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp91.013.064.537,00; unit Eselon I Badan

- Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp71.375.196.415,00;
12. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp62.511.674.075,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp658.724.150,00;
 13. Transaksi Hibah Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp384.000.000,00;
 14. Transaksi Usang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp24.9145.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp147.186.000,00;
 15. Transaksi Rusak hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp142.500.000,00;
 16. Transaksi Keluar Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp68.616.946.968,00;
 17. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.004.709.242,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp24.361.055.850,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.889.800,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp37.188.215.286,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.173.492.246,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp34.880.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.646.999,00;
 18. Transaksi Reklasifikasi ke Aset hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.651.800.000,00;
 19. Transaksi Persediaan Dalam Proses Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp19.017.028.567,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan

- Tangkap sebesar Rp68.050.318.208,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp157.974.516.527,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp18.476.523.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp46.125.882.244,00;
20. Transaksi Koreksi Nilai Kurang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp46.282.252.338,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp118.344.183,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp42.784.359.488,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.030.208.337,00;
21. Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp53.536.583.789,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp196.594.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp2.198.900.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp85.800.000,00; dan
22. Transaksi Hasil Opname Fisik hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp149.445.254,00.

Terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun Anggaran 2024 terdapat temuan pemeriksaan terkait Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat berupa benih ikan, calon induk, dan induk ikan hasil kegiatan produksi dan perekayasaan yang harga satuannya tidak terdapat atau tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 sebagai dasar pencatatan persediaan. Berdasarkan Perdirjen PB Nomor 335/PER-DJPB/2020 untuk harga satuan persediaan yang tidak diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, dihitung berdasarkan HPP dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.36
Rincian Harga Satuan Persediaan
Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat
yang Belum Diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021

	Jenis Persediaan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
A.	BPBAT Sungai Gelam			
	Larva benih ikan baung	340.000	1,00	340.000
	Larva benih ikan nilem	2.908.000	1,00	2.908.000
	Jumlah A	3.248.000		3.248.000
B.	BPBAT Tatelu			
	Larva tawes	250.000	2,00	500.000
	Jumlah B	250.000		500.000
C.	BPIU2K Karang Asem			
	Produksi induk afkir	2.625	3.200,00	8.400.000
	Produksi induk udang vaname afkir (size 25)	34.878	3.200,00	111.609.600
	Produksi udang <10 gr	39.250	440,00	17.270.000
	Produksi udang 10-20 gr	26.928	625,00	16.830.000
	Produksi udang 10-20 gr	2640	1.000,00	2.640.000
	Produksi udang 20-30 gr	12.840	1.375,00	17.655.000
	Produksi udang tambak <10 gr	25.000	440,00	11.000.000
	Produksi udang tambak 10-20 gr	657.536	625,00	410.960.000
	Jumlah C	801.697		596.364.600
Total				600.112.600

Atas permasalahan tersebut diatas, pengelola persediaan Ditjen Perikanan Budi Daya menjelaskan bahwa belum ada keseragaman kebijakan akuntansi pada satker Ditjen Perikanan Budi Daya terutama terkait pengukuran nilai persediaan hasil produksi dan perekayasaan yang nilainya belum/tidak terdapat pada PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada KKP.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.377.116.399.469,00 dan Rp23.902.807.207.513,00.

Rincian saldo Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.37
Rincian Saldo Aset Tetap Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Tanah	15.853.798.190.884	16.011.305.715.663	(157.507.524.779)	(0,98)
Peralatan dan Mesin	6.284.712.692.903	6.522.510.838.685	(237.798.145.782)	(3,65)
Gedung dan Bangunan	5.261.675.168.922	5.302.979.449.379	(41.304.280.457)	(0,78)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.053.129.578.585	3.924.815.114.324	128.314.464.261	3,27
Aset Tetap Lainnya	211.154.575.775	226.854.882.066	(15.700.306.291)	(6,92)
Konstruksi Dalam pengerjaan	183.735.627.793	91.116.357.351	92.619.270.442	101,65
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.471.089.435.393)	(8.176.775.149.955)	(294.314.285.438)	3,60
Total	23.377.116.399.469	23.902.807.207.513	(525.690.808.044)	(2,20)

Pada Tahun 2024 terdapat transfer masuk dan/atau transfer keluar dari KKP ke Kementerian/Lembaga lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.38
Rincian Transfer Masuk dan/atau Transfer Keluar Aset Tetap ke K/L Lain
Per 31 Desember 2024

Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk	Trasnfer Keluar	Keterangan
Kementerian Pertahanan				
133111	Gedung dan Bangunan		125.411.000	Transfer gedung Balai KIPM Semarang yang berdiri di atas tanah Kodam Diponegoro
Kementerian Keuangan				

Kode Akun	Nama Akun	Transfer Masuk	Trasnfer Keluar	Keterangan
132111	Peralatan dan Mesin	27.761.000		Optimalisasi aset dari KPKNL Tasikmalaya berupa Meubeulair untuk satker Poltek Pangandaran
135111	Aset Tetap Renovasi		4.672.951.991	Transfer ATR di Gd. Mina Bahari II
Perpustakaan Nasional				
132111	Peralatan dan Mesin	190.544.310		Transfer komputer untuk satker Poltek Sidoarjo
135121	Aset Tetap Lainnya	40.774.040		Transfer buku untuk satker Poltek Sidoarjo
BRIN				
132111	Peralatan dan Mesin	8.957.294.558		Pengembalian aset yang tidak jadi dikelola BRIN pada satker BBRBLPP Gondol
133111	Gedung dan Bangunan	17.397.987.000		Pengembalian aset yang tidak jadi dikelola BRIN pada satker BBRBLPP Gondol
Badan Karantina Indonesia				
117111	Barang Konsumsi		43.456.500	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
131111	Tanah		61.621.738.882	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
132111	Peralatan dan Mesin		133.154.641.266	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
133111	Gedung dan Bangunan		108.750.000.355	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
134111	Jalan dan Jembatan		1.444.104.615	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
134112	Irigasi		746.909.251	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
134113	Jaringan		1.792.957.439	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
135121	Aset Tetap Lainnya		231.344.350	Tranfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia
Bendahara Umum Negara (BA. 999)				
131111	Tanah	137.848.653.000		Transfer masuk tanah dari satgas penyelesaian BLBI untuk Pangkalan PSDKP Benoa
Total		164.463.013.908	312.583.515.649	

Penjelasan Aset Tetap per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.2.1 Tanah

Aset tetap berupa Tanah ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai. Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.853.798.190.884,00 dan Rp16.011.305.715.663,00.

Rincian saldo Tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.39
Rincian Saldo Tanah Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	1.048.754.118.000	1.048.754.118.000	0	0,00
Ditjen PT	3.635.961.793.591	3.618.080.652.312	17.881.141.279	0,49
Ditjen PB	3.756.767.517.642	3.756.515.384.141	252.133.501	0,01
Ditjen PSDKP	362.408.433.351	206.836.578.840	155.571.854.511	75,21
Ditjen PDSPKP	610.358.044.792	610.358.044.792	0	0,00
Ditjen PKRL	328.758.991.227	308.545.890.024	20.213.101.203	6,55
BPPSDM KP	5.838.589.166.509	6.128.393.182.900	(289.804.016.391)	(4,73)
BPPMH KP	272.200.125.772	333.821.864.654	(61.621.738.882)	(18,46)
Total	15.853.798.190.884	16.011.305.715.663	(157.507.524.779)	(0,98)

Saldo Tanah yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Tanah pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP Rp155.571.854.511,00 yang secara umum disebabkan oleh adanya transfer Tanah di Pangkalan PSDKP Benoa dari satuan tugas (satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Tanah pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp61.621.738.882,00 yang secara umum disebabkan oleh transfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia.

Rincian nilai tercatat (*carrying ammount*) Aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tanah Persil sebesar Rp12.957.993.012.043,00;
2. Tanah Non Persil sebesar Rp2.763.812.435.508,00; dan
3. Lapangan sebesar Rp131.992.743.333,00.

Ringkasan mutasi akun Tanah per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.40
Ringkasan Mutasi Tanah Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		16.011.305.715.663
Mutasi Tambah		1.063.033.304.098
100	Saldo Awal	39.452.383.000
102	Transfer Masuk	217.032.906.760
103	Hibah Masuk	2.730.681.654
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	521.090.281
107	Reklasifikasi Masuk	370.636.604.300
112	Perolehan Lainnya	148.305.755.444
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	83.384.197
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.067.014.337
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	757.483.500
208	Pengembangan Melalui KDP	1.994.971.825
412	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	110.346.287.172
432	Perubahan PI ke BMN	158.104.741.628
Mutasi Kurang		(1.220.508.237.736)
214	Koreksi Susulan	(521.385.462)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.433.803.689)
302	Transfer Keluar	(278.654.645.642)
303	Hibah Keluar	(1.211.135.566)
304	Reklasifikasi Keluar	(370.636.604.300)
305	Koreksi Pencatatan	(10.184.970.234)
431	Perubahan BMN Ke PI	(557.898.283.984)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		15.853.798.190.884

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Tanah adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.776.780.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp19.675.603.000,00;
2. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp144.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp216.657.866.760,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp231.040.000,00;
3. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp116565000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.577.418.451,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp36.698.203,00;
4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp49.867.279,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp471.223.002,00;
5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp351.100.534.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp492.411.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp19.043.659.300,00;
6. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp137.848.653.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp500.800.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp9.956.302.444,00;
7. Transaksi Pengembangan Nilai Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp83.384.197,00;

8. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.478.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp12.570.182.575,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp493.353.762,00;
9. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp757.483.500,00;
10. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp168.749.304,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.826.222.521,00;
11. Transaksi Perubahan Aset Kemitraan ke BMN hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp110.346.287.172,00;
12. Transaksi Perubahan PI ke BMN hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.581.047.416.28,00;
13. Transaksi Koreksi Susulan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp521.385.462,00;
14. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp8.105.536,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.425.698.153,00;
15. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp144.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp216.657.866.760,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp231.040.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp61.621.738.882,00;
16. Transaksi Hibah Keluar hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.211.135.566,00;
17. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar

Rp351.100.534.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp492.411.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp19.043.659.300,00;

18. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.065.549.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp81.19.421.234,00; dan
19. Transaksi Perubahan BMN Ke PI terdapat pada 2 (dua) unit Eselon yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp110.346.287.172,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp447.551.996.812,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain

Terdapat tanah dikuasai dan/atau bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.41
Rincian Tanah Dikuasai dan/atau Bersengketa dengan Pihak Lain
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Nama Satker	Luas (m2)	Nilai (Rp)	Keterangan
Ditjen Perikanan Tangkap		1.400	3.965.775.000	
	Pelabunan Perikanan Nusantara Brondong	1.400	3.965.775.000	Sengketa dengan PT DOK dan PS (Persero)
Ditjen Perikanan Budi Daya		3.243.419	393.900.484.000	
	Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	472.440	180.483.744.000	Sengketa dengan PT SC
	BLU Produksi Perikanan Budi Daya Karawang	2.736.585	153.248.760.000	Dikuasai oleh masyarakat
	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	34.394	60.167.980.000	Pencatatan ganda dengan Pemprov. Sulawesi Selatan
Jumlah		3.244.819	397.866.259.000	

Penjelasan ringkas atas permasalahan tanah pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

a. Ditjen Perikanan Tangkap - Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Berupa tanah seluas 1.400 m² di Lamongan, Jawa Timur pada satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dikuasai oleh PT DOK dan PS (Persero). Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 September 2022 untuk menengahi persoalan sengketa tanah hasil reklamasi oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada tahun 2004 dengan mengambil alih Tanah yang dipersengketakan untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas umum sarana perhubungan berupa jalan dan kawasan energi di lingkungan Pelabuhan Perikanan sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2021.

b. Ditjen Perikanan Budi Daya - Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Berupa sebidang tanah seluas 472.440 m² sebagai obyek perjanjian tukar menukar (*ruislag*) di Sidoarjo, Jawa Timur antara Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Perikanan dengan PT SC pada Tahun 1997. Dalam perjalanannya terjadi sengketa dalam pelaksanaan *ruislag* sehingga tanah tersebut saat ini dikuasai oleh PT SC.

Atas permasalahan tersebut pada tahun 2023 KKP melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- Mengirimkan surat permohonan penilaian BMN berupa Tanah dalam rangka tindak lanjut penyelesaian perjanjian *ruislag* kepada Kementerian Keuangan. Surat tersebut dikembalikan dengan alasan obyek penilaian beserta permasalahan hukum tidak jelas;
- Melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dengan kesepakatan sebagai berikut.
 - i. Kementerian Keuangan belum dapat melakukan penilaian ulang atas aset dimaksud dan disarankan untuk sementara menggunakan hasil revaluasi pada tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp180.246.056.750,00;
 - ii. Penilaian aset pengganti yang telah diberikan oleh PT SC dapat dilakukan oleh Tim Penilai/Akuntan Publik;

iii. KKP dapat melakukan negosiasi ulang dengan PT SC dan diharapkan mendapatkan alternatif solusi terbaik bagi para pihak.

- Sebagai tindak lanjut poin iii telah dilaksanakan rapat antara 2 pihak pada tanggal 19 Juni 2024. Dalam rapat tersebut KKP memberikan opsi kepada PT SC untuk melanjutkan *ruislag* dengan memperhitungkan prestasi perijinan yang telah dilaksanakan PT SC. Prestasi tersebut berupa 2 (dua) unit mobil Izusu Panther senilai Rp168.000.000,00; Tanah dan Bangunan di Buduran, Jawa Timur senilai Rp77.750.000,00 dan Perbaikan sarana dan prasarana rumah dinas senilai Rp43.941.000,00. Sehingga tanah yang dapat ditukar adalah sebagai berikut.

$$\frac{289.691.000}{3.372.972.000} \times \frac{472.440}{\text{m}^2} = 40.575 \text{ m}^2$$

Atas usulan tersebut PT SC akan membahasnya secara internal terlebih dahulu untuk didiskusikan kembali dengan KKP.

c. Ditjen Perikanan Budi Daya - BLU Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Berupa tanah seluas 273,66 Ha eks proyek Tambak Inti Rakyat pada satker Badan Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang yang dikuasai oleh masyarakat. Atas masalah ini KKP masih mengkaji kewajiban yang mungkin timbul berkenaan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat berserta peraturan turunannya termasuk tapi tidak terbatas pada konversi lahan kepada masyarakat.

d. Ditjen Perikanan Budi Daya - Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tercatat sebagai BMN di satker BPBAP Takalar dan juga tercatat sebagai BMD pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi sebagai berikut.

- Tanah di Desa Bira, Kota Makassar dengan luas tanah 15.000 m² dengan nilai Rp55.020.000.000,00 bersertifikat Hak Pakai Nomor 20004/Parang Loe atas nama Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan terbit tahun 2019.

Pada tanah ini terdapat bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

- Tanah di Desa Mandalle, Kab. Pangkep dengan luas tanah 19.394 m² dengan nilai Rp5.147.980.000,00 bersertifikat Hak Pakai a.n. Departemen Pertanian RI Jakarta Kantor dan Unit *Hatchery* Ditjen Perikanan dan Kepulauan, dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Mandalle tanggal 2 Februari 1989.

Pada tanah ini terdapat bangunan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sertifikat tanah tersebut berupa salinan dan dipegang oleh satker BBPBAP Takalar.

Sampai saat ini kedua permasalahan tanah di satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar tersebut belum selesai sehingga tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat/Pihak Lain.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Tanah dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin merupakan mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.284.712.692.903,00 dan Rp6.522.510.838.685,00.

Rincian saldo Peralatan dan Mesin pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.42
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	372.813.315.084	359.277.507.174	13.535.807.910	3,77
Itjen	21.614.225.277	21.801.109.926	(186.884.649)	(0,86)
Ditjen PT	747.538.103.773	797.654.420.257	(50.116.316.484)	(6,28)
Ditjen PB	922.411.425.057	925.923.688.626	(3.512.263.569)	(0,38)
Ditjen PSDKP	2.110.458.043.015	2.111.226.266.042	(768.223.027)	(0,04)
Ditjen PDSPKP	155.596.231.192	193.874.063.797	(38.277.832.605)	(19,74)
Ditjen PKRL	125.006.191.641	122.993.161.716	2.013.029.925	1,64
BPPSDM KP	1.449.384.664.147	1.455.058.616.217	(5.673.952.070)	(0,39)
BPPMH KP	379.890.493.717	534.702.004.930	(154.811.511.213)	(28,95)
Total	6.284.712.692.903	6.522.510.838.685	(237.798.145.782)	(3,65)

Saldo Peralatan dan Mesin yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Peralatan dan Mesin pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal Rp13.535.807.910,00 yang secara umum disebabkan oleh pencatatan Peralatan dan Mesin yang merupakan bagian pekerjaan jasa keamanan siber dan pencatatan Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari belanja barang (52).

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp154.811.511.213,00 yang secara umum disebabkan oleh transfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia sebesar Rp133.154.641.266,00.

Nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.021.543.920.827,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per bidang barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.43
Daftar Rinci Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
301-Alat Besar	469.825.761.387	461.393.810.204	389.561.896.333	80.263.865.054
302-Alat Angkutan	2.747.495.185.495	1.872.872.087.192	2.011.884.302.168	735.610.883.327
303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	74.071.876.643	65.141.125.760	66.067.727.621	8.004.149.022
304-Alat Pertanian	204.610.139.005	179.083.598.829	187.491.812.409	17.118.326.596
305-Alat Kantor & Rumah Tangga	710.254.212.443	637.664.232.592	619.477.311.321	90.776.901.122
306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	318.504.044.187	235.561.312.852	246.549.479.241	71.954.564.946
307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	49.028.967.628	52.208.941.288	46.236.240.475	2.792.727.153
308-Alat Laboratorium	1.004.123.346.384	978.615.142.253	886.572.769.528	117.550.576.856
309-Alat Persenjataan	51.138.973.225	33.589.364.176	35.016.875.128	16.122.098.097
310-Komputer	440.477.888.973	376.353.169.155	365.211.017.544	75.266.871.429
311-Alat Eksplorasi	7.439.095.996	7.063.894.254	7.068.756.507	370.339.489
312-Alat Pengeboran	4.129.183.300	4.150.426.972	4.111.658.935	17.524.365
313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	19.090.934.086	19.884.546.911	13.735.918.847	5.355.015.239
314-Alat Bantu Eksplorasi	15.587.329.030	14.644.155.657	14.833.636.463	753.692.567
315-Alat Keselamatan Kerja	46.946.037.819	41.491.578.065	39.683.170.854	7.262.866.965
316-Alat Peraga	12.774.373.962	7.867.422.023	8.327.693.116	4.446.680.846
317-Peralatan Proses/Produksi	92.846.381.146	62.729.242.029	65.869.721.771	26.976.659.375
318-Rambu - Rambu	8.840.141.117	7.338.917.867	6.949.494.531	1.890.646.586
319-Peralatan Olah Raga	7.528.821.077	6.752.869.186	6.894.438.035	634.383.042
Total	6.284.712.692.903	5.064.405.837.265	5.021.543.920.827	1.263.168.772.076

Ringkasan mutasi akun Peralatan dan Mesin per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.44
Ringkasan Mutasi Peralatan dan Mesin Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		6.522.510.838.685
Mutasi Tambah		411.676.788.034
100	Saldo Awal	21.808.900.122
101	Pembelian	140.285.002.920
102	Transfer Masuk	93.701.197.333

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
103	Hibah Masuk	8.430.751.100
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.107.875.300
106	Pembatalan Penghapusan	159.921.559
107	Reklasifikasi Masuk	11.398.213.837
112	Perolehan Lainnya	36.097.466.831
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	7.425.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	3.826.226.200
131	Likuidasi Masuk	29.673.113.101
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.115.589.375
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	16.199.330.752
208	Pengembangan Melalui KDP	17.440.363.926
214	Koreksi Susulan	91.480.550
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	26.333.930.128
Mutasi Kurang		(649.474.933.816)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(16.121.676.760)
301	Penghapusan	(1.407.337.950)
302	Transfer Keluar	(217.680.238.731)
303	Hibah Keluar	(5.635.191.550)
304	Reklasifikasi Keluar	(15.454.033.537)
305	Koreksi Pencatatan	(34.004.912.827)
311	Likuidasi Keluar	(29.673.113.101)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(523.944.172)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(328.974.485.188)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		6.284.712.692.903

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp14.544.158.611,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp6.644.870.509,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp27.548.862,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp14.988.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar

- Rp527.701.640,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp49.632.000,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp17.603.440.907,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.707.707.175,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp32.121.727.806,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp27.869.136.200,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp18.707.905.091,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp3.151.555.025,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp13.255.235.559,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp19.904.133.062,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp4.964.162.095,00;
 3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp960.964.000,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp42.491.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp8.443.966.652,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21.274.333.742,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp8.485.411.958,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp20.208.702.269,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp477.139.300,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp30.145.448.382,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.662.740.030,00;
 4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp88.892.292,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp8.341.858.808,00;

5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.598.975.300,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.208.900.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp300.000.000,00;
6. Transaksi Pembatalan Penghapusan hanya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp103.191.959,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp56.729.600,00;
7. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp96.478.030,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp669.717.100,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp149.168.339,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.443.230.956,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp617.945.617,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp2.598.802.300,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.822.871.495,00;
8. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp14.560.024.427,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.249.331.684,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp499.343.535,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp545.546.862,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp46.497.900,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp111.084.660,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.071.337.763,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp14.300.000,00;

9. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp7.425.000,00;
10. Transaksi Reklasifikasi Masuk dari Persediaan terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.808.575.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.500.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp16.151.200,00;
11. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.536.069.305,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.877.117.996,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp259.925.800,00;
12. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp61.487.160,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.770.073.715,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp20.035.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp263.993.000,00;
13. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp34.765.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp77.937.166,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.351.156.702,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp14.589.239.184,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp126.754.200,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.899.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp17.579.000,00;
14. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar

- Rp2.396.722.950,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp14.866.610.450,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp177.030.526,00;
15. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp89.893.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.587.550,00;
 16. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp39.050.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp15.933.080.226,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.400.141.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp7.223.636.832,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp57.847.720,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp186.509.750,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.493.664.100,00;
 17. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp100.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.538.115,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.390.609.671,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp14.453.159.314,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp111.084.660,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp52.740.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp94.445.000,00;
 18. Transaksi Penghapusan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp440.769.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp966.568.950,00;

19. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.409.030.332,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.040.271.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.828.796.102,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp23.376.817.912,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp6.119.338.066,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp20.208.702.269,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.023.998.684,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp19.585.647.600,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp137.087.636.266,00;
20. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.926.915.750,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.610.997.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp437.103.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.400.250.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp259.925.800,00;
21. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp319.860.000,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp96.478.030,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp669.717.100,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp149.168.339,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp9.166.470.956,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp716.782.617,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp2.531.099.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.804.457.495,00;

22. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp15.618.761.945,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp355.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp8.702.519.262,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp14.998.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp198.800.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp9.112.569.620,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp2.263.500,00;
23. Transaksi Likuidasi Keluar hanya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp19.536.069.305,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.877.117.996,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp259.925.800,00;
24. Transaksi Reklasifikasi Keluar Persediaan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp77.000.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.500.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp220.496.172,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp224.948.000,00; dan
25. Transaksi Penghentian dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp15.933.546.592,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.896.711.324,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp120.797.815.419,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp40.765.721.174,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp34.548.836.339,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp39.986.930.558,00; unit Eselon I Ditjen

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.284.994.720,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp37.853.954.240,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp27.905.974.822,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.261.675.168.922,00 dan Rp5.302.979.449.379,00.

Rincian saldo Gedung dan Bangunan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.45
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	766.903.467.648	757.132.444.069	9.771.023.579	1,29
Ditjen PT	787.698.310.066	740.302.680.416	47.395.629.650	6,40
Ditjen PB	1.313.698.875.867	1.347.325.198.064	(33.626.322.197)	(2,50)
Ditjen PSDKP	231.184.717.974	209.152.504.836	22.032.213.138	10,53
Ditjen PDSPKP	112.680.374.165	104.297.330.029	8.383.044.136	8,04
Ditjen PKRL	90.736.630.532	86.958.983.679	3.777.646.853	4,34
BPPSDM KP	1.692.502.360.675	1.684.337.201.059	8.165.159.616	0,48
BPPMH KP	266.270.431.995	373.473.107.227	(107.202.675.232)	(28,70)
Total	5.261.675.168.922	5.302.979.449.379	(41.304.280.457)	(0,78)

Saldo Gedung dan Bangunan yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Gedung dan Bangunan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap Rp47.395.629.650,00 yang secara umum disebabkan oleh pendetailan pembukuan BMN yang dihasilkan dari pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Saumlaki dan perolehan Gedung dan Bangunan eks pemanfaatan BMN (berupa lahan di lingkungan pelabuhan) oleh PT HOI.

2. Penurunan signifikan

Penurunan signifikan saldo Gedung dan Bangunan pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp107.202.675.232,00 yang secara umum disebabkan oleh transfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia.

Nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.010.479.851.763,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per bidang barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.46
Daftar Rinci Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
401-Bangunan Gedung	5.056.012.310.352	860.869.203.701	976.517.283.421	4.079.495.026.931
402-Monumen	1.235.524.269	165.410.372	195.207.039	1.040.317.230
403-Bangunan Menara	17.875.118.153	3.961.941.578	4.462.980.300	13.412.137.853
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	186.552.216.148	26.487.921.144	29.304.381.003	157.247.835.145
Total	5.261.675.168.922	891.484.476.795	1.010.479.851.763	4.251.195.317.159

Ringkasan mutasi akun Gedung dan Bangunan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.47
Ringkasan Mutasi Gedung dan Bangunan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		5.302.979.449.379
Mutasi Tambah		364.386.762.349
100	Saldo Awal	16.795.970.531
101	Pembelian	4.688.976.251
102	Transfer Masuk	46.088.409.992
103	Hibah Masuk	2.849.908.967
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	39.672.485.008
106	Pembatalan Penghapusan	159.816.000
107	Reklasifikasi Masuk	63.116.706.433
112	Perolehan Lainnya	42.754.622.543
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.253.151.400
131	Likuidasi Masuk	57.380.700.532
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.621.071.544
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	26.366.310.503
208	Pengembangan Melalui KDP	34.924.810.803
214	Koreksi Susulan	1.456.821.254
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.947.558.273
412	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	9.107.000
432	Perubahan PI ke BMN	12.300.335.315
Mutasi Kurang		(405.691.042.806)
214	Koreksi Susulan	(14.477.450)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(78.409.028.782)
302	Transfer Keluar	(137.565.834.347)
303	Hibah Keluar	(6.726.036.048)
304	Reklasifikasi Keluar	(63.336.737.133)
305	Koreksi Pencatatan	(16.640.359.587)
311	Likuidasi Keluar	(57.380.700.532)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(12.315.994.945)
431	Perubahan BMN Ke PI	(33.301.873.982)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		5.261.675.168.922

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.174.115.460,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya

- sebesar Rp13.252.458.731,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp529.446.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp529.890.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp310.059.840,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.261.255.706,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.016.959.408,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp552.659.836,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp448.934.300,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp409.167.001,00;
 3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp17.395.278.492,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp7.571.886.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp20.827.567.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp293.678.500,00;
 4. Transaksi Hibah Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.354.521.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp495.387.967,00;
 5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.685.817.780,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.257.803.702,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp17.405.733.725,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.837.630.819,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.386.320.482,00; unit

- Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp99.178.500,00;
6. Transaksi Pembatalan Penghapusan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp159.816.000,00;
 7. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp388.754.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp38.787.204.096,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp18.393.152.716,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp325.875.989,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.221.719.632,00;
 8. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp36.554.373.963,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.131.748.204,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp127.797.700,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp3.940.702.676,00;
 9. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp86.741.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.432.550.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp191.782.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp347.578.400,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp194.500.000,00;
 10. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp24.483.637.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp32.897062.677,00;

11. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.015.970.192,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.395.290.800,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp172.343.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp414.991.086,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.257.897.566,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp364.578.900,00;
12. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp835.850.101,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp9.964.172.340,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.288.924.488,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp880.158.136,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp363.810.587,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp10.399.517.818,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp633.877.033,00;
13. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.442.010.924,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.745.443.413,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp6.711.919.674,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp4.487.622.007,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.054.735.385,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp6.863.650.610,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp619.428.790,00;

14. Transaksi Koreksi Susulan terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp288.001.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.168.820.254,00;
15. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.937.020.543,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp419.697.590,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp535.318.140,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp55.522.000,00;
16. Transaksi Aset Kemitraan ke BMN hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.107.000,00;
17. Transaksi Perubahan PI ke BMN terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.788.342.315,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp7.502.886.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.107.000,00;
18. Transaksi Koreksi Susulan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp14.477.450,00;
19. Transaksi Koreksi Nilai Pencatatan Berkurang terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp84.173.446,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp83.986.632,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp67.943.500.813,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp490.012.480,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.774.831.763,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp8.031.853.048,00; unit

- Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp670.600,00;
20. Transaksi Tranfer Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp17.395.278.492,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp7.571.886.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp239.200.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp3.190.380.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp109.169.089.855,00;
21. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.173.849.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp917.627.760,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp634.559.288,00;
22. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp388.754.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp38.853.177.796,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp18.393.152.716,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp325.875.989,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp59.057.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.316.719.632,00;
23. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.063.354.945,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.130.132.607,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp383.464.700,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp257.821.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP

sebesar Rp2.102.740.834,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp702.845.501,00;

24. Transaksi Likuidasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp24.483.637.855,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp32.897.062.677,00;
25. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp422.664.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp4.816.111.704,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp542.413.614,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp561.694.450,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp636.926.401,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp5.336.184.776,00; dan
26. Transaksi Perubahan BMN ke Properti Investasi terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.416.685.081,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp9.107.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp27.876.081.901,00.

Terdapat permasalahan pada BMN berupa Gedung dan Bangunan yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu.

1. Rumah negara sebanyak 2 (dua) unit pada satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris ASN.
2. Rumah negara sebanyak 10 (sepuluh) unit pada satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan Bogor yang dikuasai pensiunan ASN dan ahli waris ASN.

Penjelasan lebih lanjut pengelolaan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP

TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.053.129.578.585,00 dan Rp3.924.815.114.324,00.

Rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.48
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	78.998.488.111	78.998.488.111	0	0,00
Ditjen PT	2.867.865.609.468	2.819.507.801.303	48.357.808.165	1,72
Ditjen PB	550.975.996.989	471.105.825.468	79.870.171.521	16,95
Ditjen PSDKP	141.640.668.493	140.206.467.587	1.434.200.906	1,02
Ditjen PDSPKP	30.205.936.446	30.161.373.276	44.563.170	0,15
Ditjen PKRL	12.616.970.810	13.492.329.061	(875.358.251)	(6,49)
BPPSDM KP	352.882.410.805	349.388.079.750	3.494.331.055	1,00
BPPMH KP	17.943.497.463	21.954.749.768	(4.011.252.305)	(18,27)
Total	4.053.129.578.585	3.924.815.114.324	128.314.464.261	3,27

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya Rp79.870.171.521,00 yang secara umum disebabkan oleh pembukuan pekerjaan fisik Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab. Mesuji berupa Jalan dan Jembatan, Bangunan Pembuang Irigasi dan Bangunan Talud Penahan sebesar Rp6.292.168.374,00 serta pembukuan pengembangan

kawasan BUBK Kebumen berupa Jalan Khusus Proyek, Penguat Tebing/Pantai, Sumur Dengan Pompa dan Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA sebesar Rp 45.349.360.058,00.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp4.011.252.305,00 yang secara umum disebabkan oleh transfer aset dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia sebesar Rp3.983.971.305,00.

Nilai akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.432.464.729.331,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.49
Daftar Rinci Nilai Tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
501-Jalan Dan Jembatan	1.939.766.820.075	943.464.658.441	1.083.380.676.875	856.386.143.200
502-Bangunan Air	1.689.294.716.491	1.102.123.002.008	1.171.308.998.786	517.985.717.705
503-Instalasi	286.165.796.918	133.339.999.178	140.166.666.536	145.999.130.382
504-Jaringan	137.902.245.101	34.049.894.465	37.608.387.134	100.293.857.967
Total	4.053.129.578.585	2.212.977.554.092	2.432.464.729.331	1.620.664.849.254

Ringkasan mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.50
Ringkasan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		3.924.815.114.324
Mutasi Tambah		311.764.901.172
100	Saldo Awal	2.643.332.529
101	Pembelian	2.044.914.438
102	Transfer Masuk	8.624.846.911
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	14.986.874.344
107	Reklasifikasi Masuk	768.073.700

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
112	Perolehan Lainnya	46.460.118.005
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.015.797.750
131	Likuidasi Masuk	48.847.274.429
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.080.024.277
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	15.497.724.602
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	45.349.360.058
208	Pengembangan Melalui KDP	13.174.709.467
214	Koreksi Susulan	620.701.982
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.775.144.680
412	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	103.876.004.000
Mutasi Kurang		(183.450.436.911)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.254.941.126)
302	Transfer Keluar	(12.608.818.216)
303	Hibah Keluar	(1.985.298.864)
304	Reklasifikasi Keluar	(804.514.000)
305	Koreksi Pencatatan	(6.577.743.311)
311	Likuidasi Keluar	(48.847.274.429)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(6.495.842.965)
411	Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	(103.876.004.000)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		4.053.129.578.585

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal hanya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp47.851.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.367.922.841,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp227.558.688,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp509.160.700,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp644.598.486,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp615.383.771,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp275.771.481,00;

3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp8.502.982.911,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp31.864.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp90.000.000,00;
4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.441.015.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp11.525.937.741,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp435.828.733,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.584.092.870,00;
5. Transaksi Reklasifikasi Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp768.073.700,00;
6. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp44.459.013.309,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.311.744.296,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp689.360.400,00;
7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.946.284.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp69.513.750,00;
8. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp45.276.175.701,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.571.098.728,00;
9. Transaksi Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp301.904.170,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.223.140.680,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp554.979.427,00;

10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.550.287.391,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.527.960.019,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp44.563.170,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp374.914.022,00;
11. Transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp45.349.360.058,00;
12. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.999.148.942,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp8.659.438.646,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp516.121.879,00;
13. Transaksi Koreksi Susulan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp620.701.982,00;
14. Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3441.003.820,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.325.273.860,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp8.867.000,00;
15. Transaksi Perubahan Aset Kemitraan ke BMN hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp103.876.004.000,00;
16. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp344.433.686,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.709.069.148,00; unit Eselon I Ditjen

Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp7.369.904,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp194.068.388,00;

17. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp6.009.927.763,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.493.055.148,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp31.864.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp90.000.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp3.983.971.305,00;
18. Transaksi Hibah Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.237.175.864,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp748.123.000,00;
19. Transaksi Reklasifikasi Keluar terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp702.100.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp84.000.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp18.414.000,00;
20. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp270.125.700,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp62.29.236.861,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp69.513.750,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp8.867.000,00;
21. Transaksi Likuidasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp45.276.175.701,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp3.571.098.728,00;

22. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.595.886.854,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp9.714.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp680.743.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.200.632.111,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp8.867.000,00; dan
23. Transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp103.876.004.000,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp211.154.575.775,00 dan Rp226.854.882.066,00.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.51
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	15.288.041.864	15.341.053.165	(53.011.301)	(0,35)
Ditjen PT	23.821.507.884	27.617.048.970	(3.795.541.086)	(13,74)
Ditjen PB	4.649.857.349	4.677.754.349	(27.897.000)	(0,60)
Ditjen PSDKP	8.100.376.320	18.976.611.320	(10.876.235.000)	(57,31)
Ditjen PDSPKP	272.840.270	278.535.270	(5.695.000)	(2,04)
Ditjen PKRL	129.357.185.571	129.592.041.571	(234.856.000)	(0,18)

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
BPPSDM KP	28.153.165.516	28.434.958.070	(281.792.554)	(0,99)
BPPMH KP	1.511.601.001	1.936.879.351	(425.278.350)	(21,96)
Total	211.154.575.775	226.854.882.066	(15.700.306.291)	(6,92)

Saldo Aset Tetap Lainnya yang mengalami penurunan signifikan pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap Rp3.795.541.086,00 yang secara umum disebabkan oleh koreksi kode barang dan penggabungan nilai BMN sebesar Rp3.031.477.386,00 serta pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.876.235.000,00 yang secara umum disebabkan oleh koreksi nilai atas kapal yang dijadikan monumen sebesar Rp10.716.722.000,00.

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.600.933.472,00. Rincian nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap berupa Aset Tetap Lainnya per bidang barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.52
Daftar Rinci Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Per Akun Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Aset Tetap Renovasi	15.488.148.683	1.577.267.510	200.310.639	15.287.838.044
607-Aset Tetap Dalam Renovasi	15.488.148.683	1.577.267.510	200.310.639	15.287.838.044
Aset Tetap Lainnya	195.666.427.092	6.330.014.293	6.400.622.833	189.265.804.259
601-Bahan Perpustakaan	56.534.705.339	0	0	56.534.705.339
602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	138.900.221.753	6.330.014.293	6.400.622.833	132.499.598.920
606-Barang Koleksi Non Budaya	231.500.000	0	0	231.500.000
Total	211.154.575.775	7.907.281.803	6.600.933.472	204.553.642.303

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.069.456.674,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu Sekretariat Ditjen Perikanan sebesar Rp4.444.632.000,00; DKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp5.415.973.000,00; DKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp208.851.674,00. Aset Tetap Renovasi satker Sekretariat Ditjen Perikanan antara lain berupa pembangunan rehabilitasi TPI, gerbang, pagar depan dan jalan lingkungan SKPT Sebatik sebesar Rp4.061.973.000,00. Sedangkan terhadap Aset Tetap Renovasi pada satker DKP Provinsi Kalimantan Tmur dan DKP Provinsi Sulawesi Utara akan dilaksanakan identifikasi ulang dalam rangka proses serah terima ke pemilik aset.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.736.548.559,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada satker sebagai berikut.

a. Setditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan pekerjaan pembuatan partisi dan tata ruang di lantai 7 dan 8 Gd. Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp1.837.608.966,00 dan pekerjaan penataan ruang *podcast* lantai 7 Gd Mina Bahari IV yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebesar Rp63.310.000,00.

b. DKP Prov. Sulawesi Utara

Merupakan pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebesar Rp77.000.000,00 yang saat ini dalam proses penyelesaian melalui proses penghibahan atau penghapusan.

c. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Merupakan pekerjaan rehabilitasi gedung kantor sebesar Rp758.629.593,00.

3. Badan Riset dan Sumber Daya KP sebesar Rp2.682.143.450,00

Saldo Aset Tetap Renovasi pada Badan Riset dan Sumber Daya KP terdapat pada satker sebagai berikut.

a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan pekerjaan renovasi ruang Kepala Badan di lantai 7 Gd. Mina Bahari III yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp95.000.000,00.

b. Pusat Riset Perikanan

Merupakan pengurugan tanah milik Pemkab. Kepulauan Tanimbar yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebesar Rp2.537.843.450,00 dan perencanaan pemeliharaan gedung 2 kantor BPPSDM KP lantai 3 (tiga) dan 4 (empat).

Ringkasan mutasi akun Aset Tetap Lainnya per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.53
Ringkasan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		226.854.882.066
Mutasi Tambah		60.489.895.600
100	Saldo Awal	45.356.858.358
101	Pembelian	5.879.439.759
102	Transfer Masuk	1.927.207.285
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	50.000.000
107	Reklasifikasi Masuk	700.708.000
112	Perolehan Lainnya	394.811.400
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	198.968.000
131	Likuidasi Masuk	5.892.566.174
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	89.336.624
Mutasi Kurang		(76.190.201.891)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.925.146.604)
302	Transfer Keluar	(52.897.573.144)
304	Reklasifikasi Keluar	(265.559.300)
305	Koreksi Pencatatan	(5.708.492.469)
311	Likuidasi Keluar	(5.892.566.174)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(5.695.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(495.169.200)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		211.154.575.775

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp45.349.360.058,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp7.498.300,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.017.083.670,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp144.687.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp28.720.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.051.475.445,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp6374.73.644,00;
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp300.702.800,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.051.475.445,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp376.061.040,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp198.968.000,00;
4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp50.000.000,00;
5. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp319.860.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp232.856.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp147.992.000,00;
6. Transaksi Perolehan Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp394.811.400,00;
7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung terdapat pada unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp198.968.000,00;

8. Transaksi Likuidasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp5.659.234.674,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp233.331.500,00;
9. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp89.336.624,00;
10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp208.424.604,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp10.716.722.000,00;
11. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp4.191.455.791,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp955.358.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp45.349.360.058,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.051.475.445,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp232.856.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp686.755.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp4.303.12.350,00;
12. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3.229.352.386,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp171.400.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.051.475.445,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.057.296.638,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp198.968.000,00;
13. Transaksi Likuidasi Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar

Rp5.659.234.674,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp233.331.500,00;

14. Transaksi Reklasifikasi Keluar ke Persediaan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp5.695.000,00; dan
15. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan terdapat 7 (tujuh) pada unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp79.411.200,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp106.220.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp27.897.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp16.833.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.000.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp68.874.000,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp193.934.000,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp183.735.627.793,00 dan Rp91.116.357.351,00.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.54
Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	7.699.342.783	62.433.802.649	(54.734.459.866)	(87,67)
Ditjen PT	143.588.893.165	20.324.415.386	123.264.477.779	606,48
Ditjen PB	23.005.851.182	1.552.206.900	21.453.644.282	1.382,14
Ditjen PSDKP	2.122.367.218	4.886.395.403	(2.764.028.185)	(56,57)
Ditjen PDSPKP	1.357.471.200	178.862.000	1.178.609.200	658,95
Ditjen PKRL	0	492.149.864	(492.149.864)	(100,00)
BPPSDM KP	5.961.702.245	1.248.525.149	4.713.177.096	377,50
Total	183.735.627.793	91.116.357.351	92.619.270.442	101,65

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap Rp123.264.477.779,00 yang secara umum disebabkan oleh transfer masuk pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Morotai sebesar Rp112.038.800.057,00 dan SKPT Saumlaki sebesar Rp101.263.137.223,00 dan pendetailan pembukuan BMN yang dihasilkan dari pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Saumlaki sebesar Rp91.042.248.646,00.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp54.734.459.866,00 yang secara umum disebabkan oleh pembangunan lanjutan proyek SKPT sebesar Rp 160.977.069.646,00 dan transfer keluar pekerjaan pembangunan fisik di SKPT Morotai sebesar Rp112.038.800.057,00 dan SKPT Saumlaki sebesar Rp101.263.137.223,00.

Penjelasan ringkas atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal merupakan pekerjaan peningkatan kapasitas sarana sistem radar terminal sebesar Rp7.620.133.183,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Morotai sebesar Rp112.038.791.057,00 dan pembangunan prasarana dan sarana di SKPT Saumlaki sebesar Rp28.632.532.558,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Perikanan budi Daya antara lain berupa pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk di Mesuji, Prov. Lampung sebesar Rp5.427.676.107,00; Irigasi SPAL Intek BUBK sebesar Rp6.838.221.150,00 dan bangunan Modeling Kepiting di Pasuruan, Prov. Jawa Timur sebesar Rp1.621.900.000,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa pembuatan kapal pengawas kelas I sebesar Rp1.578.818.600,00 dan perencanaan pembangunan pos pengawas di Kab Seram Bagian Timur, Benoa dan Kota Baru sebesar Rp295.797.625,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa perencanaan teknis dan studi kelayakan pembangunan gudang beku untuk mendukung implementasi sistem rantai dingin pada produk perikanan sebesar Rp1.178.609.200,00.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa perencanaan dan pembangunan di Poltek KP Tegal sebesar Rp5.216.052.185,00; Konsultan perencanaan pembangunan Gd. Administrasi II sebesar Rp139.549.000,00; Perencanaan pembangunan gedung Kampus Jakarta dan Serang di Poltek KP AUP sebesar Rp250.115.860,00; dan Pembangunan jalan dan dermaga di Poltek KP Sorong sebesar Rp191.001.200,00.

Sedangkan rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan status keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

Tabel C.55
Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Status Keberlanjutannya
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen	Total
Setjen	7.699.342.783			7.699.342.783
Ditjen PT	143.588.893.165			143.588.893.165
Ditjen PB	21.692.954.432		1.312.896.750	23.005.851.182
Ditjen PSDKP	64.183.430	1.786.878.675	271.305.113	2.122.367.218
Ditjen PDSPKP	1.277.621.200		79.850.000	1.357.471.200
BPPSDM KP	5.416.361.185		545.341.060	5.961.702.245
Total	179.739.356.195	1.786.878.675	2.209.392.923	183.735.627.793

Penjelasan ringkas atas Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara dan dihentikan permanen pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Budi Daya

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Ditjen Perikanan budi Daya antara lain berupa biaya pendukung pengadaan KJA *Offshore* sebesar Rp242.164.650,00 dan penyusunan dok lingkungan instalasi budidaya ikan lepas pantai sebesar Rp527.345.500,00 pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa pembuatan kapal pengawas kelas I sebesar Rp1.578.818.600,00 pada satker Sekretariat Ditjen PSDKP sedangkan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP antara lain berupa perencanaan pembangunan pos pengawas di Kab. Seram Bagian Timur sebesar Rp97.737.550,00 pada satker Stasiun PSDKP Ambon.

3. Ditjen Penguatan Daya Saing KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa pengadaan gedung dan bangunan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp49.850.000,00. Gedung dan bangunan diserahkan kepada masyarakat tersebut seharusnya dibukukan pada akun-akun Persediaan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat. Atas kesalahan pembukuan tersebut akan diperbaiki pada periode Semester I Tahun 2025 pada satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing KP.

4. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan permanen pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP antara lain berupa perencanaan renovasi asrama kampus Serang sebesar Rp78.720.400 pada satker Poltek AUP dan konsultan perencanaan renovasi dermaga Poltek KP Sorong sebesar Rp181.912.400,00.

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.56
Ringkasan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		91.116.357.351
Mutasi Tambah		533.400.694.704
502	Perolehan/Penambahan KDP	200.027.682.790
503	Pengembangan KDP	109.480.726.435
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	4.703.641.250
506	Transfer Masuk KDP	214.301.118.166
510	Perolehan Lainnya KDP	3.769.940.181
514	Reklasifikasi Masuk KDP	1.117.585.882
Mutasi Kurang		(440.781.424.262)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(58.357.153.633)
208	Pengembangan Melalui KDP	(67.534.856.021)
505	Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(1.058.890.518)
507	Transfer Keluar KDP	(214.301.118.166)
513	Reklasifikasi Keluar KDP	(1.117.585.882)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(94.870.964.069)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(3.540.855.973)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		183.735.627.793

Ringkasan mutasi akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Perolehan/Penambahan KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp160.977.069.646,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.918.009.705,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp25.439.928.319,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp2.386.251.875,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.178.609.200,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp627.523.842,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp1.287.837.703,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp212.452.500,00;

2. Transaksi Pengembangan KDP terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp73.98.690.173,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.822.604.004,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp33.146.956.570,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp34.139.185.555,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp4.264.842.362,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp18.611.459.982,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp96.987.789,00;
3. Transaksi Koreksi Nilai KDP Bertambah terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp430.364.107,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.036.628.568,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.111.472.347,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp451.150.622,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp264.858.605,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp409.167.001,00;
4. Transaksi Transfer Masuk KDP hanya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp214.124.087.640,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp177.030.526,00;
5. Transaksi Perolehan Lainnya KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp79.209.600,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.747.213.907,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp719.182.924,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp154.820.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp69.513.750,00;
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.117.585.882,00;

7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp7.844.504.059,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21.992.6414.43,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp17.841.562.458,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.837.630.819,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp7.741.636.354,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp99.178.500,00;
8. Transaksi Pengembangan Melalui KDP terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.442.010.924,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp11.141.315.305,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp15.540.107.624,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp21.696.576.857,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.054.735.385,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp7.040.681.136,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp619.428.790,00;
9. Transaksi Penghapusan/Penghentian KDP terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp200.310.150,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp194.187.500,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp477.649.864,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp186.743.004,00;
10. Transaksi Transfer Keluar KDP hanya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp213.301.928.280,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp822.159.360,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp177.030.526,00;

11. Transaksi Reklasifikasi Keluar KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.117.585.882,00;
12. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp91.987.571.584,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.337.151.454,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp710.066.324,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp465.650.622,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp370.524.085,00; dan
13. Transaksi Koreksi Nilai KDP Berkurang terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp445.490.081,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.982.251.276,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp818.841.428,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp113.364.823,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp180.908.365,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.471.089.435.393,00 dan Rp8.176.775.149.955,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.57
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	(Kenaikan) Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.021.543.920.827)	(5.064.405.837.265)	42.861.916.438	(0,85)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.010.479.851.763)	(891.484.476.795)	(118.995.374.968)	13,35
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.083.380.676.875)	(943.464.658.441)	(139.916.018.434)	14,83
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1.171.308.998.786)	(1.102.123.002.008)	(69.185.996.778)	6,28
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(177.775.053.670)	(167.389.893.643)	(10.385.160.027)	6,20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.600.933.472)	(7.907.281.803)	1.306.348.331	(16,52)
Total	(8.471.089.435.393)	(8.176.775.149.955)	(294.314.285.438)	3,60

Ringkasan nilai penyusutan Aset Tetap per akun per bidang barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.58
Ringkasan Nilai Penyusutan Aset Tetap Per Akun Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Peralatan dan Mesin	6.284.712.692.903	5.064.405.837.265	5.021.543.920.827	1.263.168.772.076
301-Alat Besar	469.825.761.387	461.393.810.204	389.561.896.333	80.263.865.054
302-Alat Angkutan	2.747.495.185.495	1.872.872.087.192	2.011.884.302.168	735.610.883.327
303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	74.071.876.643	65.141.125.760	66.067.727.621	8.004.149.022
304-Alat Pertanian	204.610.139.005	179.083.598.829	187.491.812.409	17.118.326.596
305-Alat Kantor & Rumah Tangga	710.254.212.443	637.664.232.592	619.477.311.321	90.776.901.122
306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	318.504.044.187	235.561.312.852	246.549.479.241	71.954.564.946
307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	49.028.967.628	52.208.941.288	46.236.240.475	2.792.727.153
308-Alat Laboratorium	1.004.123.346.384	978.615.142.253	886.572.769.528	117.550.576.856
309-Alat Persenjataan	51.138.973.225	33.589.364.176	35.016.875.128	16.122.098.097
310-Komputer	440.477.888.973	376.353.169.155	365.211.017.544	75.266.871.429

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
311-Alat Eksplorasi	7.439.095.996	7.063.894.254	7.068.756.507	370.339.489
312-Alat Pengeboran	4.129.183.300	4.150.426.972	4.111.658.935	17.524.365
313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	19.090.934.086	19.884.546.911	13.735.918.847	5.355.015.239
314-Alat Bantu Eksplorasi	15.587.329.030	14.644.155.657	14.833.636.463	753.692.567
315-Alat Keselamatan Kerja	46.946.037.819	41.491.578.065	39.683.170.854	7.262.866.965
316-Alat Peraga	12.774.373.962	7.867.422.023	8.327.693.116	4.446.680.846
317-Peralatan Proses/Produksi	92.846.381.146	62.729.242.029	65.869.721.771	26.976.659.375
318-Rambu - Rambu	8.840.141.117	7.338.917.867	6.949.494.531	1.890.646.586
319-Peralatan Olah Raga	7.528.821.077	6.752.869.186	6.894.438.035	634.383.042
Gedung dan Bangunan	5.261.675.168.922	891.484.476.795	1.010.479.851.763	4.251.195.317.159
401-Bangunan Gedung	5.056.012.310.352	860.869.203.701	976.517.283.421	4.079.495.026.931
402-Monumen	1.235.524.269	165.410.372	195.207.039	1.040.317.230
403-Bangunan Menara	17.875.118.153	3.961.941.578	4.462.980.300	13.412.137.853
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	186.552.216.148	26.487.921.144	29.304.381.003	157.247.835.145
Jalan dan Jembatan	1.939.766.820.075	943.464.658.441	1.083.380.676.875	856.386.143.200
501-Jalan Dan Jembatan	1.939.766.820.075	943.464.658.441	1.083.380.676.875	856.386.143.200
Irigasi	1.689.294.716.491	1.102.123.002.008	1.171.308.998.786	517.985.717.705
502-Bangunan Air	1.689.294.716.491	1.102.123.002.008	1.171.308.998.786	517.985.717.705
Jaringan	424.068.042.019	167.389.893.643	177.775.053.670	246.292.988.349
503-Instalasi	286.165.796.918	133.339.999.178	140.166.666.536	145.999.130.382
504-Jaringan	137.902.245.101	34.049.894.465	37.608.387.134	100.293.857.967
Aset Tetap Renovasi	15.488.148.683	1.577.267.510	200.310.639	15.287.838.044
607-Aset Tetap Dalam Renovasi	15.488.148.683	1.577.267.510	200.310.639	15.287.838.044
Aset Tetap Lainnya	195.666.427.092	6.330.014.293	6.400.622.833	189.265.804.259
601-Bahan Perpustakaan	56.534.705.339	0	0	56.534.705.339
602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	138.900.221.753	6.330.014.293	6.400.622.833	132.499.598.920
604-Ikan	0	0	0	0
606-Barang Koleksi Non Budaya	231.500.000	0	0	231.500.000
Total	15.810.672.016.185	8.176.775.149.955	8.471.089.435.393	7.339.582.580.792

C.3 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk.

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp898.573.434.043,00 dan Rp477.778.353.020,00.

Rincian saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.59
Rincian Saldo Properti Investasi Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	187.429.347.232	186.801.004.466	628.342.766	0,34
Ditjen PB	151.245.930.000	151.245.930.000	0	0,00
Ditjen PDSPKP	80.683.375.526	88.186.261.526	(7.502.886.000)	(8,51)
Ditjen PKRL	110.346.287.172	0	110.346.287.172	0,00
BPPSDM KP	368.868.494.113	51.545.157.028	317.323.337.085	615,62
Total	898.573.434.043	477.778.353.020	420.795.081.023	88,07

Saldo Properti Investasi yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Properti Investasi pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP Rp317.323.337.085,00 yang secara umum disebabkan oleh adanya pembukuan Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa sebesar Rp116.491.213.000,00 dan Tanah Sawah di Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Properti Investasi pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp7.502.886.000,00 yang secara umum disebabkan oleh reklasifikasi pembukuaan *Cold Storage* 1000 ton di Muara Baru ke Gedung dan Bangunan.

Penjelasan ringkas atas saldo Properti Investasi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa kantin, *foodcourt* anak buah kapal (ABK), gedung pertokoan MBC, lahan penanganan hasil tangkapan, lahan penyaluran BBM, gedung pemasaran produk perikanan, gedung pasar, area wisata bahari, lahan parkir wisata bahari, *cold storage*, bangunan pengepakan, gudang dan rumah susun.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa wisma, kolam ikan dan lahan *hatchery* udang.

3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Properti Investasi pada Ditjen Perikanan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP antara lain berupa Pasar Ikan Modern dan tempat pengelolaan *styrofoam* di Muara Baru.

4. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Properti Investasi pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain berupa tanah dan bangunan kerja sama pemanfaatan (KSP) di Pulau Nipa, Batam.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Properti Investasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP berupa Pulau Cemara Besar di Karimun Jawa, akuarium PIAMARI di Pangandaran, tanah dan kolam tambak.

Rincian aset tetap berupa Properti Investasi per bidang barang per satker per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.60
Daftar Rinci Properti Investasi Per Bidang Barang
Per 31 Desember 2024

Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Tercatat/Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
201-Tanah	503.271.457.356	0	0	503.271.457.356
401-Bangunan Gedung	395.301.976.687	67.013.812.119	81.513.026.434	313.788.950.253
Total	898.573.434.043	67.013.812.119	81.513.026.434	817.060.407.609

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Properti Investasi dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.513.026.434,00 dan Rp67.013.812.119,00.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi ada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.61
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	(17.127.800.683)	(14.761.171.674)	(2.366.629.009)	16,03
Ditjen PB	(44.841.144.544)	(38.632.207.644)	(6.208.936.900)	16,07
Ditjen PDSPKP	(9.682.005.060)	(8.981.368.671)	(700.636.389)	7,80
BPPSDM KP	(9.862.076.147)	(4.639.064.130)	(5.223.012.017)	112,59
Total	(81.513.026.434)	(67.013.812.119)	(14.499.214.315)	21,64

Ringkasan nilai penyusutan Properti Investasi per akun per bidang barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel C.63 diatas.

C.4 Piutang Jangka Panjang

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.62
Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	516.201.823	201.014.544	315.187.279	156,80
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan	(158.621.431)	(157.051.745)	(1.569.686)	1,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	101.011.615.666	103.580.242.333	(2.568.626.667)	(2,48)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	(505.058.070)	(517.901.203)	12.843.133	(2,48)
Total	100.864.137.988	103.106.303.929	(2.242.165.941)	(2,17)

Penjelasan Piutang Jangka Panjang per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.4.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp516.201.823,00 dan Rp201.014.544,00.

Rincian saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.63
Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
BPPSDM KP	201.014.544	201.014.544	0	0,00
BPPMH KP	315.187.279	0	315.187.279	0,00
Total	516.201.823	201.014.544	315.187.279	156,80

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang mengalami kenaikan signifikan hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp315.187.279,00 yang secara umum disebabkan oleh pembukuan atas atas kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/IT J.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat pada Sekretariat BKIPM dengan temuan adanya pengelolaan keuangan Negara TA 2022 dan 2023 yang tidak benar.

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada satker sebagai berikut.

a. Pusat Pendidikan

Merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi biaya atas pelanggaran dalam pelaksanaan tugas belajar atas nama Sdr. HR Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.117/MEN/KU.440/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Penyelesaian piutang ini telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara (PUPN) pada tanggal 16 Juli 2019. Saldo Piutang TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp156.824.545,00.

b. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi (LHAI) nomor R.112/ITJ.5/HP.230/III/2023 terdapat Tuntutan Ganti Rugi atas nama Sdr. FF terkait kegiatan Pelatihan Satpam yang dilaksanakan di SUPM senilai Rp66.240.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilakukan setoran ke kas negara sebesar Rp56.500.000,00, namun terdapat beberapa setoran yang menggunakan akun tidak sesuai, yaitu akun penerimaan atas pemanfaatan BMN dan penerimaan kembali belanja lain-lain, sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.190.000,00.

2. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KP

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada Satker Sekretariat BKIPM atas kerugian negara akibat kekurangan uang yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.280/ITJ.5/HP.230/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat pada Sekretariat BKIPM dengan temuan adanya pengelolaan keuangan Negara TA 2022 dan 2023 yang tidak benar sebesar Rp420.526.758,00. Dari nilai tersebut sebesar Rp105.339.479,00 merupakan piutang yang jatuh tempo pada Tahun 2025 yang telah dibukukan pada akun Bagian Lancar TP/TGR, sehingga saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp315.187.279,00.

Adapun kualitas dari saldo piutang TP/TGR pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.64
Kualitas Piutang TP/TGR pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Saldo	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
BPPSDMKP	201.014.544	44.190.000	0	0	156.824.544
BPPMHKP	105.339.479	105.339.479			
Total	306.354.023	149.529.479	0	0	156.824.544

C.4.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp158.621.431,00 dan Rp157.051.745,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.65
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PKRL	0	(6.250)	6.250	(100,00)
BPPSDM KP	(157.045.495)	(157.045.495)	0	0,00
BPPMH KP	(1.575.936)	0	(1.575.936)	0,00
Total	(158.621.431)	(157.051.745)	(1.569.686)	1,00

C.4.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp101.011.615.666,00 dan Rp103.580.242.333,00.

Rincian saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.66
Rincian Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	0	9.370.590	(9.370.590)	(100,00)
Ditjen PT	2.855.976.110	2.855.976.110	0	0,00
Ditjen PKRL	98.155.639.556	100.714.895.633	(2.559.256.077)	(2,54)
Total	101.011.615.666	103.580.242.333	(2.568.626.667)	(2,48)

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya yang mengalami penurunan signifikan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp2.559.256.077,00 yang secara umum disebabkan oleh reklasifikasi ke akun piutang PNPB.

Penjelasan ringkas atas saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.855.976.110,00 merupakan pembebanan ganti kerugian negara atas pelanggaran kewajiban pegawai tugas belajar atas nama Sdr. GP di satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap.

2. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan piutang perikatan kerja sama pemanfaatan (KSP) BMN yang berlokasi di Pulau Nipa kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan PT SMA. Adapun jangka waktu KSP adalah 30 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan perikatan KSP telah ditetapkan bahwa selama kurun waktu 30 tahun KKP akan memperoleh kontribusi tetap sebesar 0,50% dari nilai investasi sedangkan nilai investasinya sendiri mengalami kenaikan 7,50% setiap tahun. Perhitungan kontribusi yang akan diterima per tahun terhitung sejak ditetapkannya KSP sampai dengan berakhirnya KSP adalah sebagai berikut.

Tabel C.67
Perhitungan Kontribusi Kerja Sama Pemanfaatan BMN di Pulau Nipa

No.	Tahun	Nilai Investasi	Kenaikan Investasi per tahun	Nilai Investasi Tahun Berjalan	Kontribusi Tetap per tahun	Piutang Jangka Panjang Lainnya
		(Obyek KSP)	7,50%		0,50%	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2014	231.020.559.930	-	231.020.559.930	1.155.102.800	118.281.836.533
2	2015	231.020.559.930	17.326.541.995	248.347.101.925	1.241.735.510	117.040.101.023
3	2016	248.347.101.925	18.626.032.644	266.973.134.569	1.334.865.673	115.705.235.350
4	2017	266.973.134.569	20.022.985.093	286.996.119.662	1.434.980.598	114.270.254.752
5	2018	286.996.119.662	21.524.708.975	308.520.828.636	1.542.604.143	112.727.650.609
6	2019	308.520.828.636	23.139.062.148	331.659.890.784	1.658.299.454	111.069.351.155
7	2021	331.659.890.784	24.874.491.809	356.534.382.593	1.782.671.913	109.286.679.242
8	2022	356.534.382.593	26.740.078.694	383.274.461.287	1.916.372.306	107.370.306.936
9	2022	383.274.461.287	28.745.584.597	412.020.045.884	2.060.100.229	105.310.206.706
10	2023	412.020.045.884	30.901.503.441	442.921.549.325	2.214.607.747	103.095.598.960
11	2024	442.921.549.325	33.219.116.199	476.140.665.525	2.380.703.328	100.714.895.632
12	2025	476.140.665.525	35.710.549.914	511.851.215.439	2.559.256.077	98.155.639.555
13	2026	511.851.215.439	38.388.841.158	550.240.056.597	2.751.200.283	95.404.439.272
14	2027	550.240.056.597	41.268.004.245	591.508.060.842	2.957.540.304	92.446.898.968
15	2028	591.508.060.842	44.363.104.563	635.871.165.405	3.179.355.827	89.267.543.140
16	2029	635.871.165.405	47.690.337.405	683.561.502.810	3.417.807.514	85.849.735.626
17	2030	683.561.502.810	51.267.112.711	734.828.615.521	3.674.143.078	82.175.592.549
18	2031	734.828.615.521	55.112.146.164	789.940.761.685	3.949.703.808	78.225.888.740
19	2032	789.940.761.685	59.245.557.126	849.186.318.811	4.245.931.594	73.979.957.146
20	2033	849.186.318.811	63.688.973.911	912.875.292.722	4.564.376.464	69.415.580.683
21	2034	912.875.292.722	68.465.646.954	981.340.939.677	4.906.704.698	64.508.875.984
22	2035	981.340.939.677	73.600.570.476	1.054.941.510.152	5.274.707.551	59.234.168.434
23	2036	1.054.941.510.152	79.120.613.261	1.134.062.123.414	5.670.310.617	53.563.857.817
24	2037	1.134.062.123.414	85.054.659.256	1.219.116.782.670	6.095.583.913	47.468.273.903
25	2038	1.219.116.782.670	91.433.758.700	1.310.550.541.370	6.552.752.707	40.915.521.196
26	2039	1.310.550.541.370	98.291.290.603	1.408.841.831.973	7.044.209.160	33.871.312.036
27	2040	1.408.841.831.973	105.663.137.398	1.514.504.969.371	7.572.524.847	26.298.787.190
28	2041	1.514.504.969.371	113.587.872.703	1.628.092.842.073	8.140.464.210	18.158.322.979
29	2042	1.628.092.842.073	122.106.963.156	1.750.199.805.229	8.750.999.026	9.407.323.953
30	2043	1.750.199.805.229	131.264.985.392	1.881.464.790.621	9.407.323.953	-

Piutang terkait (KSP) BMN di Pulau Nipa dicatat pada 2 (dua) akun yaitu kontribusi tetap tahun 2025 sebesar Rp2.559.256.077,00 yang dibukukan akun Piutang Pendapatan Bukan Pajak Lainnya dan sisa kontribusi tetap sampai dengan tahun 2043 sebesar Rp Rp98.155.639.556,00 yang dicatat pada Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Adapun kualitas dari saldo piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.68
Kualitas Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Saldo	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan
Ditjen PT	2.855.976.110	2.855.976.110	-	-
Ditjen PKRL	98.155.639.556	98.155.639.556	-	-
Total	101.011.615.666	101.011.615.666	-	-

C.4.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp505.058.070,00 dan Rp517.901.203,00.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.69
Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang Lainnya Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	0	(46.853)	46.853	(100,00)
Ditjen PT	(14.279.881)	(14.279.881)	0	0,00
Ditjen PKRL	(490.778.189)	(503.574.469)	12.796.280	(2,54)
Total	(505.058.070)	(517.901.203)	12.843.133	(2,48)

C.5 Aset Lainnya

Rincian saldo Aset Lainnya per akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.70
Rincian Saldo Aset Lainnya Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	103.876.004.000	214.231.398.172	(110.355.394.172)	(51,51)
Aset Tak Berwujud	256.859.024.246	234.921.980.781	21.937.043.465	9,34
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	235.822.950	2.745.000	233.077.950	8.491,00
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	78.880.988.327	32.493.421.582	46.387.566.745	142,76
Aset Lainnya	390.301.200.894	443.267.346.082	(52.966.145.188)	(11,95)
Akm Peny dan Amortisasi Aset Lainnya	(496.394.725.995)	(505.938.982.710)	9.544.256.715	(1,89)
Total	333.758.314.422	418.977.908.907	(85.219.594.485)	(20,34)

Penjelasan Aset Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan pemanfaatan aset melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) antara KKP dengan PT SMA atas aset yang terdapat di Pulau Nipa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau. Kerja sama pemanfaatan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-502/MK.6/2013 dengan jangka waktu pemanfaatan selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali.

Pada tanggal 16 April 2014 telah ditandatangani akta perjanjian kerja sama dihadapan notaris PH, S.H sehingga perjanjian KSP tersebut dimulai pada tanggal 16 April 2014 dan berakhir pada tanggal 15 April 2043. Ringkasan akta perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai berikut.

1. Obyek yang dikerjasamakan terdiri dari.
 - a. Tanah sebesar Rp110.346.287.172,00;
 - b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.107.000,00;
 - c. Jalan Khusus Inspeksi senilai Rp13.121.507.000,00; dan
 - d. Tanggul Keliling senilai Rp90.754.497.000,00.
2. Penerimaan Langsung untuk Negara.
 - a. Kontribusi tetap sebesar 0,50% dari nilai investasi;
 - b. Pembagian keuntungan hasil pendapatan KSP Pulau Nipa (paling cepat dimulai pada tahun ke-8);
 - c. Hibah aset berupa *speed boat* dan kantor terintegrasi beserta *furniture*/peralatan kantor sebesar Rp5.200.000.000,00; dan
 - d. Sisa Aset berupa bangunan tangki minyak beserta fasilitas pendukungnya yang akan diterima pada akhir jangka waktu KSP sebesar Rp1.704.073.842.605,00.

Berdasarkan asersi manajemen, aset KSP berupa Tanah serta Gedung dan Bangunan tersebut diatas memenuhi kriteria sebagai aset Properti Investasi sehingga pada tahun 2024 direklasifikasi sebagai aset Properti Investasi. Sedangkan aset KSP berupa Jalan Khusus Inspeksi dan Tanggul Keliling tetap diklasifikasikan sebagai aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.876.004.000,00 dan Rp214.231.398.172,00 yang hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Saldo per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp110.355.394.172,00 atau 51,51% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023.

Ringkasan mutasi akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.71
Ringkasan Mutasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		214.231.398.172
Mutasi Tambah		103.876.004.000
411	Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	103.876.004.000
Mutasi Kurang		(214.231.398.172)
412	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN	(214.231.398.172)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		103.876.004.000

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Perubahan BMN ke Aset Kemitraan merupakan reklasifikasi masuk aset KSP berupa Jalan Khusus Inspeksi dan Tanggul Keliling dari Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp103.876.004.000,00 karena hasil identifikasi lanjutan tidak memenuhi kriteria Properti Investasi.
2. Transaksi Perubahan Aset Kemitraan ke BMN merupakan reklasifikasi keluar seluruh Aset Kemitraan ke Aset Tetap pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp214.231.398.172,00 agar dapat direklasifikasi ke aset Properti Investasi karena memenuhi kriteria.

Penjelasan lebih lanjut atas kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau dapat dilihat pada pos pengungkapan lainnya dan pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.5.2 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp256.859.024.246,00 dan

Rp234.921.980.781,00. Rincian saldo Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.72
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Hak Cipta	0	25.000.000	(25.000.000)	(100,00)
Paten	6.182.273.163	12.549.291.776	(6.367.018.613)	(50,74)
Software	156.980.722.508	128.704.062.520	28.276.659.988	21,97
Lisensi	2.399.752.141	1.988.544.657	411.207.484	20,68
Hasil Kajian/Penelitian	789.767.000	789.767.000	0	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	90.506.509.434	90.865.314.828	(358.805.394)	(0,39)
Total	256.859.024.246	234.921.980.781	21.937.043.465	9,34

Kenaikan signifikan saldo Aset Tak Berwujud secara umum disebabkan pengadaan software antara lain berupa portal dan *big data engine* sebesar Rp12.900.000.000,00; *Visualization and recognition - integrated fund* sebesar Rp4.350.000.000,00; *Netscout ngeniusone - cyber security* sebesar Rp9.880.000.000 dan *E-submission - platform integrasi perizinan KP* sebesar Rp7.000.000.000,00. Sedangkan penurunan signifikan saldo Aset Tak Berwujud secara umum disebabkan penghentian penggunaan antara lain berupa *Main terravision comunic* sebesar Rp721.050.000,00; *RPC Server software* sebesar Rp275.310.000,00; *Ocean farm system comp* sebesar Rp550.620.000,00; Website Pusdik KP sebesar Rp380.408.000,00; Metode alat pembesaran abalon sebesar Rp287.978.900,00; Probiotik produksi benih udang sebesar Rp277.157.075,00; Vaksin *flexibacter* mencegah penyakit sebesar Rp379.450.700,00; Rekombinan protein kapsid *megalocytivirus* sebesar Rp279.356.929,00 dan Probiotik berbahan dasar bakteri untuk pertumbuhan sebesar Rp288.870.647,00.

Pada Tahun 2024 Aset Tak Berwujud yang mengalami kenaikan signifikan adalah Aplikasi data SKAT NFC sebesar Rp199.800.000,00

pada satker Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP. Sedangkan Aset Tak Berwujud yang mengalami penurunan signifikan adalah *Netscout nGeniusOne - Cyber Security* sebesar Rp8.186.695.000,00 pada satker Pusat Data dan Informasi.

Rincian aset tetap berupa Aset Tak Berwujud per akun per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.73
Daftar Rinci Aset Tak Berwujud Per Akun
Per 31 Desember 2024

Nama Akun	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Hak Cipta	0	4.285.707	0	0
Paten	6.182.273.163	7.604.241.754	4.458.151.314	1.724.121.849
Software	156.980.722.508	69.461.642.731	91.693.222.822	65.287.499.686
Lisensi	2.399.752.141	1.580.087.661	2.141.087.141	258.665.000
Hasil Kajian/Penelitian	789.767.000	0	0	789.767.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	90.506.509.434	1.810.330.315	2.930.639.986	87.575.869.448
Total	256.859.024.246	80.460.588.168	101.223.101.263	155.635.922.983

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tetap Tak Berwujud pada masing-masing akun adalah sebagai berikut.

1. Paten

Aset Tak Berwujud berupa Paten antara lain berupa paten proses pemurnian garam sebesar Rp573.399.400,00, paten berupa *buoy* untuk pemantauan kualitas air sebesar Rp383.410.800,00, dan paten rumpon elektronik dengan pengamatan langsung sebesar Rp475.398.500,00.

2. *Software*

Aset Tak Berwujud berupa *Software* antara lain berupa *software* pengawasan armada/kapal kelautan dan perikanan sebesar Rp8.997.386.400,00; *software coofis ultimate digital touch point* sebesar Rp14.718.513.147,00; dan *software ultimate* otomatisasi proses bisnis sebesar Rp14.468.513.147,00.

3. Lisensi

Aset Tak Berwujud berupa lisensi antara lain berupa Sistem *Backup Data Virtualisasi* sebesar Rp539.000.000,00, *Radar Module Licence* sebesar Rp489.883.385,00, dan *Themis Server Licence Standby* sebesar Rp907.195.319,00.

4. Hasil Kajian/Penelitian

Aset Tak Berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian antara lain berupa rancang bangun rinci (*Detail Engineering Design*) masing-masing sebesar Rp342.045.000,00 dan Rp447.722.000,00.

5. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud berupa Aset Tak Berwujud Lainnya antara lain berupa Radar Data 1.800 unit *Scenes* sebesar Rp33.614.116.407,00, *Oceangraphy Data* sebesar 24.260.279.982,00, dan Data Citra *COSMO-SkyMED 150 Scenes* sebesar Rp7.390.301.414,00.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.74
Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		234.921.980.781
Mutasi Tambah		44.123.496.340
100	Saldo Awal	393.396.306
101	Pembelian	35.446.393.500
102	Transfer Masuk	1.049.600.800
103	Hibah Masuk	473.688.800
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.632.965.400
107	Reklasifikasi Masuk	3.872.027.000
112	Perolehan Lainnya	644.417.050
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	199.800.000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	411.207.484
Mutasi Kurang		(22.186.452.875)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(8.186.695.000)

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
302	Transfer Keluar	(3.055.135.075)
305	Koreksi Pencatatan	(210.579.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.734.043.800)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		256.859.024.246

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Penambahan Saldo Awal terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp393.396.306,00;
2. Transaksi Pembelian terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp34.139.990.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp293.270.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp1.013.133.500,00;
3. Transaksi Transfer Masuk terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp596.070.800,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp363.990.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp89.540.000,00;
4. Transaksi Hibah Masuk hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp473.688.800,00;
5. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.632.965.400,00;
6. Transaksi Reklasifikasi Masuk terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.723.240.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp148.787.000,00;
7. Transaksi Perolehan Lainnya terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp636.092.050,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp8.325.000,00;

8. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp199.800.000,00;
9. Transaksi Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp411.207.484,00;
10. Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp8.186.695.000,00;
11. Transaksi Transfer Keluar terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.049.600.800,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp2.005.534.275,00;
12. Transaksi Koreksi Pencatatan terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.990.000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp198.690.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.899.000,00; dan
13. Transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan hanya terdapat pada 6 (enam) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp720.000.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp118.880.000,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.447.930.000,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp80.810.188,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp148.787.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp6.217.636.112,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.5.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah aset tak berwujud yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp235.822.950,00 dan Rp2.745.000,00.

Rincian saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.75
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	37.132.950	0	37.132.950	0,00
Ditjen PB	198.690.000	0	198.690.000	0,00
BPPSDM KP	0	2.745.000	(2.745.000)	(100,00)
Total	235.822.950	2.745.000	233.077.950	8.491,00

Saldo Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yang mengalami kenaikan hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp198.690.000,00 yang secara umum disebabkan oleh pembukuan pengadaan aplikasi Layanan Produksi dan Pengiriman Benih Lobster di satker Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Sitobondo yang belum digunakan.

Penjelasan ringkas atas saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Sekretariat Jenderal merupakan pengadaan aplikasi bank soal untuk *assesment center* di satker Biro Umum dan PBJ.

2. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan pengadaan aplikasi Layanan

Produksi dan Pengiriman Benih Lobster di satker Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Sitobondo.

Ringkasan mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per jenis transaksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.76
Ringkasan Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2023		2.745.000
Mutasi Tambah		1.868.788.350
502	Perolehan/Penambahan KDP	196.972.950
503	Pengembangan KDP	1.473.125.400
510	Perolehan Lainnya KDP	198.690.000
Mutasi Kurang		(1.635.710.400)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(1.632.965.400)
517	Koreksi Pencatatan KDP	(2.745.000)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		235.822.950

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Perolehan/Penambahan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp196.972.950,00;
2. Transaksi Pengembangan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.473.125.400,00;
3. Transaksi Perolehan Lainnya KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp198.690.000,00;
4. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP hanya terdapat unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.632.965.400,00; dan
5. Transaksi Koreksi Pencatatan KDP hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan SDM KP sebesar Rp2.745.000,00.

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.5.4 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Pemerintah menerapkan pembayaran dengan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang selanjutnya disebut rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dengan tujuan untuk:

1. Menjaga prinsip “pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN baru dapat dilaksanakan setelah barang/jasa diterima”; dan
2. Mendukung optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.

RPATA digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran. Sedangkan ruang lingkup pembayaran atas penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan yang:

1. Pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran;
2. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya; dan
3. Pekerjaan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya berdasarkan keputusan KPA.

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp78.880.988.327,00 dan Rp32.493.421.582,00. Rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.77
Rincian Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Dana di Rekening Penampungan- Kementerian/Lembaga	77.897.445.316	32.493.421.582	45.404.023.734	139,73
Dana di Rekening Penampungan - BLU	983.543.011	0	983.543.011	0,00
Total	78.880.988.327	32.493.421.582	46.387.566.745	142,76

Penjelasan Dana Rekening Penampungan – K/L per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.5.4.1 Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga

Rincian saldo Dana di Rekening Penampungan – Kementerian/Lembaga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.78
Rincian Saldo Dana Rekening Penampungan- K/L
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	38.456.138.715	17.644.494.012	20.811.644.703	117,95
Ditjen PT	5.472.213.465	2.760.602.390	2.711.611.075	98,23
Ditjen PB	8.217.751.805	2.820.385.928	5.397.365.877	191,37
Ditjen PSDKP	4.939.898.353	2.041.577.398	2.898.320.955	141,96
Ditjen PDSPKP	10.939.976.273	5.677.273.150	5.262.703.123	92,70
Ditjen PKRL	0	411.012.378	(411.012.378)	(100,00)
BPPSDM KP	9.840.539.226	1.138.076.326	8.702.462.900	764,66
BPPMH KP	30.927.479	0	30.927.479	0,00
Total	77.897.445.316	32.493.421.582	45.404.023.734	139,73

Ringkasan dan mutasi Dana Rekening Penampungan – K/L per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.79
Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan – K/L
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Saldo Awal	Pembayaran	Penihilan	Saldo Akhir
Setjen	38.456.138.715			38.456.138.715
Ditjen PT	5.697.213.465	225.000.000		5.472.213.465
Ditjen PB	8.217.751.805			8.217.751.805
Ditjen PSDKP	4.939.898.353			4.939.898.353
Ditjen PDSPKP	12.995.860.677	2.055.884.404		10.939.976.273
BPPSDM KP	10.040.434.752	199.895.526		9.840.539.226
BPPMH KP	30.927.479			30.927.479
Total	80.378.225.246	2.480.779.930	0	77.897.445.316

Penjelasan pembayaran pekerjaan TA 2024 yang melalui mekanisme RPATA pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Sekretariat Jenderal terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. Biro Umum dan PBJ

Merupakan pekerjaan pengadaan jasa tenaga teknis gedung kantor pusat KKP sebesar Rp1.075.962.765,00; pengadaan jasa lainnya *manage service* LAN Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi sebesar Rp591.600.000,00; pengadaan keamanan siber serta infrastruktur dan data analitik sebesar Rp9.880.000.000,00; pengadaan jasa lainnya *bandwidth internet command center* tahun 2024 sebesar Rp549.960.000,00; pengadaan layanan *managed service* LAN Tahun 2024 sebesar Rp1.542.600.000,00; pengadaan jasa lainnya *bandwidth* Wisma Gracilaria Tahun 2024 sebesar Rp217.500.000,00; pengadaan jasa lainnya pemeliharaan *containment* KKP sebesar Rp1.305.000.000,00; pekerjaan pengadaan jasa tenaga kebersihan kantor pusat KKP sebesar Rp1.279.176.848,00; pengadaan jasa lainnya *redundant*

bandwidth internet pusat Tahun 2024 sebesar Rp1.575.000.000,00; pengadaan jasa lainnya *bandwidth* internet untuk pimpinan Tahun 2024 sebesar Rp824.999.997,00; pengadaan jasa lainnya biaya komunikasi berbasis satelit sebesar Rp560.000.000,00; pembangunan *platform* integrasi perizinan KKP sebesar Rp7.000.000.000,00; pengadaan *bandwith* internet kantor pusat sebesar Rp3.437.499.750,00; dan lain-lain sebesar Rp154.512.877,00.

b. Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP

Merupakan pekerjaan peningkatan kapasitas sarana sistem radar terminal dan pengadaan citra satelit radar sebesar Rp7.013.620.000,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 16 (enam belas) satker yaitu sebagai berikut.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan pengadaan jasa perbaikan lainnya kapal perikanan sebesar Rp1.443.999.950,00; pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan Kota Kendari sebesar Rp164.340.000,00 dan pengadaan sarana penandaan kapal perikanan menggunakan teknologi RFID sebesar Rp396.000.000,00.

b. PPS Cilacap

Merupakan pengadaan jasa tenaga kebersihan tempat pelelangan ikan (TPI) sebesar Rp19.786.700,00; pengadaan tenaga sekretaris sebesar Rp8.872.000,00; pengadaaan tenaga satuan pengamanan sebesar Rp139.638.200,00 dan pengadaan tenaga *outsourcing* lain-lain sebesar Rp31.785.600,00.

c. PPS Nizam Zachman

Merupakan pemeliharaan lift gedung kantor UPT dan kantor terpadu sebesar Rp7.600.000,00; pengadaan sistem pemantauan dan pengendalian pelabuhan perikanan terpadu (*Command Center*) sebesar Rp1.270.000.000,00; sewa jasa *toll gate* pelabuhan sebesar Rp24.150.000,00; biaya pembuangan sampah sebesar Rp179.732.500,00; dan pengadaan jasa tenaga kebersihan gedung kantor sebesar Rp80.314.530,00.

d. PPN Kejawatanan

Merupakan pengadaan jasa tenaga satuan pengamanan dan tenaga kebersihan sebesar Rp277.397.091,00.

e. Satker Lainnya

Terdapat pada 12 (dua belas) satker sebesar Rp1.418.538.265,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai Layanan Umum Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Merupakan pengadaan benih udang vaname sebesar Rp374.400.000,00.

b. Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Merupakan biaya kirim pengadaan alat berat sebesar Rp145.500.000,00; pemeliharaan ruang mushola gedung Mina Bahari IV lantai 5 dan 6 sebesar Rp126.633.240,00; bantuan *autoclave* di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara sebesar Rp355.644.000,00; biaya pemindahan material atau barang di Kab. Rote Ndao sebesar Rp183.094.500,00; pembuatan seragam Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp198.464.670,00; bantuan unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan bangunan pendukung di Kab. Maluku Tenggara sebesar Rp579.994.536,00; unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan bangunan pendukung di Kab.

Rote Ndao sebesar Rp1.231.940.609,00; bantuan sarana modeling budidaya rumput laut di Kab. Rote Ndao sebesar Rp4.336.245.600,00; pemeliharaan ruang mushola gedung Mina Bahari IV lantai 7 dan 8 sebesar Rp126.584.400,00; biaya kirim pengadaan alat berat sebesar Rp202.000.000,00; dan lain-lain sebesar Rp357.250.250,00.

4. Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 6 (enam) satker yaitu sebagai berikut.

a. Stasiun PSDKP Belawan

Merupakan konstruksi renovasi pos pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Belawan sebesar Rp951.623.645,00; jasa konsultan pengawas renovasi pos pengawasan sebesar Rp79.276.200,00; dan jasa konsultan perencanaan renovasi pos pengawasan sebesar Rp14.850.135,00.

b. Stasiun PSDKP Pontianak

Merupakan pembelian bahan bakar minyak pada Stasiun PSDKP sebesar Rp1.060.878.000,00.

c. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP

Merupakan biaya dukungan terintegrasi Kapal Pengawas sebesar Rp401.760.000,00; pemasangan lantai dan pintu kaca ruang rapat hiu macan di gedung Mina Bahari IV sebesar Rp145.049.250,00; penataan ruang kerja staf pelaksana timja SDMAO sebesar Rp196.183.000,00; *furnishing interior* melekat area ruang rapat Ditjen PSDKP gedung Mina Bahari IV sebesar Rp197.341.350,00; biaya komunikasi satelit di Kapal Pengawas sebesar Rp304.806.642,00; biaya dukungan komunikasi terintegrasi operasi kapal pengawas sebesar Rp294.000.000,00; pemasangan pintu *folding* area ruang rapat gedung Mina Bahari IV Lantai 10 sebesar Rp111.000.000,00;

dan sewa *colocation server* sebagai *disaster recovery centre* (DRC) sebesar Rp5.500.000,00.

d. Satker Lainnya

Terdapat pada 3 (tiga) satker sebesar Rp1.177.630.131,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Siang dan Produk KP

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP hanya terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Siang dan Produk KP yang merupakan jasa pekerjaan pelaksanaan sosialisasi sistem rantai dingin untuk menjamin kualitas produk perikanan di Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah sebesar Rp199.589.000,00; pengadaan genset unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah sebesar Rp198.000.000,00; paket pekerjaan pemeliharaan *ramp* sisi kanan lapak bawah Pasar Ikan Modern sebesar Rp196.157.202,00; pembangunan UPI bernilai tambah di Kota Pekalongan sebesar Rp2.838.158.219,00; pengadaan kendaraan berefrigerasi roda 6 (enam) di Kab. Garut dan Kab. Pangandaran sebesar Rp1.689.270.000,00; sosialisasi sistem rantai dingin untuk menjamin kualitas produk perikanan di Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo sebesar Rp199.617.000,00; pekerjaan pengadaan palet besi sebesar Rp128.000.000,00; pekerjaan pengadaan pekerjaan penataan kawasan UPI NT HPI sebesar Rp199.290.000,00; pengadaan pabrik es *portable* di Kab. Lampung Selatan sebesar Rp1.480.000.000,00; perencanaan teknis dan studi kelayakan pembangunan gudang beku untuk mendukung implementasi sistem rantai dingin pada produk perikanan di PPN Tual sebesar Rp285.309.600,00; peralatan pengolahan dan diversifikasi HPI sebesar Rp149.600.000,00; penyusunan *success story* sarana sistem rantai dingin sebesar Rp199.700.000,00; pengadaan peralatan sarana penunjang *cold storage* sebesar Rp186.400.000,00; pengadaan pabrik es *portable* di Kota Gorontalo sebesar Rp1.497.500.000,00; paket pekerjaan

pengadaan jasa lainnya revitalisasi *cold storage* sebesar Rp563.000.000,00; pemberdayaan usaha dalam rangka peningkatan asupan protein guna mewujudkan Indonesia Emas sebesar Rp199.400.400,00; jasa pekerjaan pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan sistem rantai dingin mendukung ketahanan pangan, di Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung sebesar Rp199.502.500,00; dan lain-lain sebesar Rp531.482.352,00.

6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 16 (enam belas) satker yaitu sebagai berikut.

a. SUPM Tegal

Merupakan jasa konsultan pengawas bangunan sayap gedung Direktorat sebesar Rp188.472.450,00; pembangunan bangunan sayap gedung Direktorat SUPM Tegal sebesar Rp3.565.838.830,00; dan jasa konsultan perencana bangunan sayap gedung Direktorat sebesar Rp14.273.920,00.

b. Pusat Riset Perikanan

Merupakan pencetakan buku inovasi teknologi penyuluhan sebesar Rp104.062.500,00; pengadaan perlengkapan kegiatan lapangan sebesar Rp188.811.000,00; pencetakan kalender sebesar Rp196.035.000,00; pemeliharaan gedung kantor Ancol lantai 3 (tiga) dan 4 (empat) sebesar Rp722.606.544,00; jasa *outsourcing* tenaga kebersihan dan keamanan sebesar Rp460.338.609,00; dan lain-lain sebesar Rp91.203.750,00.

c. Politeknik KP AUP Jakarta

Merupakan pengadaan *catering* Politeknik AUP periode Agustus-Desember 2024 sebesar Rp1.143.405.240,00.

d. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Merupakan pengolah bahan publikasi II sebesar Rp41.318.160,00; pengadaan jasa internet sebesar Rp53.000.000,00; pengolah data dan informasi II sebesar Rp41.318.160,00; jasa tenaga kebersihan sebesar Rp328.280.605,00; jasa tenaga satuan pengamanan sebesar Rp287.112.034,00; dan lain-lain sebesar Rp25.724.464,00.

e. Politeknik KP AUP Sorong

Merupakan pemeliharaan rusunawa sebesar Rp269.659.000,00 dan pemeliharaan Kapal Motor (KM) Airaha 02 sebesar Rp344.756.343,00.

f. Satker Lainnya

Terdapat pada 3 (tiga) satker sebesar Rp1.731.544.073,00.

7. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Dana Rekening Penampungan – K/L pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai KIPM Banjamasin

Merupakan pengadaan jasa tenaga *cleaning service* sebesar Rp8.618.479,00.

b. Pusat Riset Perikanan

Merupakan jasa tenaga pengamanan kantor dan pengemudi sebesar Rp22.309.000,00.

Per tanggal 9 Mei 2025 hampir seluruh pembayaran pekerjaan TA 2024 melalui mekanisme RPATA telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.80
Ringkasan dan Mutasi Dana di Rekening Penampungan – K/L
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 9 Mei 2025

Unit Eselon I	Saldo 31 Des 2024	Pembayaran Tahun 2025	Penihilan Tahun 2025	Saldo 9 Mei 2025
Setjen	38.456.138.715	37.648.663.886	807.474.829	0
Ditjen PT	5.472.213.465	5.460.008.097	12.205.368	0
Ditjen PB	8.217.751.805	8.217.751.805		0

Unit Eselon I	Saldo 31 Des 2024	Pembayaran Tahun 2025	Penihilan Tahun 2025	Saldo 9 Mei 2025
Ditjen PSDKP	4.939.898.353	4.920.540.711	19.357.642	0
Ditjen PDSPKP	10.939.976.273	10.939.976.273		0
BPPSDM KP	9.840.539.226	9.620.647.774	219.891.452	0
BPPMH KP	30.927.479	30.927.479		0
Total	77.897.445.316	76.838.516.025	1.058.929.291	0

C.5.4.2 Dana di Rekening Penampungan – BLU

Saldo Dana di Rekening Penampungan – BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp983.543.011,00 dan Rp0,00. Saldo Dana di Rekening Penampungan – BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP yang merupakan pembangunan Asrama Permanen sebesar Rp983.543.011,00.

C.5.5 Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan yang dapat disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai kebutuhan organisasi, rusak berat atau masa kegunaannya telah berakhir. Aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif harus dieliminasi dari neraca. Jenis eliminasi yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara menghapus bukukan aset tersebut, tetapi apabila aset tersebut masih bernilai ekonomis dapat memilih jenis eliminasi lain yang dapat berupa namun tidak terbatas pada transfer keluar atau hibah keluar kepada entitas lain yang membutuhkan. Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp390.301.200.894,00 dan Rp443.267.346.082,00. Rincian saldo aset lain-lain per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.81
Rincian Saldo Aset Lain-Lain Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	285.290.470	7.290.038.535	(7.004.748.065)	(96,09)
Itjen	1.896.711.324	0	1.896.711.324	0,00
Ditjen PT	154.494.387.263	180.426.395.119	(25.932.007.856)	(14,37)
Ditjen PB	149.285.521.241	173.350.588.698	(24.065.067.457)	(13,88)
Ditjen PSDKP	15.714.299.564	11.857.578.009	3.856.721.555	32,53
Ditjen PDSPKP	5.272.956.483	2.486.465.676	2.786.490.807	112,07
Ditjen PKRL	13.782.435.459	21.210.163.880	(7.427.728.421)	(35,02)
BPPSDM KP	49.569.599.090	46.646.116.165	2.923.482.925	6,27
Total	390.301.200.894	443.267.346.082	(52.966.145.188)	(11,95)

Saldo Aset lain-lain yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Aset lain-lain pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp3.856.721.555,00 yang secara umum disebabkan oleh Penghentian Aset Dari Penggunaan antara lain berupa *Speed Boat*/Motor Tempel sebesar Rp6.234.890.544,00; *Camera Video* sebesar Rp5.751.423.880,00; *Software* Komputer sebesar Rp3.597.656.600,00; *Workstation* sebesar Rp1695871026,00; Lap Top sebesar Rp1.255.778.000,00; *Radar Data Processing System*/RDPS sebesar Rp1.251.557.256,00; PC Unit sebesar Rp859.013.484,00; Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya sebesar Rp687.635.998,00; Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya sebesar Rp542.800.000,00; *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp493.101.132,00; Kursi Besi/Metal sebesar Rp484.040.377,00; Note Book sebesar Rp470.555.300,00; Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp460.911.000,00; Mini Komputer sebesar Rp443.437.884,00; Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK)

sebesar Rp429.955.000,00; Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp410.400.000,00.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Aset lain-lain secara umum disebabkan transaksi pencatatan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan dengan penjelasan masing-masing eselon I sebagai berikut.

a. Ditjen Perikanan Tangkap

Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp133.981.206.287,00 Alat Pengolahan Air Lainnya sebesar Rp19.520.000.000,00; *Suction Dredger* sebesar Rp14.299.250.000,00; *Dredger* Lainnya sebesar Rp14.299.250.000,00; Alat Bantu Produksi Lainnya sebesar Rp13.579.593.811,00; *Amphibi Dredger* Lainnya sebesar Rp13.286.022.017,00; Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp5.677.012.417,00; *Forklift* sebesar Rp5.559.638.700,00; *Sweeper Rotary* sebesar Rp3.502.497.900,00; *P.C Unit* sebesar Rp2.914.066.986,00; *Lap Top* sebesar Rp2.843.631.505,00; Dermaga sebesar Rp2.603.759.400,00; *Note Book* sebesar Rp2.468.857.434,00; Bangunan TPI Permanen sebesar Rp1.610.544.000,00; Kursi Besi/Metal sebesar Rp1.376.144.037,00; *Printer* (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp1.115.725.942,00; Genset sebesar Rp1.027.520.200,00; *Station Wagon* sebesar Rp1.012.100.000,00; Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebesar Rp852.212.000,00; Tangki Air sebesar Rp823.875.840,00; Bangunan Gedung Instalasi Lainnya sebesar Rp811.700.000,00; Kapal Patroli Pantai sebesar Rp806.410.500,00; Alat Khusus Bahari sebesar Rp789.043.000,00; *Water Treatment* (Mesin Proses) sebesar Rp785.180.000,00; *Beach Seine* (Pukat Pantai) sebesar Rp747.332.000,00; Sepeda Motor sebesar Rp729.222.370,00; Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan

Lainnya sebesar Rp720.500.000,00; Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp707.154.000,00; Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum sebesar Rp570.250.000,00; Lemari Besi/Metal sebesar Rp565.436.781,00; Jeep sebesar Rp542.610.000,00; LCD Projector/Infocus sebesar Rp506.545.974,00; Dump Truck sebesar Rp458.032.300,00; Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya sebesar Rp449.440.850,00; Meja Kerja Kayu sebesar Rp434.611.922,00; Speed Boat / Motor Tempel sebesar Rp412.020.000,00; Portable Water Pump sebesar Rp331.613.002,00; Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya sebesar Rp319.632.000,00; CCTV - Camera Control Television System sebesar Rp319.252.500,00; Sedan sebesar Rp293.193.000,00; Cold Room Frezzer sebesar Rp269.504.005,00; Food Processor sebesar Rp261.982.600,00; Camera Digital sebesar Rp254.354.126,00; Steam Pressure Gauge sebesar Rp251.612.392,00; Pagar Semi Permanen sebesar Rp231.500.000,00; Alat Produksi Perikanan Lainnya sebesar Rp229.833.000,00; A.C. Split sebesar Rp210753833,00; Tablet PC sebesar Rp203.431.000,00; Gerobak Dorong sebesar Rp202.361.001,00; dan lain-lain sebesar Rp12.194.991.942,00.

b. Ditjen Perikanan Budi Daya

Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan pada Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp134.635.492.527,00 merupakan Keramba (Jaring Apung) sebesar Rp23.385.800.441,00; Kapal Tarik sebesar Rp22.379.408.670,00; Ponton sebesar Rp22.163.089.548,00; Encircling Gill Net (Jaring Insang Lingkar) sebesar Rp21.192.594.000,00; Camera Under Water sebesar Rp14.209.486.036,00; Penyemprot Mesin (Power Sprayer) sebesar Rp4.906.768.208,00; Drill Pipe sebesar Rp4.033.143.987,00; Genset sebesar Rp3.741.014.913,00; Alat Produksi Perikanan Lainnya sebesar Rp1.702.244.000,00; Mini

Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp1.624.277.875,00; *Wheel Excavator + Attachment* sebesar Rp1.050.500.000,00; *Crawler Excavator + Attachment* sebesar Rp1.033.700.000,00; *Sumersible Pump* sebesar Rp972.285.411,00; Bangunan Pembesar Ikan sebesar Rp905802000,00; *Centrifugal Pump* sebesar Rp773.829.000,00; Bangunan Kolam/Bak Ikan sebesar Rp652.916.379,00; *Aerator* sebesar Rp556.664.310,00; *Note Book* sebesar Rp475.345.000,00; *Lap Top* sebesar Rp473.429.300,00; *High Perfomance Liquid Chromatography* (HPLC) sebesar Rp321.683.000,00; *P.C Unit* sebesar Rp310.551.980,00; *Station Wagon* sebesar Rp291.900.000,00; *Deep Freezer* (Alat Laboratorium Pertanian) sebesar Rp269.669.400,00; Sepeda Motor sebesar Rp253.168.000,00; *Water Quality Checker* sebesar Rp252.849.440,00; *A.C. Split* sebesar Rp250.208.600,00; Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen sebesar Rp205.616.000,00; dan lain-lain sebesar Rp6.247.547.029,00.

Aset Lain-Lain pada Ditjen Perikanan Tangkap antara lain berupa pencatatan aset eks dana bergulir program pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil (PUPTSK) tahun 2003 s.d. 2005 berdasarkan BAST nomor KPB.1794/DJPT.1/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 antara Ditjen Perikanan Tangkap dan Perikanan dengan Ditjen Kekayaaan Negara. Sedangkan Aset Lain-Lain pada pada Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain berupa pembangunan Keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA *Offshore*) sebesar Rp114.871.468.303,00. Pembangunan KJA *Offshore* tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lain-Lain karena sebagian besar komponen dari 3 (tiga) unit KJA *Offshore* yang berlokasi di Sabang, Karimun Jawa dan Pangandaran mengalami kerusakan sehingga secara fungsional tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan semula tetapi masih mungkin dimanfaatkan untuk tujuan yang lain dengan pengadaan sarana dan prasarana lain. Penjelasan terkait aset eks

dana bergulir dan KJA *Offshore* kami jelaskan lebih lanjut pada pos pengungkapan lainnya.

Rincian Aset Lain-Lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan per golongan barang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel C.82
Rincian Aset Tetap Lain-Lain Per Golongan Barang
Per 31 Desember 2024

No.	Golongan Barang	Nilai
1	Tanah	12.321.000
2	Peralatan dan Mesin	300.383.488.237
3	Gedung dan Bangunan	38.716.367.970
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.814.063.219
5	Aset Tetap Lainnya	533.886.800
6	Aset Tak Berwujud	20.841.073.668
Total		390.301.200.894

Ringkasan mutasi akun Aset Lain-Lain per jenis transaksi per 31 Desember 2024 kami sajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel C.83
Ringkasan Mutasi Aset Lain-Lain Per Jenis Transaksi
Per 31 Desember 2024

Kode Transaksi	Uraian	Nilai
Saldo Awal Per 1 Januari 2024		443.267.346.082
Mutasi Tambah		460.989.919.266
192	Transfer Masuk (Henti Guna)	16.747.546.650
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	359.015.536.098
912	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	85.226.836.518
Mutasi Kurang		(513.956.064.454)
301	Penghapusan	(9.987.076.878)
312	Likuidasi Keluar Henti Guna	(16.186.184.925)
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(561.361.725)
393	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(1.750.183.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(36.467.840.565)
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(449.003.417.361)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		390.301.200.894

Penjelasan ringkas atas mutasi akun Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

1. Transaksi Transfer Masuk (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.361.590.675,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.477.389.250,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp713.751.500,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp194.815.225,00;
2. Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan terdapat pada 9 (sembilan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp17.155.622.292,00; unit Eselon I Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.896.711.324,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp129.434.913.977,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp41.345.745.788,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp39.256.036.789,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp40.067.740.746,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp12.273.340.232,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp49.476.649.128,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp28.108.775.822,00;
3. Transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.213.329.971,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.084.925.785,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp75.233.955.078,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp5.602.021.484,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.092.604.200,00;

4. Transaksi Penghapusan terdapat pada 5 (lima) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.950.904.305,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.690.242,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp2.972.053.706,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp20.511.125,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp40.917.500,00;
5. Transaksi Likuidasi Keluar Henti Guna hanya terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp10.361.590.675,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp5.477.389.250,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp347.205.000,00;
6. Transaksi Transfer Keluar (BMN Yang dihentikan) terdapat pada 3 (tiga) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp156.846.500,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp209.700.000,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp194.815.225,00;
7. Transaksi Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) terdapat pada 2 (dua) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.007.683.000,00 dan unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp742.500.000,00;
8. Transaksi Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif terdapat pada 7 (tujuh) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp39050000,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp23.311.104.589,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp1.819.839.090,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp7.634.844.316,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp1.918.439.720,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan

Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp186.509.750,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp1.558.053.100,00;

9. Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan terdapat pada 8 (delapan) unit Eselon I yaitu pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal sebesar Rp18.383.746.023,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp133.981.206.287,00; unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp134.635.492.527,00; unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp32.990.538.902,00; unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP sebesar Rp37.281.249.939,00; unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp17.762.117.808,00; unit Eselon I Badan Penyuluhan Pengembangan dan SDM KP sebesar Rp46.325.738.953,00; unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP sebesar Rp27.643.326.922,00;

Penjelasan lebih lanjut atas pengelolaan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada lampiran berupa Laporan Barang Milik Negara KKP TA 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan KKP TA 2024 (*Audited*) ini.

C.5.6 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per akun per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.84
Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	(Kenaikan) Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(46.557.374.318)	(40.290.983.371)	(6.266.390.947)	15,55
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	(329.578.974.304)	(367.251.664.821)	37.672.690.517	(10,26)

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	(Kenaikan) Penurunan	%
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan				
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	(4.285.707)	4.285.707	(100,00)
Akumulasi Amortisasi Paten	(4.458.151.314)	(7.604.241.754)	3.146.090.440	(41,37)
Akumulasi Amortisasi Software	(91.693.222.822)	(69.461.642.731)	(22.231.580.091)	32,01
Akumulasi Amortisasi Lisensi	(2.141.087.141)	(1.580.087.661)	(560.999.480)	35,50
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(2.930.639.986)	(1.810.330.315)	(1.120.309.671)	61,88
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(19.035.276.110)	(17.935.746.350)	(1.099.529.760)	6,13
Total	(496.394.725.995)	(505.938.982.710)	9.544.256.715	(1,89)

Ringkasan nilai peyusutan/amortisasi aset lainnya per akun per bidang barang Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.85
Ringkasan Nilai Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per Akun Per Bidang Barang Per 31 Desember 2024

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	103.876.004.000	40.290.983.371	46.557.374.318	57.318.629.682
201-Tanah	0	0	0	0
401-Bangunan Gedung	0	1.241.868	0	0
501-Jalan Dan Jembatan	13.121.507.000	11.630.426.659	13.121.507.000	0
502-Bangunan Air	90.754.497.000	28.659.314.844	33.435.867.318	57.318.629.682
Hak Cipta	0	4.285.707	0	0
801-Aset Tak Berwujud	0	4.285.707	0	0
Paten	6.182.273.163	7.604.241.754	4.458.151.314	1.724.121.849
801-Aset Tak Berwujud	6.182.273.163	7.604.241.754	4.458.151.314	1.724.121.849
Software	156.980.722.508	69.461.642.731	91.693.222.822	65.287.499.686
801-Aset Tak Berwujud	156.980.722.508	69.461.642.731	91.693.222.822	65.287.499.686
Lisensi	2.399.752.141	1.580.087.661	2.141.087.141	258.665.000
801-Aset Tak Berwujud	2.399.752.141	1.580.087.661	2.141.087.141	258.665.000

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
Hasil Kajian/ Penelitian	789.767.000	0	0	789.767.000
801-Aset Tak Berwujud	789.767.000	0	0	789.767.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	90.506.509.434	1.810.330.315	2.930.639.986	87.575.869.448
801-Aset Tak Berwujud	90.506.509.434	1.810.330.315	2.930.639.986	87.575.869.448
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	369.460.127.226	367.251.664.821	329.578.974.304	39.881.152.922
201-Tanah	12.321.000	0	0	12.321.000
301-Alat Besar	126.948.090.752	94.479.840.600	124.037.397.997	2.910.692.755
302-Alat Angkutan	55.167.879.126	61.030.696.385	54.014.659.141	1.153.219.985
303-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.462.141.236	3.298.034.745	2.452.904.431	9.236.805
304-Alat Pertanian	30.098.310.099	64.085.066.063	30.091.793.425	6.516.674
305-Alat Kantor & Rumah Tangga	18.439.046.146	22.386.863.170	18.378.718.929	60.327.217
306-Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	16.481.525.931	22.470.484.091	16.016.996.950	464.528.981
307-Alat Kedokteran Dan Kesehatan	557.822.772	974.198.776	557.822.772	0
308-Alat Laboratorium	20.700.140.059	20.981.880.587	20.580.413.972	119.726.087
309-Alat Persenjaan	205.337.500	1.007.806.606	205.337.500	0
310-Komputer	22.721.997.990	19.881.855.233	22.713.548.006	8.449.984
311-Alat Eksplorasi	110.726.000	282.497.502	109.371.503	1.354.497
312-Alat Pengeboran	2.524.070.936	2.789.058.675	1.928.704.952	595.365.984
313-Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	67.112.500	73.060.500	67.112.500	0
314-Alat Bantu Eksplorasi	62.842.000	13.967.938.565	62.141.482	700.518
315-Alat Keselamatan Kerja	1.708.851.276	1.804.432.407	1.708.851.276	0
316-Alat Peraga	0	0	0	0
317-Peralatan Proses/Produksi	1.814.450.470	1.208.115.276	1.768.946.284	45.504.186
318-Rambu - Rambu	10.855.000	0	8.532.166	2.322.834
319-Peralatan Olah Raga	302.288.444	561.745.912	302.288.444	0
401-Bangunan Gedung	35.398.927.800	8.725.264.661	10.359.210.085	25.039.717.715
403-Bangunan Menara	560.290.000	17.420.218	156.803.476	403.486.524
404-Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.757.150.170	641.512.878	986.386.760	1.770.763.410
501-Jalan Dan Jembatan	10.070.999.848	8.718.850.177	8.576.940.171	1.494.059.677
502-Bangunan Air	16.769.014.413	15.767.310.778	12.681.857.417	4.087.156.996
503-Instalasi	2.405.012.283	1.668.066.960	1.398.177.023	1.006.835.260
504-Jaringan	569.036.675	410.664.056	395.057.642	173.979.033
601-Bahan Perpustakaan	462.874.800	0	0	462.874.800

Nama Akun serta Kode dan Nama Bidang	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		Saldo Awal	Saldo Akhir	
602-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	53.999.000	19.000.000	19.000.000	34.999.000
604-Ikan	0	0	0	0
605-Tanaman	180.000	0	0	180.000
606-Barang Koleksi Non Budaya	16.833.000	0	0	16.833.000
607-Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	20.841.073.668	17.935.746.350	19.035.276.110	1.805.797.558
801-Aset Tak Berwujud	20.841.073.668	17.935.746.350	19.035.276.110	1.805.797.558
Total	751.036.229.140	505.938.982.710	496.394.725.995	254.641.503.145

C.6 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp104.869.850.410,00 dan Rp65.683.529.844,00.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per akun Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.86
Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	94.174.913.102	47.165.904.471	47.009.008.631	99,67
Hibah Langsung Belum Disahkan	0	8.820.342.608	(8.820.342.608)	(100,00)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	44.885.401	144.463.282	(99.577.881)	(68,93)
Pendapatan Diterima Dimuka	10.255.464.006	9.518.380.902	737.083.104	7,74
Uang Muka Dari KPPN	215.583.279	206.500	215.376.779	104.298,68
Utang Jangka Pendek Lainnya	179.004.622	34.232.081	144.772.541	422,91
Total	104.869.850.410	65.683.529.844	39.186.320.566	59,66

Penjelasan Kewajiban Jangka Pendek per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.6.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp94.174.913.102,00 dan Rp47.165.904.471,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.87
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.241.962.086	1.164.549.490	77.412.596	6,65
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	12.891.580.576	10.821.731.442	2.069.849.134	19,13
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	210.963.000	1	210.962.999	21.096.299.900,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	68.658.285.944	33.655.789.842	35.002.496.102	104,00
Dana Pihak Ketiga	1.488.047.396	1.518.047.396	(30.000.000)	(1,98)
Dana Pihak Ketiga BLU	9.684.074.100	5.786.300	9.678.287.800	167.262,12
Total	94.174.913.102	47.165.904.471	47.009.008.631	99,67

Penjelasan Utang Kepada Pihak Ketiga per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.6.1.1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.241.962.086,00 dan Rp1.164.549.490,00.

Rincian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.88
Rincian Saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Itjen	13.085.494	0	13.085.494	0,00
Ditjen PT	315.182.361	141.000.650	174.181.711	123,53
Ditjen PB	228.879.584	140.634.254	88.245.330	62,75
Ditjen PSDKP	72.258.191	32.746.550	39.511.641	120,66
Ditjen PDSPKP	3.200.000	0	3.200.000	0,00
Ditjen PKRL	38.164.098	0	38.164.098	0,00
BPPSDM KP	289.382.260	204.518.284	84.863.976	41,49
BPPMH KP	281.810.098	645.649.752	(363.839.654)	(56,35)
Total	1.241.962.086	1.164.549.490	77.412.596	6,65

Sedangkan saldo saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp174.181.711,00 yang secara umum disebabkan penambahan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP sebesar Rp363.839.654,00 yang secara umum disebabkan oleh perpindahan personel pengendali hama dan penyakit ikan (PHPI) dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia dengan jumlah yang signifikan.

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Inspektorat Jenderal

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Inspektorat Jenderal merupakan belanja gaji pokok ASN dan kekurangan tunjangan fungsional ASN periode November dan Desember 2024 sebesar Rp13.085.494,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 6 (enam) satker yaitu sebagai berikut.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan uang makan P3K dan PNS periode Desember 2024 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp20.974.050,00 dan Rp117.873.450,00.

b. PPS Nizam Zachman

Merupakan uang makan PNS periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp98.370.000,00.

c. Satker Lainnya

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar pada 4 (empat) satker sebesar Rp77.964.861,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 8 (delapan) satker yaitu sebagai berikut.

a. BBPBL Lampung

Merupakan uang makan PNS dan P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp51.560.000,00.

b. BLUPPB Karawang

Merupakan kekurangan tunjangan kinerja 13 (tiga belas) orang ASN periode Agustus s.d Desember 2024 sebesar Rp64.460.000,00.

c. BPIU2K Karangasem

Merupakan tunjangan kinerja P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp29.820.360,00.

d. BPKIL Serang

Merupakan uang makan PNS dan P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp19.501.000,00 dan Rp2.514.000,00 serta kekurangan tunjangan kinerja periode Agustus dan Oktober sebesar Rp2.782.068,00.

e. Satker Lainnya

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar pada 2 (dua) satker sebesar Rp58.242.156,00.

4. Ditjen Perikanan Pengawasan dan Sumber Daya KP

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Perikanan Pengawasan dan Sumber Daya KP terdapat pada 4 (empat) satker yaitu sebagai berikut.

a. Pangkalan PSDKP Bitung

Merupakan kekurangan gaji 8 (delapan) ASN periode Maret - Desember 2024 sebesar Rp7.087.100,00; kekurangan tunjangan kinerja 4 (empat) ASN periode November - Desember 2024 sebesar Rp12.195.038,00; dan lain-lain sebesar Rp1.272.447,00.

b. Pangkalan PSDKP Pontianak

Merupakan kekurangan gaji pokok 2 (dua) ASN sebesar Rp3.343.200,00; kekurangan tunjangan kinerja 1 (satu) PNS periode April - November 2024 sebesar Rp11.097.678,00; kekurangan tunjangan kinerja 1 (satu) P3K periode April - November 2024 sebesar Rp9.190.300,00 dan lain-lain sebesar Rp262.608,00.

c. Satker Lainnya

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar pada 2 (dua) satker sebesar Rp27.809.820,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP hanya terdapat pada satker Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP yang merupakan tunjangan fungsional periode 2024 yang belum dibayar untuk 5 (lima) PNS sebesar Rp3.200.000,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelauatan dan Ruang Laut

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Ditjen Pengelolaan Kelauatan dan Ruang Laut terdapat pada satker Loka KPPN Pekanbaru yang merupakan kekurangan tunjangan kinerja 9 (sembilan) ASN periode Desember 2024 sebesar Rp38.164.098,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 7 (tujuh) satker yaitu sebagai berikut.

a. BP3 Banyuwangi

Merupakan tunjangan kinerja PNS dan P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar masing-masing sebesar Rp133.504.245,00 dan Rp68.743.444,00.

b. Poltek KP Pangandaran

Merupakan tunjangan kinerja 4 (empat) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp24.637.228,00.

c. Poltek KP Sorong

Merupakan uang makan PNS periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp51.548.000,00.

d. Satker Lainnya

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar pada 5 (lima) satker sebesar Rp10.949.343,00.

8. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP terdapat pada 10 (sepuluh) satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan tunjangan kinerja 7 (tujuh) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp39.488.905,00; gaji pokok 8 (delapan) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp2.237.800,00 dan lain-lain sebesar Rp272.556,00.

b. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan tunjangan kinerja 11 (sebelas) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp75.522.300,00; tunjangan kinerja 1 (satu) orang pelaksana tugas (Plt) periode November - Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp6.825.600,00 dan tunjangan fungsional 1 (satu) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp305.000,00.

c. Balai KIPM Denpasar

Merupakan tunjangan kinerja 3 (tiga) orang PNS periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp25.765.009,00.

d. Stasiun KIPM Merak

Merupakan tunjangan kinerja 11 (sebelas) orang ASN periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp65.486.650,00 dan tunjangan kinerja 1 (satu) P3K periode Desember 2024 yang belum dibayar sebesar Rp3.510.400,00.

e. Satker Lainnya

Merupakan belanja pegawai Tahun 2024 yang belum dibayar pada 6 (enam) satker sebesar Rp62.395.878,00.

C.6.1.2 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.891.580.576,00 dan Rp10.821.731.442,00.

Rincian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.89
Rincian Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	2.097.877.322	2.144.498.511	(46.621.189)	(2,17)
Ditjen PT	1.938.147.098	2.094.936.245	(156.789.147)	(7,48)
Ditjen PB	2.793.243.161	2.409.785.165	383.457.996	15,91
Ditjen PSDKP	2.033.624.497	733.569.279	1.300.055.218	177,22
Ditjen PDSPKP	570.976.670	272.640.734	298.335.936	109,42
Ditjen PKRL	736.208.679	111.589.096	624.619.583	559,75
BPPSDM KP	2.004.007.533	1.910.582.350	93.425.183	4,89
BPPMH KP	717.495.616	1.144.130.062	(426.634.446)	(37,29)
Total	12.891.580.576	10.821.731.442	2.069.849.134	19,13

Sedangkan saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP sebesar Rp1.300.055.218,00 yang secara umum disebabkan pembukuan biaya sewa pesawat Tahun 2024 sebesar Rp1.462.016.040,00 dan biaya *ground handling* pesawat Tahun 2024 sebesar Rp142.215.505,00 yang belum dibayar.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP sebesar Rp426.634.446,00 yang

secara umum disebabkan turunnya pembukuan biaya utilitas karena terdapat transfer keluar Gedung dan Bangunan dalam rangka pembentukan Badan Karantina Indonesia dengan jumlah yang signifikan.

Penjelasan ringkas atas saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Merupakan biaya listrik Gd. Mina Bahari I, II, III, IV, Wisma Gracilaria dan Gd. Arsip Juanda bulan Desember 2024 sebesar Rp1.870.858.941,00 dan biaya telepon Gd. Mina Bahari I, II, III, IV, Wisma Gracilaria, Gd. Arsip Juanda bulan Desember 2024 sebesar Rp115.643.471,00, tunggakan perjalanan dinas sebesar Rp38.951.070,00 dan belanja keperluan perkantoran yang belum dibayar sebesar Rp14.399.750,00.

b. Balai Pengelola Informasi Sumber Daya KP

Merupakan tagihan biaya listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp57.406.486,00 dan biaya telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp617.604,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan terdapat pada 21 (dua puluh satu) satker yaitu sebagai berikut.

a. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Merupakan tagihan listrik SKPT Tahun 2024 sebesar Rp226.044.033,00; tagihan langganan daya serta jasa tegalsari sebesar Rp3.781.324,00 dan lain-lain sebesar Rp56.980.000,00.

b. PPN Karangantu

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp64.712.119,00; tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp16.124.500,00 dan tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp4.919.312,00.

c. Balai Besar Penangkapan Ikan

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp52.566.589,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp164.058,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp168.640,00.

d. PPN Kwandang

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp70.583.016,00; tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp1.519.900,00 dan lain-lain sebesar Rp9.036.490,00.

e. PPN Brondong

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp92.303.827,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp27.512.800,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp94.942,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp2.743.255,00.

f. PPS Cilacap

Merupakan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp3.131.000,00 dan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp60.873.415,00.

g. PPS Bungus

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp80.253.128,00 dan tagihan telepon serta internet Tahun 2024 sebesar Rp3.406.146,00.

h. PPS Nizam Zachman

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp146.949.519,00; tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp45.447.329,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar

Rp25.800.000,00 dan retribusi sampah Tahun 2024 sebesar Rp258.045.380,00.

i. PPN Palabuhan Ratu

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp63.667.737,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp5.703.142,00 dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp2.695.440,00.

j. PPN Sibolga

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp65.317.354,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp121.101,00; tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp5.101.071,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp37.518.115,00.

k. PPN Ambon

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp66.879.054,00; tagihan telepon Tahun 2024 sebesar Rp215.673,00 dan tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp9.592.963,00.

l. PPN Kejawan

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp60.188.529,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp272.007,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp69.419.280,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp5.369.970,00.

m. PPN Bitung

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp47.849.385,00.

n. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 8 (delapan) satker sebesar Rp188.090.555,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 17 (tujuh belas) satker yaitu sebagai berikut.

a. BPBAT Sungai Gelam

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp90.020.649,00 dan tagihan langganan daya dan jasa lainnya periode Desember 2024 sebesar Rp13.739.782,00.

b. BBPBAP Jepara

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp421.312.397,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp 69.708,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp8.547.000,00.

c. BBPBL Lampung

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp182.254.569,00.

d. BLUPPB Karawang

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp637.001.614,00; dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp2.750.000,00.

e. BPIU2K Karangasem

Merupakan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp384.301,00; dan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp128.465.379,00.

f. BPBAP Situbondo

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp210.706.754,00; dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp6.189.732,00.

g. BPBAP Ujung Batee

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp104.656.711,00.

h. BPBL Batam

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp170.854.643,00.

i. BPBAP Takalar

Merupakan biaya listrik periode Desember 2024 sebesar Rp211.398.649,00.

j. BPBL Ambon

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp134.519.302,00.

k. BPKIL Serang

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp147.825.075,00; dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp1.112.431,00.

l. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 6 (enam) satker sebesar Rp321.434.465,00.

4. Ditjen Pengawasan dan Sumber Daya KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengawasan Sumber Daya KP terdapat pada 15 (lima belas) satker yaitu sebagai berikut.

a. Pangkalan PSDKP Batam

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp57.881.915,00; tagihan telepon/internet periode Desember 2024 sebesar Rp14.212.008,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp853.776,00,00.

b. Pangkalan PSDKP Jakarta

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp54.854.767,00; tagihan telepon/internet periode Desember 2024 sebesar Rp1.195.400,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp3.981.166,00.

c. Pangkalan PSDKP Tual

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp32.514.207,00; tagihan telepon/internet periode Desember 2024 sebesar Rp8.223.219,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp680.285,00.

d. Seditjen PSDKP

Merupakan tagihan sewa pesawat Tahun 2024 sebesar Rp1.462.016.040,00; tagihan *ground handling* pesawat Tahun 2024 sebesar Rp142.215.505,00; kekurangan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp28.149.725,00 dan tagihan jasa telekomunikasi sebesar Rp609.325,00.

e. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 11 (sebelas) satker sebesar Rp226.237.159,00.

5. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. BBP3KP Cipayung

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp469.825.518,00 dan tagihan telepon/internet periode Desember 2024 sebesar Rp837.959,00.

b. Setditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp100.313.193,00.

6. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Saldo Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdapat pada 9 (sembilan) satker yaitu sebagai berikut.

a. BPSPL Pontianak

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp10.256.486,00; tagihan telepon periode Desember

2024 sebesar Rp9.288.960,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp604.300,00.

b. BKKPN Kupang

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp12.240.782,00; tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp13.913.775,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp841.716,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp282.045,00.

c. Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Merupakan pelunasan pekerjaan penataan lahan dan pipanisasi rumah garam di Kab Aceh Besar sebesar Rp164.836.000,00; pelunasan pekerjaan penataan lahan dan pipanisasi rumah garam di Kab Aceh Utara sebesar Rp165.872.000,00; dan pelunasan pekerjaan sarana pendukung rumah garam di Kab. Pidie Jaya sebesar Rp278.153.400,00.

d. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 6 (enam) satker sebesar Rp79.919.215,00.

7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 37 (tiga puluh tujuh) satker yaitu sebagai berikut.

a. BP3 Banyuwangi

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp45.638.448,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp174.953,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp11.236.300,00.

b. BP3 Tegal

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp51.947.259,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp2.553.000,00; tagihan telepon periode Desember

2024 sebesar Rp90.448,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp7.135.670,00.

c. Pusat Riset Perikanan

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp58.322.258,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp7.492.500,00 dan tagihan telepon Tahun 2024 sebesar Rp105.672,00.

d. BRPPUPP Palembang

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp93.246.861,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp1.170.790,00 dan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp3.093.898,00.

e. BBRBLPP Gondol

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp89.275.834,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp1.045.500,00 dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp829.675,00.

f. BRPBAPPP Maros

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp113.769.149,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp4.220.340,00; tagihan telepon Tahun 2024 sebesar Rp71.639,00 dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp2.939.400,00.

g. BRPBATPP Sempur

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp61.214.190,00,00 dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp618.800,00.

h. Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp43.892.242,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp59.816,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp12.819.400,00.

i. BBR Pengolahan Produk Dan Bioteknologi KP

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp97.134.482,00.

j. Politeknik KP Bone

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp49.846.156,00 dan tagihan telepon serta internet periode Desember 2024 sebesar Rp9.687.540,00.

k. Politeknik AUP Jakarta

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp194.999.093,00; tagihan telepon Tahun 2024 sebesar Rp6.114.223,00 dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp45.097.700,00.

l. Politeknik KP Sidoarjo

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp91.671.216,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp165.834,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp51.258.550,00 dan langganan koran periode Desember 2024 sebesar Rp300.000,00.

m. Sekretariat BRSDMKP

Merupakan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp12.309.983,00; tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp150.499.409,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp4.405.960,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp577.200,00.

n. Politeknik KP Sorong

Merupakan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp16.334.008,00 dan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp20.406.700,00.

o. BPPA Sukamandi

Merupakan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp62.696.314,00.

p. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 22 (dua puluh dua) satker sebesar Rp561.599.123,00.

8. Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil KP

Saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 36 (tiga puluh enam) satker yaitu sebagai berikut.

a. Balai KIPM Surabaya I

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp81.399.888,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp2.139.216,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp6.736.500,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp3.801.654,00.

b. Balai KIPM Medan I

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp24.930.012,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp350.094,00; dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp 2.514.841,00.

c. Balai Besar KIPM Makassar

Merupakan tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp644.690,00; tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp19.084.638,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp255.633,00; dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp111.000,00.

d. Balai KIPM Denpasar

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp26.090.300,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp1.517.646,00; tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp5.831.818,00 dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp58.300,00.

e. Stasiun KIPM Batam

Merupakan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp3.336.450,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp486.566,00; tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp25.685.618,00 dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp179.564,00.

f. Stasiun KIPM Pontianak

Merupakan tagihan telepon Tahun 2024 sebesar Rp118.832,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp5.222.600,00; tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp13.859.373,00; dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp1.172.300,00.

g. Balai KIPM Manado

Merupakan tagihan listrik Tahun 2024 sebesar Rp26.376.316,00; tagihan internet Tahun 2024 sebesar Rp7.035.195,00 dan tagihan air Tahun 2024 sebesar Rp1.412.500,00.

h. Stasiun KIPM Kendari

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp18.856.534,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp931.290,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp4.239.090,00.

i. Balai KIPM Mataram

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp21.339.005,00; tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp179.243,00; tagihan air periode Desember 2024 sebesar Rp753.050,00 dan tagihan internet periode Desember 2024 sebesar Rp2.468.760,00.

j. Stasiun KIPM Palu

Merupakan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp2.385.845,00; tagihan air periode Desember 2024

sebesar Rp122.500,00 dan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp21.727.900,00.

k. Balai KIPM Semarang

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp23.533.535,00 dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp253.893,00.

l. Balai KIPM Jakarta II

Merupakan tagihan listrik periode Desember 2024 sebesar Rp19.202.345,00 dan tagihan telepon periode Desember 2024 sebesar Rp4.516.382,00.

m. Satker Lainnya

Merupakan belanja barang Tahun 2024 yang belum dibayar pada 24 (dua puluh empat) satker sebesar Rp 336.634.700,00.

C.6.1.3 Utang Kepada Pihak Ketiga BLU

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp210.963.000,00 dan Rp1,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.90
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga BLU
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	0	1	(1)	(100,00)
BRSDM KP	210.963.000	0	210.963.000	0,00
Total	210.963.000	1	210.962.999	210.962.999,00

Utang Kepada Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan uang muka yang diterima dari calon peserta untuk pelatihan yang akan

diselenggarakan pada tahun 2025 pada satker BP3 Tegal sebesar Rp210.963.000,00.

C.6.1.4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan belanja yang telah dicairkan dari kas negara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.658.285.944,00 dan Rp0,00.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.91
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	31.786.224.192	0	31.786.224.192	0,00
Ditjen PT	5.460.008.097	0	5.460.008.097	0,00
Ditjen PB	8.217.751.805	0	8.217.751.805	0,00
Ditjen PSDKP	4.621.161.841	0	4.621.161.841	0,00
Ditjen PDSPKP	10.939.976.273	0	10.939.976.273	0,00
BPPSDM KP	7.602.236.257	0	7.602.236.257	0,00
BPPMH KP	30.927.479	0	30.927.479	0,00
Total	68.658.285.944	0	68.658.285.944	0,00

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan input BAST pembayaran pekerjaan melalui RPATA per tanggal 31 Desember. Rincian pembukuan BAST RPATA adalah sebagai berikut.

Tabel C.92
Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Terkait BAST RPATA
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024

Unit Eselon I	Saldo RPATA Per 31 Des 2024	Pembayaran RPATA		Pengembalian RPATA	Saldo Akhir
		BAST Tahun 2024 (Diinput sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga pada Tahun 2024)	BAST Tahun 2024 dan 2025 (Terdapat Perpanjangan Pekerjaan)		
Setjen	38.456.138.715	31.786.224.192	5.862.439.694	807.474.829	0
Ditjen PT	5.472.213.465	5.460.008.097		12.205.368	0
Ditjen PB	8.217.751.805	8.217.751.805			0
Ditjen PSDKP	4.939.898.353	4.621.161.841	299.378.870	19.357.642	0
Ditjen PDSPKP	10.939.976.273	10.939.976.273			0
BPPSDM KP	9.840.539.226	7.602.236.257	2.018.411.517	219.891.452	0
BPPMH KP	30.927.479	30.927.479			0
Total	77.897.445.316	68.658.285.944	8.180.230.081	1.058.929.291	0

C.6.1.5 Dana Pihak Ketiga

Saldo Dana Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.488.047.396,00 dan Rp1.518.047.396,00.

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.93
Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	0	30.000.000	(30.000.000)	(100,00)
BPPSDM KP	1.488.047.396	1.488.047.396	0	0,00
Total	1.488.047.396	1.518.047.396	(30.000.000)	(1,98)

Penurunan signifikan saldo Dana Pihak Ketiga Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp30.000.000,00 yang disebabkan oleh penyetoran pembayaran piutang PT Prnd (Persero) ke Kas Negara.

Saldo Dana Pihak Ketiga Lainnya hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan SDM KP yang merupakan sisa kas program hibah dari *Australian Center for International Agricultural*

Research (ACIAR) sebesar Rp949.918.483,00 dan *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO) yang pelaksanaannya telah berakhir senilai Rp538.128.913,00 pada satker Pusat Riset Perikanan.

C.6.1.6 Dana Pihak Ketiga BLU

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.786.300,00.

Rincian saldo Dana Pihak Ketiga BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.94
Rincian Saldo Dana Pihak Ketiga Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PB	9.684.074.100	0	9.684.074.100	0,00
BPPSDM KP	0	5.786.300	(5.786.300)	(100,00)
Total	9.684.074.100	5.786.300	9.678.287.800	167.262,12

Penurunan signifikan saldo Dana Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM KP sebesar Rp5.786.300,00 yang disebabkan oleh penyeteroran kelebihan belanja pegawai tahun 2021 dan 2022 ke Kas Negara.

Saldo Dana Pihak Ketiga BLU hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya di satker BLUP BPBAP Situbondo yang merupakan dana pihak ketiga berupa uang muka dari perusahaan *Joint Venture* terkait kerjasama BLU Budidaya Benih Bening Lobster (BBL) sebesar Rp9.684.074.100,00.

C.6.2 Hibah Yang Belum Disahkan

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp8.820.324.608,00.

Saldo Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

merupakan hibah yang belum disahkan terkait proyek *Improving Efforts To Reduce IUU Fishing Through Expanding Human Capacity and Implementing New Tools to Improve Maritime Surveillance* dari hibah *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*.

C.6.3 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.885.401,00 dan Rp144.463.282,00.

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan biaya Provisi yang diterima dimuka yang dibayarkan oleh debitur yang mekanisme pencairan Dana Bergulirnya dilakukan secara bertahap dan pada tanggal 31 Desember 2024 belum seluruhnya dicairkan berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani antara LPMUKP dengan debitur sebesar Rp44.885.401,00.

C.6.4 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.255.464.006,00 dan Rp9.518.380.902,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.95
Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	4.091.411.270	1.959.765.624	2.131.645.646	108,77
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	5.590.274.975	7.339.847.778	(1.749.572.803)	(23,84)
Pendapatan Diterima Dimuka BLU	573.777.761	218.767.500	355.010.261	162,28
Total	10.255.464.006	9.518.380.902	737.083.104	7,74

Penjelasan Pendapatan Diterima Dimuka per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.6.4.1 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.091.411.270,00 dan Rp1.959.765.624,00.

Rincian saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.96
Rincian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	1.486.150.275	979.441.292	506.708.983	51,73
Ditjen PT	2.142.606.059	30.904.417	2.111.701.642	6.833,01
Ditjen PB	134.081.644	701.790.504	(567.708.860)	(80,89)
Ditjen PDSPKP	3.990.046	0	3.990.046	0,00
Ditjen PKRL	0	42.391.800	(42.391.800)	(100,00)
BPPSDM KP	324.583.246	205.237.611	119.345.635	58,15
Total	4.091.411.270	1.959.765.624	2.131.645.646	108,77

Saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka yang mengalami kenaikan dan penurunan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kenaikan signifikan

Terdapat kenaikan signifikan saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp2.111.701.642,00 yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan kerjasama pemanfaatan lahan di pelabuhan perikanan sebanyak 64 (enam puluh empat) kontrak.

2. Penurunan signifikan

Terdapat penurunan signifikan saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp567.708.860,00 yang secara umum disebabkan oleh

kewajiban KKP untuk menyewakan lahan untuk PT. Tri Karta Pratama dan PT. Suri Tani telah dilaksanakan.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker Biro Umum dan PBJ yang merupakan.

- a. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 gedung Mina Bahari I oleh PT MSD sebesar Rp174.776.233,00;
- b. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 dan rooftop gedung dan bangunan pada gedung Mina Bahari I oleh PT TS sebesar Rp339.976.683,00;
- c. Pendapatan atas sewa lantai B3 pada gedung Mina Bahari III oleh PT IBS sebesar Rp18.184.067,00;
- d. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B2 gedung Mina Bahari III oleh KPN MS sebesar Rp14.889.236,00;
- e. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B1 gedung Mina Bahari III oleh Koperasi MU sebesar Rp9.300.833,00;
- f. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari III oleh PT BNI sebesar Rp415.097.223,00;
- g. Pendapatan atas sewa sebagian lantai B3 Gedung Mina Bahari IV oleh PT dTN sebesar Rp408.333.333,00; dan
- h. Pendapatan atas sewa sebagian lantai 1 gedung Mina Bahari IV oleh PT BRI sebesar Rp105.592.667,00.

2. Ditjen Perikanan Tangkap

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan sewa Barang Milik Negara pada 5 (lima) satker yaitu pada PPN Prigi sebesar Rp61.380.003,00; PPS Cilacap sebesar Rp295.276.065,00; PPS Kendari sebesar Rp408.073.612,00; PPN Kejawanen sebesar

Rp1.365.682.173,00 dan PPN Pengambengan sebesar Rp12.194.206,00.

3. Ditjen Perikanan Budi Daya

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat pada 3 (tiga) satuan kerja yaitu sebagai berikut.

a. BBPBAT Sukabumi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp5.088.648,00.

b. BLUPPB Karawang

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT AGFS dan Koperasi PRI GM sebesar Rp40.328.496,00.

c. BPKIL Serang

Merupakan pendapatan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh PT. Tri Karta Pratama dan PT. Suri Tani sebesar Rp88.664.500,00.

4. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP hanya terdapat pada satker BBP3KP Cipayung yang merupakan sewa Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin (kendaraan berreferigrasi) sebesar Rp3.990.046,00.

5. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 7 (tujuh) satker yaitu sebagai berikut.

a. BP3 Banyuwangi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BRI sebesar Rp8.784.000,00 dan PT BSI sebesar Rp1.998.200,00.

b. BRPPUPP Palembang

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Koperasi KP3 KKP sebesar Rp7.231.931,00 dan sewa tanah dan/atau bangunan (tanah instalasi ikan di Patra Tani) oleh PT DP sebesar Rp115.000.000.

c. BRPBATPP Sempur

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BRI sebesar Rp55.947.500,00.

d. Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan anjungan tunai mandiri (ATM) PT BNI sebesar Rp7.173.332,00 dan sewa lahan parkir sebesar Rp19.494.000,00.

e. Politeknik AUP Jakarta

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BM sebesar Rp36.154.126,00 dan PT BNI sebesar Rp41.346.081,00.

f. SUPM Pontianak

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan berupa ruang kelas oleh Yayasan SUPMKB sebesar Rp21.530.876,00.

g. BPPA Sukamandi

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan oleh Kop. PRI TM sebesar Rp9.923.200,00.

C.6.4.2 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.590.274.975,00 dan Rp7.339.847.778,00.

Rincian saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.97
Rincian Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	5.552.683.421	7.269.385.557	(1.716.702.136)	(23,62)
BPPSDM KP	37.591.554	70.462.221	(32.870.667)	(46,65)
Total	5.590.274.975	7.339.847.778	(1.749.572.803)	(23,84)

Penurunan signifikan saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka hanya terdapat pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp1.716.702.136,00 yang secara umum disebabkan oleh kewajiban KKP untuk menyewakan lahan untuk usaha Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Perikanan Tangkap

Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan sewa lahan pada kawasan pelabunan perikanan sesuai tugas dan fungsi serta pendapatan dari jasa kepelabuhanan pada 20 (dua puluh) satker sebesar Rp5.552.683.421,00. Satker dengan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka terbesar antara lain PPS Cilacap sebesar Rp686.314.117,00; PPS Kendari sebesar Rp1.078.550.089,00; PPN Sibolga sebesar Rp337.762.580,00; PPN Ambon sebesar Rp789.311.068,00; PPN Kejawanen sebesar Rp645.891.615,00; PPN Pengembangan sebesar Rp371.453.908,00 dan PPS Bitung sebesar Rp378.914.764,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. BP3 Tegal

Merupakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan untuk anjungan tunai mandiri (ATM) PT BRI sebesar Rp Rp3.977.554,00 dan PT BTN sebesar Rp5.114.000,00.

b. Politeknik AUP Jakarta

Merupakan biaya pendidikan semester ganjil Tahun 2024/2025 sebesar Rp28.500.000,00.

C.6.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka BLU

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp573.777.761,00 dan Rp218.767.500,00.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.98
Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Setjen	122.531.761	89.368.500	33.163.261	37,11
BPPSDM KP	451.246.000	129.399.000	321.847.000	248,72
Total	573.777.761	218.767.500	355.010.261	162,28

Kenaikan signifikan Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap Rp321.847.000,00 yang secara umum disebabkan oleh terdapat pembayaran biaya pendidikan, biaya makan Taruna dan sewa asrama semester genap oleh peserta didik pada Tahun 2024.

Penjelasan ringkas atas saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal

Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal hanya terdapat pada satker LPMUKP yang

merupakan pengakuan diterimanya sejumlah Kas dari Debitur atas kelebihan pembayaran pendapatan jasa layanan sebesar Rp122.531.761,00.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Pendapatan Diterima Dimuka BLU pada unit Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP terdapat pada 2 (dua) satker yaitu sebagai berikut.

a. BP3 Tegal

Merupakan pendapatan atas sewa aset pengolahan sebesar Rp105.000.000,00.

b. Poltek KP Sidoarjo

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka BLU satker Poltek KP Sidoarjo merupakan.

- Pendapatan dari biaya pendidikan semester genap Tahun 2024/2025 yang sudah dibayarkan oleh beberapa taruna pada bulan Desember 2024 sebesar Rp155.650.000,00;
- Pendapatan dari permakanan taruna semester genap Tahun 2024/2025 sebesar Rp153.321.000,00; dan
- Pendapatan dari sewa asrama taruna semester genap Tahun 2024/2025 sebesar Rp37.275.000,00.

C.6.5 Uang Muka KPPN

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian saldo Uang Muka KPPN pada masing-masing unit eselon I Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.99
Rincian Saldo Uang Muka KPPN Pada Masing-Masing Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah	Saldo UP	Saldo TUP	Jumlah
1	Ditjen PT	2.000.000	0	2.000.000	206.500	0	206.500
2	BPPSDM KP	0	213.583.279	213.583.279	0	0	0
Total		2.000.000	213.583.279	215.583.279	206.500	0	206.500

C.6.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179.004.622,00 dan Rp34.232.081,00.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per akun adalah sebagai berikut.

Tabel C.100
Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per Akun
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan rekening	157.190.207	12.812.081	144.378.126	1.126,89
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	21.814.415	21.420.000	394.415	1,84
Total	179.004.622	34.232.081	144.772.541	422,91

Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya per masing-masing akun adalah sebagai berikut.

C.6.6.1 Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp157.190.207,00 dan Rp12.812.081,00.

Saldo Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga hanya terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal yang merupakan sejumlah transaksi penerimaan pada rekening satker LPMUKP yang masih memerlukan konfirmasi sebesar Rp126.208.285,00 dan kelebihan pembayaran jasa layanan oleh debitur yang sudah lunas dan dalam proses pengembalian ke debitur bersangkutan sebesar Rp30.981.922,00.

C.6.6.2 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor merupakan pungutan pajak dari pelaksanaan APBN yang belum disetor ke kas negara oleh bendahara pengeluaran. Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.814.415,00 dan Rp21.420.000,00.

Rincian saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

Tabel C.101
Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor
Pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)	%
Ditjen PT	0	21.420.000	(21.420.000)	(100,00)
Ditjen PRL	113.000	0	113.000	0,00
BRSDM KP	21.701.415	0	21.701.415	0,00
Total	21.814.415	21.420.000	394.415	1,84

Penjelasan ringkas atas saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor pada masing-masing unit Eselon I adalah sebagai berikut.

1. Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut merupakan pajak honor validator yang belum disetor sebesar Rp113.000,00 pada satker DKP Prov. Sulawesi Tenggara. Pajak tersebut telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2025 dengan NTPN 167D75BBSE08HL5Q.

2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP merupakan pajak yang belum disetor berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp9.620.672,00 dan pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp12.080.743,00 pada satker Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.

C.7 Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

C.7.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 25.220.160.346.839,00 dan Rp25.529.221.392.262,00.

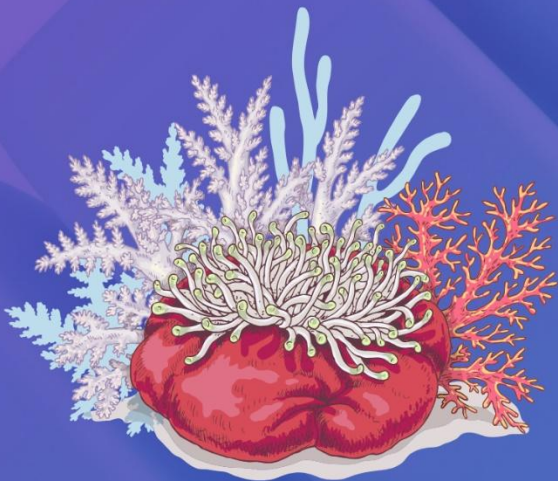
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LO

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

D.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO
Rp2.207.976.788.689,00

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali yang bukan berasal dari setoran pajak negara.

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan beban negara (Pasal 1 UU 9/2018).

Peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan ini berasal dari PNBP Sumber Daya Alam berupa pendapatan pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan pada Ditjen Perikanan Tangkap serta PNBP Non Sumber Daya Alam berupa pendapatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja Eselon I penghasil PNBP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budi Daya, Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP, Ditjen PKRL, BPPSDMKP, BPPMHKP dan BLU pada

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saldo akun Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Berikut ini rincian saldo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel D.1
Rincian Pendapatan-LO
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Sumber Daya Alam	954.494.968.076	637.161.520.387	317.333.447.689	49,80
Pendapatan PNPB Lainnya	1.060.883.227.384	1.043.563.997.110	17.319.230.274	1,66
Pendapatan BLU	192.598.593.229	0	192.598.593.229	0,00
Total	2.207.976.788.689	1.680.725.517.497	527.251.271.192	31,37

D.1.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya
Rp954.494.968.076 ,00

Pendapatan Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp954.494.968.076,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp317.333.447.689,00 atau 49,80% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp637.161.520.387,00.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap dengan rincian berdasarkan akun disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.2
Rincian Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	41.594.325.393	45.780.968.647	(4.186.643.254)	(9,14)
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	153.870.000	93.225.000	60.645.000	65,05
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	912.732.373.347	591.287.326.740	321.445.046.607	54,36
Total	954.480.568.740	637.161.520.387	317.319.048.353	49,80

Kenaikan Pendapatan Sumber Daya Alam yang dipungut oleh Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah dari Pendapatan Pungutan SDA Perikanan yang terdiri dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Perikanan Tangkap dengan kode akun 421521, Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Bidang Pembudidayaan Ikan dengan kode akun 421522 dan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dengan kode akun 421531. Pendapatan PPP Bidang Perikanan Tangkap Bulan Januari s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp41.594.325.393,00 yang diperoleh dari Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan, Penerbitan SIUP Pengangkutan Ikan, Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk ikan beku.

Sementara itu, pendapatan PPP Bidang Pembudidayaan Ikan Bulan Januari s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp153.870.000,00 yang diperoleh dari Penerbitan SIKPI untuk ikan hidup/budidaya. Adapun pendapatan PHP Bulan Januari s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp912.732.373.347,00 yang diperoleh dari pendaratan produksi ikan. Total PNBPN SDA Perikanan Bulan Januari s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp954.480.568.740,00. Terdapat kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan Bulan Januari s.d Desember tahun 2023 yaitu sebesar Rp637.161.520.387,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh:

- a. Peningkatan signifikan pada pendapatan pungutan hasil perikanan (PHP) sebagai implementasi penarikan PNBPN SDA perikanan pascaproduksi secara penuh di tahun 2024, dimana PNBPN dibayarkan berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan;
- b. Pengenaan PNBPN PHP diberlakukan jika perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan dan nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan. Dengan besaran nilai

pungutan dihitung secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap melalui aplikasi yang disediakan oleh KKP;

- c. Kapal yang masih beroperasi mengantongi izin praproduksi tahun 2022, kapal yang masih memiliki izin (SIPI) PNBP SDA perikanan praproduksi belum dapat ditarik PNBP SDA perikanan pascaproduksi di tahun 2023 sampai dengan izin PNBP SDA perikanan pascaproduksi terbit. Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR, BSSN 7;
- d. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan;
- e. Peningkatan volume permintaan izin kapal dengan penarikan pascaproduksi;

Terdapat perbedaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.3
Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Sumber Daya Alam (LO)	951.819.466.723
Pendapatan Sumber Daya Alam (LRA)	954.494.968.076
Selisih	(2.675.501.353)

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan/berasal dari:

Tabel D.4
Rincian Perbedaan Saldo Pendapatan Sumber Daya Alam
per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	35.332.514
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-2.720.081.358
Koreksi Lainnya	9.247.491
Jumlah	-2.675.501.353

D.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp1.060.883.227.384,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.060.883.227.384,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.319.230.274,00 atau 1,66% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.043.563.997.110,00. Rincian saldo dari akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel D.5
Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	6.696.524.107	(6.696.524.107)	(100,00)
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	0	142.074.007	(142.074.007)	(100,00)
Pendapatan Penyediaan Barang	0	3.774.135.400	(3.774.135.400)	(100,00)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	2.859.053.296	(2.859.053.296)	(100,00)
Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	0	38.310.000	(38.310.000)	(100,00)
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	0	28.597.814.517	(28.597.814.517)	(100,00)
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	0	4.927.687.694	(4.927.687.694)	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	1.472.093.971	(1.472.093.971)	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	39.179.680.769	(39.179.680.769)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain BLU	0	11.286.949.970	(11.286.949.970)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	17.053.814	(17.053.814)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	68.265.000	(68.265.000)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	772.676.771	(772.676.771)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	102.892.554	(102.892.554)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	39.949.400	(39.949.400)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	90.220.240	(90.220.240)	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	33.000.000	(33.000.000)	(100,00)

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan,	21.041.638.181	21.768.008.114	(726.369.933)	(3,34)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	613.430.700	629.181.210	(15.750.510)	(2,50)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.349.119.867	6.935.976.579	(586.856.712)	(8,46)
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.780.822.830	501.608.724	1.279.214.106	255,02
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	12.000.000	0	12.000.000	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai	26.785.092.480	27.833.628.198	(1.048.535.718)	(3,77)
Pendapatan Perizinan Lainnya	827.828.756.068	686.762.808.355	141.065.947.713	20,54
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	48.910.381.200	68.555.614.000	(19.645.232.800)	(28,66)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	38.700.000	1.632.470.000	(1.593.770.000)	(97,63)
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	3.800.000	323.873.000	(320.073.000)	(98,83)
Pendapatan Biaya Pendidikan	1.097.533.333	1.461.669.167	(364.135.834)	(24,91)
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	3.850.212.000	3.407.915.000	442.297.000	12,98
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	598.500	275.625	322.875	117,14
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan	17.000.000	30.544.905	(13.544.905)	(44,34)
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	73.938.733.004	77.046.101.149	(3.107.368.145)	(4,03)
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	21.270.644.636	15.444.632.406	5.826.012.230	37,72
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	53.775.000	23.300.000	30.475.000	130,79
Pendapatan Jasa Lainnya	2.493.288	62.250.000	(59.756.712)	(95,99)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	320	0	320	0,00
Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	0	0	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.353.758.153	2.301.329.076	1.052.429.077	45,73
Pendapatan Denda Lainnya	23.877.548.743	27.372.249.411	(3.494.700.668)	(12,77)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	359.202	(359.202)	(100,00)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	57.189.081	1.371.821.479	(1.314.632.398)	(95,83)
Total	1.060.883.227.384	1.043.563.997.110	17.319.230.274	1,66

Rincian atas saldo akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan TA 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.6
Rincian Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	1.030.964.770	72.646.469.086	(71.615.504.316)	(98,58)
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	92.533.670.275	93.830.330.528	(1.296.660.253)	(1,38)
Ditjen PB	20.030.179.618	37.819.551.179	(17.789.371.561)	(47,04)
Ditjen PSDKP	24.106.789.390	27.672.368.338	(3.565.578.948)	(12,88)
Ditjen PDSPKP	8.597.721.855	8.789.441.871	(191.720.016)	(2,18)
Ditjen PKRL	849.223.580.038	702.424.483.944	146.799.096.094	20,90
BPPSDMKP	18.866.109.629	29.923.299.103	(11.057.189.474)	(36,95)
BPPMHKP	46.494.211.809	70.458.053.061	(23.963.841.252)	(34,01)
Total	1.060.883.227.384	1.043.563.997.110	17.319.230.274	1,66

Kenaikan signifikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada tahun 2024 terdapat pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Unit Eselon I dengan pengungkapan sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kenaikan pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar 20,90% disebabkan karena Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya (425629) yang berasal dari penerimaan fungsional antara lain Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi serta Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya berupa Pungutan Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas di Luar Ketentuan Perlindungannya dan Dibatasi Pemanfaatannya dari Habitat Alam untuk Kegiatan Perdagangan.

Terdapat juga peningkatan pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252) berupa Pendapatan Perizinan Lainnya (425259) dikarenakan pada tahun ini terdapat Penerimaan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Perizinan

Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut yaitu Kegiatan Wisata Bahari, Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Pelaksanaan Reklamasi, Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan, Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka PMA.

Penambahan pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya juga dikarenakan adanya koreksi *Audited*, diantara lain:

- a. Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBPN dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2024 oleh BUT EMP Gebang Limited dengan total Rp2.488.353.852,00 sebesar Rp622.088.463,00;
- b. Pembentukan piutang atas izin pelaksanaan reklamasi yg menghasilkan PNBPN dgn pembayaran melewati tahun anggaran 2024 oleh PT. Vesinter Indonesia dengan total Rp9.564.232.305,00 sebesar Rp7.651.385.844,00.

Terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.7
Perbedaan Saldo PNBPN Lainnya Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Sumber Daya Alam (LO)	1.060.883.227.384
Pendapatan Sumber Daya Alam (LRA)	1.073.849.165.581
Selisih	(12.965.938.197)

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan/berasal dari:

Tabel D.8
Rincian Perbedaan Saldo PNBPN Lainnya per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Pendapatan Non Operasional Lainnya	(19.145.000.435)
2. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
Kas di Bendahara Penerimaan	(81.395.000)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(1.659.049.530)

Uraian	Nilai (Rp)
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	109.845.283
Piutang Lainnya	8.289.297.405
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(2.754.840.533)
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	2.525.246.537
Koreksi Lainnya	(4.712.500)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	(40.328.496)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(203.549.368)
3. Koreksi Lain - Lain	
Lain-lain	(1.451.560)
Jumlah	(12.965.938.197)

D.1.3 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan
Layanan Umum
Rp192.598.593.229,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp192.598.593.229,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp192.598.593.229,00 atau 100% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Kenaikan ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Badan Layanan Umum masih masuk ke dalam angka Pendapatan PNBPN Lainnya. Rincian saldo dari akun Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel D.9
Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	14.269.052.898	0	14.269.052.898	0,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	347.033.750	0	347.033.750	0,00
Pendapatan Penyediaan Barang	5.613.374.010	0	5.613.374.010	0,00
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.123.410.261	0	1.123.410.261	0,00
Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	17.300.000	0	17.300.000	0,00
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	36.306.569.687	0	36.306.569.687	0,00
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	7.647.452.715	0	7.647.452.715	0,00
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan -	27.203.967	0	27.203.967	0,00

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	71.009.136.247	0	71.009.136.247	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	28.479.909.015	0	28.479.909.015	0,00
Pendapatan Lain-lain BLU	24.710.604.107	0	24.710.604.107	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	233.440.220	0	233.440.220	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.098.555.118	0	1.098.555.118	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.402.613.997	0	1.402.613.997	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	35.654.737	0	35.654.737	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	16.250.000	0	16.250.000	0,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin	261.032.500	0	261.032.500	0,00
Total	192.598.593.229	0	192.598.593.229	0,00

Rincian atas saldo akun Pendapatan Badan Layanan Umum untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan TA 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.10
Rincian Saldo Pendapatan Badan Layanan Umum Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	71.623.005.343	0	71.623.005.343	0,00
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	0	0	0	0,00
Ditjen PB	92.579.845.639	0	92.579.845.639	0,00
Ditjen PSDKP	0	0	0	0,00
Ditjen PDSPKP	0	0	0	0,00
Ditjen PKRL	0	0	0	0,00
BPPSDMKP	29.371.711.247	0	29.371.711.247	0,00
BPPMHKP	0	0	0	0,00
Satker Konsolidasi	(975.969.000)	0	(975.969.000)	0,00
Total	192.598.593.229	0	192.598.593.229	0,00

Terdapat perbedaan Pendapatan Badan Layanan Umum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.11
Perbedaan Saldo PNBPN Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Pendapatan Sumber Daya Alam (LO)	192.598.593.229
Pendapatan Sumber Daya Alam (LRA)	182.656.387.734
Selisih	(9.942.205.495)

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Pendapatan Badan Layanan Umum merupakan/berasal dari:

Tabel D.12
Rincian Perbedaan Saldo PNBPN Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(601.123.140)
Piutang Lainnya	184.344.578
Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(4.967.000)
Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	166.243.450
Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	11.416.692.946
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	10.725.000
Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	(35.235.000)
Gedung dan Bangunan	27.203.967
Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	79.734.532
Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	13.637.334
Pendapatan Diterima di Muka BLU	(379.409.261)
Koreksi Lainnya	(1.407)
Pendapatan Lain-lain BLU	(5.705.950)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	5.705.950
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	40.328.496
Belanja Bahan	(103.194.000)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(830.775.000)
Belanja Jasa Lainnya	(42.000.000)
Jumlah	9.942.205.495

D.2 BEBAN

Beban
Rp6.629.592.600.166,00

Beban Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Rincian saldo pos akun Beban untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing disajikan sebagai berikut.

Tabel D.13
Rincian Beban
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Pegawai	1.912.227.733.739	1.800.393.474.514	111.834.259.225	6,21
Beban Persediaan	147.530.974.235	179.045.299.672	(31.514.325.437)	(17,60)
Beban Barang dan Jasa	2.009.908.942.375	1.931.232.862.440	78.676.079.935	4,07
Beban Pemeliharaan	341.035.450.066	359.522.125.975	(18.486.675.909)	(5,14)
Beban Perjalanan Dinas	835.505.791.460	875.495.745.766	(39.989.954.306)	(4,57)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	619.256.772.699	615.716.271.822	3.540.500.877	0,58
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	758.048.674.328	791.677.052.361	(33.628.378.033)	(4,25)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.078.261.264	9.786.927.758	(3.708.666.494)	(37,89)
Total	6.629.592.600.166	6.562.869.760.308	66.722.839.858	1,02

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.912.227.733.739,00

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.912.227.733.739,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp111.834.259.225,00 atau 6,21% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.800.393.474.514,00. Rincian saldo dari akun Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel D.14

Rincian Saldo Beban
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Gaji Pokok PNS	579.610.729.783	585.742.616.950	(6.131.887.167)	(1,05)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8.107.691	8.693.258	(585.567)	(6,74)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43.980.069.744	44.189.301.959	(209.232.215)	(0,47)
Beban Tunj. Anak PNS	13.628.985.411	13.681.478.309	(52.492.898)	(0,38)
Beban Tunj. Struktural PNS	6.080.494.480	7.396.834.640	(1.316.340.160)	(17,80)
Beban Tunj. Fungsional PNS	64.887.421.982	69.708.796.386	(4.821.374.404)	(6,92)
Beban Tunj. PPh PNS	6.436.422.563	2.281.034.615	4.155.387.948	182,17
Beban Tunj. Beras PNS	31.974.037.550	35.248.932.668	(3.274.895.118)	(9,29)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.450.000	0	6.450.000	0,00
Beban Uang Makan PNS	71.962.394.142	81.510.562.972	(9.548.168.830)	(11,71)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	88.450.000	96.025.000	(7.575.000)	(7,89)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1.782.375.000	2.151.210.000	(368.835.000)	(17,15)
Beban Tunjangan Umum PNS	9.383.761.335	10.008.833.717	(625.072.382)	(6,25)
Beban Tunjangan Profesi Guru	3.090.666.800	3.185.831.700	(95.164.900)	(2,99)
Beban Tunjangan Profesi Dosen	11.788.500.610	9.994.067.450	1.794.433.160	17,95
Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara	23.538.438	0	23.538.438	0,00
Beban Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara	52.502.580	0	52.502.580	0,00
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	79.800.000	0	79.800.000	0,00
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	236.250.000	245.003.100	(8.753.100)	(3,57)
Beban Gaji Pokok PPPK	72.953.347.772	26.086.545.952	46.866.801.820	179,66
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.480.699	630.068	850.631	135,01
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.578.928.710	1.701.097.341	2.877.831.369	169,17
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.278.604.624	468.098.998	810.505.626	173,15
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.562.311.720	4.246.630.000	5.315.681.720	125,17
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.336.531.720	1.692.020.880	2.644.510.840	156,29
Beban Tunjangan Lauk Pauk PPPK	56.176.000	3.182.000	52.994.000	1.665,43

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Uang Makan PPPK	11.981.213.631	5.311.364.100	6.669.849.531	125,58
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	419.950.124	40.937.306	379.012.818	925,84
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	1.950.000	2.250.000	(300.000)	(13,33)
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	87.650.000	32.325.000	55.325.000	171,15
Beban Tunjangan Umum PPPK	32.700.000	1.620.000	31.080.000	1.918,52
Beban Uang Lembur	12.600.750.043	17.930.535.250	(5.329.785.207)	(29,72)
Beban Uang Lembur PPPK	1.616.060.100	644.114.100	971.946.000	150,90
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	831.107.808.276	815.974.345.269	15.133.463.007	1,85
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	96.045.394.079	37.105.044.630	58.940.349.449	158,85
Beban Gaji dan Tunjangan	20.465.918.132	23.703.510.896	(3.237.592.764)	(13,66)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	0	0	0,00
Total	1.912.227.733.739	1.800.393.474.514	111.834.259.225	6,21

Berikut ini rincian saldo akun Beban Pegawai untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited*.

Tabel D.15
Rincian Saldo Beban Pegawai Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	108.447.080.403	98.897.052.221	9.550.028.182	9,66
Itjen	36.587.189.221	33.714.777.788	2.872.411.433	8,52
Ditjen PT	230.018.070.782	188.334.306.934	41.683.763.848	22,13
Ditjen PB	185.887.444.571	165.366.756.996	20.520.687.575	12,41
Ditjen PSDKP	201.208.774.103	169.397.972.815	31.810.801.288	18,78
Ditjen PDSPKP	65.321.485.101	54.814.675.243	10.506.809.858	19,17
Ditjen PKRL	112.197.428.463	98.524.358.181	13.673.070.282	13,88
BPPSDMKP	816.756.306.194	733.365.596.878	83.390.709.316	11,37
BPPMHKP	155.803.954.901	257.977.977.458	(102.174.022.557)	(39,61)
Total	1.912.227.733.739	1.800.393.474.514	111.834.259.225	6,21

Adapun peningkatan Beban Pegawai per akun yang cukup signifikan disebabkan hal-hal berikut ini.

Kenaikan belanja pegawai merupakan dampak dari penambahan jumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Beban Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara, Belanja Tunjangan Lain-lain Pejabat Negara, dan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara dikarenakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa dalam melaksanakan tugas Menteri Koordinator atau Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- b. Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,22%, dimana Beban Tunjangan PPh PNS sebesar 182,17 hal ini disebabkan adanya tarif TER harian PPh 21 adalah 0% untuk penghasilan hingga Rp450 ribu, dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta.
- c. Beban pegawai merupakan Beban Gaji dan Tunjangan yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan pegawai BLU. Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sejumlah Rp20.465.918.132,00.
- d. Beban Tunjangan Kemahalan PNS senilai Rp6.450.000 merupakan tunjangan staff PBJ yang ada di Provinsi Papua.
- e. Rincian Beban Pegawai pada BLU LPMUKP adalah sebagai berikut:
 - i. Remunerasi Pegawai Tetap
 - ii. Remunerasi Dewan Pengawas
 - iii. Remunerasi Pegawai Kontrak Pusat
 - iv. Remunerasi Pegawai Kontrak Daerah
 - v. THR Pegawai Tahun 2024
 - vi. Gaji Ke-13 Pegawai Tetap Tahun 2024

Terdapat perbedaan Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.16
Perbedaan Saldo Beban Pegawai Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian		Nilai
Beban Pegawai (LO) (a)		1.912.227.733.739
Belanja Pegawai (LRA) (b)		1.891.758.893.702
Saldo Akhir Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (c)	+	1.241.962.086
Saldo Awal Belanja Pegawai yang masih harus dibayar (d)	-	1.164.549.490
Jumlah (e)	(b) + (c) - (d)	1.891.836.306.298
Selisih (a-e)		20.391.427.441

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Pegawai merupakan/berasal dari:

Tabel D.17
Rincian Perbedaan Saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Belanja Pegawai pada Satker BLU	20.465.918.132
2. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
Piutang Lainnya	-46.664.972
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lainnya	30.881
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-27.856.600
Jumlah	20.391.427.441

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp147.530.974.235,00

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp147.530.974.235,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.514.325.437,00 atau 17,60% dibandingkan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp179.045.299.672,00.

Rincian saldo akun Beban Persediaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.18
Rincian Saldo Beban Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Persediaan konsumsi	116.373.326.800	108.464.804.019	7.908.522.781	7,29
Beban Persediaan amunisi	84.695.142	55.283.134	29.412.008	53,20
Beban Persediaan bahan baku	23.623.703.203	61.909.679.960	(38.285.976.757)	(61,84)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	359.900	(359.900)	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	7.449.249.090	8.615.172.659	(1.165.923.569)	(13,53)
Total	147.530.974.235	179.045.299.672	(31.514.325.437)	(17,60)

Berikut ini rincian saldo akun Beban Persediaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited*.

Tabel D.19
Rincian Saldo Beban Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	6.028.723.860	6.572.627.332	(543.903.472)	(8,28)
Itjen	273.243.522	188.867.667	84.375.855	44,67
Ditjen PT	8.219.548.806	41.703.876.247	(33.484.327.441)	(80,29)
Ditjen PB	93.743.724.753	82.586.510.180	11.157.214.573	13,51
Ditjen PSDKP	7.869.509.325	7.605.458.811	264.050.514	3,47
Ditjen PDSPKP	1.096.464.558	693.062.841	403.401.717	58,21
Ditjen PKRL	922.018.513	1.049.371.886	(127.353.373)	(12,14)
BPPSDMKP	18.339.993.447	18.638.491.150	(298.497.703)	(1,60)
BPPMHKP	11.037.747.451	20.007.033.558	(8.969.286.107)	(44,83)
Total	147.530.974.235	179.045.299.672	(31.514.325.437)	(17,60)

Terdapat penurunan saldo yang cukup signifikan pada BPPMHKP yaitu sebesar 44,81% atau sebesar Rp8.965.735.030,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh pengurangan penggunaan bahan laboratorium terkait pengujian Karantina Ikan yg sudah pindah ke BKI.

Penurunan saldo yang cukup signifikan juga terdapat pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar 80,29% atau sebesar Rp33.484.327.441,00 yang disebabkan karena kebutuhan barang

persediaan yang berkurang dan sudah tidak ada pekerjaan untuk Kampung Nelayan Modern (KALAMO).

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp2.009.908.942.375,00

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.009.908.942.375,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp78.676.079.935,00 atau 4,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp1.931.232.862.440,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.20
Rincian Saldo Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Keperluan Perkantoran	294.434.250.391	352.810.246.493	(58.375.996.102)	(16,55)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	34.418.816.539	30.594.864.259	3.823.952.280	12,50
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.174.373.423	10.296.124.821	(2.121.751.398)	(20,61)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.397.985.537	1.531.987.914	(134.002.377)	(8,75)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25.034.089.472	40.073.983.394	(15.039.893.922)	(37,53)
Beban Barang Operasional Lainnya	51.604.078.732	50.311.274.252	1.292.804.480	2,57
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu	0	12.763.196	(12.763.196)	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	0	752.743.861	(752.743.861)	(100,00)
Beban Bahan	551.980.744.223	575.427.429.520	(23.446.685.297)	(4,07)
Beban Honor Output Kegiatan	66.462.794.045	88.558.519.620	(22.095.725.575)	(24,95)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	133.168.385.500	127.576.338.268	5.592.047.232	4,38
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	45.000.000	18.750.000	26.250.000	140,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	293.857.822	(293.857.822)	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.637.259.296	3.320.660.069	(683.400.773)	(20,58)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	323.699.735	1.575.250.178	(1.251.550.443)	(79,45)

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	52.992.000	196.414.000	(143.422.000)	(73,02)
Beban Langganan Listrik	119.211.114.016	112.355.385.481	6.855.728.535	6,10
Beban Langganan Telepon	5.779.354.935	6.089.014.364	(309.659.429)	(5,09)
Beban Langganan Air	7.083.962.070	6.425.855.284	658.106.786	10,24
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48.275.719.978	37.854.213.531	10.421.506.447	27,53
Beban Jasa Pos dan Giro	169.000	3.103.000	(2.934.000)	(94,55)
Beban Jasa Konsultan	40.748.700.847	37.299.143.975	3.449.556.872	9,25
Beban Sewa	140.628.312.382	115.869.399.727	24.758.912.655	21,37
Beban Jasa Profesi	31.861.033.879	34.249.395.601	(2.388.361.722)	(6,97)
Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian	0	0	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	419.682.326.732	284.225.714.239	135.456.612.493	47,66
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	451.816.013	(451.816.013)	(100,00)
Beban Barang	12.340.321.281	6.226.952.650	6.113.368.631	98,18
Beban Jasa	11.768.899.669	4.182.653.529	7.586.246.140	181,37
Beban Ketersediaan Layanan BLU	44.825.040	0	44.825.040	0,00
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.469.555.202	2.084.769.646	384.785.556	18,46
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2.688.800	(2.688.800)	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	12.460.000	0	12.460.000	0,00
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	2.749.707	0	2.749.707	0,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	264.968.744	525.440.760	(260.472.016)	(49,57)
Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	36.108.173	(36.108.173)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	0	0	0	0,00
Total	2.009.908.942.375	1.931.232.862.440	78.676.079.935	4,07

Rincian saldo akun Beban Barang dan Jasa untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.21
Rincian Beban Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	237.885.424.589	203.240.622.295	34.644.802.294	17,05
Itjen	7.259.223.722	6.454.106.790	805.116.932	12,47
Ditjen PT	294.028.620.691	274.356.607.758	19.672.012.933	7,17
Ditjen PB	189.602.200.306	210.339.309.069	(20.737.108.763)	(9,86)
Ditjen PSDKP	524.890.419.762	515.848.577.913	9.041.841.849	1,75
Ditjen PDSPKP	118.491.698.377	110.428.249.056	8.063.449.321	7,30
Ditjen PKRL	126.468.152.564	92.151.728.840	34.316.423.724	37,24
BPPSDMKP	424.840.520.110	406.347.291.214	18.493.228.896	4,55
BPPMHKP	87.418.651.254	112.066.369.505	(24.647.718.251)	(21,99)
Satker Konsolidasi	(975.969.000)	0	(975.969.000)	0,00
Total	2.009.908.942.375	1.931.232.862.440	78.676.079.935	4,07

Berikut ini pengungkapan terkait kenaikan saldo yang terdapat pada Beban Beban Barang dan Jasa paling signifikan.

1. Sekretariat Jenderal

Kenaikan signifikan pada Beban Barang dan Jasa pada Setjen disebabkan berikut:

- a. Kenaikan belanja pada Biro Umum dan PBJ karena adanya pekerjaan Renovasi Ruang kerja Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, dan Biro Keuangan yang menyebabkan adanya kenaikan belanja listrik, belanja bahan;
- b. Kenaikan signifikan ada pada belanja jasa disebabkan karena adanya pengesahan belanja dari hibah *The Project for Enhancement of Satellite Utilization for Monitoring Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Activity* sebesar Rp7.927.047.548,00 berupa integrasi data satelit *command center*;
- c. Kenaikan belanja sewa juga disebabkan adanya kenaikan jumlah sewa mobil milik Wakil Menteri dan jajaran. Adapun besaran belanja sewa pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp15.423.887.865,00;

- d. Belanja selisih kurs terealisasi merupakan belanja atas selisih kurs yang atas hibah Japan International Cooperation Agency pada surat Nomor 366.12/KPA/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Permohonan Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Kas Hibah Pemerintah Jepang (JICA) dengan nomor Register 2FMFRX6A pada Satker Biro Umum dan PBJ, serta surat Nomor 366.13/KPA/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Permohonan Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi atas Kas Hibah Pemerintah Jepang (JICA) dengan nomor Register 2CK4LTSA pada Satker Biro Umum dan PBJ;
- e. Realisasi Belanja Barang (525112) per 31 Desember 2024 merupakan realisasi belanja konsumsi dan snack rapat, biaya keperluan perkantoran sehari-hari, biaya jamuan tamu, biaya cetak dokumen atau spanduk kegiatan selama Tahun 2024. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.366.579.150,00 atau mencapai 73,08% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.869.865.000,00.
- f. Realisasi Belanja Jasa (525113) per 31 Desember 2024 merupakan realisasi dari belanja jasa tenaga ahli implementasi pengembangan SDM, biaya langganan pengiriman dokumen, jasa kredit scoring, jasa konsultan pelaporan keuangan, biaya pelatihan pegawai, dan jasa konsultan pendampingan hukum. Realisasi belanja jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.508.628.568,00 atau mencapai 74,06% dari pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp3.387.185.000,00.
- g. Realisasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119) per 31 Desember 2024 merupakan realisasi dari biaya penggunaan bahan bakar kendaraan operasional sewa roda 4, BPJS pegawai BLU LPMUKP, biaya administrasi perbankan dan biaya lisensi video conference. Realisasi Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya per 31 Desember

2024 sebesar Rp1.582.155.202,00 atau mencapai 76,05% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp2.080.460.000,00.

2. DJPKRL

Kenaikan signifikan terdapat pada beban Jasa Lainnya yang termasuk di dalamnya adalah:

- Belanja Jasa Lainnya Pemeliharaan Aplikasi SAJI;
- Belanja Jasa Lainnya Pemeliharaan Aplikasi SEAPARK;
- Penyediaan Jasa Lainnya menggunakan *Event Organizer* sebagai penyelenggara acara, diantaranya *event* Bulan Cinta Laut dan Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan (SILATNAS);
- Penyedia Jasa pembuatan video-video untuk kehumasan;
- Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan petugas keamanan, enumerator kelautan dan perikanan, petugas layanan informasi, operator speedboat, pramubakti, dan lain-lain.

Terdapat perbedaan Beban Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.22
Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
A. Beban Barang dan Jasa (LO)	2.009.908.942.375
B. Belanja Barang Jasa (LRA)	1.911.320.372.158
<i>Realisasi Belanja Barang Operasional (5211xx)</i>	<i>416.064.549.060</i>
<i>Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212xx)</i>	<i>778.702.515.599</i>
<i>Realisasi Belanja Jasa (5221xx)</i>	<i>689.698.165.896</i>
<i>Realisasi Belanja Barang jasa-BLU (5251xx)</i>	<i>26.855.141.603</i>
A - B	98.588.570.217

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Barang dan Jasa merupakan/berasal dari:

Tabel D.23
Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pengesahan hibah Langsung Brg/Jasa	106.902.059.500
2. Pencatatan Akrual Pada Neraca	
Menggunakan Akun 525	(15.209.707)
Piutang Lainnya	(4.884.843.999)
Belanja yang Masih Harus Dibayar	950.700.363
Koreksi Aset Tetap Non Reval	(441.024.008)
Eliminasi Resiprokal	(975.969.000)
Pendapatan Perolehan Lainnya	(2.381.464.221)
Beban Ekstrakomptabel Alsin	308.624.700
3. Koreksi Lain - Lain	
Lain-lain	(874.303.411)
Jumlah	98.588.570.217

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp341.035.450.066,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp341.035.450.066,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.633.549.838,00 atau 5,14% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp359.522.125.975,00.

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.24
Rincian Saldo Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.199.441.937	147.943.593.858	(21.744.151.921)	(14,70)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.999.916.278	1.699.195.295	300.720.983	17,70
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.356.565.821	4.194.164.916	2.162.400.905	51,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.731.573.499	160.569.907.955	5.161.665.544	3,21

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.718.315.732	3.954.637.698	(236.321.966)	(5,98)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.959.103.279	4.781.363.932	(822.260.653)	(17,20)
Beban Pemeliharaan Irigasi	2.302.696.564	2.040.196.462	262.500.102	12,87
Beban Pemeliharaan Jaringan	7.194.944.142	9.655.977.523	(2.461.033.381)	(25,49)
Beban Pemeliharaan Lainnya	547.497.230	1.496.243.350	(948.746.120)	(63,41)
Beban Pemeliharaan	3.049.576.134	164.464.800	2.885.111.334	1.754,24
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.890.073.520	3.375.925.817	(485.852.297)	(14,39)
Beban Persediaan suku cadang	17.037.225.480	19.330.338.915	(2.293.113.435)	(11,86)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	48.520.450	316.115.454	(267.595.004)	(84,65)
Total	341.035.450.066	359.522.125.975	(18.486.675.909)	(5,14)

Rincian saldo akun Beban Pemeliharaan untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.25
Rincian Beban Pemeliharaan Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	66.251.385.784	52.799.019.232	13.452.366.552	25,48
Itjen	1.168.104.336	944.169.983	223.934.353	23,72
Ditjen PT	43.793.249.955	48.201.920.544	(4.408.670.589)	(9,15)
Ditjen PB	39.531.632.420	35.743.047.066	3.788.585.354	10,60
Ditjen PSDKP	77.668.126.702	73.418.304.947	4.249.821.755	5,79
Ditjen PDSPKP	6.615.556.600	9.419.365.666	(2.803.809.066)	(29,77)
Ditjen PKRL	8.110.707.732	10.117.997.525	(2.007.289.793)	(19,84)
BPPSDMKP	72.848.253.397	98.972.343.624	(26.124.090.227)	(26,40)
BPPMHKP	25.048.433.140	29.905.957.388	(4.857.524.248)	(16,24)
Total	341.035.450.066	359.522.125.975	(18.486.675.909)	(5,14)

Beban Pemeliharaan pada Unit Eselon I yang mengalami penurunan signifikan ada pada Eselon I DJPDSPKP dengan mutasi seperti berikut:

- a. Transfer Keluar : Rp245.541.739.474,00
- b. Hibah Keluar : Rp1.400.250.000,00
- c. Koreksi Pencatatan : Rp1.066.473.945,00

- d. Reklas ke Persediaan : Rp355.532.693,00
- e. Penghentian Aset : Rp40.118.838.196,00
- f. Perubahan PI ke BMN : Rp7.502.886.000,00
- g. Barang Mau Dihapuskan : Rp37.322.942.939,00

Serta pada Eselon I BPPSDMKP dengan mutasi seperti berikut:

- a. Transfer Keluar : Rp25.848.923.859,00
- b. Hibah Keluar : Rp1.845.694.854,00
- c. Reklasifikasi Keluar : Rp27.125.455.132,00
- d. Koreksi Pencatatan : Rp20.940.366.473,00
- e. Reklas ke Persediaan : Rp5.500.000,00
- f. Penghentian Aset : Rp48.506.258.748,00
- g. Perubahan PI ke BMN : Rp474.547.708.713,00
- h. Barang Mau Dihapuskan : Rp46.948.790.095,00

Terdapat perbedaan Beban Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.26
Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
A. Beban Barang dan Jasa (LO)	341.035.450.066
B. Belanja Barang Jasa (LRA)	355.011.705.003
A - B	(13.976.254.937)

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Pemeliharaan merupakan/berasal dari:

Tabel D.27
Rincian Perbedaan Saldo Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Masih tercatat sebagai saldo Persediaan	9.306.053.555
2. Dibukukan sebagai non beban pemeliharaan	928.706.458
3. Transfer Keluar	9.091.500
4. RPATA yang belum BAST tgl 31 Des 2024	3.047.100.000
5. Dibukukan sebagai Aset Tetap/Aset Lainnya	7.073.289.376
6. Menggunakan akun pemeliharaan BLU	(3.049.576.134)

Uraian	Nilai (Rp)
7. Pembelian dengan menggunakan akun non 523XXX	(2.636.371.162)
8. Koreksi Lain - Lain	(702.038.656)
Jumlah	13.976.254.937

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas
Rp835.505.791.460,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp835.505.791.460,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp39.989.954.306,00 atau 4,57% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp875.495.745.766,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.28
Rincian Saldo Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Perjalanan Biasa	545.922.101.257	550.241.865.529	(4.319.764.272)	(0,79)
Beban Perjalanan Tetap	186.054.148	189.404.334	(3.350.186)	(1,77)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.348.689.680	27.883.426.893	(3.534.737.213)	(12,68)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.379.313.962	66.321.706.582	(2.942.392.620)	(4,44)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	157.940.576.925	176.477.357.721	(18.536.780.796)	(10,50)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	29.507.144.110	41.928.543.355	(12.421.399.245)	(29,63)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	8.405.241.650	4.664.061.032	3.741.180.618	80,21
Beban Perjalanan	5.816.669.728	7.789.380.320	(1.972.710.592)	(25,33)
Total	835.505.791.460	875.495.745.766	(39.989.954.306)	(4,57)

Berikut ini Rincian saldo akun Beban Perjalanan Dinas untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited*.

Tabel D.29
Rincian Beban Perjalanan Dinas Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	97.154.259.165	91.040.893.847	6.113.365.318	6,71
Itjen	36.457.547.036	31.857.554.043	4.599.992.993	14,44
Ditjen PT	162.445.383.793	183.635.515.571	(21.190.131.778)	(11,54)
Ditjen PB	91.348.214.338	131.421.393.071	(40.073.178.733)	(30,49)
Ditjen PSDKP	117.372.116.676	96.123.450.167	21.248.666.509	22,11
Ditjen PDSPKP	65.371.746.073	71.875.056.880	(6.503.310.807)	(9,05)
Ditjen PKRL	150.661.582.859	129.331.972.654	21.329.610.205	16,49
BPPSDMKP	74.901.825.009	79.685.500.339	(4.783.675.330)	(6,00)
BPPMHKP	39.793.116.511	60.524.409.194	(20.731.292.683)	(34,25)
Total	835.505.791.460	875.495.745.766	(39.989.954.306)	(4,57)

Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan 5 (lima) Unit Eselon I disebabkan karena pada bulan November 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali terdampak kebijakan penghematan belanja sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Berdasarkan surat ini, masing-masing Unit melakukan revisi pengajuan penambahan blokir di masing-masing Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Terdapat perbedaan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.30
Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024
pada LRA dan LO

Uraian	Nilai
Beban Perjalanan Dinas (LO) (a)	835.505.791.460
Belanja Perjalanan Dinas (LRA) (b)	836.849.580.618
Selisih (a-b)	(1.343.789.158)

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Perjalanan Dinas merupakan/berasal dari:

Tabel D.31
Rincian Perbedaan Saldo Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Pencatatan Akrua	
Piutang Lainnya	(35.281.530)
Belanja barang yang masih harus dibayar	(320.156.846)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(998.905.568)
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	9.879.500
2. Koreksi Lain - Lain	
Lain-lain	675.286
Jumlah	(1.343.789.158)

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
 Diserahkan Kepada Masyarakat
 Rp619.256.772.699,00

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp619.256.772.699,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.540.500.877,00 atau 0,58% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp615.716.271.822,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.32
Rincian Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	0	0	0	0,00
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0,00
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0,00
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	2.712.816.000	9.567.184.000	(6.854.368.000)	(71,64)

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	0	0	0	0,00
Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0	0,00
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	87.202.864.707	100.314.580.664	(13.111.715.957)	(13,07)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	59.919.253.460	56.171.259.683	3.747.993.777	6,67
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	295.934.251.385	270.946.742.124	24.987.509.261	9,22
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk	9.762.894.025	15.146.806.263	(5.383.912.238)	(35,54)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	6.914.436.900	49.950.000	6.864.486.900	13.742,72
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada	4.787.047.755	6.347.621.607	(1.560.573.852)	(24,59)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	152.023.208.467	157.172.127.481	(5.148.919.014)	(3,28)
Total	619.256.772.699	615.716.271.822	3.540.500.877	0,58

Rincian saldo akun Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.33
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	0	0	0	0,00
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	121.974.977.373	80.643.296.112	41.331.681.261	51,25
Ditjen PB	334.615.617.843	379.368.872.466	(44.753.254.623)	(11,80)
Ditjen PSDKP	0	0	0	0,00
Ditjen PDSPKP	91.107.870.190	101.149.246.059	(10.041.375.869)	(9,93)
Ditjen PKRL	70.985.835.693	53.300.973.230	17.684.862.463	33,18
BPPSDMKP	572.471.600	1.253.883.955	(681.412.355)	(54,34)
BPPMHKP	0	0	0	0,00
Total	619.256.772.699	615.716.271.822	3.540.500.877	0,58

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat paling besar adalah sebagai berikut:

Tabel D.34
Transaksi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Nama Eselon I	Nama Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
Ditjen PT	UAPKPB DIREKTORAT KAPAL DAN ALAT PENANGKAP IKAN	Kapal Penangkap Ikan < 5GT MP.03 dengan Mesin Yamaha 15 PK PT SBM	106	7.367.000.000,00
Ditjen PB	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Bantuan Bioflok	37	7.128.400.000,00
Ditjen PB	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	BINS >50g	597.705	3.227.607.000,00
Ditjen PB	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	BINS Konsumsi	206.639.470	4.714.065.140,00
Ditjen PB	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Vaname Konsumsi*	57.124	3.157.640.376,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Jakarta Selatan. DKI Jakarta Ta. 2024 (003)	1	2.145.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kabupaten Subang. Jawa Barat Ta. 2024 (003)	1	2.170.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kota Baubau. Sulawesi Tenggara Ta. 2024 (003)	1	2.290.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kabupaten Garut. Jawa Barat Ta. 2024 (003)	1	2.180.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kabupaten Pangandaran. Jawa Barat Ta. 2024 (003)	1	2.180.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kabupaten Aceh Jaya. Provinsi Aceh Ta. 2024 (003)	1	2.330.000.000,00
Ditjen PDSPKP	DIREKTORAT LOGISTIK	Gudang Beku Portabel di Kabupaten Karangasem. Bali Ta. 2024 (003)	1	2.276.000.000,00
Ditjen PKRL	PKPB. Dit Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kab. Sumbawa / 2024	1	2.846.580.900,00
Ditjen PKRL	PKPB. Dit Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Pembangunan dermaga Apung/Tambat Labuh di Kab. Banggai Laut / 2024	1	2.224.658.000,00
Ditjen PKRL	PKPB. Dit Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kab. Kep. Aru / 2024	1	2.707.408.879,00

Terdapat perbedaan Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.35
Perbedaan Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per
31 Desember 2024 pada LRA dan LO

Uraian		Nilai
BEBAN BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (LO)		619.256.772.699
BELANJA BARANG/JASA yang akan diserahkan kepada masyarakat (LRA)		604.186.688.160
PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepada masyarakat 2023	+	31.264.309.510
Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat 2024	+	-
PERSEDIAAN barang/jasa untuk diserahkan kepada masyarakat 2024	-	87.754.621.847
Biaya yang Masih Harus Dibayar untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat 2023	-	-
Jumlah		547.696.375.823
koreksi penyesuaian	+	-
Selisih		71.560.396.876

Selisih antara saldo basis kas dan saldo basis akrual Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan/berasal dari:

Tabel D.36
Rincian Perbedaan Saldo Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 pada LRA dan LO

Uraian	Nilai (Rp)
1. Transfer Masuk	63.170.398.225
2. Perolehan Lainnya	121.344.215.229
3. Reklasifikasi Masuk	76.256.217.639
4. Reklasifikasi Dari Aset	77.000.000
5. Persediaan Dalam Proses Masuk	334.908.226.583
6. Koreksi Nilai Tambah	3.943.200.000
7. Koreksi Kuantitas Tambah	36.911.546
8. Hasil Opname Fisik	1.578.292.000
9. Transfer Keluar	-63.170.398.225
10. Rusak	-142.500.000
11. Keluar Lainnya	-68.616.946.968
12. Reklasifikasi Keluar	-73.720.887.624
13. Reklasifikasi ke Aset	-3.651.800.000
14. Persediaan Dalam Proses Keluar	-
	290.527.340.479

Uraian	Nilai (Rp)
15. Koreksi Nilai Kurang	-46.282.252.338
16. Koreksi Kuantitas Kurang	-2.481.294.000
17. Pencatatan Akrual Pada Neraca	0
Dibukukan sebagai beban Bahan Baku	19.521.938.950
Dibukukan sebagai beban Persediaan Lainnya	-5.000.000
Reklas antar beban 526	90.195.330
	0
3. Koreksi Lain - Lain	0
Lain-lain	-767.778.992
Jumlah	71.560.396.876

D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp758.048.674.328,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp758.048.674.328,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.628.378.033,00 atau 4,25% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp791.677.052.361,00.

Adanya penurunan pada beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah karena adanya pengurangan jumlah aset yang dihapuskan karena kondisinya sudah mengalami rusak berat maupun dengan adanya proses likuidasi keluar. Pada Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap terdapat transaksi keluar seperti berikut:

- Penghapusan sebesar Rp510.394.242,00;
- Transfer Keluar Rp12.794.082.365,00;
- Hibah keluar Rp8.709.841.165,00;
- Reklas keluar Rp364.429.653.800,00;
- Koreksi pencatatan Rp25.420.273.783,00;
- Likuidasi keluar Rp96.162.235.164,00;
- Likuidasi keluar henti guna Rp10.745.839.675;
- BMN dihentikan Rp156.846.500,00;
- Penghentian aset dari penggunaan Rp130.472.310.107,00;
- Pencatatan barang yang mau dihapuskan Rp135.004.623.870,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.37
Rincian Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	359.841.045.969	371.864.224.705	(12.023.178.736)	(3,23)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	134.250.036.063	136.364.435.164	(2.114.399.101)	(1,55)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	135.514.188.403	138.148.861.310	(2.634.672.907)	(1,91)
Beban Penyusutan Irigasi	65.832.935.164	91.325.288.245	(25.492.353.081)	(27,91)
Beban Penyusutan Jaringan	11.161.386.263	11.373.563.712	(212.177.449)	(1,87)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	279.477.660	494.414.843	(214.937.183)	(43,47)
Beban Penyusutan Properti Investasi	11.789.598.708	9.900.440.526	1.889.158.182	19,08
Beban Amortisasi Hak Cipta	178.571	357.142	(178.571)	(50,00)
Beban Amortisasi Paten	413.893.537	720.776.240	(306.882.703)	(42,58)
Beban Amortisasi Software	24.082.410.977	15.912.443.763	8.169.967.214	51,34
Beban Amortisasi Lisensi	149.791.996	334.301.355	(184.509.359)	(55,19)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	1.120.309.671	870.798.523	249.511.148	28,65
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	96.807.023	0	96.807.023	0,00
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.267.632.815	6.267.839.793	(206.978)	(0,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	7.248.981.508	8.099.307.040	(850.325.532)	(10,50)
Total	758.048.674.328	791.677.052.361	(33.628.378.033)	(4,25)

Rincian saldo akun Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	74.722.295.123	65.603.304.126	9.118.990.997	13,90
Itjen	2.290.101.538	2.067.982.812	222.118.726	10,74
Ditjen PT	230.972.040.573	263.434.360.579	(32.462.320.006)	(12,32)
Ditjen PB	109.487.602.990	110.688.485.039	(1.200.882.049)	(1,08)
Ditjen PSDKP	175.616.060.748	158.527.770.268	17.088.290.480	10,78
Ditjen PDSPKP	10.993.123.836	15.165.476.302	(4.172.352.466)	(27,51)
Ditjen PKRL	21.068.599.317	19.577.237.886	1.491.361.431	7,62
BPPSDMKP	102.828.078.065	114.555.144.174	(11.727.066.109)	(10,24)
BPPMHKP	30.070.772.138	42.057.291.175	(11.986.519.037)	(28,50)
Total	758.048.674.328	791.677.052.361	(33.628.378.033)	(4,25)

D.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
Rp6.078.261.264,00*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah nilai setelah perhitungan tarif penyisihan dari piutang yang diproyeksikan tidak akan tertagih pada periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.078.261.264,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.708.666.494,00 atau 37,89% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp9.786.927.758,00. -Kemudian, rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.39
Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Penyisihan Piutang PNB	(1.131.981.556)	(26.508.583)	(1.105.472.973)	4.170,25
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	6.416.546.187	1.840.619.964	4.575.926.223	248,61
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	(161.615)	0	(161.615)	0,00
Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	59.000	83.835	(24.835)	(29,62)

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia	831.217	0	831.217	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU	0	7.949.856.491	(7.949.856.491)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	53.625	11.250	42.375	376,67
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional	98.901	34.526.615	(34.427.714)	(99,71)
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian	803.509.151	0	803.509.151	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	2.102.634	205.950	1.896.684	920,94
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	(12.796.280)	(11.867.764)	(928.516)	7,82
Total	6.078.261.264	9.786.927.758	(3.708.666.494)	(37,89)

Rincian saldo akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.40
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	9.066.893.262	7.986.288.676	1.080.604.586	13,53
Itjen	0	119.391	(119.391)	(100,00)
Ditjen PT	143.265.849	(41.769.613)	185.035.462	(442,99)
Ditjen PB	24.302.442	396.441.185	(372.138.743)	(93,87)
Ditjen PSDKP	2.371.939.104	21.368.124	2.350.570.980	11.000,36
Ditjen PDSPKP	5.917.906	(1.351.817)	7.269.723	(537,77)
Ditjen PKRL	29.810.528	(13.548.802)	43.359.330	(320,02)
BPPSDMKP	2.691.942.632	1.439.114.710	1.252.827.922	87,06
BPPMHKP	2.168.035	265.904	1.902.131	715,35
Satker Konsolidasi	(8.257.978.494)	0	(8.257.978.494)	0,00
Total	6.078.261.264	9.786.927.758	(3.708.666.494)	(37,89)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terbesar ada pada Satker Konsolidasi yang merupakan Jurnal eliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan TA 2024 sebesar Rp8.257.978.494,00 serta pada BPPSDMKP terbesar pada satuan kerja Pusat Riset Perikanan sebesar

Rp2.692.388.393,00 atas penyisihan piutang kepada PT. Tata Guna Pratama yang merupakan rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 nomor 13c/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai serta Hasil Pemeriksaan BPK atas LK tahun 2019 berupa kekurangan Volume atas pekerjaan konstruksi terintegrasi rancangan dan Bangunan (Design and Build) pembangunan akuarium PIAMARI di Pangandaran oleh PT Pangkho.

D.3 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari saldo pos akun Pendapatan dikurangi Beban yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar (Rp4.421.615.811.477) dan 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.882.144.242.811).

D.4 SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Defisit Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp114.278.615.674,00

Akun Pendapatan/Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah akun yang termasuk ke dalam pos Laporan Operasional untuk pos Surplus/Defisit Non Operasional. Defisit dari saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp114.278.615.674,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.356.143.263,00 atau 2,02% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp116.634.758.937,00.

Kemudian, rincian saldo akun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.41
Rincian Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	(Kenaikan)	%
			Penurunan	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.126.547.042	15.014.865.792	(7.888.318.750)	(52,54)
Dikurangi:				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	121.405.162.716	131.649.624.729	(10.244.462.013)	(7,78)
Total	(114.278.615.674)	(116.634.758.937)	2.356.143.263	(2,02)

D.4.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.126.547.042,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.888.318.750,00 atau 52,54% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp15.014.865.792,00. Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.42
Rincian Saldo Beban Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	101.476.436	48.641.800	52.834.636	108,62
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.861.872.613	14.358.036.555	(7.496.163.942)	(52,21)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	163.197.993	608.187.437	(444.989.444)	(73,17)
Total	7.126.547.042	15.014.865.792	(7.888.318.750)	(52,54)

Rincian saldo akun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk masing-masing Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.43
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	180.468.715	346.738.787	(166.270.072)	(47,95)
Itjen	0	322.567.454	(322.567.454)	(100,00)
Ditjen PT	2.212.203.768	856.432.701	1.355.771.067	158,30
Ditjen PB	2.080.792.147	1.594.769.900	486.022.247	30,48
Ditjen PSDKP	312.631.038	2.491.760.194	(2.179.129.156)	(87,45)
Ditjen PDSPKP	691.600.248	6.297.529.088	(5.605.928.840)	(89,02)
Ditjen PKRL	427.360.838	1.342.599.995	(915.239.157)	(68,17)
BPPSDMKP	901.929.734	1.114.552.360	(212.622.626)	(19,08)
BPPMHKP	319.560.554	647.915.313	(328.354.759)	(50,68)
Total	7.126.547.042	15.014.865.792	(7.888.318.750)	(52,54)

Penurunan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terdapat pada Ditjen PSDKP dan Ditjen PDSPKP dikarenakan adanya penurunan pendapatan atas lelang pelepasan Aset pada Eselon I tersebut.

D.4.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp121.405.162.716,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.244.462.013,00 atau 7,78% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp131.649.624.729,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan transaksi-transaksi Kerugian Pelepasan Aset yang disajikan lebih detail ke dalam Unit Eselon I lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.44
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	7.171.911.314	424.297.216	6.747.614.098	1.590,30
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	19.896.308.261	16.856.993.498	3.039.314.763	18,03
Ditjen PB	85.391.101.888	87.931.385.339	(2.540.283.451)	(2,89)
Ditjen PSDKP	1.501.160.450	8.146.350.015	(6.645.189.565)	(81,57)

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Ditjen PDSPKP	108.111.246	7.264.095.600	(7.155.984.354)	(98,51)
Ditjen PKRL	2.925.514.455	8.091.215.444	(5.165.700.989)	(63,84)
BPPSDMKP	3.713.031.978	1.696.370.095	2.016.661.883	118,88
BPPMHKP	698.023.124	1.238.917.522	(540.894.398)	(43,66)
Total	121.405.162.716	131.649.624.729	(10.244.462.013)	(7,78)

Penurunan Beban Pelepasan Aset Non Lancar paling signifikan terjadi pada Ditjen Perikanan PSDKP dan Ditjen PDSPKP dikarenakan adanya penurunan jumlah asset yang dihapuskan dan dilelang ke KPKNL.

D.5 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp185.680.801.054,00

Surplus/Defisit dari saldo akun Pendapatan Non Operasional Lainnya dikurangi Beban Non Operasional Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing disajikan sebagai berikut.

Tabel D.45
Rincian Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	250.932.742.618	184.484.309.793	66.448.432.825	36,02
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	65.251.941.564	71.820.053.464	(6.568.111.900)	(9,15)
Total	185.680.801.054	112.664.256.329	73.016.544.725	64,81

D.5.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp250.932.742.618,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp66.448.432.825,00 atau 36,02% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp184.484.309.793,00.

Kemudian, rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.46
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran	0	0	0	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	594.686.184	325.382.691	269.303.493	82,77
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	1.000.000	13.500.000	(12.500.000)	(92,59)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	901.500.265	862.584.291	38.915.974	4,51
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	5.908.362.953	3.680.582.534	2.227.780.419	60,53
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	104.020.300	192.386.348	(88.366.048)	(45,93)
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran	0	0	0	0,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	111.526.035	114.963.183	(3.437.148)	(2,99)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	111.620.770	68.213.648	43.407.122	63,63
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	239.012.099.894	143.546.649.927	95.465.449.967	66,50
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	4.187.926.217	35.680.047.171	(31.492.120.954)	(88,26)
Total	250.932.742.618	184.484.309.793	66.448.432.825	36,02

Rincian saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.47
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	8.416.966.124	319.346.360	8.097.619.764	2.535,69
Itjen	0	185.000	(185.000)	(100,00)
Ditjen PT	103.185.244.615	27.354.584.382	75.830.660.233	277,21
Ditjen PB	133.526.391.364	111.600.555.696	21.925.835.668	19,65
Ditjen PSDKP	583.621.038	46.966.556	536.654.482	1.142,63
Ditjen PDSPKP	429.222.418	329.455.479	99.766.939	30,28
Ditjen PKRL	1.249.356.722	3.501.928.048	(2.252.571.326)	(64,32)
BPPSDMKP	2.775.623.230	40.661.644.785	(37.886.021.555)	(93,17)
BPPMHKP	766.317.107	669.643.487	96.673.620	14,44
Total	250.932.742.618	184.484.309.793	66.448.432.825	36,02

Kenaikan paling signifikan terjadi pada Ditjen PSDKP berupa pencatatan asset berupa penyerahan barang rampasan negara 5 unit kapal perikanan dari Kejaksaan Agung sesuai BAST Nomor B-3/K.4/KPA.5/03/2024 dan Nomor 90/SJ/PL.450/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan hasil dari koreksi pencatatan.

D.5.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.251.941.564,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.568.111.900,00 atau 9,15% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp71.820.053.464,00.

Kemudian, rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan lebih detail ke dalam akun-akun lebih rinci yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel D.48
Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Beban Selisih Kurs Terealisasi	4.354.241.000	7.623.000.000	(3.268.759.000)	(42,88)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	46.462.251.872	37.424.550.631	9.037.701.241	24,15
Beban Persediaan Rusak/Usang	833.717.518	708.344.566	125.372.952	17,70
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	13.601.731.174	26.064.158.267	(12.462.427.093)	(47,81)
Total	65.251.941.564	71.820.053.464	(6.568.111.900)	(9,15)

Rincian saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2024 *Audited* disajikan sebagai berikut.

Tabel D.49
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	18.002.355.357	33.673.720.262	(15.671.364.905)	(46,54)
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	42.784.860.488	10.346.600	42.774.513.888	413.416,14
Ditjen PB	3.767.523.284	2.354.538.149	1.412.985.135	60,01
Ditjen PSDKP	34.820.500	0	34.820.500	0,00
Ditjen PDSPKP	265.994.701	43.474.584	222.520.117	511,84
Ditjen PKRL	232.986.000	0	232.986.000	0,00
BPPSDMKP	13.766.900	35.661.155.585	(35.647.388.685)	(99,96)
BPPMHKP	149.634.334	76.818.284	72.816.050	94,79
Total	65.251.941.564	71.820.053.464	(6.568.111.900)	(9,15)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami kenaikan paling signifikan ada pada Ditjen Perikanan Tangkap Rp42.784.860.488,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya koreksi nilai persediaan pada SKPT Moa sebesar Rp42.787.497.856,00 yang merupakan Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap Nomor. R.424/ITJ.2/HP.470/XI/2024 tanggal 5 November 2024 dan Nota Dinas Nomor. 276/ITJ.2/HP.470/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terbesar ada pada Ditjen PKRL merupakan transaksi sebagai berikut:

- a. Transaksi Koreksi Kuantitas Kurang Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada PKPB Direktorat P4K berupa Pengadaan sarana usaha ekonomi produktif di Kabupaten Rembang / 2024, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp85.800.000, hal tersebut dilakukan karena terdapat kesalahan akuntansi pencatatan pada Modul Komitmen, yaitu *double input*, sehingga dilakukan koreksi pencatatan (Koreksi Kuantitas Kurang) sebesar Rp85.000.000;
- b. Koreksi Penyesuaian Nilai Persediaan Barang Konsumsi pada Satker Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sebesar Rp35.607.312.600,00, hal tersebut dikarenakan kesalahan pencatatan pada Modul Komitmen, dengan penjelasan rincian sebagai berikut:
 - Adanya kesalahan dalam perekaman dari BAST persediaan pada modul komitmen yaitu kesalahan dalam penginputan/perekaman volume dan satuan harga barang berupa Tinta Epson;
 - Pada BAST persediaan atau modul komitmen untuk tinta/*toner printer* (Tinta Epson 664) sesuai dengan Nomor Dokumen 03207311691075000TP204000M, Nomor Bukti: 004/UP-TUP/691075 tanggal Dokumen 27-12-2024 dengan Total Harga Rp1.000.000,00 tertulis volume 94.350 dengan harga satuan Rp1,00 (satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.50
Rincian BAST Persediaan untuk Tinta/Toner

Terinput/terekam pada BAST Persediaan/Modul Komitmen				
No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	tinta epson 664 cyan	94350	1	94.350
2	tinta epson 664 magenta	94350	1	94.350
1	tinta epson 664 yellow	94350	1	94.350
1	tinta epson 664 black	94350	2	188.700
	Jumlah	377.400	5	471.750

- Terhadap hal tersebut satker telah berkonsultasi ke KPPN Gorontalo dan disarankan untuk melakukan koreksi pada Modul Persediaan yaitu koreksi nilai dan koreksi jumlah, yaitu sebagai berikut:

Tabel D.51
Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tinta/Toner

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tinta Epson 664 Cyan	1	94.350	94.350
2	Tinta Epson 664 Magenta	1	94.350	94.350
3	Tinta Epson 664 Yellow	1	94.350	94.350
4	Tinta Epson 664 Black	2	94.350	188.700
Jumlah		5	377.400	471.750

- Hasil dari koreksi tersebut memunculkan nilai pada pos Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan senilai (Rp8.901.828.150,00);
- Karena proses Koreksi pada Modul Persediaan sehingga terbentuk nilai Pendapatan Penyesuaian Persediaan sebesar (Rp35.607.312.600,00), sebagaimana tabel transaksi yang didownload dari MonSAKTI:

Gambar D.1
Tangkapan Layar Monsakti atas Transaksi Persediaan

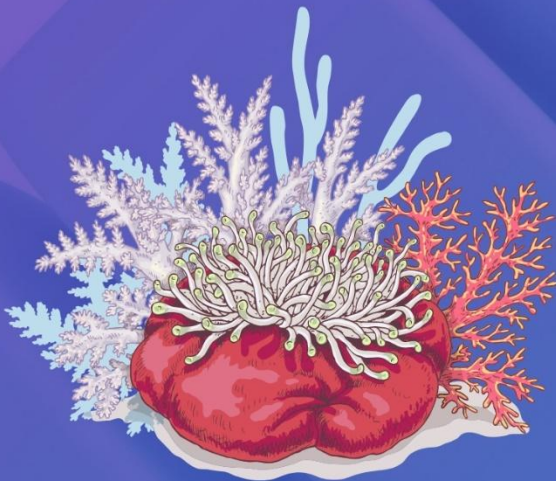
No	Transaksi Pencatatan	Nilai
1	66896853.Koreksi Kuantitas Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664	(1)
2	66902533.Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664	(8.901.828.150)
3	66902534.Koreksi Nilai Tambah atas Koreksi Kuantitas Tambah Tinta Epson 664	(94.349)
4	66917164.Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664	(8.901.828.150)
5	66920053.Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664	(8.901.733.800)
6	66921732.Koreksi Nilai Tambah atas Pembelian Tinta Epson 664	(8.901.828.150)
JUMLAH :		(35.607.312.600)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENJELASAN ATAS POS-POS LPE

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
TA 2024
AUDITED

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp25.529.221.392.262,00

Nilai ekuitas awal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp25.529.221.392.262,00 dan Rp25.420.240.996.441,00.

Rincian nilai ekuitas awal pada masing-masing eselon I per 1 Januari 2024 dan per 1 Januari 2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel E.1
Rincian Saldo Awal Ekuitas pada Masing-Masing Eselon I
per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023

Eselon I	01 Januari 2024	01 Januari 2023
Setjen	2.581.548.736.255	2.565.065.116.335
Itjen	5.762.264.041	5.693.248.380
Ditjen PT	5.802.866.832.042	5.986.784.264.050
Ditjen PB	5.406.458.171.217	5.356.986.583.499
Ditjen PSDKP	1.359.158.574.563	1.029.548.972.642
Ditjen PDSPKP	823.452.826.731	842.500.749.748
Ditjen PKRL	837.822.061.097	847.116.239.121
BPPSDMKP	7.899.796.695.676	7.964.170.647.372
BPPMHKP	745.154.664.299	770.753.081.452
Satker Konsolidasi	67.200.566.341	51.622.093.842
TOTAL	25.529.221.392.262	25.420.240.996.441

Kenaikan Ekuitas Awal disebabkan unsur yang menambah nilai ekuitas yaitu Defisit LO yang mengalami penurunan, sedangkan koreksi yang menambah nilai ekuitas dan transaksi antar entitas mengalami kenaikan.

Perbandingan nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.2
Perbandingan Nilai Ekuitas Awal
per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023

Uraian	01 Januari 2024	01 Januari 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	25.420.240.996.441	25.764.812.932.135	(344.571.935.694)	(1,34)
Surplus/ Defisit LO	(4.886.114.745.419)	(3.995.503.249.355)	(890.611.496.064)	22,29
Koreksi yang menambah Ekuitas	52.349.387.566	18.236.661.604	34.112.725.962	187,06
Transaksi Antar Entitas	4.942.745.753.674	3.632.694.652.057	1.310.051.101.617	36,06
TOTAL	25.529.221.392.262	25.420.240.996.441	108.980.395.821	0,43

E.2 Surplus Defisit LO

Defisit LO
Rp4.350.213.626.097,00

Surplus Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah defisit Rp4.350.213.626.097,00 dan Rp4.886.114.745.419,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Perbandingan Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.3
Perbandingan Surplus/Defisit LO
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023
Kegiatan Operasional		
Pendapatan Operasional	2.207.976.788.689	1.680.725.517.497
Beban Operasional	6.629.592.600.166	6.562.869.760.308
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(4.421.615.811.477)	(4.882.144.242.811)
Kegiatan Non Operasional		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(114.278.615.674)	(116.634.758.937)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Opr. Lainnya	185.680.801.054	112.664.256.329
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	71.402.185.380	(3.970.502.608)
Total	(4.350.213.626.097)	(4.886.114.745.419)

Penurunan Defisit LO per 31 Desember 2024 disebabkan karena meningkatnya pendapatan operasional yang cukup signifikan yakni Rp527.251.271.192,00 atau sebesar 31,37%.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp25.028.983.106,00

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp25.028.983.106,00) dan Rp52.349.387.566,00.

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp44.567.008.171,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp44.567.008.171,00 dan sebesar Rp5.160.560.702,00.

Rincian dan perbandingan saldo koreksi nilai persediaan pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.4
Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	0	139.760.000	(139.760.000)	(100,00)
Itjen	0	0	0	0,00
Ditjen PT	42.787.497.856	(186.117.300)	42.973.615.156	(23.089,53)
Ditjen PB	1.617.942.116	5.071.380.177	(3.453.438.061)	(68,10)
Ditjen PSDKP	2.009.000	(409.375)	2.418.375	(590,75)
Ditjen PDSPKP	(349.310.330)	0	(349.310.330)	0,00
Ditjen PKRL	0	0	0	0,00
BPPSDMKP	508.869.529	133.114.700	375.754.829	282,28
BPPMHKP	0	2.832.500	(2.832.500)	(100,00)
Total	44.567.008.171	5.160.560.702	39.406.447.469	763,61

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan senilai Rp39.406.447.469,00. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya koreksi nilai persediaan pada SKPT Moa sebesar Rp42.787.497.856,00 yang merupakan Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Ditjen Perikanan Tangkap Nomor. R.424/ITJ.2/HP.470/XI/2024 tanggal 5 November 2024 dan Nota Dinas Nomor. 276/ITJ.2/HP.470/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp360.018.554,00*

Koreksi nilai persediaan adalah koreksi yang diakibatkan perubahan jenis penggolongan dan kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodefikasi BMN yang lain.

Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp360.018.554,00 dan Rp11.717.276.630,00.

Rincian saldo koreksi atas reklasifikasi pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.5
Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Masing-Masing Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	29.520.487	0	29.520.487	0,00
Ditjen PT	0	1.743.608	(1.743.608)	(100,00)
Ditjen PB	154.864.732	177.286.850	(22.422.118)	(12,65)
Ditjen PSDKP	44.370.800	11.608.789.602	(11.564.418.802)	(99,62)
Ditjen PDSPKP	212.717.293	0	212.717.293	0,00
Ditjen PKRL	(7.865.132)	0	(7.865.132)	0,00
BPPSDMKP	(70.699.000)	(84.398.430)	13.699.430	(16,23)
BPPMHKP	(2.890.626)	13.855.000	(16.745.626)	(120,86)
Total	360.018.554	11.717.276.630	(11.357.258.076)	(96,93)

Koreksi atas Reklasifikasi yang signifikan terdapat pada Ditjen PSDKP Rp11.564.418.802,00 karena pengurangan transaksi reklasifikasi keluar dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.089.923.395,00.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Defisit
Rp64.588.272.232,00*

Koreksi ini berasal dari koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena penilaian kembali yang dapat berupa pembukuan persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. pembukuan transaksi dengan dokumen sumber sebelum tahun berjalan, koreksi nilai/kuantitas, koreksi pencatatan dan lain-lain.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai (Rp64.588.272.232,00) dan Rp28.047.097.088,00.

Rincian saldo koreksi aset non revaluasi pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.6
Rincian Saldo Koreksi Aset Non Revaluasi pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024			31 Des 2023		
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	Jumlah	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	Jumlah
Setjen	225.107.099	(7.899.778.299)	(7.674.671.200)	17.895.861.450	(12.175.993.116)	5.719.868.334
Itjen	0	0	0	0	0	0
Ditjen PT	(80.960.612.579)	0	(80.960.612.579)	217.886.529	837.685.125	1.055.571.654
Ditjen PB	614.458.132	0	614.458.132	15.242.795.285	(1.458.334)	15.241.336.951
Ditjen PSDKP	(4.988.448.272)	286.332.484	(4.702.115.788)	(55.069.596)	0	(55.069.596)
Ditjen PDSPKP	(118.430.208)	0	(118.430.208)	(5.808.180)	0	(5.808.180)
Ditjen PKRL	18.496.254.440	(949.500)	18.495.304.940	2.363.507.938	43.706.250	2.407.214.188
BPPSDMKP	9.696.360.781	(2.745.000)	9.693.615.781	3.527.693.057	154.537.723	3.682.230.780
BPPMHKP	64.178.690	0	64.178.690	1.752.957	0	1.752.957
Total	(56.971.131.917)	(7.617.140.315)	(64.588.272.232)	39.188.619.440	(11.141.522.352)	28.047.097.088

Koreksi Aset Non Revaluasi timbul karena adanya transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi terbesar koreksi non revaluasi ada pada Eselon I Ditjen Perikanan Tangkap, dan Ditjen PSDKP dengan penjelasan transaksi signifikan sebagai berikut:

- a. Setditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp80.960.612.579,00 yang terdiri dari;
 - Hibah Masuk sebesar Rp15.294.411,00;
 - Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp1.890.164.176,00;
 - Koreksi Pencatatan sebesar Rp7.016.296.120,00;
 - Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp91.042.248.646,00;
 - Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp6.331.816.209,00;
 - Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp2.938.376.730,00;
 - Saldo Awal sebesar Rp19.776.780.000,00; dan

- Koreksi Lainnya sebesar Rp1.110.455.481.

Koreksi pencatatan KDP paling besar ada pada SKPT Saumlaki karena adanya transfer dari Biro Umum dan PBJ sebesar Rp72.719.632.465,00 sesuai dengan nota dinas Nomor 1903/DJPT.4/PL.760/VIII/2024 Tanggal 10 Agustus 2024 Hal Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Ukurlaran SKPT Saumlaki dan pada Direktorat Kapal dan Alat Penangkap Ikan sebesar Rp1.155.625.676,00 dari pembelian kapal 1 paket berisi 2 unit kapal.

- b. Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.674.671.200,00

Koreksi Nilai Aset Aset Non Revaluasi yang terbesar terdapat pada satuan kerja Biro Umum dan PBJ senilai Rp8.186.695.000,00 berupa Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas ATB software sesuai dengan Memorandum Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor 5047/SJ.2/PL.760/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 serta Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP yang merupakan transaksi penambahan saldo awal *software* dengan nilai buku sebesar Rp174.694.852,00 (Rp199.651.260,00-Rp24.956.408,00) serta temuan aparat pengawas intern pemerintah berupa selisih fisik dan catatan persediaan sebesar Rp25.339.327,00.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Lain - Lain
(Rp5.367.737.599,00)

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain. koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi Lain-Lain yang bersaldo negatif menunjukkan bahwa saldo Koreksi Lain-Lain akan mengurangi Ekuitas Akhir. Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai (Rp5.367.737.599,00) dan Rp7.424.453.146,00.

Rincian saldo koreksi lain-lain pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel E.7
Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	809.013.186	7.635.469	801.377.717	10.495,46
Itjen	119.391	489.017	(369.626)	(75,59)
Ditjen PT	1.991.659.101	2.956.763.539	(965.104.438)	(32,64)
Ditjen PB	359.365.993	2.640.850.668	(2.281.484.675)	(86,39)
Ditjen PSDKP	(32.175.056)	(71.564.172)	39.389.116	(55,04)
Ditjen PDSPKP	283.594.733	6.472.475	277.122.258	4.281,55
Ditjen PKRL	(1.169.084.070)	16.679.201	(1.185.763.271)	(7.109,23)
BPPSDMKP	(200.977.733)	1.830.543.600	(2.031.521.333)	(110,98)
BPPMHKP	45.216.199	36.583.349	8.632.850	23,60
Satkon	(7.454.469.343)	0	(7.454.469.343)	0,00
Total	(5.367.737.599)	7.424.453.146	(12.792.190.745)	(172,30)

Atas Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp2.266.595.839,00 sebagaimana tersaji pada tabel di atas, yang mana koreksi ini akan menambah saldo Ekuitas.

Koreksi Lain-Lain yang signifikan terdapat pada Satker Konsolidasi dan Ditjen PKRL.

Tabel E.8
Rincian Saldo Koreksi Lain-Lain per Satuan Kerja pada Satkon dan Ditjen PKRL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Eselon I	Nama Satuan Kerja	Total
DJPKRL	BPSPL Makassar	6.250
	Setditjen Pengelolaan Ruang Laut	(1.169.090.320)
DJPKRL Total		(1.169.084.070)
Satkon	Satker Konsolidasi	(7.454.469.343)
Satkon Total		(7.454.469.343)
Grand Total		(8.623.553.413)

Transaksi terbesar koreksi non revaluasi ada pada Eselon I Satker Konsolidasi dikarenakan adanya Jurnal eliminasi nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca setelah eliminasi nilai Beban Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih dan/atau Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun berjalan TA 2024.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp4.066.181.563.780,00

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain Akun 313111
2. Diterima dari Entitas Lain Akun 313121
3. Transfer Keluar Akun 313211
4. Transfer Masuk Akun 313221
5. Pengesahan Hibah Langsung Akun 391131
6. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Akun 391132
7. Pengesahan Hibah Langsung TAYL Akun 391133
8. Setoran Surplus BLU Akun 391141

Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp4.066.181.563.780,00 dan Rp4.942.745.753.674,00.

Rincian saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel E.9
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Akun	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.949.830.679.868	6.179.932.863.844	(230.102.183.976)	(3,72)
Diterima dari Entitas Lain	(2.025.668.632.304)	(1.610.430.196.076)	(415.238.436.228)	25,78
Transfer Keluar	(848.951.570.805)	(568.670.504.194)	(280.281.066.611)	49,29
Transfer Masuk	818.837.653.821	567.835.523.984	251.002.129.837	44,20
Pengesahan Hibah Langsung	162.512.311.529	355.848.151.332	(193.335.839.803)	(54,33)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(6.972.940)	0	(6.972.940)	0,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	9.979.698.811	18.229.914.784	(8.250.215.973)	(45,26)
Setoran Surplus BLU	(351.604.200)	0	(351.604.200)	0,00
Total	4.066.181.563.780	4.942.745.753.674	(876.564.189.894)	(17,73)

Perbandingan Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel E.10
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas per Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan	%
			(Penurunan)	
Setjen	289.760.511.202	513.120.099.590	(223.359.588.388)	(43,53)
Itjen	84.445.355.544	74.973.352.664	9.472.002.880	12,63
Ditjen PT	118.337.456.182	150.187.192.723	(31.849.736.541)	(21,21)
Ditjen PB	938.899.392.145	1.081.522.594.857	(142.623.202.712)	(13,19)
Ditjen PSDKP	1.114.057.528.414	1.317.006.013.434	(202.948.485.020)	(15,41)
Ditjen PDSPKP	344.522.161.841	336.386.336.664	8.135.825.177	2,42
Ditjen PKRL	(355.608.334.769)	(306.855.776.556)	(48.752.558.213)	15,89
BPPSDMKP	1.428.701.560.240	1.349.979.953.130	78.721.607.110	5,83
BPPMHKP	103.065.932.981	426.425.987.168	(323.360.054.187)	(75,83)
Total	4.066.181.563.780	4.942.745.753.674	(876.564.189.894)	(17,73)

Saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.066.181.563.780,00 mengalami penurunan sebesar 17,73% dibanding dengan saldo Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 senilai Rp4.942.745.753.674,00.

Rincian dari Saldo Transaksi Antar Entitas dijelaskan sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain(DDEL)

Merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL yang secara keseluruhan merupakan realisasi belanja sebesar Rp2.025.668.632.304,00.

Tabel E.11
Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Eselon I	DDEL	
	31 Des 2024	31 Des 2023
Setjen	2.224.907.322	1.410.458.995
Itjen	23.878.250	420.555.837
Ditjen PT	1.053.010.386.957	736.108.210.282
Ditjen PB	24.643.253.666	29.626.772.546
Ditjen PSDKP	23.459.756.799	30.613.322.664

Eselon I	DDEL	
	31 Des 2024	31 Des 2023
Ditjen PDSPKP	9.354.525.348	15.226.344.631
Ditjen PKRL	843.308.374.261	707.036.792.705
BPPSDMKP	22.315.600.001	18.186.782.117
BPPMHKP	47.327.949.700	71.800.956.299
TOTAL	2.025.668.632.304	1.610.430.196.076

Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Eselon I yang memiliki nilai paling signifikan sebesar Rp1.053.010.386.957,00 karena perolehan PNBP yang tinggi.

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara BUN. Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp5.949.830.679.868,00. Pada umumnya DKEL diperoleh dari pendapatan pengembalian belanja, denda penyelesaian pekerjaan, perizinan, dan lelang aset yang menggunakan dana APBN (Rupiah Murni).

Nilai bersih dari kedua akun tersebut adalah sebesar Rp3.924.162.047.564,00. Rincian DDEL dan DKEL yang bersaldo negatif akan menambah saldo Ekuitas Akhir dan sebaliknya akan mengurangi Ekuitas Akhir jika bersaldo positif.

Tabel E.12
Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023
Setjen	556.350.498.605	510.109.251.551
Itjen	84.427.641.894	75.393.908.501
Ditjen PT	834.829.659.593	820.377.622.108
Ditjen PB	959.241.092.143	1.085.122.366.948
Ditjen PSDKP	995.498.070.995	1.119.216.743.475
Ditjen PDSPKP	324.896.904.773	339.604.537.406
Ditjen PKRL	470.651.334.172	399.126.971.951
BPPSDMKP	1.399.061.514.605	1.333.354.518.437
BPPMHKP	324.873.963.088	497.626.943.467
TOTAL	5.949.830.679.868	6.179.932.863.844

Berdasarkan tabel di atas, BPPSDMKP merupakan eselon I dengan realisasi belanja terbesar dibanding yang lain senilai Rp1.399.061.514.605,00.

Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer keluar/transfer masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk yang bersaldo positif akan menambah saldo Ekuitas Akhir sedangkan Transfer Keluar yang bersaldo negatif akan mengurangi Ekuitas Akhir.

Rincian saldo transfer keluar/transfer masuk pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel E.13
Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk Pada Masing-Masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024

Nama Eselon I	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
Setjen	279.130.133.671	26.551.900	279.103.581.771
Itjen	0	41.591.900	(41.591.900)
Ditjen PT	41.880.554.159	294.887.709.947	(253.007.155.788)
Ditjen PB	114.587.635.177	118.391.745.799	(3.804.110.622)
Ditjen PSDKP	1.777.091.002	140.278.304.852	(138.501.213.850)
Ditjen PDSPKP	226.778.499.585	245.044.540.152	(18.266.040.567)
Ditjen PKRL	492.028.247	353.037.261	138.990.986
BPPSDMKP	7.047.219.710	17.035.843.163	(9.988.623.453)
BPPMHKP	177.258.409.254	2.778.328.847	174.480.080.407
TOTAL	848.951.570.805	818.837.653.821	30.113.916.984

Selisih TK-TM antar masing-masing Eselon I senilai Rp30.113.916.984,00. Selisih TK-TM terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal senilai Rp279.103.581.771,00.

Selisih transfer keluar dan transfer masuk pada Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disebabkan karena adanya Transfer Keluar dan Masuk aset dari Kementerian/Lembaga lain.

Adapun rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari Kementerian Lain disajikan sebagai berikut:

Tabel E.14
Rincian Saldo Transfer Keluar Transfer Masuk dari Kementerian Lainnya
pada Masing-Masing Eselon I per 31 Desember 2024

Kementerian/Lembaga		Transfer Keluar	Transfer Masuk	Total
Nama Kementerian/ Lembaga	Nama Eselon I			
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA	BPPSDMKP	-	27.761.000	-27.761.000
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol	BPPSDMKP	-	26.361.268.558	-26.361.268.558
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA	BPPSDMKP	-	232.849.040	-232.849.040
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI	BPPMHKP	14.470.398.145	-	14.470.398.145
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DKI JAKARTA	BPPMHKP	9.741.533.751	-	9.741.533.751
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR	BPPMHKP	3.406.457.190	-	3.406.457.190
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA	BPPMHKP	1.854.683.046	-	1.854.683.046
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI SELATAN	BPPMHKP	14.139.371.407	-	14.139.371.407
BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA UTARA	BPPMHKP	9.335.881.139	-	9.335.881.139
BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN	BPPMHKP	23.422.436.991	-	23.422.436.991
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANTEN	BPPMHKP	34.046.650.408	-	34.046.650.408
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BENGKULU	BPPMHKP	400.169.000	-	400.169.000
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BPPMHKP	1.679.076.802	-	1.679.076.802
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN GORONTALO	BPPMHKP	4.506.823.251	-	4.506.823.251
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAMBI	BPPMHKP	6.386.411.834	-	6.386.411.834
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA BARAT	BPPMHKP	15.734.541.124	-	15.734.541.124
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TENGAH	BPPMHKP	10.222.639.327	-	10.222.639.327
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN JAWA TIMUR	BPPMHKP	14.833.544.224	-	14.833.544.224
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN BARAT	BPPMHKP	8.138.379.558	-	8.138.379.558
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN SELATAN	BPPMHKP	7.338.335.228	-	7.338.335.228
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN TENGAH	BPPMHKP	4.494.426.744	-	4.494.426.744
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KALIMANTAN UTARA	BPPMHKP	8.908.701.125	-	8.908.701.125

Kementerian/Lembaga		Transfer Keluar	Transfer Masuk	Total
Nama Kementerian/ Lembaga	Nama Eselon I			
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BPPMHKP	7.297.358.464	-	7.297.358.464
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN KEPULAUAN RIAU	BPPMHKP	14.718.121.233	-	14.718.121.233
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN LAMPUNG	BPPMHKP	2.871.091.665	-	2.871.091.665
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU	BPPMHKP	3.100.280.175	-	3.100.280.175
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN MALUKU UTARA	BPPMHKP	5.466.735.231	-	5.466.735.231
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NANGROE ACEH DARUSSALAM	BPPMHKP	5.725.498.025	-	5.725.498.025
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT	BPPMHKP	10.233.688.033	-	10.233.688.033
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA TIMUR	BPPMHKP	7.608.793.704	-	7.608.793.704
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT	BPPMHKP	1.130.503.000	-	1.130.503.000
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA BARAT DAYA	BPPMHKP	1.534.879.125	-	1.534.879.125
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA SELATAN	BPPMHKP	4.810.404.019	-	4.810.404.019
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PAPUA TENGAH	BPPMHKP	7.576.252.273	-	7.576.252.273
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN RIAU	BPPMHKP	8.178.248.662	-	8.178.248.662
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI BARAT	BPPMHKP	2.194.691.500	-	2.194.691.500
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH	BPPMHKP	7.366.179.032	-	7.366.179.032
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGGARA	BPPMHKP	9.192.105.904	-	9.192.105.904
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI UTARA	BPPMHKP	7.214.343.018	-	7.214.343.018
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT	BPPMHKP	3.245.480.675	-	3.245.480.675
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN	BPPMHKP	475.588.795	-	475.588.795
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI	BPPSDMKP	2.005.534.275	-	2.005.534.275
Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	4.088.627.991	-	4.088.627.991
Sekretariat Jenderal	DJPKRL	232.856.000	-	232.856.000
Sekretariat Jenderal	BPPSDMKP	351.468.000	-	351.468.000
SEKRETARIAT UTAMA	BPPMHKP	5.212.955.680	-	5.212.955.680
ZIDAM IV/DIP	BPPMHKP	125.411.000	-	125.411.000
TOTAL		315.017.555.773	26.621.878.598	288.395.677.175

Transfer Keluar kepada kementerian lainnya paling banyak ada pada BPPMHKP sebesar Rp279.130.133.671,00, merupakan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin.

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung merupakan hibah-hibah yang disahkan di tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu.

Rincian saldo pengesahan hibah langsung pada masing-masing Unit Eselon I per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel E.15
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung pada Masing-Masing Unit Eselon I
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Nama Eselon I	31 Des 2024			31 Des 2023		
	Pengesahan Hibah Langsung	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	Pengesahan Hibah Langsung	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
Setjen	14.738.501.690	0	0	3.029.512.566	0	0
Itjen	0	0	0	0	0	0
Ditjen PT	82.936.538.758	0	574.489.000	65.907.666.397	0	0
Ditjen PB	849.047.246	0	0	26.777.883.455	0	0
Ditjen PSDKP	3.438.015.368	0	79.985.000	229.237.572.833	0	0
Ditjen PDSPKP	10.713.741.849	0	0	11.971.647.952	0	0
Ditjen PKRL	17.157.971.043	(6.972.940)	36.698.203	0	0	0
BPPSDMKP	32.678.495.575	0	9.288.526.608	18.323.868.129	0	18.229.914.784
BBPMHKP	0	0	0	600.000.000	0	0
Total	162.512.311.529	(6.972.940)	9.979.698.811	355.848.151.332	0	18.229.914.784

Pengesahan Hibah Langsung yang ada pada periode Desember 2024 merupakan hibah yang terdiri dari:

1. Pengesahan hibah langsung pada Biro Umum dan PBJ senilai Rp14.738.501.690 berupa hibah dari JICA dalam rangka *Program for Development of The Integrated Marine and Fisheries Center and Market in Outer Island* sejak tahun 2018 dan *The Project of Enhancement of Satellite Utilization for Monitoring Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Activity* sejak tahun 2021;

2. Pengesahan Pencatatan Hibah Jasa Luar Negeri dari *United State Agency for International Development* (USAID) untuk kegiatan *USAID Bilateral Development Cooperation Framework* (BDCF) 497-AA-040 (*The Implementation of USAID Marine and Fisheries Portofolio*) pada Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp41.324.432.842;
3. Setditjen PKRL dengan nomor dokumen 130/USAID-INA/BAST-Service/ENV;
4. Hibah jasa dari AFD dengan nomor register 2KJXM82A senilai Rp3.727.651.536,00 pada Dit. KP;
5. Hibah uang dari WWF (GEF 6) senilai Rp25.654.255.330,00 pada Ditjen Perikanan Tangkap;
6. Hibah tanah dari Pemkab Belitung senilai Rp116.565.000,00 pada PPN Kejawanan;
7. Hibah uang dari WWF (GEF 5) senilai Rp10.313.634.050,00 pada Ditjen Perikanan Tangkap;
8. Hibah dari Panitia Pembangunan Masjid Mina Maritim sebesar Rp1.800.000.000,00;
9. Kegiatan *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practice (IFish)* sesuai Dokumen Perjanjian Hibah Nomor: GCP/INS/303/GFF Tanggal 20 Juni 2021 dan 13 September 2021 senilai Rp18.551.008.274;
10. Pengesahan Hibah dalam Bentuk Jasa Tahun 2021 untuk Kegiatan *Mainstreaming Biodiversity Conservation and Sustainable Use Into Inland Fisheries Practices (IFish)* sesuai Dokumen Perjanjian Hibah Nomor: GCP/INS/303/GFF Tanggal 20 Juni 2023 senilai Rp14.127.487.301;
11. Sekretariat Ditjen PSDKP senilai Rp940.581.917,00 merupakan hibah jasa luar negeri dari FAO (*Food and Agriculture Organization of The United Nations*) atas pelaksanaan kegiatan *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesian Seas* sesuai no register hibah nomor 2RQRTF2A tanggal

- 17 Januari 2019, untuk kegiatan yang dilaksanakan pada periode Desember 2022 sampai September 2023 sesuai BAST Nomor 0206/GCP/RAS/289/Progs.24 tanggal 1 April 2024;
12. Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan hibah tanah di Satwas SDKP Aceh Barat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 25/BAST-HIBAH/III/2023 tanggal 07 September 2023;
13. Pangkalan PSDKP Tual dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berupa tanah seluas 1.500 m² senilai Rp54.000.000,00 sesuai dengan BAST Hibah Nomor 000.2.4/270/SETDA dan Nomor 867/SJ/PL.450/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 serta NPHD Nomor 000.2.32/269/SETDA dan Nomor 866/SJ/PL.750/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024. Tanah tersebut telah bersertifikat hak pakai dengan NIB 33.06.000000210.0 tanggal 18 November 2024 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Pengesahan Pencatatan Hibah Jasa Luar Negeri dari *United State Agency for International Development* (USAID) untuk kegiatan *USAID Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF) 497-AA-040 (The Implementation of USAID Marine and Fisheries Portofolio)*;
15. Pengesahan hibah atas kegiatan *Project Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesia Seas (ISLME)* sebesar Rp849.047.246,00;
16. Pengesahan hibah langsung berbentuk Jasa Nomor Register 23D58AMA dari *United States Agency for International Development* (USAID) sebesar Rp15.800.713.582,00 pada Ditjen PKRL;
17. Pengesahan hibah langsung dari *Food and Agriculture Organization of United Nations* (FAO) pada Ditjen PKRL.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo awal Ekuitas. Surplus/Defisit LO. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar. Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas dan Transaksi Antar Entitas.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp25.220.160.346.839,00 dan Rp25.529.221.392.262,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel E.16
Perbandingan Saldo Ekuitas Akhir
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan	%
			Penurunan	
Ekuitas Awal	25.529.221.392.262	25.420.240.996.441	108.980.395.821	0,43
Surplus/Defisit LO	(4.350.213.626.097)	(4.886.114.745.419)	535.901.119.322	(10,97)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	(25.028.983.106)	52.349.387.566	(77.378.370.672)	(147,81)
Transaksi Antar Entitas	4.066.181.563.780	4.942.745.753.674	(876.564.189.894)	(17,73)
Ekuitas Akhir	25.220.160.346.839	25.529.221.392.262	(309.061.045.423)	(1,21)

Dibandingkan tahun sebelumnya, Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp309.061.045.423,00 yang disebabkan unsur-unsur pembentuk LPE mengalami penurunan.

Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel E.17
Rincian Saldo Ekuitas Akhir pada Masing-Masing Unit Eselon I
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Unit Eselon I	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan
			Penurunan
Setjen	2.320.994.186.025	2.581.548.736.255	(260.554.550.230)
Itjen	6.172.329.601	5.762.264.041	410.065.560
Ditjen PT	5.883.172.592.765	5.802.866.832.042	80.305.760.723
Ditjen PB	5.462.922.038.268	5.406.458.171.217	56.463.867.051
Ditjen PSDKP	1.384.998.306.029	1.359.158.574.563	25.839.731.466
Ditjen PDSPKP	818.344.135.993	823.452.826.731	(5.108.690.738)
Ditjen PKRL	856.829.743.540	837.822.061.097	19.007.682.443
BPPSDMKP	7.872.838.249.001	7.899.796.695.676	(26.958.446.675)
BKIPM	545.884.690.125	745.154.664.299	(199.269.974.174)
Satker Konsolidasi	68.004.075.492	67.200.566.341	803.509.151
TOTAL	25.220.160.346.839	25.529.221.392.262	(309.061.045.423)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Pengungkapan Lainnya



TIDAK DIPUBLIKASI KARENA
MERUPAKAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE TAHUNAN TA 2024

